Choirul Fuad Yusuf, dkk.

DINAMIKA ISLAM

Filipina, Burma dan Thailand

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

FILIPINA, BURMA DAN THAILAND

Choirul Fuad Yusuf, dkk.

Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG LEKTUR DAN KHAZANAH KEAGAMAAN

Puji syukur kehadirat Allah swt., Tuhan semesta alam yang selalu memberikan limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga buku ini dapat tersaji di hadapan para pembaca.

Kami menyambut baik terbitnya buku *"Dinamika Perkembangan Islam di Filipina, Burma dan Thailand"* ini, yang kehadirannya diharapkan dapat memberi sumbangan akademis bagi masyarakat. Buku ini merupakan kompilasi hasil penelitian Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2012.

Kementerian Agama melalui Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan memiliki kepentingan untuk memelihara khazanah keislaman sekaligus ikut mendorong perdamaian dunia melalui pengembangan kelekturan dan kekhazanahan. Terkait dengan misi tersebut, salah satu usaha yang dilakukan adalah menerbitkan buku-buku sejarah keislaman yang memuat misi perdamaian atau pengembangan budaya damai, dan penguatan kesadaran multikultural.

Buku yang berada di tangan pembaca sekalian adalah usaha untuk mengungkap sejarah masuk dan perkembangan Islam di Filipina, Burma dan Thailand. Sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di Nusantara atau di kawasan yang sekarang menjadi Asia Tenggara merupakan salah satu tema yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Persoalan sejarah awal masuknya Islam di kawasan ini pun hingga saat ini dapat dikatakan belum menemukan kesepakatan terutama mengenai kapan masuknya, siapa pembawanya, wilayah mana yang pertama kali diislamkan, dan bagaimana proses pengislamannya. Sedangkan terkait dengan perkembangannya, banyak tema yang masih menyisakan berbagai pertanyaan. Misalanya, dari aspek politik, kapan komunitas Islam di wilayah ini mencapai kekuasaan politik dan menjadi sebuah "negara", wilayah mana saja yang mencapai kekuasaan politik tersebut dan dalam bentuk apa kekuasaan tersebut; bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan bagaimana pula hubungannya di antara berbagai wilayah yang memiliki kekuasaan politik tersebut dan aspek lainnya. Semua akan terjawab dalam buku ini.

Dengan segala hormat, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah menyiapkan buku ini dengan serius, kepada editor buku ini, dan kepada seluruh panitia yang telah membantu menyiapkan naskah sehingga menjadi sebuah buku yang layak dibaca. Tak lupa, kami menyampaikan permohonan maaf yang

besar-besarnya jika dalam penerbitan ini masih banyak kekurangan disana sini. Kami mengharapkan masukan dan kritikan untuk penyempurnaan penerbitan ini di masa yang akan datang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. []

Jakarta, Desember 2013

Choirul Fuad Yusuf

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di Nusantara atau di kawasan yang sekarang menjadi Asia Tenggara merupakan salah satu tema kajian yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Persoalan sejarah awal masuknya Islam di kawasan ini pun hingga sekarang dapat dikatakan belum menemukan kesepakatan terutama mengenai kapan masuknya, siapa pembawanya, wilayah mana yang pertama kali diisalamkan, dan bagaimana proses pengislamannya. Sedangkan terkait dengan perkembangannya, banyak tema yang masih menyisakan berbagai pertanyaan. Misalanya, dari aspek politik, kapan komunitas Islam di wilayah ini mencapai kekuasaan politik dan menjadi sebuah "negara", wilayah mana saja yang mencapai kekuasaan politik tersebut dan dalam bentuk apa kekuasaan tersebut; bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan bagaimana pula hubungannya di antara berbagai wilayah yang memiliki kekuasaan politik tersebut. Sebut saja misalnya kesultanan-kesultanan Islam yang pernah ada, mulai dari Samudera Pasai di Aceh, Malaka di Semenanjung Malaya, Tumasik di Singapura, Demak, Cirebon, Banten, Aceh Darussalam, Palembang, Riau, Goa-Tallo, Ternate-Tidore, Banjar, Sumbawa, Bima, dan lain-lain di Indonesia. Demikian juga di kawasan Asia Tenggara yang dulunya menggunakan

bahaya Melayu sebagai *lingua franka*, seperti Pattani di Thailand, Mindanao dan Sulu di Filipina, serta seluruh wilayah yang sekarang menjadi Malaysia dan Brunei Darussalam.

Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique (Eds.) (1989: x) menjelaskan secara lebih tegas mengenai daya tarik Islam Asia Tengga untuk terus diteliti. Dikatakan bahwa "Asia Tenggara tidak hanya sekedar tempat bagi agama besar dunia –Islam, Budha, Kristen dan Hindu—tetapi juga penyebarannya sedemikian rupa sehingga ikatan-ikatan yang mempersatukan pengikutnya dapat mengaburkan dan sekaligus menegaskan batas-batas perbedaan politis dan teritorial. Dalam masalah ini kasus Islam adalah yang paling menarik, mengingat para pengikutnya terdapat di hampir semua negara Asia Tenggara dalam jumlah yang besar, dan di antara beberapa negara menembus batas-batas politik yang menghalanginya. ..." (Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique [Eds.], 1989: x).

Kajian Islam di Asia Tenggara mendapat perhatian secara lebih khusus dari para sarjana dan sejarawan Asia Tenggara sendiri pada tahun 1980-an. Beberapa hasil diterbitkan dalam buku bunga rampai yang diberi judul *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique [Eds.], 1989). Akan tetapi upaya tersebut hingga kini masih memerlukan perhatian yang lebih besar karena sejak kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut masih meninggalkan persoalan terutama terkait dengan sejarah awal perkembangannya di kawasan ini. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi, antara lain:

1. Orang perlu menghabiskan waktu untuk menguasai ilmu lain, semacam bahasa Belanda.
2. Ia harus siap “berbungkus lumus” mengumpulkan bahan-bahan atau arsip yang terpencar di mana-mana.
3. Ia juga harus siap untuk menambah tebal kaca matanya, karena matanya “rusak” membaca arsip dan naskah tulisan tangan yang tidak mudah dibaca dan dipahami.
4. Alasan yang tak kurang pentingnya bahwa ia harus bisa berbeda dengan apa yang pernah ditulis orang lain (khususnya sarjana asing) jika ia berharap studinya punya arti penting. Azra (2000: 3).

Sesungguhnya jika kita menengok jauh ke masa silam, sejarah awal Islam dan perkembangannya di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari hubungan kawasan ini dengan dunia luar, seperti Arab, Persia, India, Cina, dan lain-lain, termasuk Mesir. Bukti-bukti mengenai adanya hubungan Asia Tenggara dengan kawasan lain dapat terungkap dari berbagai kajian tentang hubungan dan jalur dangan internasional masa lalu, terutama sebelum Islam datang di Asia Tenggara. Beragam bangsa dan kawasan yang berhubungan dengan Asia Tenggara inilah yang kemudian melahirkan berbagai perspektif dalam hal teoritisasi mengenai kedatangan Islam di kawasan ini sehingga masih diperdebatkan sampai saat ini. Oleh karena itu, tidak heran jika terjadi perbedaan pendapat, apakah Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Arab, India, Gurajat, Persia, atau Cina. Semuanya bisa jadi benar jika diyakini perkembangan Islam di berbagai kawasan di Asia

Tenggara terjadi secara simultan. Ketika Islam masuk ke Aceh, misalnya, bisa jadi pada saat yang sama, Islam juga datang di tanah Jawa. Ketika para pedagang Arab berniaga dengan penguasa Sriwijaya di Sumatera, bisa jadi ada ekspedisi lain yang berlabuh di Celebes (Sulawesi), dan seterusnya. Apalagi jika dilihat bahwa hubungan Asia Tenggara dan Timur Tengah sudah terjadi sejak sebelum Islam lahir di Jazirah Arab.

Sementara itu, banyak hasil kajian Islam dari kalangan sarjana Barat yang cenderung menafikan peran Islam di kawasan ini. Pengkerdilan peran Islam di Asia Tenggara hampir dilakukan secara sistematis dengan membangun argumen yang terkesan "ilmiah" dan "akademis", seperti dialkukan antara lain oleh London (1949), Van Leur (1955), Winstedt (1951), Geertz, atau Snouck Hurgronje. Berbagai kritik telah disampaikan bukan saja dari sarjana kawasan Nusantara tetapi juga dari kalangan sarjana Barat sendiri. Sebut misalnya Edward Said, A.H. John dan Marshall G. Hudgson. Seperti dikatakan Azra (2000: 4), Edward Said mengkritik secara tajam pandangan para sarjana Barat terhadap Dunia Timur (*Oriental*) secara umum, juga terhadap Islam dan Dunia Muslim secara khusus.

Kalangan orientalis dan sebagian sarjana asing memiliki persepsi yang kurang tepat—untuk tidak mengatakan cacat—terhadap Islam di Asia Tenggara. Kajian terhadap Islam di Asia Tenggara masih merupakan lahan yang tak terlalu banyak disentuh kaum orientalis dibandingkan dengan studi-studi tentang Islam dan masyarakat-masyarakat Muslim di

Timur Tengah yang begitu banyak. Akan tetapi para orientalis tampaknya elah berhasil menciptakan dan membentuk potret Islam di Asia Tenggara yang sesungguhnya tidak selalu akurat. Kehadiran kolonialisme, khususnya Inggris dan Belanda di kawasan ini ikut bertanggung jawab atas terciptanya pandangan yang keliru tersebut. Sejak pertama kali mereka mencoba secara sistematis menggambarkan Islam dan mengungkapkan Islam di kawasan ini, mereka, orientalis dan kolonialis, telah menciptakan berbagai distorsi terhadap Islam. Sayangnya, mispersepsi dan distorsi yang mereka ciptakan malah dijadikan kerangka kerja (*framework*) bagi kesarjanaan dan keilmuan tentang Islam di Asia Tenggara pada masa-masa berikutnya. (Azra, 2000: 4).

Dalam "Pengantar" buku *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara,* Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique (1989: 1), telah menegaskan pula mengenai penanfsiran kolonial yang cenderung menyimpangkan tradisi Islam di Asia Tenggara. Islam yang telah ada di kawasan ini sekitar tujuh abad telah membentuk suatu tradisi tersendiri yang telah tertanam secara kukuh dalam konteks sosio-ekonomi dan politik. Pemahaman terhadap tradisi ini memang merupakan hal yang rumit karena bukan hanya tradisi local yang harus dipahami tetapi juga tradisi Islam itu sendiri sebelum dan sesudah berkembang di kawasan ini. Akan tetapi, persoalannya menjadi lebih rumit banyak hal yang harus dikoreksi terkait dengan "penafsiran kolonial, yang banyak di antaranya cenderung menyimpangkan tradisi Islam di kawasan ini, disesuaikan dengan aspirasi kolonial dan

kepentingan administratif." (Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique, "Pengantar", 1989: 1)

Pandangan yang kurang berimbang tersebut juga terjadi dalam hal penggunaan sumber-sumber lokal tentang Islam di Asia Tenggara. Azra menyebutkan sebagai berikut, "Untuk konteks Asia Tenggara, bahan-bahan—khususnya tentang sejarah awal Islam—bukan tidak ada sama sekali. Terdapat bahan-bahan tertulis selain bukti arkeologi dan epigrafi, baik lokal maupun asing. Bahan-bahan lokal, semacam hikayat, babad, sejarah, tambo, atau historiografi klasik lain memberi informasi tentang konvenrsi penduduk lokal kepada Islam dan perkembangan awal agama ini di tempat tertentu di Nusantara. Tetapi banyak sarjana Barat, seperti dikritik Johns (1979: 43), memandang historiografi lokal ini secara negatif, karena genre literatur tersebut tidak sesuai dengan kategori-kategori Barat tentang sejarah dan historiografi. Bahkan sarjana Barat, seperti de Graaf, bersikeras bahwa historiografi awal Islam di Nusantara tidak terlalu bisa dipercaya. "Terdapat keseragaman bunyi di antara mereka, yang tidak menunjukkan kebenaran." (de Graaf, 1970: 123).

Penilaian de Graaf agaknya berlebihan. Karena terlepas dari karakteristiknya yang khas yang berbeda dengan historiografi Barat, sarjana yang serius, jujur, dan objektif tidak bias mengabaikan historiografi klasik Islam di Nusantara. Karena, bagaimanapun, mereka memberikan sejumlah informasi tentang watak dan perkembangan Islam; bahkan memberikan semacam pola umum bagaimana Islam diperkenalkan dan berkembang di kawasan Asia Tenggara.

Lebih dari itu, historiografi klasik ini memberikan dan mengimbangi informasi dan gambaran tentang Islam dan masyarakat Muslim Nusantara seperti diberikan sumber-sumber asing: Barat, Cina, dan Arab". (Azra, 2000: 9-10)

Pada umumnya, kajian Islam yang dilakukan sarjana asing cenderung bias dan tidak lepas dari maksud-maksud tertentu di luar masalah akademis. Kecenderungan ini telah berlangsung lama sehingga "jelas terdapat keengganan di kalangan orientalis untuk mengakui eksistensi Islam, sebagaimana adanya di Asia Tenggara." Bahkan, untuk kajian Islam di Timur Tengah pun yang memiliki bahan yang melimpah ruah, tokoh-tokoh sarjana seperti Goldziher, Schacht, Juynboll, dan Crone, menolak reliabilitas sunah historis dan tradisi sahabat. Sikap seperti ini menunjukkan adanya maksud-masud yang bersifat ideologi dan bertujuan "mengobrak-abrik" basis historis dan sekaligus doktrinal Islam awal (Azra, 2000: 9).

Kecenderungan meminggirkan peranan Islam di kawasan Asia Tenggara setali tiga uang dengan kencenderungan penafsiran kolonial dalam menyimpangkan tradisi Islam. Fenomena ini terjadi karena beberapa alasan, selain untuk kepentingan kolonialisme di kawasan ini, antara lain, *pertama*, karena jauhnya wilayah ini dari pusat perkembangan Islam di Timur Tengah. *Kedua*, sumber-sumber lokal, baik yang berupa peninggalan tertulis maupun lisan, *material culture* maupun *immaterial cultures*, cenderung diabaikan dan kurang dipercaya sebagai sumber sejarah. *Ketiga*, akibat dari alasan kedua, sebagaimana disebutkan di

atas, berbagai kajian tentang Islam di Asia Tenggara seperti dilakukan Geertz dan Snouck Hurgronje hanya permukaannya saja dan memaknai Islam yang berkembang di kawasan ini hanya dari satu perspektif. *Keempat*, dari kalangan Muslim sendiri, terkesan kurang menyentuh persoalan Islam di kawasan Asia Tenggara sehingga watak dan karakter Islam kawasan ini kurang dipahami secara utuh dan belum masuk dalam kerangka global Dunia Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu simpul persoalan terkait dengan sejarah awal dan perkembangan Islam di Asia Tenggara adalah dalam hal penggunaan sumber lokal. Sumber lokal tersebut terutama yang berbentuk historiografi tradisional seperti babad, hikayat, tambo, sajarah, silsilah/salasilah, dan kaba, serta peninggalan arkeologis dan tradisi setempat. Selain kepentingan kolonial, sulitnya mengakses sumber-sumber lokal tersebut juga merupakan penyebab lain dari kurang tergalinya informasi tetang Islam di kawasan ini. Kesulitan tersebut karena, selain usianya yang sudah tua, juga karena tersebar di hampir seluruh kawasan ini. Oleh karena itu, penelusuran kembali sumber-sumber lokal di berbagai wilayah di kawasan ini menjadi penting dilakukan. Dengan penelusuran ini diharapkan akan diperoleh data dan fakta mengenai sejarah awal dan perkembangan Islam di kawasan ini. Data dan fakta tersebut kemudian diidentifikasi, dideskripsikan, diverifikasi, dan dihadirkan sebagai bukti sejarah yang dapat dipercaya.

Masalah Penelitian

Penelusuran kembali sumber lokal tentang sejarah Islam di Asia Tenggara baik yang berupa historiografi tradisional, peninggalan arkeologis, maupun tradisi dan adat istiadat setempat merupakan wilayah kajian yang sangat luas. Sehubungan dengan itu, diperlukan batasan dan rumusan masalah agar penelitian ini tidak melebar kepada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan sejarah awal dan perkembangan Islam di kawasan ini dan perkembangannya pada masa ini. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada masalah awal masuknya Islam di Asia Tenggara dan masa pertumbuhan kesultana/kerajaan yang bercorak keislaman serta perkembangannya dewasa ini di kawasan ini. Maka, sesuai dengan batasan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa saja historiografi tradisional, khususnya yang berupa manuskrip, yang memberikan informasi tentang sejarah awal Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Filipina, Burma dan Thailand?
2. Bagaimana sejarah awal masuknya Islam di kawasan ini, khususnya di Filipina, Burma dan Thailand?
3. Kesultanan atau kerajaan bercorak keislaman apa saja yang pernah ada di kawasan ini, kapan berdirinya dan siapa saja sultan atau rajanya, serta dimana posisinya sekarang?
4. Bagaimana perkembangan Islam dewasa ini di masing-masing lokasi, yakni Filipina, Burma dan Thailand?

Tujuan Penelitian

1. Menginventarisasi dan mendeskripsikan historiografi tradisional atau manuskrip-masnuskrip yang mengandung informasi tentang sejarah awal masuknya Islam di kawasan Nusantara, khususnya di Filipina, Burma dan Thailand.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sejarah awal masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Filipina, Burma dan Thailand.
3. Menggambarkan dan menganalisis kesultanan atau kerajaan bercorak keislaman di kawasan ini, mengenai waktu berdirinya dan sultan-sultan atau raja-rajanya, serta posisinya pada masa kini.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan Islam dewasa ini di masing-masing lokasi, yakni Filipina, Burma dan Thailand.

Manfaat Penelitian

Penulisan sejarah Islam di Nusantara memiliki kecenderungan Eropa centris di satu sisi, dan di sisi lain sangat nasionalis. Persepektif pertama belum dapat memosisikan Islam sebagai bagian penting dari sejarah kawasan ini. Peran Islam cenderung dipinggirkan dan sumber lokal yang berupa historiografi tradisonal seperti babad, hikayat, tambo, sajarah, dan kaba kurang dipercaya sebagai sumber dalam penulisan sejarah Islam. Sementara perspektif nasionalis—meskipun sampai batas tententu menguntungkan

bagi kepentingan dalam negeri untuk melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme—belum sepenuhnya menggunakan sumber lokal sebagai acuan dalam penulisan sejarah Islam dalam konteks sejarah perkembangan negara bersangkutan. Dua kecenderungan ini sama-sama belum memaksimalkan sumber lokal tersebut, yang dikenal sebagai historiografi tradisional, dalam menggambarkan sejarah awal dan perkembangan Islam kawasan ini.

Selain historiografi tradisional, sumber lainnya yang berupa peninggalan arkeologis juga masih dilihat secara terpisah-pisah mengikuti batas-batas geografi negara-negara yang sekarang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara. Sesungguhnya negara-negara tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain di masa lalu, apalagi jika dilihat dari bahasa yang digunakannya, yaitu bahasa Melayu. Maka sebagian wilayah Thailand dan Filipina serta seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam disebut sebagai *Jawah* atau al-Jawi, yakni sebuah kawasan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pergaulan.

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari dua kecenderungan tersebut di atas. Penelusuran kembali sumber-sumber lokal, baik berupa historiografi tradisional maupun tinggalan arkeologis akan melengkapi kekurangan dari keduanya. Dengan menginventarisasi dan mendeskripsikan historiografi tradisional atau manuskrip-masnuskrip yang berisi tentang sejarah awal Islam di kawasan ini, sejarah Islam di kawasan ini dapat direkonstruksi secara lebih berimbang,

yakni dengan menggunakan perspektif dan sumber asing yang sering banyak digunakan dan juga perspektif dan sumber lokal yang masih kurang mendapatkan perhatian. Gabungan dua perspektif ini dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga tentang teori-teori kedatangan Islam dan perkembangannya di kawasan ini. Dinamika internal kawasan dapat dibaca melalui manuskrip-manuskrip tersebut.

Selain melalui historiografi tradisonal, peninggalan-peninggalan masa lalu Islam di kawasan ini, seperti prasasti, istana, dan rumah ibadah kuno, atau tradisi dan adat istiada keagamaan dapat pula menggambarkan dinamika agama Islam dan kaum Muslimin di kawasan ini. Selain itu, penulisan sejarah kesultanan atau kerajaan yang bercorak Islam juga dapat lebih akurat. Pada gilirannya nanti dapat pula memosisikan kesultanan-kesultanan tersebut dalam proses islamisasi dan perkembangan Islam di kawasan ini.

Dengan mengungkapkan sejarah awal masuknya Islam di kawasan Nusantara, dan mendata serta menguraikan kesultanan atau kerajaan bercorak keislaman yang pernah ada dapat melihat keterkitan berbagai lokasi awal kedatangan dan hubungan di antara berbagai kesultanan tersebut. Hal ini tidak saja bermanfaat sebagai pengetahuan sejarah, tetapi juga sangat berguna bagi penguatan jati diri dan karakter peradaban bangsa-bangsa di kawasan ini, yang pada gilirannya pula dapat semakin mempererat persatuan dan kesatuan serta kerjasama antarnegara di Asia Tenggara yang memiliki akar sejarah yang hampir sama.

Secara kelembangaan, hasil kegiatan ini bermanfaat bagi penyediaan data dan informasi keagamaan, khususnya terkait literatur yang membahas sejarah awal Islam dan perkembangannya berdasarkan sumber-sumber lokal yang berupa historiografi tradisional dan peninggalan arkeologis. Manfaat lain adalah pelestarian khazanah keagamaan, khususnya informasi dalam manuskrip-masnuskrip dan peninggalan-peningalan arekologis tentang sejarah awal Islam dan perkembangannya di Nusantara. Dalam konteks nasional, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber beagi penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia jilid III yang membahas tentang Islam dan Perkembangannya di Indonesia.

Metodologi Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni dengan mengkaji data yang diperoleh dari historiografi tradisional dan peninggalan-peninggalan masa lalu. Maka, dalam uraian hasilnya akan digunakan pendekatan sejarah sebagai pendekatan utama. Sampai batas tertentu akan digunakan pula pendekatan filologi dalam melihat manuskrip dan pendekatan arkeologi dalam mengamati peninggalan-peninggalan masa lalu. Dalam menggambarkan dan menganalisis perkembangan Islam dewasa ini dapat digunaka pendekatan budaya, sosilogi, dan antropologi.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Penelusuran Sejarah Islam di Nusantara termasuk dalam lingkup penelitian sejarah. Dalam hal metodologi, penelitian sejarah merupakan kajian atas berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah terdiri atas empat tahap, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

a. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil-tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas manuskrip, arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, surat kabar, benda-benda arkeologis material seperti prasasti, bangunan bersejarah, makam, dan sejenisnya, maupun nonmaterial seperti cerita rakyat atau adat istiadat.

b. Kritik Sumber

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu peristiwa terjadi. Sumber primer adalah sebagaimana didefiniskan berikut: *a* ***primary source*** *is a document, or other source of information that was created at or near the time being studied, by an*

authoritative source, usually one with direct personal knowledge of the events being described. In this sense primary does not mean superior. It refers to creation by the primary players, and is distinguished from a secondary source, which in historical scholarship is a work, such as a scholarly book or article, built up from primary sources.[1] (Artinya kurang lebih: Sumber primer adalah dokumen, atau sumber informasi lain yang dibuat pada saat atau dekat waktunya dengan peristiwa yang sedang dikaji, oleh sumber terpercaya, biasanya seseorang yang mengetahui langsung kejadian-kejadian yang sedang diuraikan. Dalam pengertian ini, primer tidak berarti superior [lebih unggul]. Hal ini merujuk pada informasi yang disampaikan oleh pelaku-pelaku langsung, dan berbeda dengan sumber sekunder, yang dalam keilmuan sejarah adalah sebuah karya, seperti buku atau artikel ilmiah, yang disusun berdasarkan sumber-sumber primer).

Adapun sumber sekunder adalah seperti definisi berikut: *a **secondary source** is a document or recording that relates or discusses information originally presented elsewhere. A secondary source contrasts with a primary source, which is an original source of the information being discussed. Secondary sources often involve generalization, analysis, synthesis, interpretation, or evaluation of the original information. Primary and secondary are relative terms, and some sources may be classified as primary or secondary, depending on how it is used.*[2] (Artinya kurang lebih: Sumber sekunder adalah dokumen atau rekaman yang berhubungan

---

[1] http://www.statemaster.com/encyclopedia/Primary-source

[2] http://www.statemaster.com/encyclopedia/Secondary-source

atau membahas informasi yang pada dasarnya menyajikan dari mana saja. Sumber sekunder berbeda dengan sumber primer, yang merupakan sumber original (asli) dari informasi yang sedang dibahas. Sumber sekunder mencakup generalisasi, analisis, sintesis, interpretasi, atau penilaian terhadap informasi asli. Primer dan sekunder merupakan istilah-istilah yang relatif, dan sebagian sumber dapat diklasifikasikan sebagai primer maupun sekunder bergantung pada bagaimana ia digunakan).

Terkait dengan sumber untuk penulisan sejarah ilmiah, sumber-sumber tersebut terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik sumber dimaksudkan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas daripada bahan-bahan sumber tersebut. Untuk mendapatkan sumber-sumber yang otentik dan kredibel diadakan kritik sumber. Ada dua cara dalam melakukan kritik sumber, yaitu:

a. Kritik Ekstern, digunakan untuk menguji apakah data tersebut otentik (asli/sejati) atau palsu, yakni dengan meneliti tanggal pembuatan, siapa pembuatnya, dan bukti-bukti yang mendukung pembuatannya seperti bentuk huruf, ejaan, tinta atau alat tulis, bahan yang dipakai dan bahasanya.

b. Kritik Intern, digunakan untuk menguji bagaimana nilai pembuktian yang sebenarnya dari isinya atau berusaha untuk menetapkan kesahihan *(validity)* dan dapat dipercaya atau tidak isi dari sumber itu *(credibility)*.

Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Setiap data dicatat dalam lembaran lepas (sistem kartu), agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan. Data tentang sejarah awal masuknya Islam dikelompokkan dalam satu kategori, kemudian data tetang kesultanan dan sultan-sultannya dalam kelompok lain, dan benda-benda material dikelompokkan khusus peninggalan material, serta tradisi dan adat istiadat keagamaan pun demikian, misalnya tentang upacara keagamaan dalam kelompok tersendiri dan tari-tarian dalam kelompok tersendiri pula. Demikian seterusnya.

c. Interpretasi

Dalam metode sejarah, interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, internet, buku-buku yang relevan dengan masalah yang diangkat, maupun hasil wawancara langsung dengan para tokoh yang pernah terlibat langsung dengan peristiwa yang diteliti atau saksi sejarah dan tokoh lainnya yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Pada tahap interpretasi juga dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Pada tahap ini dilakukan pula analisis dengan menggunakan kerangka teori yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Tahapan ini menuntut kehati-hatian dan integritas penulis untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti terhadap aspek yang diteliti, mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan yang luas dari peneliti, baik pengetahuan dalam ilmu sejarah maupun pengetahuan dalam disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, antropologi, arkeologi atau filologi, agar dapat memberikan interpretasi yang tepat di dalam sumber sejarah. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua fakta sejarah tersebut penting untuk dimasukkan sebagai sumber yang relevan, perlu nalisis lebih lanjut mengenai keterkaitannya dengan objek yang diteliti.

d. Historiografi

Tahap terakhir dari langkah-langkah dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis/diakronis dan sistematis, menjadi karya sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Historiografi merupakan puncak dari metode penelitian sejarah, yang dalam penelitian ini merupakan laporan hasil penelitian. Penulisan laporan hasil penelitian pada tahap ini mencoba menangkap dan memahami realita sejarah. Dalam konteks ini penyajian hasil temuan lapangan tidak hanya menjawab pertanyaan ´apa´, ´siapa´, ´kapan´, dan ´bagaimana´ tetapi melakukan suatu eksplanasi secara kritis tentang ´bagaimana´, dan ´mengapa´.

Adapun tujuan dari penulisan yaitu menciptakan kembali totalitas dari fakta sejarah dengan menulis kejadian atau peristiwa masa lampau yang sebenarnya terjadi dengan melakukan sintesis dan analisis. Pada tahap akhir ini, penulis berusaha merekonstruksi kembali jalannya peristiwa dalam bentuk karya sejarah. Hasil tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif naratif dan deskriptif analisis. Diskriptif naratif yaitu menguraikan peristiwa dalam bentuk kisah sejarah dengan memerhatikan urutan kronologis peristiwa. Hal ini dimaksudkan agar tulisan yang disajikan dapat lebih sistematis dan dapat dipahami oleh pembaca. Sedangkan deskriptif analisis, khususnya untuk menjadi pertanyaan 'mengapa', atau yang dalam metode sejarah disebut sebagai sebab akibat terjadinya suatu peristiwa.

Kerangka Teori

Dalam melihat proses Islamisasi di Asia Tenggara dapat digunakan konsep pembentukan tradisi. Konsep ini dapat melihat berbagai data dan fakta terkait dengan sejarah awal dan perkembangan Islam di wilayah tertentu dengan memerhatikan kondisi masyarakat setempat serta pandangan hidup mereka dalam melihat masa lalu. Dengan mengutip E. Shils dari bukunya *Traditions*, Taufik Abdullah (1988: 61; "tradisi integrasi", h. 84) menjelaskan bahwa "sebagai sesuatu yang diturunkan dari masa lampau, tradisi tidak hanya berkaitan dengan landasan legitimasi tetapi juga dengan sistem otoritas dan kewenangan. Sebagai suatu konsep sejarah, tradisi dapat dipahami sebagai suatu paradigma

kultural untuk melihat dan memberikan makna terhadap kenyataan. Karena proses pembentukan tradisi sesungguhnya merupakan suatu proses seleksi – ketika cita-cita harus senantiasa berhadapan dengan kenyataan dan di saat kebebasan harus menemukan *modus vivendi* dengan keharusan-keharusan struktural—maka tradisi dapat pula dilihat sebagai seperangkat nilai dan sistem pengetahuan yang menentukan sifat dan corak komunitas kognitif. Tradisilah yang memberi kesadaran identitas serta rasa keterkaitan dengan sesuatu yang dianggap lebih awal."

Berdasarkan teori di atas, sejarah tidak semata-mata mengejar kepastian sejarah mengenai 5 W dan 1 H, yaitu apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Akan tetapi, dengan memerhatikan kondisi masyarakat dan pandangan hidup mereka yang terekam dalam berbagai media, baik benda-benda arkeologis maupun manuskrip-manuskrip atau cerita yang berkembang di masyarakat, maka dapat ditangkap watak zaman di saat suatu peristiwa itu terjadi. Catatan-catatan mengenai pandangan hidup masyarakat terhadap masa lalu di Nusantara khususnya terekam dalam warisan masyarakat yang dikenal dengan historiografi tradisional. Taufik Abdullah (1988: 63) mengatakan, "… sejarah bukanlah sekedar masalah kepastian sejarah, yang mengharuskan setiap peristiwa yang dinyatakan secara kritis dapat dibuktikan dengan sumber-sumber yang jelas, melainkan juga menyangkut masalah kewajaran (*fairness*), ketika sejarah dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan makna

sosial dan budaya, maka pandangan mengenai masa lampau masyarakat yang bersangkutan berperanan sangat penting. Bila sejarah dapat dilihat sebagai suatu rangkaian peristiwa-yang-dikehendaki, yang menjadikan para pelaku memainkan peranan aktif, kita juga dapat beranggapan bahwa dalam proses sejarah para pelaku tidak sekedar bereaksi terhadap lingkungannya sendiri tetapi juga terhadap konsepnya mengenai kepantasan (*propriety*). Kepantasan dalam pola tingkah laku ini didasarkan pada pengetahuan serta pandangan dunia si pelaku. Salah satu gudang aspek-aspek kognitif dan normatif dari kehidupan ini adalah historiografi tradisional. Memang pada titik ini kita mengkin menghadapi suatu lapisan tipis yang memisahkan sejarah dan mitos. Namun bila mitos dapat dilihat sebagai perwujudan dari pandangan dunia dalam bentuk cerita, maka dapat berharap untuk mendapatkan, di satu poihak, konsptualisasi msyarakat mengenai masa lalu, sebagai perwujudan dari keprihatinan-kultural, dan di pihak lain, sumber-sumber potensial dari sejarah-sebagai-peristiwa-masa-lampau. Yang pertama akan memberikan para sejarawan suasana yang terlah diterima sebagaimana adanya, sedangkan yang kedua tentang peristiwa masa lamau. Karena itu, untuk memahami proses awal dan dinamika Islam di kepulauan Nusantara, suatu tinjauan sekilas mengenai berbagai historiografi tradisional perlu juga dilakukan."

DAFTAR ISI

ISLAM FILIPINA: PERJUANGAN TANPA HENTI

Oleh: Choirul Fuad Yusuf

PENDAHULUAN

Filipina (*Republic of the Phillipines*) merupakan negara kepulauan di Asia. Membentang dari sekitar 600 mile (966 km) dari pulau utama Asia di ujung Barat Lautan Pasifik, maka Filipina terkenal dengan sebutan "Pearl of the Orient Sea" sebagaimana tertulis dalam puisi "*Mi ultimo adios*" ("*My Final Farewe-ll*") yang ditulis malam sebelum Jose Rizal dieksekusi Kolonial Spanyol pada 1898.Dinamai Republik Filipina sejak tahun 1543 dalam rangka memberi penghormatan kepada Raja Spanyol ke II, Philip. Sementara kepulauan Filipina diepergunakan jeuh sebelum kemerdekaannya.

Sebagai negara kepulauan, Filipina memiliki lebih dari 7,109 pulau (tapi sekitar 4000 pulau belum diberi nama resmi) dengan luas sekitar 111,830 mil persegi (atau sekitar 307,055 km2), walau hanya sekitar 2000 pulau yang dihuni penduduk.[1] Panjang wilayah Filipina 1,854 km2, yang membentang dari utara hingga selatan, dengan kelebaran

---

[1] Pulau-pulau terbesar di Filipina, diantaranya pulau Luzon (105,666 km2), Mindanao (95,550 km2), Samar (13,074 km2), Negros (12,699 km2), Palawan (11,780 km2), Panay 11,511 km2), Mindoro (9,732 km2), Leyte (7,210 km2), Cebu (4,406 km2), Bohol (3,868 km2), Masbate 3,267 km2), dan Catanduanes (1,429 km2). Lihat : ***The Encyclopedia Americana***, International Edition, 1974:749

1,107 km2. Tak ada batas pulau, tapi hanya dibatasi oleh laut. Sebelah Barat oleh Laut Cina Selatan, sebelah Timur oleh Laut Filipina, sebelah Selatan oleh Laut Sulawesi, serta sebelah Utara oleh Selat Luzon yang memisahkan negara dari tetangganya, Taiwan. Negara (bangsa) terdekat dengan Filipina adalah Malaysia dan indonesia. Vietnam dan Cina adalah tetangga daratan terdekat di Asia. Kondisi struktur geografik seperti ini, menjadi salah satu faktor kesulitan mempersatukan Filipina sebagai negara kesatuan.

Penduduk Filipina, pada tahun 2000 sudah mencapai 81 juta, dengan tingkat harapan hidup tinggi, sehiggga ada 4 % lebih berusia 65 tahun. Penduduk Filipina terkonsentrasi di 11 pulau besar di tiga area, yaitu Luzon di utara, Mindanao di selatan, dan kepulauan Visayan di tengah. Penduduk terpadat terdapat di Metropolitan Manila, ibukota yang mecapai 8-10 juta orang. Sepuluh tahun kemudian, penduduk Filipina mengalami pertumbuhan pesat, sehingga pada tahun 2011 menjadi berjumlah 103,775,002 jiwa, dan 4,3%-nya berusia diatas 65 tahun, dengan birth-rate 24.98/1000 penduduk dan death-rate 4.98/1000 penduduk. Sekitar 11,449 juta lebih tinggal di Manila Metro, 1,48 di Davao. Harapan hidup penduduk Filipina juga meningkat, rata-rata 71,94 tahun (laki-laki 68,99 tahun, sedang perempuan 75,03 tahun).Dari jumlah ini, pada tahun 2011, pemeluk Katolik 82,9 % (Katolik Roma 80,9 % dan Aglipayan 2%), Muslim 5 %, Evangelikal 2,8%, Iglesia ni Kristo 2,3%, Kristen lain 4,5% dan lainnya sebesar 2,5%.[2]

---

[2] Index Mundi, ***Phillipines Demographic Profile***, 2011.

Bahasa resmi Filipina adalah Filipino, yang terbentuk dari kata (bahasa) Tagalog dan Inggeris.[3] Hanya sekitar 55 persen fasih berbahada Filipino, sementara Bahasa Inggeris dipergunakan di insitusi Perguruan Tinggi, Pengadilan, dan Pemerintah. Terdapat sekitar 70 hingga 80 dialek bahasa derivasi bahasa Melayu. Hanya tiga dialek nasional yang dianggap penting : Cebuana di kepulauan bagian Selatan, Ilocano di utara, dan Tagalog dipakai masyarakat Ibukota Filipina. Namun demikian, bahasa standar yang diterima secara nasional disebut "Taglish" (gabungan antara Tagalog dan English), karena gagasan penerapan Filipino sebagai bahasa nasional ditolak oleh Cebuanos. Meski demikian, orang Filipino sangat bangga dengan negaranya, karena menjadi negara dengan jumlah pengguna/pembicara bahasa Inggeris ketiga terbesar di dunia. Sementara bahasa Spanyol, sebagai bahasa penguasa kolonial terlama di negeri ini, hanya dipergunakan sebagai bahasa wajib hingga tahun 1968 Walau kini jarang dipakai, tapi bahasa Spanyol banyak terserap dalam dialek-dialek di Filipina.

---

[3] Bahasa yang dipergunakan di Republik Filipina, dengan kisaran persentase penggunanya. Tagalog (Filipino) dipakai oleh sekitar 44,4 %, Inggeris (39,5%), Spanyol (2,1 %), Cina/Mandarin (0,5%). Dialek-dialek utama dominan di Filipina adalah dialek : Cebuano (24,1 %), Tagalog (21%), Iloko (11,7 %), Panay-Hiligaynon (11,4%), Bikol (7,8%), Samar-Leyte (5,5%), Pangasinan (2 %). Sedang dialek yang dipakai oleh penduduk di bawah 500 ribu, diantaranya adalah dialek Magindanaon, Taudag (Sulu-Moro), Aklanan, Hamtikom, Maranaw, Masbate, Chavacano, Samal, Bilaan, Subanon, Bontog, Ifagao, Zambal, Kaangkanai, Cagayano, Bukidnon, Davaweno, Itawi, Inibaloi, Visaya-Hamtikanon, Kalinga, Manabo, Malauug, Apayoo atau Ismeg, Bogobo-Guiangga, Tirurai, Mandaya, Bolinao, Palawano, Ramblon, Gaddang, Caviteno, Calagan atau Caragan, Yogad, Baadjao, Ivatan, Isinae, Pinalawan, Tagakaolo. (Lihat : ***The Enciclopedia Americana***, hal.751).

Secara geokultural, Filipina sebagai salah satu negara kawasan Asia Tenggara merupakan negara majemuk dilihat dari ras, etnisitas, agama, dan budayanya. Filipina telah terhuni manusia sejak 67.000 tahun laluoleh orang-orang Calao Cagayan sebelum kedatangan orang Negrito dan suku berbahasa Melayu Polinesia.Filipina memiliki cultural linkage dengan budaya Nusantara umumnya.Demikian pula sejak tahun 900-an, Filipina sebagai talasokrasi (*thalassocracy*) yang berpusat di Manila Bay diramaikan oleh hiruk-pikuk perdagangan bangsa Cina, Jepang, Malay, dan berbagai bangsa Asia Timur. Secara kultural, kemajemukan kultural yang berkembang di Filipina menjadikannya sebagai pusat Karena itu, Filipina menjadi kawasan menarik bagi kajian Asia Tenggara, terutama dalam kontek analisis politik atau keagamaan.

Pertama, secara geohistorik, Filipina terletak di lautan Pasifik, menjadi sangat strategik bagi berbagai kepentingan : politik, ekonomi, kebudayaan, maupun agama itu sendiri. Filipina terletak di lautan Fasifik dan dikitari oleh negara-negara maju di kawasan Asia, seperti Jepang, Taiwan, dsb. sehingga menjadi sangat strategik. Paling tidak, secara geohistorik, Filipina memiliki sejarah peradaban yang tinggi dengan ciri keragaman kultural, agama, maupun warna politik. Selanjutnya, Filipina merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjangFilipina Islam masuk ke Filipina antara abad 12-13 bersama pedagang muslim dari Semenanjung Persia, India Selatan, dari beberapa kesultanan

di kepulauan Malaka. Karena itu, perkembangan Islam sebagai agama Abrahamik memiliki karakteristik religiositas menarik dampak strategisitas Filipina secara geografik maupun kultural. (lihat *Islam in Philliphines*).

Kedua, secara georeligi, ternyata di Filipina hidup dan berkembang banyak ragam agama dan kepercayaan : Hindu, Buddha, Judaism dan Islam, disamping masih jugakepercayaan lokal yang masih hidup hingga saat ini, seperti : dinamisme, animisme dan agnotisme juga atheisme subur di Filipina. Pertemuan antara Islam dengan berbagai agama di satu pihak, dan dengan kepercayaan dan budaya lokal di pihak lain, melahirkan Islam Filipina dengan segenap variannya, seperti Islam moderat, Islam radikal, dan Islam kultural dan sinkretisme Islam.

Ketiga, secara politik, perkembangan Islam di Filipina, sejak kehadirannya, terutama sejak era kolonialisme dan paskakemerdekaannya, mengalami perkembangan yang menarik. Hal ini, karena dinamika perjalanan sejarah Islam di negeri ini dihadapkan pada situasi konfluktual yang nyaris tak pernah berhenti. *"Never-ending conflict"* antara Islam dengan Pemerintah ditambah kompetisi antara Islam dan Kristiani mengisi dinamika kehidupan Filipina Selatan. Atas dasar ketiga alasan di atas, kajian atas perkembangan Islam di Filipina menjadi topik sangat penting dilihat dari perspektif mana pun.

ISLAM FILIPINA: FOKUS, DAN METODOLOGI

Sesungguhnya, penelitian ini berjudul *Perkembangan Islam di Filipina.*Namun kemudian, karena fokusnya lebih kepada persoalan konflik, maka judul dimodifikasi menjadi "*Filipina : Never Ending Struggle*". Penelitian ini bertujuanmendeskripsikan, memahami, dan dan mengungkap informasi/ data historik terkait dengan perkembangan Islam di Filipina : periode, faktor penyebab, dan kondisi keagamaan (Islam).Untuk itulah, penelitian memokus pada : (1) Bagaimana awal perkembangan (kedatangan) Islam di Filipina; (2) Bagaimana Perkembangan Islam pada masa Kolonialisme Spanyol dan (3) Bagaimana perkembangan Islam pada periode terakhir ini ? Untuk itu, dalam penulisan sejarah Islam Filipina ini, dipergunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) yang dibantu oleh beberapa metoda yang biasa dipergunakan dalam studi ilmu sosial dan humaniora, seperti : sosiologi, antropologi, arkeologi, linguistik, filologi, dan sejenisnya dalam rangka pemaknaan realitas, analisis sosiohistorik, atau analisis sosiokultural yang lebih komprehensif.

TEORI-TEORI RELEVAN

Dalam subbab ini, berikut dipaparkan beberapa teori yang fungsional untuk membantu memahami kondisi dan sejarah perkembangan Islam di Filipina. Pemaparan beberapa rangka teori ini dimaksudkan sebagai "eksplanan" untuk

membantu menjelaskan fenomena atau realitas yang terjadi ikhwal perkembangan Islam di Filipina.

Pertama, teori terkait dengan bagaimana pengalaman sejarah tentang perjumpaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai agama monoteistik. Pengungkapan teoretik tentang bagaimana historisitas perjumpaan antara agama-gaman Abrahamik (Yahudi, Kristen, dan Islam) diharapkan bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya kecenderungan-kecenderungan sosiometik, idiopmetrik antara ketiga agama seturunan tersebut dalam realitas sejarah peradaban. Dengan kata lain, berdasarkan pada pengalaman sejarah sejak awal perjumpaan ketiga agama hingga kini, kiranya akan dapat membantu menjawab mengapa perjumpaan antara ketiga agama kerap bahkan selalu menimbulkan "perseteruan". Pemahaman historik atas ketiga agama Abrahamik yang terjadi di berbagai belahan dunia, dapat memahami kondisi dan sejarah perkembangan Islam di Filipina.

Kedua,subbab berupaya menjelaskan bagaimana agama--baik agama wahyu maupun agama budaya—sebagai susbbsistem kehidupan memegang peran atau fungsi penting dalam mengintegrasikan atau sebaliknya mendisintegrasikan masyarakat. Uraian teoretik di subbab ini, diharapkan dapat membantu memahami secara komprehensif mengapa konflik Mindanao hingga kini masih terjadi tanpa penyelesaian yang tuntas, atau mengapa konflik Filipina cenderung melebar skala perseteruannya.

Ketiga, dalam subbab ini juga akan dipaparkan secara teoretik bagaimana pertemuan antar agama sebagai bagian tak terpisahkan dari makrosistem kehidupan kebudayaan. Melalui, penjelasan teoretik ini, diharapkan dapat mencerahkan atau memperjelas bagaimana pertemuan antara agama satu dengan agama lain, antara agama dengan sistem budaya "indigeneous" yang sudah mengakar. Teori ini bisa menjelaskan dampak kultural dari akulturasi subsistem-subsistem kebudayaan besar tersebut yang terjadi di Filipina Selatan, disamping diharapkan membantu memahami pola-pola keberagamaan yang terjadi (terbentuk) di Filipina sebagai entitas negara bangsa. Secara ringkas, berikut dielaborasi landasan teoretik terkait dengan ketiga variabel besar pengkajian "*Islam Filipina : Never Ending-Conflict*"

1) Kristen dan Islam dalam Konstelasi Politico-historik

Yahudi, Kristen dan Islam, secara genealogik, sebenarnya merupakan agama wahyu (*revealed religion*). Ketiganya merupakan agama (sistem ajaran) yang berasal dari nenek moyang pembawa ajaran wahyu tersebut, yaitu Nabi Ibrahim. Ketiganya, merupakan agama yang tertulis dalam kitabnya masing-masing. Dalam Kitab Suci Yahudi (Taurat) dan Kitab Suci agama Kristen (Injil, yang diistilahi baru-nya The Bible), disebutkan akan hadir agama berikutnya, yang akan melanjutkan ajaran Allah. Demikian pula, dalam Kitab Suci agama Islam, yaitu Al Qur'an disebutkan bahwa Nabi Isa al Masih (yang kemudian disebut Jesus dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru) adalah salah satu dari 25 Rasul Allah yang diyakini oleh muslim. Nabi Isa adalah Rosul yang diberi

wahyu dan ditugaskan mengajak umat pada zamannya untuk menyembah kepada Allah, yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Pengikut ajaran Nabi Isa yang mengamalkan Injil, dan juga ajaran Nabi Musa pengamal Taurat, keduanya disebut ahli Kitab dalam Islam. Dengan demikian, secara genealogik maupun teologik, terutama dalam hal keyakinan kepada Tuhan, Yahudi, Kristen, dan Islam adalah agama wahyu, agama keturunan Nabi Ibrahim. Ketiganya, merupakan agama monoteistik yang mengakui adanya satu Tuhan di dunia.

Ketiga agama "seturunan" tersebut, kemudian dalam perjalanan sejarahnya, berkembang ke penjuru dunia, tidak saja di daerah kelahirannya (Arab) dengan berbagai cara : dakwah/penggembalaan, perang, dsb. Masing-masing ingin memperoleh pengakuan pengaruh hegemonik dari pemeluknya dalam berbagai aspek kehidupan : politik, ekonomi, budaya, dsb. Implikasi historiknya, percaturan ketiga agama wahyu ini pada akhirnya berakibat terjadinya perseteruan (konflik) dalam berbagai aspek yang terjadi di hampir seluruh penjuru--baik dalam bentuk konflik terbuka (*manifest conflict*), maupun tersembunyi (*latent conflict*)[4]—

---

[4] Konflik terbuka adalah bentuk konflik yang terjadi jelas, dimana standing-position masing-masing conflictant terlihat nyata, disamping "masalah sumber konfliknya" juga nyata sehingga masing-masing pihak mengetahui apa, mengapa, dan bagiamana sikap lawannya. Sebaliknya, konflik tertutup (manifest/open conflict, latent/hidden conflict) adalah bentuk konflik yang terjadi secara terselubung, sehingga tidak atau kurang jelas/pasti "position-standing" dari masing-masing pihak berkonflik. Masalah atau sumber konfliknya pun belum atau tidak selalu jelas, tapi tersembunyi sehingga berakibat multi-interpretasi, dan salah faham. Penyelesaian

walau pada mulanya bersumber dari perbedaan atau perseteruan teologik.

2) Agama: Faktor Integratif dan Disintegratif

Antara Yahudi (Jews) agama yang diwahyukan kepada Nabi Musa a.s, Kristen (Dalam Perjanjian Lama/Baru, disebut Christianity, dan dalam Islam disebutnya Nashrani), yang diwahyukan kepada Nabi Isa a.s (yang kemudian oleh umat Kristiani disebut Jesus), serta Islam (agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w), sesungguhnya, memiliki ajaran yang bersumber dari kekuatan (Tuhan) yang sama. Ketiganya mengajarkan Tuhan satu (*monotheism*). Perbedaan dari ketiganya, diantaranya karena "masa keberlakuan" dan kompleksitas ajarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan umat pada zamannya. Namun kemudian, kesamaan teologik tersebut, karena faktor-faktor internal dan eksternalnya, pada titik akhir menunjukkan perbedaan tajam pada aspek teologik dan praktek keberagamaannya. Perbedaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. (Sesuai fokus penelitian ini, hanya Kristianitas dan Islam saja yang dibahas berikut).

Islam mengajarkan prinsip tauhid, bahwa Tuhan itu satu. Tiada tuhan selain Allah. Sementara, doktrin Kristianitas mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tapi terdiri dari tiga unsur, yaitu : Tuhan Bapak, Tuhan Anak (Jesus), dan Roh

---

konflik terbuka sebetulnya cenderung lebih mudah pemecahannya dibanding konflik tertutup.

Kudus. Ketiganya memiliki substansi yang sama, dan kekuatan yang setara. *"There are three persons in the Godhead : the Father, the Son, and the Holy Ghost (Holy Spirit), and these three are one God, the same substance, equal in power and glory"*.[5] Jesus Kristus adalah Tuhan. Kristus mencipta segala sesuatu (John, 1:3, Hebrews, 1:10). Kristus memberi pengampunan dosa (Mark, 2:5-12; Colossians, 3:13). Kristus juga akan membangkitkan orang mati pada Hari Kebangkitan (John, 11:25), dan "mengarahkan dan membimbing jalannya sejarah umat (Corinthians, 10:1-11), dan sifat lainnya, yaitu : Tidak tergantung pada zat lainnya, Abadi, Maha Suci, Maha Benar, Maha Pengasih, Maha Adil, dsb. Maha Tahu, Maha Kuasa, Ada dimana-mana, namun, sebaliknya Jesus Kristus juga manusia. Dalam Kitab Sucinya, disebutkan bahwa Jesus Kristus memiliki sifat-sifat kemanusiaan, seperti sifat : tumbuh-berkembang fisik dan intelektualnya (Luke, 2:52), butuh makan-minum (Matthew, 4:2), merasa capek (John,4:6), butuh tidur (Matthew,8:24), dan ia juga wafat (John,11:23).

Berbeda dari ajaran Kristianitas, agama Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tidak bersekutu atau disekutukan. Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tuhan memiliki sifat superior (*omnipotence*), seperti : Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Adil, dsb. Selain itu, secara doktrinal, Islam memiliki sistem ajaran yang lebih kompleks.

---

[5] "The Belief of Orthodox Christianity", dalam Josh McDowell & Don't Stewart, ***Handbook of Today's Religions*** , Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1983, h.26-27.

Islam yang bersumber pada Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijtihad, diyakini pemeluknya memiliki sistem ajaran yang lengkap (komprehensif) dan mencakup segenap aspek kehidupan—sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan, dll., sehingga diyakini "*applicable*" sebagai instrumen efektif untuk penataan umat sepanjang zaman. Perbedaan yang terjadi, secara sosio-teologik, melahirkan banyak sekte atau aliran keagamaan.[6]

Demikian pula, perbedaan agama kemudian menyebabkan terjadinya pengelompokan-pengelompokan, atau pemisahan-pemisahan yang ekslusif yang kuat.Dengan kata lain, pertumbuhan agama melahirkan kelompok-kelompok sesuai keyakinan dan praktek ajaran yang diamalkannya. Agama, dalam konteks relasi sosial, merupakan faktor integrasi yang sangat kuat dan juga faktor disintegrasi.[7]

Sebagai faktor integratif (*integrating factors*), agama membangun kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan keyakinan, kesamaan ajaran, kesamaan tujuan, dan pola

---

[6] Dalam Kristen, misalnya terdapat sekte-sekte yang disebabkan perbedaan dasar teologiknya, maupun sistem penggembalaannya, seperti Jehovah, ….. Dalam Islam, melahirkan.

[7] Selain fungsi edukatif, penyelamatan (salvatif), kontrol sosial, agama juga memiliki fungsi integratif dan disintegratif sekaligus. Fungsi integratif, melihat agama menjadi "necessary ingredient of well integrated society", atau sebagai "the primary sources of integration". Implikasi dari "proses" integrasi, maka melahirkan "ego kelompok", yang menjadi embrio lahirnya "fanaticisme". Dengan demikian, "integrated community" yang berlebihan bisa melahirkan proses disintegrasi antar kelompok. Lihat : J. Milton Yinger, ***Religion, Society and the Individual : An Introduction to the Sociology of Religion***, The Macmillan, New York, 1960, hal.60.

prilaku yang sama. Dalam kasus inilah, agama menjadi faktor terbentuknya sebuah kelompok dengan karakteristik dasar yang sama. Agama menjadi wadah dari relasi sosial berlatar agama sama. Realitas kemajemukan agama dalam masyarakat berakibat lahirnya beragam kelompok dengan latar idiologi, tujuan, interes, kebiasan, dsb yang berbeda. Realitas kemajemukan agama dalam masyarakat, sebetulnya bisa merupakan potensi untuk penguatan masyarakat sebagai sistem.

Ini jikalau terjadi kesadaran pemeluk agama untuk berkompetisi dalam kebaikan bagi umat secara keseluruhan. Namun sebaliknya, kemajemukan agama bisa menjadi "*burden*" atau kendala penyiptaan struktur situasi kondusif untuk terbangunnya keamanan dalam masyarakat, jikalau terjadi kompetisi negatif atau politisasi agama untuk tujuan lain. Namun, demikian, tingkat integrasi yang berlebihan melahirkan kelompok-kelompok ekslusif, ekstrim yang meyakini bahwa kelompoknya-lah yang benar. Kelompok lain, salah. *Truth-claim* keagamaan memiliki potensi kuat sebagai penyebab konfliks *multifaceted*. Selain itu, konflik berbasis agama, cenderung juga disebabkan karena terjadinya kompetisi antar agama, dalam konteks penguatan pengaruh, perolehan pemeluk, ekspansi teritori dengan motif perluasan wilayah (kerajaan, atau negara"), atau motif misionaris untuk melakukan perubahan masyarakat. Para fungsionalist, mencatat bahwa ketidak-seimbangan antar kelompok melahirkan nilai dan agenda konflik yang menyebabkan persaingan antar mereka. Dan, faktor agama bisa

menjadifaktor "*constant competition*" dalam masyarakat,[8] atau faktor disintegartif dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak awal sejarah peradaban, konflik dengan tingkat perseteruan tinggi atau dahsyat terjadi karena karena faktor agama.[9] Perang-perang pada zaman Nabi-nabi, Perang Salib, Perang Cordoba, Ekspansi Ashoka, Perang-peran perlawanan terhadap Kolonialisme merupakan contoh konkret konflik berbasis agama. Contoh konflik antar agama yang aktual hampir terjadi di berbagai negara. Misalnya, konflik antar agama berbeda : Buddhis versus Kristen di Myanmar/Burma pada 1948, Muslim vs Yahudi di Palestina, 1968, Katolik vs Protestan di Irlandia Utara 1969, Buddhis vs Kristen di Bangladesh tahun 1973; Muslim vs Kristen Armenia di Azerbeijdan 1990;; Hindu vs Muslims di Uthar Pradesh India, 1992; Hindu vs Muslim di Srilanka 1983. Kemudian konflik interen agama, seperti : Kristen Ortodoks Serbia vs Kristen Roma katolik di Yugoslavia, 1991; Islam Sunni vs Islam Shiah di Iraq 1991; Islam Fundamentalis vs Islam Moderat di Afganistan, 1992. Sementara konflik antara Agama dan Pemerintah tercatat terjadi lebih ekstensif karena berbagai faktor "biasa", seperti : ketidak-adilan, diskriminasi, marjinalisasi, dan karena fungsi profetik agama sebagai

---

[8] M.L Anderson dan H.F Taylor, ***Sociology : The Essentials***, Belmont, CA : Thomson Wadsworth, 2009.

[9] Perang karena faktor agama seperti : perbedaan teologik, ego kelompok, diskriminasi, misinteraksi, *misunderstanding*, intoleransi, faktor bertumpuk (*multi-faceted factors* : politik, ekonomi, kurural, individual, dsb.).

pengontrol Pemerintah dari perspektif moral atau agama. Konflik jenis terakhir ini, seperti : Muslim vs Pemerintah (Pusat) di Ethiopia, 1976; Sikh vs Pemerintah, di Punjab India, 1982; Muslim vs Pemerintah (Hindu) di Kashmir 1990; Muslim vs Pemerintah di Aceh, Indonesia, 1990; Muslim vs Pemerintah, di Mesir, 1977; Muslim vs Pemerintah di Tunisia, 1978; Muslim vs Pemerintah di Aljazair, 1988, dan masih banyak berlangsung memasuki milenium ketiga.

Termasuk perang kebudayaan melalui perang informasi. Buku-buku tentang hubungan antara Kristen dan Islam selalu memokus pada isyu perang and peristiwa konflik politik. "The faith interact like armies, periodically clashing at flash points across the globe. Outside of Popes and Caliphs and a few other critical figures, no one is especially important".[10]

3) Akulturasi Relijius

Akulturasi (*acculturation*) merupakan proses perubahan psikologis dan kultural akibat pertemuan antara budaya. Dampak proses akulturasi dapat terlihat pada bentuk dan tingkat yang beragam dalam proses interaksi kulturalnya. Di tingkat kelompok, misalnya, akulturasi bisa berpengaruh pada terjadinya perubahan prilaku kelompok, baik perubahan budaya, adat-kebiasaan, atau institusi.[11] Akulturasi relijius,

---

[10] Andrew Wheatcroft, ***Infidels : A History of the Conflict Between Christendom and Islam,*** 2003, p.

[11] D.L. Sam & J.W. Berry, "Acculturation : When individuals and Group of Different Cultural Background Meet", dalam ***Perspectives on Psychological Science*** V, 472.

dengan demikian, merupakan proses pertemuan antara dua atau lebih agama sebagai sistem norma, nilai, dan praktek keagamaan. Pertemuan antar agama, dan agama dengan sistem budaya lain, mengakibatkan terjadinya proses asimilasi, separasi, integrasi, marjinalisasi kebudayaan. Kecenderungan lahirnya bentuk baru agama, bentuk sintetik, atau peminggiran terhadap agam tertentu menjadi hal yang mungkin terjadi sebagai proses akulturasi. Tarik-menarik antara ajaran dan budayanya merupakan keniscayaan alami yang terjadi dalam akulturasi. Dengan kata lain, dampak pertemuan antara dua atau lebih dari kebudayaan (cultural pattern) melahirkan perubahan baru prilaku budaya masyarakat. J.W Berry (1997)[12] mengategorikan empat model perubahan akulturasi. Pertama, asimilasasi (*assimilation*), yaitu bentuk akulturasi ketika individu menolak budaya asli dan menyerap norma (nilai) budaya dominan pihak lain atau tuan rumah (*host culture*). Kedua, pemisahan (*separation*), yaitu akulturasi dimana individu (masyarakat) menolak budaya tuan rumah dalam upaya melestarikan budaya asli milik dirinya. Ketiga, penggabungan (*integration*), yaitu akulturasi yang terjadi jika individu (atau masyarakat) mampu menyerap (mengadopsi) norma/nilai budaya dominan tuan rumah sembari melestarikan budayanya sendiri. Keempat, peminggiran (*marginalization*) yaitu akulturasi yang terjadi manakala individu (masyarakat) menolak kedua norma/nilai budaya yang ada—baik budaya sendiri maupun tuan rumah.

---

[12] J.W. Berry "Immigration, Acculturation, and Adaptation" dalam ***Applied Psychology : An International Review***, 46, 1997, hal.10

Agama sebagai sistem nilai dan norma—baik bersumber dari wahyu (*revealed religion*) maupun budaya (*cultural religion, unrevealed religion*)—merupakan sistem yang memungkinkan mengalami proses akulturasi jika bertemu dengan sistem budaya atau agama yang lain. Agama wahyu, dalam konteks ini, karena sumbernya diyakini dari sumber ilahi (Tuhan) yang absolut, dan memiliki *truth-claim* masing-masing, maka secara sosio-kultural, maupun sosio-idiologik, berkecenderungan menghasilkan proses akulturasi yang kaku. Proses akulturasi atau interaksi antara agama wahyu, karena itu, berkecenderungan sulit memroduk akulturasi ientegratif. Dua sistem ajaran absolut, sangat tidak mungkin, melahirkan penggabungan antara keduanya. Karena, keduanya memiliki "truth-claim" yang keras, absolut. Masing-masing kerap memiliki "*fanaticisme*" yang kuat dalam upaya mempertahankan kebenaran dan keberadaan agama yang diyakini berasal dari Tuhannya yang maha benar. Peristiwa sejarah tentang pertempuran, konflik antara dan intern agama terjadi dimana dan kapanpun dalam sejarah peradaban.

Pertemuan antara agama wahyu dan agama budaya, berkecenderungan menyebabkan dua kondisi. Pertama, terjadi pengagamaan (Islamisasi, atau Kristenisasi) secara efektif yang ditandai oleh terjadinya perubahan total tata kehidupan pihak tuan rumah. Contoh dalam hal ini adalah akulturasi Islam (sistem baru) dapat mengubah masyarakat Madinah pada saat pertama kali dakwahnya. Kecenderungan kedua, adalah terbangunnya budaya berbasis agama wahyu tertentu (*religiously-based culture*). Di sini, kebudayaan dalam

pengertian luas (meliputi sistem nilai, norma, tradisi, adat istiadat, pola pendidikan, relasi, dsb.) diwarnai oleh agama tertentu atau sebaliknya ajaran agama diwarnai oleh budaya tuan rumah. Cuma saja, dalam kondisi tertentu, kerap kali, integrasi terjadi secara tidak sepenuhnya. Dampak, sosio-idiologisnya, kondisi kecenderungan kedua melahirkan upaya terus menerus yang dilakukan oleh gerakan purifikasi.

4) Pengalaman Penyebaran Islam

Islam sebagai agama wahyu Abrahamik yang diturunkan terakhir, secara doktrinal oleh pemeluknya diyakini memiliki sistem ajaran yang dapat difungsikan untuk menata pelbagai kehidupan manusia, baik politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek lainnya. Karena itulah, maka secara sistemik, Islam menawarkan berbagai sistem atau model untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya menggunakan sistem lain, baik sistem berbasis agama, atau berbasis budaya, atau sistem berbasis pemikiran filosofis.Visi, misi, dan program-program pengembangan Islam melalui pelbagai pendekatan (dakwah, disseminasi, pendidikan, inovasi gagasan, dsb) mengundang pihak lain, baik agama-agama sebelumnya maupun sistem yang sedang diterapkan, merasa terusik dengan kehadiran sistem agama baru. Respon terhadap gerakan Islam (Islamisasi) sudah barang tentu bermacam-macam: menerima atau menolak sepenuhnya, atau berasimilasi dengan segenap implikasinya. Penolakan terhadap Islam, apapun motifnya, melahirkan konflik.

Dalam konteks ini, ada beberapa kecenderungan motif mengapa dinamika pengembangan Islam kerap mengalami penolakan yang pada gilirannya melahirkan konflik.

Pertama, secara teologik, dikarenakan adanya *truth claim* atas kebenaran ajarannya. Masing-masing agama berpegang teguh atas kebenaran yang diyakininya. Menerima agama lain, berarti menerima kebenaran teologik dan ajarannya dan secara berbarengan mengakui kesalahan akan sistem teologi dan ajaran agama yang dipeluk sejak lama dan sudah eksis berabad-abad. Mengapa harus menerima kebenaran teologik yang baru ?

Kedua, secara politik, kerap kali agama diseret ke ranah politik oleh pihak tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, banyak terjadi konflik yang sebenarnya disebabkan oleh faktor individual, atau faktor non-agama, namun kemudian dikembangkan menjadi konflik agama. Selain itu, Islam sebagai agama diyakini (berdasarkan sumber ajarnnya) potensial melahirkan sistem atau model politik tertentu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat moderen. Dalam konteks ini, perkembangan Islam dapat mengancam "model-model" atau "sistem-sistem" dunia yang dapat merugikan kelompok atau negara non-Islam. World-system produk pemikiran filsosofis, yang selama ini diterapkan di hampir belahan dunia, seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sistem politik demokrasi liberal atau otorianistik, atau sistem budaya pragmatik, sistem relasi sosial yang "hedonistik" akan kehilangan otoritas dan fungsinya jikalau penerapan Islam diterima secara mulus. Implikasi

politiknya, banyak pihak negara kurang nyaman dengan penerapan Islam penataan negara. Selain tentu saja, dari aspek politik global, pemungsian/pemeranan Islam sebagai faktor integratif, bisa melahirkan aliansi politik negara pada skala global yang (dianggap) mengancam kehidupan negara atau bangsa lain berbagai aspek : politik, ekonomi, dan budaya. Alasan sosio-politik diatas, menyebabkan perkembangan Islam kerapkali dihadapkan pada persoalan politik, ekonomi, budaya, bukan sekedar persoalan kebenaran doktrinalnya semata. Perkembangan agama, seringkali dalam prosesnya, terjadi secara berbarengan dengan perkembangan dimensi kehidupan politik, dan aspek lainnya. Kualitas, intensitas, dan dinamika perkembangan agama pada berbagai aspek religiositasnya—keyakinan, ritual, pengetahuan, maun artefaktualnya, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melekat, baik eksternal agama terkait dengan sistem dan struktur atau daya atur dan relevansi agama itu sendiri maupun faktor eksternal yang terkait, baik politik, ekonomi, dsb. Perkembangan agama Katolik, misalnya, hampir selalu bersamaan dengan peristiwa kolonisasi Barat. Ini, lantaran Kristianitas berkembang di Barat (Eropa dan Amerika) umumnya. Kristenisasi, kerap terjadi bersama kolonisasi atau "Westernisasi". Para kolonial, seperti Spanyol, Poutugis, Belanda, Inggeris, dan Amerika secar historik membawa misi Kristenisasi(Gospel), disamping Gold (kekayaaan), dan Glory (kemenangan ekspansi teritori). Agama Hindu, Budha, maupun Konfusianisme juga tak berbeda. Ketiga agama, yang terkategori "*unrevealed religion*" membawa sistem budaya

(nilai, norma, tradisi, folklore, dan gaya hidup negara asal berkembangnya agama tersebut. Begitu juga Islam. Sebagai agama yang berkembang di Timur Tengah, perkembangan Islam juga terjadi dengan perkembangan perluasan kerajaan atau kesultanan Islam. Contoh, perkembangan Islam ke Eropa (Spanyol) dibawa bersama kejayaan Kerajaan Abdurrahman atau Otman. Masuknya Islam ke Filipina adalah berkat Kesultanan Sulu dan Kerajaaan Magindanaon. Ringkasnya, perkembangan suatu agama tergantung pada faktor politik, budaya dll

FILIPINA PRA-ISLAM

Secara geokultural, Filipina merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjang. Hampir sama dengan Indonesia, Filipina yang berada pada posisi strategik, negara ini menjadi daerah yang disinggahi oleh berbagai bentuk budaya, agama, adat istiadat, disamping budaya dan kebiasaanhidup penduduk aslinya (*indigenous people*) yang berakibat melahirkan budaya, tradisi yang sangat majemuk yang berlangsung hingga kini.

Sebelum kehadiran agama-agama Abrahamik, seperti Islam dan Kristen, di Filipina terdapat kepercayaan (*indigenous spirituality* atau *local belief*). Dalam penelitian Thomas McKenna, dalam *Muslim Rulers and Rebels* (1990, Berkeley, University of California Press) dan Fenella Cannel dalam *Power and Intimacyin the Christian Phillippines* (1990, Cambridge : Cambridge University Press) menemukan pengaruh kuat praktek dan keyakinan penduduk asli terhadap kehidupan

keberagamaan masyarakat hingga kini walau Islam dan Kristianitas sudah mencoba mengubahnya. Tradisi, kepercayaan, atau spiritualitas asli Filipina yang sudah berkembang sejak awal sejarahnya, seperti animisme, dinamisme, maupun tradisi sintetik dengan agama sebelumnya berpengaruh secara teologik maupun kultural terhadap perkembangan agama setelahnya, yaitu Islam dan Kristianitas. Misalnya, keyakinan akan roh nenek moyang, kepercayaan Tawo sebagai Tawo sebagai penyebab sakit sehingga penyembuhannya perlu mediator spiritual.Akhirnya, kedua peneliti yang mengkaji etnologi dan keterkaitannya dengan fenomena keagamaan, menyimpulkan bahwa :

> "In looking at the religions of the Phillipines it is clear that the West has played a major role. Both Islam and Christianity were brought to indigeneous people of the Phillipines by Westerners who helped convert the Filipinos. Yet, in taking a closer look at how Filiinos practice and understandtheir spiritual world. It is clear that they have created a unique combination of both western religions and indigeneous spiritual belief. It is important and valuable to understand the underneath of the notion of the Phillippines as being decidedly Catholic there rests unique local elements that shape Filipino religious life. The Moros are decidedly Muslim. Islam a major part of their identity and politics of their lives, yet they still

have another part of their identity that is connected with their being Filipino and Southeast Asian. Moreover, it is also to not overlook the fact that there is a small minority Muslim population in the Phillipines who have struggled for separation from the State."

Dengan demikian, adalah jelas, kepercayaan asli dan tradisi berpengaruh dalam tatanan kehidupan komunitas Islam maupun Kristen. Dan kondisi ini, menyebabkan kompleksitas dan kerumitan tersendiri ketika menjelaskan fenomena perkembangan Islam di Filipina, khususnya terkait dengan isyu konflik berkepanjangan di Filipina itu sendiri : mengapa konflik Filipina, terutama antara Islam dan Pemerintah sulit menemukan solusi. Ketidak-jelasan "*standing-position*" dari keduanya dikarenakan kemajemukan, multikulturalitas, dan "produk sintetik kultural yang berpengaruh pada ranah idiologi" menjadi *intervening variable* suasana politik Filipina sebagai entitas negara bangsa.

Sebelum masa kedatangan dan pendudukan kolonial Spanyol, daerah kawasan Asia Tenggara (yang diistilahi kawasan Nusantara), dipengaruhi oleh budaya Melayu Hindu (Hindu-Malayan), seperti Imperium HIndu Sri Vijaya (Sriwijaya) yang beribukota di Palembangu, Sumatera Selatan, Indonesia.[13] Pada zaman ini, budaya Hindu--yang haikatnya

---

[13] Kerajaan (Imperium) Sri Vijaya didirikan pada abad 7 oleh Kalinga Srisailam. Imperium yang beribuka di Palembangu merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia (Nusantara, saat itu). Bahkan, imperium terbesar di Pacific. Secara idio-kultural, Sri Vijaya (Sriwijaya) membawa misi menyebarkan budaya Hindu (*Hinduistic culture*) yang secara idio-historikal berasal dari India. Dengan

merupakan proses Indianisasi--menyebar ke berbagai "negara" ke hampir segenap penjuru kawasan Asia Tenggara, seperti ke Indonesia, Thailand, dan Semenanjung Malaya (Malacca), yang kemudian menyebar terus ke arah timur hingga ke Filipina. Artefak yang ditemukan di Luzon Selatan dan Mindanao, membuktikan bahwa pengaruh Sriwijaya sangat kuat di Filipina. "Many social custom current there show a likeness to the Indian ones. …India has most profoundly affected the Phillippines civilization. The Indian influence in Phillipines is explicable by the fact that was for 150 years a colony of Java-based Hindu Empire of Sri Vijaya".[14] Di Luzon, "idol of Padmapni Avalokiteshwar" mengindikasikan bahwa Funan, Shalendra, dan kerajaan Di Filipina, terutama di Sriwijaya yang kemudian diperkaya oleh budaya bersumber ajaran islam para pedagang muslim Gujarat, India yang bisa ditelusuri sejarahnya pada masa sebelum kedatangan pedagang Arab dan Eropa abad 15-16 masehi. Pengaruh Hindu melalui kerajaan Hindu yang dipimpin Raja atau Rajah memiliki pengaruh dalam sejarah pembentukan Filipina sebagai negara multikultural.Misalnya, penamaan Visayas di Filipina lahir saat penguasaan Raja

---

demikian, perluasan teritori Sriwijaya merupakan juga proses Indianisasi "*human touch*", tanpa "*physical force*" atau menghancurkan identitas dan budaya lokal. Sebaliknya, dilakukan untuk mendorong pengembangan potensi politik dan ekonomi masyarakat penduduk. Filosofinya (*world-view*) berdasarkan pada sikap saling bantu tidak berdasar prinsip "*conquest and domination*". Baca : www.hinduwisdom.info/Glimpses_XV.htm tentang A Glorious Hindu Legacy : Indic Influence in Southeast Asia". Melalui pendekatan ini, Indianisasi atau Hinduisasi berlangsung damai dan efektif. Majapahit adalah (lihat : Hinduism in the Phillipines,www.wikipedia.org/Hinduismin the Phillipines.

[14] Satyavrata R Patel, ***The Soul of India***, p.30.

Hindu Sriwijaya.[15]Seorang sejarawan, Jainal D. Rasul (2003 : 77) menyebut bahwa pada masa kejayaannya, Imperium Sriwijaya Hindu pada abad 10 memiliki pengaruh sangat luas, meliputi Sumatera, Semenanjung malaka, Jawa barat, Sulwesi, Maluku, Borneo, dan Pilipina, terumata Kepulauan Sulu dan Visayas hingga abad 13.[16]

Selain Sriwijaya berpengaruh terhadap peradaban Filipina, terutama bagian Selatan, demikian pula halnya Majapahit. Imperium talasokratik, Majapahit pada zaman keemasannya, yaitu pada kekuasaan Raja Hayam Wuruk (1350-1389) mengembangkan ekspansinya hingga hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Menurut Negarakretagama[17], pada masa raja Hayam Wuruk, di bawah Gajah Mada sebagai Patih (Perdana Menteri), terdapat 98 kerajaan di bawah kekuasaan imperium Majapahit, yang membentang sejak dari

---

[15] Imperium/Kerajaan Sriwijaya [juga disebut "Sri Vijaya" (asli Sankrit), "Sri Wichai", Thai] adalah imperium melayu talasokratik kuno yang beribukota di Sumatera (Indonesia) yang memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara yang berdiri pada abad 7 dan berakhir hingga abad 13 dikarenakan berbagai faktor, diantaranya karena faktor ekspansi Majapahit (Jawa). Sriwijaya menjadi pusat ekspansi agama Budha pada abad 8-12 Masehi. See : Srivijaya, dalam the free encyclopedia,

[16] Jainal D Rasul, *Agonies and Dreams : The Filipino Muslims and Other Minorities*, Quezon City : Care Minority, 2003, h.77.

[17]*Negarakretagama* (*Nagarakrtagama*, atau dikenal juga *Desawarnana*) adalah Eulogi Jawa Kuno (kakawin yang dicipta mengungkapkan pujian bagi Hayam Wuruk—Raja Majapahit) yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365. Negarakretagama berisi deskripsi rinci Imperium Majapahit pada masa jayanya, termasuk mengungkapkan peranan Hindu-Buddisme pada masa Imperium majapahit dengan mendeskripsikan tempat-tempat ibadah, istana-istana, dan tatacara peribadatan. Myron Malkiel dan Jirmounsky (1939), "The Study of The Artistic Antiquities of Dutch India", dalam ***Harvard Journal of Asiatic Studies 4***, Harvard-Yenching Institutes, 59-68. Lihat :www/wikipedia.org/wiki/Nagarakretagama.

Sumatera hingga Papua Nugini, terdiri dari wilayah Indonesia (sekarang), Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Timor-Timur, hingga Filipina Selatan.[18]Disamping, Majapahit juga menjalin hubungan kolaboratif dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, dan Vietnam. (Lihat : Peta Kekuasaan Imperium Majapahit berikut ini).

Karena itulah, Majapahit dikategorikan sebagai salah satu imperium terbesar di kawasannya, dan merupakan pula salah satu imperium terbesar dan terkuat dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara sehingga terkadang dijadikan sebagai patokan awal dari Negara Indonesia moderen.[19] Penguasaan Majapahit ini, secara kultural, meninggalkan berbagai tinggalan budaya (*cultural heritage*) di bekas negara kekuasaannya.

Perkembangan selanjutnya di Filipina, saat sebelum masuknya pedagang Arab ke Pulau Sulu pada tahun 1450 dan kehadiran kolonial Spanyol pada 1521 ke Filipina, maka daerah-daerah Filipina dikuasai oleh Rajas (Raja Hindu). Ajaran Hindu di bawah pemerintahan Kerajaan Namayan,

[18] Majapahit Overseas Empire, Digital Atlas of Indonesian History,

[19] M.C. Ricklefs, ***History of Modern Indonesia since c.1300***, 2^{nd} edition, Stanford : Stanford University Press, 1991, hal.19

Tondo, dan Maunila saat itu, diterima sebagai bagian dari masyarakat Filipina. Ajaran Hindu mempengaruhi pandangan, cara hidup tradisional orang Filipina. Banyak tinggalan Hindu terjumpai hingga sekarang. Dalam aspek bahasa sebagai bagian terpenting dari kebudayaan, ternyata pengaruh Hindu dan Budha sangat kuat. Jessica Klakring, seorang linguist, menulis bahwa salah *satu* dari bahasa-bahasa Austronesia pertama yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap bahasa Tagalog baik dalam aspek gramatika, morfologi, maupun semantika--adalah bahasa Sanskrit, yang tersebar melalui dua jalur, perdagangan secara langsung dan melalui gerakan budaya dari India lewat Semenanjung Malaka ke Filipina. Sebagai contoh, 25% kata-kata (istilah) bahasa dari beberapa bahasa di Filipina merupakan kata Sanskrit dan Tamil.[20]Penggunaan bahasa Pampangan, Visayan serta arca-arca Hindu di Filipina merupakan fakta sejarah pengaruh Hindu di negeri kepulauan in. Memang, pada saat masuknya

---

[20]Misalnya, dalam bahasa Tagalog (T) dijumpai kata/istilah berasal dari kata Sanskrit (S), seperti : budhi (T), bodhi (S) berarti kesadaran; dalita (T), dharita (S) = derita/penderitaan; dhuka (T), Dukkha (kemiskinan); guro (T), guru (S)=guru; mukha (T), mukha = muka, wajah; maharlika (T) mahardikka (S) = kemuliaan, yang mulia; bagay (T), vagai (Tamil) = sesuatu, dan tala' (T), tala (S) = bintang. Demikian pula dalam Bahasa Kapampangan (K) berasal dari Sanskrit (S), seperti kata : kalma (K), karma (S) = nasib; damla (K), dharma (S) = hukum agama; mantala (K), mantra (S) = doa; upaya (K), upaya (S) = kekuatan, kekuasaan; lupa (K), rupa (S) = wajah/rupa; Sabla (K), sava (S) = setiap; galura (K), garuda (S) = burung elang raksasa; laksamana/lacsamana (K), lakshmana = admiral. Dalam bahasa Tau Sug (TS) dijumpai berasal dari kata Sanskrit (S), seperti : suarga (TS), sorga (S) = surga; neraka (TS), neraka (S) = neraka; dan agama (TS), agama (S) = agama, ajaran. Demikian pula di bahasa lain, seperti bahasa Ibanag. Lihat : Juan R. Francisco (1964) ***Indian Influences in The Phillipines with Special Reference to Language and Literature***, Quezon City, University of Phillipines, dan Parauman S. Aspillera, (1956) ***Basic Tagalog***, Manila Time P ublishing Co.

Islam dan kehadiran Spanyol yang membawa ajaran Kristiani, banyak arca-arca dewa Hindu disimpan atau disembunyikan untuk menghindari penghancuran oleh agama baru yang *anti-cult image* tersebut. Sebagai contoh, “The Golden Tara”—patung Dewi Hindu Malayan bersila terbuat dari emas 21 karat seberat 4pound terdapat di Mindanao pada tahun 1917.Patung ini diperkirakan dibuat pada akhir abad 13 atau awal abad 14 oleh pematung lokal asal Jawa (karena saat itu, seniman Jawa terkenal sebagai pematung emas piawai). Selain itu, terdapat pula tinggalan artefak emas berupa Garuda, phoenix di Palawan. Sekarang disimpan di *Field Museum of Natural History*, Chicago.Namun demikian, walau pemeluknya kian berkurang karena konversi agama, “Hindu Temple” (yang dipergunakan oleh orang Sindhis) yang terletak di jalan Mahatma Gandhi dan “Khalsa Diwan Indian Sikh Temple” (tempat beribadah orang Panjabi), masih tegak dan fungsional di Manilai yaitu di daerah Paco-Pandacan—sebuah *enclave* India tradisional. Selain, juga terdapat 22 gurudwaras di seluruh Filipina serta beberapa aliran Hare Krishna tumbuh di negeri Kristiani ini.

Pengaruh Budhisme di Filipina, juga tak bisa diabaikan. Pengaruh Budhisme di Filipina, bisa dilihat sejak masa ekspansi Sriwijaya (Sri Vijaya) pada abad 12. Sebagai imperium thalassocratik Melayu, yang berbasis di pulau Sumatra (Indonesia Barat, sekarang), memiliki pengaruh besar terhadap peradaban Asia Tenggara, terutama pada daerah-daerah pesisir kepulauan baik dalam aspek perdagangan, agama, budaya, atau bahasa. Meskipun, dalam aspek agama,

Budhisme di Filipina merupakan agama relatif kecil (minor), namun tinggalan berupa rumah ibadat (vihara), seperti Mahayana dan Vajrayana, dan pemeluk Theravada, yang relatif cukup banyak dijumpai di Manila, Davao, Cebu, atau tempat lain. Selain itu, tinggalan dalam bentuk organisasi Budhisme, pusat dan kelompok-kelompok meditasi, seperti Soka Gakkai International,[21] merupakan bukti sejarah pengaruh Budhisme di Filipina. Di abad ini, wilayah Sriwijaya mencapai sebagian besar Sumatra, Semenanjung Malaka, Jawa Timur, Maluku, Borneo, dan Filipina terutama Kepulauan Sulu dan Visayas, selain pengaruh dari Thailand, Korea, dan Jepang. Data terkahir, pemeluk Budhisme sekarang mencapai sekitar antara 1 sampai 2 % dari total penduduk Filipina.

PERKEMBANGAN ISLAM DI FILIPINA

Muslim termasuk kelompok dominan di Filipina. Islam masuk ke Filipina sebelum Amerika dan Spanyol menginjak

---

[21] Soka Gakkai International merupakan organisasi/gerakan orang-orang Buddha (Buddhist) yang beranggotakan sekitar 12 juta di dunia. Anggota Soka Gakkai ini menekankan pada praktek atau pengamalan ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan, praktek agama, dan orientasi sosial dari Soka Gakkai berasal dari *Lotus Sutra* atau *Saddharma Pundarika Sutra* (salah satu Sutra Mahayana paling populer) berdasarkan pada ajaran seorang Rahib bernama Nicherern pada abad 13. Ajaran ini menekankan pada pemberdayaan individu, transformasi batin, dan spiritualitas sebagai kunci reformasi sosial. Ajaran ini Soka Gakkai Internasional ini memiliki 84 cabang, beranggotakan 12 juta tersebar di 192 negara. Lihat : Nariyoshi Tamaru, "Soka Gakkai in Historical Perspective" dalam David Machahek dan Bryan Wilson, eds., 2000, ***Global Citizens : The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World***, New York : Oxford University Press, h.24.

bumi Filipina, sehingga memiliki sejarah politik terlama di Filipina. Islamisasi di kepulauan Filipina merupakan bagian persebaran Islam di Asia Tenggara. Di Filipina, Islam tidak hanya diposisikan sebagai "agama wahyu" yang harus dijadikan sebagai "*way of life*", tapi Islam juga memperkenalkan sistem pemerintahan dan budaya yang lebih *sophisticated*. Islam memperkenalkan sistem politik dan pemerintahan baru, yaitu Kesultanan yang dipimpin seorang Sultan. Dalam pemerintahannya, Sultan mengakodasi Adat dan ajaran Islam sehingga melahirkan budaya hibridal yang merupakan produk budaya akulturatif hasil pertemuan antara Islam dan Adat. Karena itulah, memahami sejarah Islam Filipina tentu saja harus memahami Islam dan adat yang berkembang.

Dua perspektif untuk memahami Islam Filipina secara komprehensif. *Pertama*, menelusuri awal perkembangan Islam. Dalam konteks ini, diperoleh penggambaran bagaimana Islam pada awal kehadirannya di Mindanau dan Sulu. Kedua, adalah melihat Filipina sebagai hasil perjumpaan Islam, dengan budaya lokal, budaya Barat, dan Islam.

1. Islam Asia Tenggara dan Awal Perkembangan Islam Filipina: Hubungan Historik

Kehadiran Islam di Filipina tak bisa dilepaskan dari perkembangan Islam Asia Tenggara yang masih menjadi perdebatan. Di satu pihak, sejarawan Eropa, mengungkapkan bahwa awal masuknya Islam di Asia Tenggara dikarenakan terjadinya kontak perdagangan antara masyarakat Asia

Tenggara dengan Pedangang India. Sementara, versi sarjana muslim Asia Tenggara meyakini Islam tersebar di Asia Tenggara karena dibawa langsung dari Saudi Arabia di Timur Tengah. Sementara, sarjana lain mengklaim Muslim Cina yang memperkenalkan Islam lewat perdagangan.

Apapun sumbernya, atau siapa pun pembawanya, pengaruh Islam hadir di Asia Tenggara paling tidak sejak 600 tahun lalu, sekitar tahun 1400-an. Walau, sebagian sarjana meyakini awal kehadiran Islam di kawasan Asia tenggara terjadi sekitar tahun 1100 bersamaan masuknya pengaruh Islam di Aceh dan Sumatera Utara di Indonesia. Berdasarkan argumen historik ini, diasumsikan Islamisasi masyarakat Malaysia, Thailand Selatan, Indonesia, Brunei, dan Filipina bagian Selatan terjadi beberapa ratus tahun dari awal kehadirannya di kawasan ini. Islamisasi terjadi melalui proses akulturatif dengan keyakinan atau kepercayaan lokal pra-Islam masyarakat Asia Tenggara.[22] Anthony Reid, profesor Sejarah Universitas California, menyebut bahwa proses Islamisasi (dan Kristenisasi di Filipina) terjadi dalam waktu yang sangat cepat di Asia Tenggara, terutama pada periode 1550-1650-an. Pada periode ini, terjadi peristiwa sejarah penting dalam kaitannya pengaruh Islam dan Kristen di Asia Tenggara yang harus dicatat.

Pertama, pada masa initerjadi perdagangan global (global tradings) demikian pesat. Kondisi ini juga

---

[22] Misalnya, kepercayaan animisme dan dinamisme atau kepercayaan lokal nenek moyang masyarakat.

berpengaruh besar terhadap keramaian perdagangan di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara, yang pada gilirannya mempengaruhi kegiatan bisnis masyarakat asli kawasan ini. Para pedagang pendatang (Eropa dan Arab), disamping berdagang dalam pengertian sebenarnya, mereka juga membawa bentuk agama (keyakinan) baru, yaitu Islam dan Kristen. Kelebihan yang dimiliki agama baru ini, menjadi faktor pindahnya "*indigenous community*"[23] pemeluk kepercayaan lokal ke agama Kristen dan Islam. Keberhasilan pedagang Eropa dan Arab, pada peride ini, adalah meletakkan dasar keyakinan dan praktek ritual agama baru, yang kemudian melahirkan praktek sinkretisme.

Kedua, pada masa ini, terjadi secara signifikan penyebaran agama di Filipina—baik Islam oleh sarjana dan pedagang Arab, maupun Kristen oleh misionaris Spanyol. Dan, secara hampir bersamaan waktunya, Islam menancapkan pengaruhnya secara kuat di Indonesia Timur, terutama di wilayah kerajaan-kerajaan pesisir, seperti : Sulawesi, Lombok

---

[23] Asian Development Bank, mencatat bahwa "*Indigeneous community*" bisa dilihat dari konsep identifikasi diri yang meliputi : identitas kebahasaan, sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan ikatan-ikatan unik dengan wilayah nenek moyang (turunannya). *Indigenous community* (*people*) harus difahami sebagai identitas sosial maupun kultural yang berbeda dari masyarakat mainstream atau kelompok dominan, sehingga mudah dirugikan proses pembangunan. Atau kelompok masyarakat asli homogin yang terorganisir, memiliki ikatan komunal yang berada pada teritori tertentu, dan ikatan bahasa, kebiasaan, tradisi, ciri kultural dan cenderung resisten terhadap arus sosial, politik, budaya, dan agama bukan asli, serta terhadap kolonisasi, sehingga menjadi kelompok historis yang berbeda dari mayoritas Filipina. Lihat : Republic Acts No.8371 on ***The Indigeneous Peoples Rights Act*** (IPRA) of 1997, Chapter II, Section 3h.

Nusa Tenggara, Sumbawa, Kalimantan, Makassar, dan di kepulauan Sulu dan Magindanao (Provinsi Cotabato) di Filipina Selatan sejak 1603-1612.[24]

Ketiga, periode ini—sebagai pengaruh paska Perang Salib (Crusade War), Spanyol semakin memusuhi Islam di negerinya dan Spanyol menguasai muslim di Filipina sejak awal. Portugis, di pihak lain mengontrol perdagangan di Indonesia Timur. Portugis menjadikan muslim Indonesia sebagai musuh. Mereka menaklukkan dan menyerang muslim untuk mengontrol perdagangan kawasan ini. Muslim Asia Tenggara umumnya menolak dan menentang segala bentuk pengawasan dan penguasaan perdagangan oleh Eropa. Dan, kondisi ini, pada gilirannya, memecah Filipina menjadi dua kutub : Filipino Kristen dan Filipina Islam.

Keempat, perkembangan gerakan tasawuf (sufisme) di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia merupakan bagian penting dalam persebaran Islam di Asia Tenggara umumnya. Para sufis adalah para guru spiritual yang melakukan gerakan purifikasi ajaran dari animisme atau kepercayaan asli lokal. Dakwah dan pengajaran Al Qur'an yang dilakukan di kawasan ini, berandil besar membentuk dua bentuk khazanah kebudayaan yang dominan di Filipina, dikarenakan keyakinan sebelumnya yaitu Hindu dan Budha Theravadatidak meninggalkan khazanah tertulis (written legacies). Pendeta misionari Katolik meninggalkan warisan Bahasa Spanyol dalam berbagai dialek, walaupun umumnya

masyarakat Filipina tidak mengenal bahasa Spanyol. Di pihak lain, Islam meninggalkan tradisi melayu dan bahasa Arab,[25] dan tinggalan budaya (*cultural legacies*) lainnya dalam berbagai *genre*-nya : naskah keagamaan, seni-budaya keagamaan, dan berbagai benda artifaktual.

2. Akar Sejarah Islam Filipina

Islam merupakan agama monotheistik tertua di Filipina,[26] walau tentu saja bukan terkategori agama tertua.[27] Islam datang di Filipina sekitar abad 12 dan 14 Masehi bersamaan kedatangan pedagang muslim dari Persia, India bagian Selatan, dan sejumlah orang dari Kesultanan Malacca[28] di Kepulauan Melayu. Pada periode waktu tertentu, sebenarnya muslim Filipina merupakan salah satu kelompok dominandi negeri ini. Mereka mengarungi sejarah politik lebih dari 500 tahun, sehingga merupakan sejarah politik terpanjang di negeri ini dibanding kelompok lain. Bahkan secara kultural, terjumpai berkembangnya praktek ajaran Islam sinkretik produk kontak dan percampurannya dengan

---

[25] Anthony Reid, "Islamization and Christianization in Southest Asia : The Critical Phase, 1550-1565", dalam ***Southest Asia in the Early Modern Era : Trade, Power, and Belief***(Anthony Reid, ed.), New York, Cornell University Press, p.151-179.

[26]**http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the** Philippines

[27] Agama tertua di Filipina adalah Hindu, Budha Theravada, dan agama lokal (*indigenous belief*).

[28] Seorang ulama dan hakim Arab termasyhur, Karim al Makhdum, pada abad 14 bersama pedangan Arab tiba di Kesultanan Malaka (Malacca), berdakwah sehingga penguasa Malacca masuk Islam.

Adat.[29]Praktek sinkretik ini dalam prosesnya merupakan sumbangsih muslim terbesar terhadap bentuk atau tatanan politik di Filipina sekarang ini. Filipina merupakan negara demokrasi dengan sejarah panjang nuansa politiknya. Melihat keterkaitannya dengan sejarah budaya Filipina ini, maka untuk memahami sejarah perkembangan Islam, niscaya diperlukan pemahaman atau penelusuran etnologik secara komprehensif.

Perkembangan sejarah muslim Filipina tak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan Filipina secara keseluruhan. Dan, sebaliknya sejarah Filipina tak bisa lepas dari sejarah muslim Filipina, karena kontribusi dalam pembentukannya. Dr. Renato Constantino (1990), menggaris-bawahi dari studinya bahwa "…*no Phillipine history can be complete without a study of Muslim development*". Secara etno-kultural, ada dua alur perkembangan historik masyarakat

---

[29] Adat masyarakat Filipina dalam konteks ini terkait dengan kebudayaan (tradisi, bahasa, folklor, seni, kepercayaan) dari kelompok etnik Filipino (*ethnic Filipino groups*), Kelompok suku asli (*indigeneous groups*) dan sub-sub suku yang terdapat di Filipina, terutama Filipina Selatan (Mindanao). Sejak Islam masuk, masyarakat Mindanao terbagi dua kategori besar : Bangsa Moro dan Lumad. Penduduk Mindanao yang masuk Islam disebut Moro, sedang yang tidak masuk Islam disebut "Lumad", yang berarti "lahir di bumi" (*born of the Earth*) yang dianggap penduduk asli Mindanao—yang bukan Muslim juga bukan Kristen. Dilihat dari kebahasaannya (etnolinguistik), Moro terdiri dari 13 kelompok indigenous, yaitu : Maranau, Maguindanaon, Tausig, Yakan, Samal, Sangil, Molbog, Kalibugan, Kalagan, Palawani, Iranun, Jama Mapun, dan Badjao. Sedangkan, kelompok indigenous Lumad terdiri dari 18 subetnik, seperti : Bagobo Davao del Sur, Cotaboto Utara dan Selatan, Sultan Kudarat, Mansaka Davao del Norte, Mandaya Davao Oriental, Subanen Zamboanga, B'laan Davao del Sur, Maguindanao, T'boli Cotaboto Selatan, Tiruray Cotabato Utara. Lihat : ***Indigeneous People/Ethnic Minorities and Poverty Reductionin Phillipines,*** Regional and Sustainable Development Department, Asian Development Bank, Manila, Phillipines, June 2002

Filipina sebagai entitas dari *nation-state.* Pertama, fase perkembangan (kedatangan) muslim ke Mindanao dan Sulu.[30] Periode historik ini, sesungguhnya, merupakan penting dalam pembentukan Filipina sebagai negara bangsa. Namun, kolonialisme Barat mendistorsi realitas sejarah ini demi kepentingan politik, ekonomi, dan misionarisnya. Kedua, fase perkembangan kedua yang ditandai oleh terbangunnya masyarakat Filipino Hispanik,[31] pada masa Pemerintahan Kolonial. Penduduk Hispanik di Filipina menggunakan bahasa Spanyol. Interaksinya dengan suku-suku lain (yang sudah menetap di Filipina sebelumnya) melahirkan budaya hispanik yang diwarnai oleh akar budaya Eropa dan Amerika Latin (Spanyol-Meksiko). Di Filipina, pengaruh budaya Hispanik cukup mewarnai bahasa, seni-budaya, dan tradisi dan keagamaan.Dan uniknya, unsur-unsur kebudayaan Hispanik (Spanyol Eropa dan Spanyol-Meksiko) secara akulturatif bisa bercampur dengan budaya lokal, sehingga membentuk "budaya Filipino" yang berlaku hingga kini.

---

[30] Mindanao dan Sulu merupakan tempat asal muasal muslim Filipina. Keduanya berlokasi di bagian selatan Filipina dan merupakan posisi yang strategik, yang menghubungkan pelayaran antara kawasan Timur Jauh dengan Malaka, dan berdekatan dengan Sulawesi Utara dan Negara Sabah. Selain itu, secara ekonomik, Mindanao merupakan pulau yang sangat subur untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan, disamping kaya dengan sumber alamnya, seperti : emas, gas, mineral, dsb. Sementara, kepulauan Sulu kaya sumber alam gas dan minhak, selain kaya produk kelautan, seperti ikan (tercatat 50 % lebih, ikan tuna dan sarden diambil adri laut Sulu.

[31] Masyarakat Filipino Hispanik adalah penduduk Filipina keturunan Spanyol dan Portugal, atau keturunan Amerika Latin. Filipino Hispanik, awalnya, dibawa Spanyol atau pedagang Portugal yang kemudian menjadi penduduk Filipina. Free Mirriam Dictionary

Dalam bahasa, dijumpai banyak nama-nama atau istilah yang berasal dari bahasa Spanyol Hispanik dan bahasa asli Filipina, sejak nama-nama kota/tempat, nama orang, nama hari-hari agama, seni, sastra, musik, jenis masakan, dsb.[32]

Namun demikian, walaupun Mindanao merupakan "*homeland*" muslim Filipina, namun dalam perkembangannya, penduduk muslim Filipina sebagian besar mendiami Mindanao bagian barat dan Kepulauan Sulu. Di kepulauan utama Mindanao sendiri, penduduk muslim sebagian hanya mendiami propinsi Lanao dan Maguindanao. Sisanya tinggal di Zamboanga Peninsula, Cotabato Utara, Cotabato Selatan,Sutan Qudarat, Davao Oriental, Davao del Sur dan Pulau Sarangan. Di kepulauan Sulu, muslim dominan tinggal di tiga provinsi kepulauan yaitu provinsi : Basilan, Sulu dan tawi-Tawi. Secara keseluruhan, komunitas muslimFilipina—walau tinggal relatif tersebar—terintegrasi oleh faktor idiologik maupun geografik.Muslim di bagian selatan, misalnya, secara kultural memiliki hubungan dengan komunitas muslim di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Pattani Thailand selatan.

---

[32] Nama tempat seperti nama provinsi : Nueva Vizcaya, Quezon, Laguna, Negros Occidental; nama kota, seperti : Medellin,, Prosperidad, Bullones, La Trinidad, La Paz, Esperanza, Sevilla, Zaragoza. Nama orang, seperti nama-nama yang terdapat dalam "Catalogo alfabetoco de appellidos" (Katalog Alfabetik Nama orang), seperti : de los Santos, del Rosario de la Cruz. Nama hari besar agama, seperti : "Santo Nino" (Jesus Anak Suci), "Patrona" (Wanita Suci), Dia de los Muertos" (Hari Kematian), dsb. Nama-nama jenis masakan sperti : Avocado, Calabaza, Menudo, Pastel de lengua, Albondigas, Chorizo, Empanadas, Mazapan, dsb. Lihat : wikipilipinas.org/index.php. Hispanic culture in the Phillipines.

Kelompok Etnik Muslim Filipina

Secara sosiokultural, muslim Filipina, terdiri dari 13 (sebelas) kelompok etnik. Masing-masing memiliki bahasa sendiri. Namun, beberapa kelompok etnik (suku) menggunakan satu bahasa sebagai lingua-franca-nya, dengan tiga variasi dialek, yaitu suku Maranao, Iranun, dan Maguindanaon. Kesebelas suku pemeluk Islam di Filipina adalah Maranao, Maguindanao, Iranun, Tausug, Yakan, Sama, Sangil, Kaagan, Kalibugan, Palawan, dan Molbog. Suku-suku tersebut, disamping memberikan kejelasan latar historik tentang kapan ada dan "*indigeneous property*", seperti bahasa, seni budaya, sistem sosial pra-Islam, juga memberikan fakta lain terkait "the root of political standing" perkembangan muslim dalam konteks masyarakat Filipina sebagai entitas bangsa yang kini tergambar. Untuk itu, berikut ini diungkapkan secara ringkas suku-suku tersebut.

a. Suku Maranao

Maranao berarti danau. Suku Maranao terkonsentrasi tinggal di kawasan Lanao, yang disebutnya sebagai danau terbesar di Filipina. Maranao merupakan sebuah tempat strategik karena berada di bentangan pantai Iligan di sebelah utara dan pantai Illana di sebelah utara. Mempergunakan bahasa Maguindanaon dan Iranun. Selama masa kolonialisme, suku Maranao seperti suku lain pemeluk Islam, berani menentang dan melawan Spanyol di bawah bendera Kesultanan Maguindanao sampai titik darah penghabisan

untuk membela tanah kelahirean dan Islam sebagai keyakinannya. Dalam selama periode kolonial Spanyol, Maranao bersatu di bawah kesultanan Maguindanaon. Tapi, kemudian, saat Pemerintah Kolonial Amerika, Serikat memigrasikan orang Filipinos ke kawasan Lanao yang sudah menjadi daerah konsentrasi Maranao. Lima puluh tahun setelah itu, terbangunlah kawasan Lanoa sebagai daerah hunian yang terbentuk dari 2 (dua) bagian Lanao, yaitu Del Norte dan Del Sur sejak tahun 1960-an.

Dalam perkembangan peradaban Islam, Maranao merupakan tempat perkembangan budaya Islam relatif baik. Maranao juga kaya dengan khazanah lektur Islam, misalnya "Darangan" yang merupakan "*civilizational point*" dari tingkat peradaban tertentu dari Muslim Maranao. Universitas Negeri Mindanao pun berlokasi di Marawi ibukota Lanao. Sebagian besar pemimpin besar muslim Mindanao adalah produk dari perguruan tinggi universitas ini, walau 60 % guru besar perguruan tinggi ini pemeluk Kristen.

Masyarakat Maranao tergolong masyarakat tertutup. Semua wali kota Lanao der Sur adalah orang setempat, dan tertutup bagi orang luar. Gaya hidup (life style) masyarakat Maranao mengikuti tradisi atau gaya hidup Malong dan Abaya—yang belum terpengaruh oleh Barat. Kontak dengan masyarakat luar terjadi melalui kota Ilagan dan Malabang (40 menit sampai 1 jam perjalanan darat dari Lanao), termasuk kontak dengan masyarakat Kristiani.

b. Suku Maguindanao

Nama suku Maguindanao berasal dari nama dinasti yang memerintah hampir seluruh wilayah pulau Mindanao, terutama orang Cotabato, disusul muslim yang datang dari lembah Pulangi yang mendiami Mindanao barat daya. Masyarakat Maguindanao memeluk Islam sejak perempat terakhir abad 15. Islamisasi penduduk Pulangi seluruhnya terjadi saat datangnya Pangeran Syarif Kabungkuan, dari Kesultanan Johor ke Mindaanao setelah jatuhnya Malacca pada sekitar tahun 1511.

Kontribusi terbesar Maguindanao bagi peradaban Asia Tenggara adalah keberadaan Kesultanan Maguindanao dan Buayan yang berdiri secara berbarengan waktunya. Penguasaan Kesultanan Maguindanao inilah yang kemudian menjadi titik awal perlawanannya terhadap kolonial Spanyol. Sejak lama kolonial Spanyol berupaya menbangun pemukinan Filipino, namun baru tahun 1912 saat pendudukan Amerika, pemukiman Filipino terbangun. Sejak saat tersebut, Maguindanao menghadapi dua kekuatan politik, yaitu kolonialisasi dan Kristenisasi yang terjadi hingga awal abad 20-an. Maguindanao berperang tanpa bantuan asing. Dan, pada tahun 1970-an, tiga-perempat tanah Mindanao jatuh ke tangan penduduk Filipino, terutama orang Ilongo dan Cebuano. Pemerintah Manila hanya memberi 5 (lima) propinsi bagi masyarakat muslim Filipina, yaitu : Maguindanao, Cotabato, Cotabato Selatan, Sultan Qudarat, dan Sarangani.

c. Suku Iranun

Suku Iranun mendiami daerah perbatasan antara provinsi Lanao del Sur dan Maguindanao. Mereka mengaku sebagai suku asli. Bahasa suku Maguindanao dan Maranao berakar kuat pada bahasa ibu Iranun.

d. Suku Tasaug

Nama suku Tasaug diambil dari kata *tau* (orang, rakyat, *people*) dan *ma-isug* (berani). Jadi Tasaug berari orang atau masyarakat yang berani. Nama yang disematkan ini, secara historik, memang tepat, karena masyarakat Tasaug memiliki keberanian luar biasa dalam melawan berbagai bentuk eksploitasi, peminggiran maupun eketidak-adilan. Sebelum Islam masuk, suku Tasaug sudah membangun pusat pemerintahan (centra *Government*). Saat Islam masuk, para pemimpin suku Tasaug langsung menerimanya sebagai keyakinan barunya, dan menerapkannya ajaran Islam (nilai dan norma Islam) sebagai model pemerintahannya. Demikian pula, masyarakat Tausag secara kesuluruhan menerima Islam sebagai agama mereka. Perkembangan Islam di Sulu tidak mengalami rintangan berarti sehingga pada abad 13 pertengahan Islamisasi politik lokal terbangun. Kondisi inilah yang kemudian menjadi embrio berdirinya Kesultanan Sulu pada tahun 1450. Banyak pemimpin Tausug ditugaskan ke luar Sulu untuk memperkuat pengaruh Kesultanan Sulu. Peristiwa ini, yang kemudian menjadi cikal bakal

pertumbuhan suku Tasaug muslim di pulau-pula sekitarnya, seperti Tawi-Tawi, Palawan, Basilan, Zamboanga, dan Sabah.[33] Dan, Hingga kini, daerah-daerah ini menjadi tujuan migran Tasaug yang tergantikan oleh konflik dan peperangan antara Muslim dan pemerintah.

e. Yakan

Suku Yakan tinggal di propinsi Basilan. Seperti muslim di propinsi lain, Basilan juga dijadikan daerah target Kristenisasi sejak era kolonialisme Spanyol. Kesuburan dan kekayaan alam Basilan, menjadi salah satu faktor nafsu kapitalis untuk mengeksploitasi sumber propinsi ini, serta menjadi target Kristenisasi. Komunitas Kristen, seperti Isabela, Maluso, dan Lamitan berbondong mendiami Basilan. Akhirnya, sebagian besar tanah daerah strategik dimiliki oleh Filipinos. Muslim Yakan di Basilan menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan tergantikan oleh Filipinos Kristen. Di tengah dinamika kehidupan konfliktual, masyarakat Yakan tetap memiliki komitmen dan semangat tinggi untuk tetap melestarikan budayanya sebagai salah satu kekuatan yang masih dimilikinya. Namun persoalan ke depan adalah bagaimana menanamkam semangat pada generasi muda untuk menyadari akan hak-haknya untuk membangun di negerinya.

---

[33] Hannbal Bara, ***The History of the Muslim in Phillipines***.

f. Suku Sama

Nama suku ini ber asal dari kata Melayu, yang berarti "sama-sama" (togetherness) atau "usaha bersama". Suku Sama tinggal membentang di pesisir kepulauan Sulu, terutama di Pulau Tawi-Tawi. Suku ini terdiri dari lima subetnik, yaitu Sama Bajau, Sama Balimbing, Sama Simunul, Sama Sapa-Sapa, Sibutu, dan Sama Bangingi—yang merupakan subetnik terbesar dari suku Sama. Mereka memiliki mata pencaharian sama sebagai nelayan, mencari ikan di laut.Walau begitu, mereka hidup rukun, saling tolong-menolong, dan mengembangkan tradisi kebersamaan. Nyaris tidak ada tokoh elit dari suku Sama. Mereka, hampir semua berada pada strata sosial rendah (*low social class*), sehingga mereka tidak memiliki akses politik luas. Sedikit berbeda dari subetnik Sama lainnya, Sama Bangingi memiliki akses lebih baik.

g. Suku Sangil

Suku Sangil berasal dari Sangihe, kepulauan yang membujur di laut Sulawesi, selatan laut Mindanao. Migrasi mereka ke propinsi Sarangani dan kawasan pantai Davao del Sur dan Cotabato Selatan berlangsung sebelum Islam tersebar di Asia Tenggara. Suku ini memeluk islam setelah sering berhubungan dengan Mindanao yang sudah memeluk Islam dan berkomunikasi dengankomunitas muslim Maguindanao dan Sulu pada abad 14-an. Suku Sangil berkomunikasi dengan Bahasa (*Melanesian language*) dan bahasa Tasaug. Sangil memiliki akses politik dengan pimpinan pusat yang terlibat

dalam peperangan melawan Belanda dan Spanyol, serta beraliansi dengan Kesultanan Maguindanao. Pertumbuhan kesadaran politik dan keagamaan yang tinggi menginspirasi Sangil untuk menuntut otonomi. Akhirnya, suku Sangilpada tahun 1992 berhasil memperoleh hal menentukan diri sebagai propinsi Sarangani.

h. Suku Kagaan

Suku ini menempati sebagian besar daerah Davao. Perkembangan Islam pada masyarakat Suku Kaagan ini merupakan hasil kontak dengan Kesultanan Maguindanao, dan dipetrkuat oleh hadirnya beberapa kelompok Suku Tasaug. Karena itu, bahasa masyarakat Suku Kaagan banyak berakar pada bahasa Tasaug. Dan, karena organisasi sosial masyarakat Kaagan terbilang tidak memiliki akses kuat dan tidak maju, maka sebagian besar masyarakat suku ini tergolong termarginalkan (marginalized) dan tertinggal jika dibanding dengan di Lanao dan Sulu.

i. Suku Panimusan

Suku Panimusan merupakan penduduk muslim pertama di pulau Palawan sebagai pengaruh kontak dengan Kesultanan Sulu. Banyak orang Tausug datang ke pulau ini menyebarkan Islam kepada masyarakat lokal. Mereka sebagian besar mendiami bagian selatan pula Palawan, yaitu Batarasa, Rizal, Quezon, Espanola, dan Brooke's point. Di kota-kota ini, muslim cenderung dominan dan memiliki pengaruh politik relatif kuat. Namun demikian, di pula

Palawan terdapat juga masyarakat muslim yang terisolasi, seperti terjumpai di Narra, Roxas, Taytay, dan Aborian.

j. Suku Kolibugan

Suku Kolibugan termasuk subetnik Subanun—orang asli penghuni pedalaman Semenanjung Zamboanga. Nama "Kolibugan" (bahasa Sama yang berarti "turunan separoh") merupakan sebutan orang Suku Tausug dan Sama bangingi yang dilekatkan bagi orang Suku Subanun yang sudah masuk Islam. Ini dikarenakan budaya (tradisi) asli Suku Kolibugan mengalami perubahan (berakulturasi) dengan Islam melaui kawin-mawin, sehingga menjadi bentuk budaya capuran (separoh-separoh) antara budaya lokal dengan budaya Islam. Sekarang, sebutan dipergunakan bagi semua orang Subanun yang masuk Islam. Suku Kolibugan kurang memiliki akses politik kuat dengan pemerintahan pusat.

k. Suku Molbog

Sebagian besar masyarakat Suku Molbog mendiami pulau-pula Balabac yang terletak di ujung selatan Pulau Palawan. Masyarakat Suku Bulbog memeluk agama Islam karena pengaruh dari para pendakwah Brunei pada sekitar abad 15-an yang datang dari sisi timur Semenanjung Malaka dan Borneo (Kalimantan). Pada masa itu, Kesultanan Brunei melebarkan pengaruhnya ke Filipina dan Palawan. Dan, Kesultanan Sulu membantu penguatan pengembangan Islam pada masyarakat Molbog.

Dari uraian historik tentang suku-suku pemeluk Islam, terdapat sejumlah catatan sementara. Pertama, perkembangan Islam di Filipina merupakan produk kontak, pengaruh, dan bantuan dari Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. Dalam konteks histoorik ini, pemahaman atau penelusuran terhadap keberadaan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei menjadi penting, karena merupakan bagian tak terpisahkan dari "*historical blend*" perkembangan Islam di Filipina umumnya. Pemahaman akan kedua kesultanan tersebut, dapat menuntun kepada pemahaman akan "*historical linkage*" dari keberadaan Islam Asia Tenggara. Kedua, keberadaan muslim pada masyarakat suku-suku muslim Filipina sebagian besar kurang memiliki akses kuat dengan Pemerintah. Mereka, sebagian besar terpinggirkan dan terdiskriminasi oleh Pemerintah pada zamannya—baik pada masa Kolonialisme Spanyol, Amerika Serikat, maupun Pemerintah Filipina itu sendiri. Masyarakat muslim, umumnya, terdiskriminasikan jika dibandingkan dengan suku-suku penganut Kristiani (Filipinos), sehingga banyak diantaranya yang "tertinggal", "terbelakang" dalam berbagai aspeknya : sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya.Ketiga,modus Kristenisasi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara cenderung memiliki kesamaan pola, strategi, dan metoda "misionari" yang terjadi di hampir Kristenisasi berlangsung, seperti di indonesia. Kristenisasi di Indonesia maupun di Filipina dilakukan dengan model sama. Pertama, strategi (pola, pendekatan, metoda, *conditioning*) Kristenisasi dilakukan melalui program ekspansi teritori oleh Kolonial. Misi tiga G (*Gold, Gospel*, dan *Glory*) diterapkan di kedua

negara kepulauan dan majemuk tersebut. Strategi ini berakibat pada terjadi proses pemiskinan, penerbelakangan budaya, dan konversi agama disamping meninggalkan warisan kultur politik konfliktual.Kedua, Kristenisasi dilakukan dengan cara pemindahan penduduk beragama Kristen ke daerah subur pemeluk Islam. Pendudukan komunitas baru Kristen (yang *Westernized culture*) ke daerah muslim (Islam dan lokalitas), dengan sendirinya menyebabkan terjadinya perubahan cepat budaya masyarakat menjadi "kebaratan". Sebaliknya, Islam dan tradisi lokal kian kehilangan pengaruhnya. Ketiga, strategi Kristenisasi di kedua negara dilakukan melalui program Westernisasi ("Pembaratan") dengan tujuan menghancurkan tata nilai budaya Islam dan tradisi lokal (yang cenderung lebih adaptif dengan Islam). Sementara perlakuan Westernisasi yang dilakukan kolonial Spanyol terhadap umat Kristiani sangat prokemajuan. Penyediaan sarana keagamaan/kebaktian, pengembangan ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat Filipino dilakukan oleh kolonial Spanyol maupun Amerika dalam upaya mem-Barat-kan penduduk. Dalam situasi ini, penduduk Filipina Kristen (Filipino)merupakan warga yang diuntungkan. Sebaliknya, muslim meruapak pihak paling tak diuntuingkan.[34] Keempat, secara umum, terjadi

[34] Fakta sejarah menunjukkan bahwa kemajuan karya kolonisasi dan perluasan (perkembangan Kristianitas yang sangat signifikan. Pada era kolonisasi Spanyol ini, Filipino (orang Filipina Kristen) memperoleh pelayanan keagamaan yang sangat baik, disamping memperoleh fasilitas pembangunan (bagi Filipino) yang menguntungkan. "Church and State were inseparably linked in Spanish policy, with the state assuming responsibilty for religious establishments". Ini sebuah perlakuan terbalik kepada pemeluk Islam. Tercatat, pada banyak perguruan tuinggi berkualitas

kecenderungan bahwa Islam di kedua negara merupakan komunitas agama yang memiliki komitmen, semangat, dan gerakan dominan untuk melakukan perlawanan terhadap setiap bentuk kolonialisme yang merongrongnya. Muslim di kedua negara merupakan garda terdepan dalam perlawanannya terhadap Kolonial yang ditetapkan sebagai musuh.[35]

4. Kerajaan Sulu dan Perkembangan Islam Filipina.

Kesultanan Sulu adalah komunitas muslim pertama di belahan selatan Filipina yang berdiri pada tahun 1450.[36]

---

didirikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Kristenisasi, sehingga "Filipinos were among the most educated subjects in all of Asia".(Roland E. Dolan, Ed., 1991-4), ***Phillipines : A Country Study***, Washington, GPO for the Library Congress). Pada tahun, 1590 Colegio de Manila (yang kemudian berubah menjadi Universidad de San Ignacio, universitas kerajaan dan pontifikl), didirikan oleh organisasi Jesuit. Mereka juga dirikan "Colegio de San Ildefonso", pada 1595, dan Colegio de San Jose (1601) yang kemudian pada tahun 1859 menjadi Ateneo de manila University. Bishop Miguel de Benavides mendirikan Universidad de Santo Tomas di Manila (1611). Di lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh organisasi Kristiani tersebut, tidak hanya menawarkan studi topik-topik keagamaan (religious subject-matters), namun juga subyek ilmu pengetahuan, seperti fisika, kimia, matematika, dan sejarah. Di Universitas SantoTomas, misalnya, matakuliah teologi, filsafat, dan hiumaniora menjadi mata kuliah diberikan pada awal pengajaran. Demikian pula, kolonial Spanyol dan Amerika juga mengembangkan pertanian, perkebunan, dan manufaktur dengan memperkenalkan teknologi yang berkembang di negara maju (Eropa dan Amerika).

[35] Secara teologik, ini cenderung disebabkan karena Islam mengajarkan untuk membela tanah air yang dikategorikan sebagai bagian dari iman seseorang. Selain itu, secara politik-doktriner, ada kecenderungan pola penyebaran Kristen "selalu" dibawa oleh Kolonial (Eropa). Karena itu, secara politik-doktriner, Kolonial dan Kristen di kedua negara sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, atau sebagai kesatuan yang melekat.

[36] Sulu dan beberapa "kerajaan" di sekitarnya diperkenalkan kepada agama Islam oleh pedagang Cina dan arab. Pedagang muslim Cina bergiat dalam perdagangan lokal, kesultanan memiliki hubungan dengan

Berdirinya Kesultanan Sulu ("Sulu Dar al-Islam") ini berpengaruh besar berlangsungnya Islamisasi pada institusi asli Filipina (*indigenous institution*) pada beberapa aspek kehidupan terkait keyakinan, kekerabatan, perkawinan, organisasi sosial, maupun seni-budaya. Namun demikian, Islamisasi yang digerakkan oleh Kesultanan Sulu tidak mendestruksi secara revolusioner tatanan kehidupan sebelumnya. Islamisasi yang dikondisikan oleh Kesultanan Sulu melalui pendekatan, diantara melalui dakwah[37] dan perdagangan, berlangsung tanpa merusak dasar-dasar kehidupan sebelumnya. Berbagai pendekatan dan metoda dakwah dilakukan untuk melakukan transformasi secara perlahan, alomodatif, adaptif dengan kondisi sosio-kultural masyarakat dan lokalitas.[38] Dengan cepat, Islam mampu mengembangkan pengaruhnya secara kuat di Filipina.

Kesultanan Sulu terkategori sebagai kesultanan multi-etnik, tidak berbasis pada kelompok tunggal, atau dari satu

---

[37] Pada tahun 1380, Karim al-Makhdum, seorang pedagang dan sufi, tiba di Pulau Simunul dari Malacca untuk berdakwah sambil berdagang. Ia adalah orang kedua yang berdakwah di pulau ini, sejak Tuan Masha'ikha. Makhdum mendirikan masjid "Syekh Karimal Makdum" di Tubig-Indagan, Simunul (sebagai masjid pertama di Simunul bahkan di Filipina). Ia juga berdakwah di berbagai pulau di laut Sulu, sehingga di tempat-tempat tersebut berdiri masjid sebagai tanda penghormatan kepadanya atas pencerahan yang dibangun. Ia meninggal di Sulu dengan meninggalkan pengaruh cukup besar bagi sejarah perkembangan islam Filipina : mengubah tradisi, kebiasaan, keyakinan, dan hukum politik ke dalam tradisi Islam.

[38] Kondisi sebelum Islam, Sulu didiami oleh beragam penduduk dengan ragam budaya (tradisi budayanya), yang dikuasai oleh tiga kerajaan, yaitu Kerajaan Buranun, Kerajaan Tagimaha, dan Kerajaan Baklaya. Sistem sosio-politik yang berlaku pada zaman itu adalah kerajaan (rajahship), kedatuan (datuship), tuanship, dan timwayship. Tuan Masha'ikkha mengganti komunitas Islam di pulau ini.

dinasti. Didirikan oleh Hasyim Abu Bakar (Abu Bakar Abirin) yang beristerikan Paramisuli, putri Rajah Baguinda pendatang awal di Sulu asal Minangkabau. Hasyim Abu Bakar, kemudian menjadi Sultan Pertama yang bergelar Paduka Mahasari Maulana al Sultan Syariful Hasyim dilaporkanberasal dari Sumatera. Ayah Hasyim adalah keturunan Arab Hadramaut yang masih memiliki garis keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Sementara ibunya adalah putri Kesultanan Johor Malaysia. Pada masa keemasannya, abad 18 wilayah Kesultanan Sulu meliputi seluruh Semenanjung Zamboanga, Basilan, Tawi-Tawi, Palawan, Sabah selain Sulu itu sendiri. Dan, pada periode yang sama, Kesultanan Sulu menjalin kerjasama intens dengan kerajaan (kepangeranan, kadipaten) muslim tetangganya, seperti : Manila, Cebu (sebelum era kolonialisme Spanyol), Buayan, Maguindanao, Makassar, Batavia, dan juga Cina[39], baik kerjasama dalam perdagangan, persahabatan, maupun aliansi militer dengan saling tukar menukar duta (ambasador, perwakilan kerajaan/kesultanan). Menurut Dr Majul, seorang sejarawan, menegaskan bahwa sejak 1578 hingga 1927, Kesultanan Sulu adalah garda terdepan (*the fore-front*) dalam perjuangannya melawan kolonialisme dan perjuangan untuk peroleh kebebasan negaranya. Kesultanan Sulu mampu bertahan dari dua gelombang kolonialisme : Spanyol dan Amerika Serikat. Kesultanan Sulu mampu mempertahankan

---

[39] Dengan dinasti Ming melalui pertukaran upeti sebagai tanda penghormatan, persahabatan. Bahkan, Pemimpin Sulu, Paduka Batara dan putranya pindah ke Cina dan wafat di negeri ini, dan muslim Cina-lah yang membesarkan anaknya.

status politiknya sebagai kesultanan independen sejak berdirinya 1450 hingga 1936.

Berikut ini digambarkan secara ringkas alur perjalanan sejarah Kesultanan Sulu.

Tabel 1 :

Alur Sejarah Kesultanan Sulu (1450-1927)

Tahun	Peristiwa Sejarah Penting
1450	(Syekh) Hasyim Abu Bakar tiba di Sulu, dirikan Kesultanan Sulu, dan menjadi Sultan Pertama
1457-1480	Pemerintahan Kesultanan Sulu oleh Sultan Syed Hasyim Abu Bakar
1470	Penaklukan Imperium Majapahit oleh muslim
1512	Pelaut Portugis tiba di Mindanao
1519-1579	Pemerintahan Kesultanan Sulu oleh Sultans Amir ul-Ulama, Mu'izzul Mutawa Din & Nasir ud-Din
1521	Ferdinand Magellan, penjelajah Portugis temukan kepulauan San Lazaro (sekarang pula Samar) di Filipina. Kemudian, pindah ke Mindanao. Pada tahun ini, juga dirayakan upacara Katolik Roma menginjakkan kaki pertama di bumi Filipina. Di bulan yang sama (April 1521), Magellan mengkristenkan Raja Cebu, Humahon bersama keluarga dan 800-an rakyatnya.
1565-1663	Perang Moro ke Empat
1569	Sultan Brunei, Syaiful Raijal mengajarkan al Qur'an di Palawan, Sulu, selain di Sarawak dan Borneo.
1570	Rajah Bongsu Adapati Sulu menjadi Sultan Sulu Mawallil wasit nikah dengan adik perempuan Sultan Syaiful Raijal.

1571	Spanyol menguasai Kerajaan Maynila dan Kerajaan Tondo, dan membangun Manila sebagai ibukota Hindia Timur Spanyol (*Spanish East Indies*).
1591	Spanyol dirikan Cathedral lengkap dengan Istana Episcopal yang besar dan mewah, dan Monateries Augustinian, Dominican, Franciscan, serta rumah tinggal (asrama) para Jesuit.
1600-1640	Pemerintahan Sultan Mawallil Wasit (Rajah Bongsu)
1600	Kapten Juan Gallinato menaklukkan Jolo dengan 200 tentara.
1600	Panglima Abdullah dari talipao menyerang Kristen Iloilo.
1628	Orang Spanyol Manila kembali menyerang Sulu.
1629	Kesultanan Sulu mengirim ekspedisi di bawah Datu Acheh untuk menyerang pemukiman Spanyol di Camarines, Samar, Leyte, dan Bohol.
Maret 1630	Tentara Spanyol kembali menyerang Jolo dengan kekuatan 2500 personel.
1631	Tentara Sulu melancarkan serangan untuk menguasai pulau Leyte, pusat kekuatan Spanyol.
1632	Sultan Maguindanao, Kudarat, menikah dengan putri Sultan Wasit Sulu untuk memperkuat aliansi dua kesultanan.
1634	Aliansi kesultanan Sulu dan Maguindanao memobilsasi 1500 tentara untuk menyerang pemukiman yang dikuasai Spanyol di Dapitan, Leyte, dan Bohol.
1635	Garnisun militer Spanyol dibangun Samboangan untuk penaklukan Sultan Maguindanao, Kudarat
1636	Datu tegal, adik Kudarat mengajak para bajak-laut Moro dari Mindanao, Sulu, dan Borneo Utara menguasai daerah pantai Visayas.
1637	Gubernur Manila, Jendral Sebastian Hurtado pimpin ekspedisi menyerang Kudarat dan Tagal di Lamitan

	dan Lian.
1646	Jolo dikuasai Spanyol
1640-1658	Pemerintahan Sultan Nasir ud-Din
1640	Sultan Kudarat, Rajah Buhayen, bersama Rajah Buhisan digabung dalam Kesultanan Magindanao
1645	Sultan Wasit menyapu bersih garnisun Sp[anyol di Jolo
April 1645	Pemerintah Spanyol Manila menanda-tangani perjanjian perdamaian (peace-treaty) dengan Sultan Sulu Nasiruddin (pengakuan Spanyol atas kekuasaan Sulu membentang dari Tawi-Tawi, Tup-Tup, hingga kepulauan balabac.
1648	Gelombang kedua pendeta Jesuit dikirim Spanyol ke Jolo mengembangkan Roman Catholicism di Sulu.
1648	Perjanjian pembagian teritori Spanyol-Belanda ditanda-tangani.
1649	Kembali di bawah komando Sultan Nasiruddin, garnisun Spanyol di Jolo dikuasai.
1658-1663	Pemerintahan (Kesultanan Sulu) Sultan Salahuddin
Juni 1662	Sultan Brunei, Abdul Hakkul Mubin menghadiahi Sultan Sulu secara de facto Salahuddin Bakhtiar Pesisir Borneo Timur Laut
1663-1704	Pemerintahan Kesultanan Sulu, Sultan Sahabuddin dan Mustafa Shafiuddin
1703	Sultan Sulu Mustafa Shafiuddin menghadiahi Palawan kepada Sultan Mindanao Kudarat.
1704-1734	Kepemimpinan Sultan Badaruddin
1717	Sultan Badaruddin mengirim utusan ke Kaisar Cina untuk peroleh dukungan militer
1718-1772	Peride ke lima Perang Moro
1720	Sultan Badaruddin mengutus Datu Bendahara dan Datu Nakhuda ke batavia untuk memperbaharui permintaan bantuan militer Belanda, dan bersama

	dengan kekuatan Kesultanan Maguindanao menyerang Fort Pilar, tapi gagal.
1734-1735	Kepemimpinan Sultan Nasaaruddin
1735	Spanyol Manila kembali menginvansi Jolo
1735-1748	Kepemimpinan Sultan Muhammad Alimuddin
1737	Sultan Alimuddin menanda-tangani aliansi bilateral dengan Gubernur Jenderal Valdez Tamon utk perdamaian regional
1737	Raja Spanyol Philip V mengirim delegasi Pendeta Jesuit untuk menyebarkan Roman Catholicism.
1748-1763	Kepemimpinan Sultan Sulu Muizuddin (Rajah Muda Bantilan)
1749	Di bawah Gubernur Jenderal Arrechderra, Sultan Alimuddin I diusir dan Istana Malacanang dibuat Roman Katolik dan menganugerahinya gelar Kristen kepada King Ferdinand I sebagai Raja Sulu
1750	Sultan Sulu, Muiz memimpin penyerangan ke pemukiman Spanyol in seluruh Viyasa (Ang mga Pilipino).
1750	Sultan Brunei, Omar Ali Saif Saifuddin memerintahkan penyerangan ke Manila
1754	Pemerintah Spanyol Filipina menanda-tangani fakta perdamaian dengan Sultan Muizuddin
1771	Sultan Alimuddin mengumumkan perang jihad melawan Spanyol Manila
1773-1778	Kepemimpinan Sultan Isirail
1778-1808	Kepemimpinan Alimuddin II, Sarapuddin dan Alimuddin III
1796	Admiral Spanyol Jose Alava dikirim Madrid dengan kekuatan penuh untuk membasmi gangguan bajak laut Moro di laut Sulu
1844-1862	Kepemimpinan Muhammad Pulalu
1845	Datu Usuk mengumumkan kemerdekaan penuh

	dari Spanyol
1858	Ratu Spanyol Isabela II memerintahkan pendeta Jesuit bertanggungjawab atas misi Katolik di Mindanao dan Sulu
1858	Bajak Laut Moro menyerang Real Fuerra del Pilar de Zaragosa di Zamboanga untuk kuasai pelabuhan
1860	Donativo de Zamboanga dihapus
1862	Pendeta Jesuit Katolik Gallant membuka misi baru di Zamboanga dan Isabela (Basilan) untuk membantu penguasaan militer Spanyol
1863-1881	Kepemimpinan Sultan Sulu Jamaluddin
1877	Protokol Sulu ditanda-tangani antara Spanyol, Inggeris, dan Jerman yang mengakui hak Spanyol atas Sulu
1878	Sultan Jamaluddin menanda-tangani perjanjian dengan Ratu Spanyol menetapkan seluruh Sulu menjadi protektorat Spanyol
1881-1886	Kepemimpinan Sultan Sulu Badaruddin II
1884	Sultan Badaruddin II membangun Masjid Jami "Tulay" di Jolo
1886	Kepemimpinan Sultan Sulu Harun Al Rashid
1888	Brunei menjadi negara Protektorat
1893-1936	Kepemimpinan Sultan Jamaul Kiram, Raja Jubilado de Palawan
1898	Jenderal Filipino Emilio Aguinaldo mendeklarasikan Kemerdekaan Filipina dari Spanyol
14 Agustus 1898	Pendudukan Manila oleh Tentara Amerika pimpinan Jenderal Wesley Merrit
10 Des 1898	Perjanjian Paris ditanda-tangani di Washington DC antara Amerika Serikat dan Spanyol
4 Januari 1899	Jenderal Elwell Otis, pengganti Jen. Wesley Merrit, memproklamasikan Kepulauan Filipina sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Amerika Serikat

1899	**Sultan Jamaluddin Kiram, Sultan terakhir Kesultanan Sulu wafat (dengan tenang tanpa melepas kedaulatannya kepada kolonial di Astana Putih di Darul Maimbung, Lupag Sug, Bangsamoro.**

Catatan :

Tabel Alur Persitiwa Kesultanan Sulu merupakan hasil kondensasi dari berbagai sumber, baik dari buku maupun websites.

Alur peristiwa sejarah (*historical time-line*) Maharaja Kesultanan Sulu di atas, sejak tahun 1470-1899 atau selama empat abad lebih, ternyata Kesultanan Sulu yang dipimpim oleh Sultan menunjukkan karakter yang luar biasa dalam pembelaannya terhadap Islam dan "tanah air"nya.

Pertama, pembelaannya terhadap agama. Dalam fakta sejarahnya, salah satu tujuan utama dari kekuasaan Kesultanan Sulu adalah untuk menyebarkan Islam di Filipina Selatan. Berbagai pendekatan dilakukan, misalnya melalui perkawinannya dengan adik putri bangsawan lokal (yang beragama Hindu), yaitu putri Paramisuli,membuat kebijakan pengembangan agama Islam, dsb. Dalam konteks ini, boleh digaris-bawahi bahwa Islamisasi di Filipina Selatan, pada dasarnya, merupakan kontribusi dominan dari Kesultanan Sulu, selain Kesultanan Maguindanaon.

Kedua, perlawanannya terhadap kolonial yang sangat kuat. Kesultanan Sulu, yang hadir ke Filipina sebelum Spanyol yang membawa Kristen, memiliki sumbangsih besar

bagi kemerdekaan Filipina. Ajaran Islam tentang "hubbul wathon minal imaan" (cinta tanah air merupakan bagian dari iman) merupakan prinsip dan komitmen untuk melawan segenap bentuk kolonialisme. Fakta menunjukkan bahwa intensitas dan frekuensi peperangan melawan Kolonial Spanyol Amerika, adalah dilakukan komunitas muslim di bawah komando Kesultanan Sulu, atau Maguindanaon. Komitmen perjuangannya, kebih jauh, bahkan dilakukan dengan membentuk aliansi dengan komunitas Islam di Borneo atau Batavia. Dan, menjadi prestasi tersendiri dalam peperangannya selama tiga abad lebih melawan kolonial, Sulu tidak pernah menyerah kepada Pemerintah Spanyol hingga akhir sejarahnya. Hingga tahun 1899, Sulu dapat menunjukkan martabat kesultanannya kepada dunia bahwa Kesultanan Sulu tidak pernah melepas kedaulatannya kepada Pemerintah Kolonial.

Ketiga, secara kultural, walau Kesultanan Sulu berakhir pada tahun 1899, namun Kesultanan Sulu berhasil membangun peradaban Islami di Filipina Selatan, terutama di Mindanao. Tercatat sejumlah tinggalan budaya fisikal (seperti : mesjid, lembaga pendidikan, pengadilan agama) dan tinggalan budaya nonfisikal, seperti : adat istiadat, way of life, seni, folklor, manuskrip, tata cara ritual, popularisasi bahasa Arab, pengajaran Al Qur'an, dan lainnya sesungguhnya merupakan "*historical evidence*" keberadaan dan peran Kesultanan Sulu dalam perkembangan Islam di Filipina. Bersama Kesultanan Maguindanao, Sulu mampu

mengukuhkan homeland dan orang Bangsamoro sebagai bagian dari dunia melayu yang memiliki latar kesamaan agama dan kultur muslim di Filipina Selatan.

Keempat, secara politik, walau kesultanan Sulu berakhir seabad lalu, namun semangat poilitiknya masih menggema hingga sekarang ini. Pengaruh sosio-politik Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao dalam pembentukan komunitas muslim di Sulu dan Mindanao hingga pertengahan abad XX, membentuk ikatan politik (political ties) antara muslim Filipina, muslim Asia Tenggara, dan dunia muslim. Jalinan perkawinan antar keluarga kelas penguasa di Filipina, antar keluarga raja di Asia Tenggara, serta faktor kesadaran "ummatan waahidan" menjadikan perkembangan Islam di Filipina hingga abad XX tidak mengalami kendala signifikan.

Kelima,dalam rangka mempertahankan kedaulatannya, melakukan kerjasama dengan berbagai negara. Ada historical linkage antara perkembangan Islam di Filipina, peranan Kesultanan Sulu, dan pertumbuhan serta pengaruh kesultanan di lingkungan regionalnya, terutama Kesultanan Malacca, Kesultanan Brunei, dan Kesultanan di Nusantara. *Historical linkage* ini merupakan fakta sejarah bahwa "perkembangan atau persebaran agama Islam di Asia Tenggara, terutama di Semenanjung Malaka, Brunei (Borneo), Indonesia, dan Pattani mengalami kesamaan pola, serta "persoalan politik yang relatif sama".

Selain Kesultanan Sulu, Maguindanaon, merupakan kesultanan yang memiliki kontribusi besar dalam Islamisasi Filipina Selatan, khususnya di Mindanao. Kehadirannya, sejak abad 15 masehi, Kesultanan Maguindanaon bersama Kesultanan Sulu melakukan berbagai program untuk melakukan : (1) Islamisasi, (2) pembinaan terhadap ummat, dan (3) mempertahankan Filipina Selatan dari cengkeraman, atau eksploitasi kolonial, baik Spanyol, Jepang, maupun Amerika Serikat. Secara matrikal, alur peristiwa penting dalam konteks pengembangan Islam dan perlawanannya terhadap kolonial bisa dicermati berikut ini.

Selain peran Kesultanan Sulu, perkembangan Islam di Filipina juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kesultanan Maguindanaon (Maguindanau). Bahkan, dilihat dari pengaruhnya, kesultanan Maguindanaon masih meninggalkan pengaruh politik terkait dengan kepentingan bangsa moro, atau kepentingan Mindanao. Untuk itu, pemahaman perkembangan Islam di Filipina secara komprehensif (total history) dituntut menggambarkan keberadaan dan peran Kesulutanan Maguindanaon di Mindanao.

5. Maguindanao dan Lanao dalam Perkembangan Islam Mindanao

Kesultanan Maguindanao (atau Kesultanan Maguindanaon) meruapakan negara (kesultanan, kerajaan, pemerintahan) Bangsamoro. Kesultanan Maguindanao

menguasai sebagain besar Pulau Mindanao, di Filipina Selatan. Pengaruh historik Maguindanao membentang sejak dari semenanjung Zamboanga hingga pesisir Sarangani. Pada puncak kekuasaannya, bahkan Maguindanao menguasai seluruh Mindanao dan sebagian pulau-pulau sekitarnya.

Kesultanan Maguindanao berdiri pada tahun 1500. Pada mulanya, Shariff Muhammed Kabungsuwan (dari Kesultanan Johor) memperkenalkan Islam di daerah ini pada akhir abad 16 dan mentahbiskan dirinya sebagai Sultan yang berkedudukan di Malabang-Lanao. Ia mengusir orang-orang yang menyimpang dari Islam ke Cotabato. Ia menikahi dayang-dayang (putri raja) Paramasuli keluarga penguasa Maguindanaon di Dulawan, dan mendirikan Kesultanan Maguindanao di Dulawan yang berkauasa atas seluruh pula Mindanao. Ibukota pemerintahannya biasa juga berpusat di Cotabato.

Sultan paling tersohor kesultanan Maguindanao adalah Asraf Mohammad samalan Dipatuan Qudratullah Faharuddin Nasirudin (lebih populer dengan sebutan Qudarat. Di kesultanan Sulu, ia dikenal sebagai Sultan Nasiruddin.

Selama periode kolonialisme Spanyol, Kesultanan Maguindanao mampu mempertahankan teritorinya (seluruh pulau Mindanao) dan menyerahkan Pulau Palawan ke Spanyol pada tahun 1705 (pulau yang diberi Sultan Sulu Sahabuddin) agar Spanyol tidak mengganggu pulau

Maguindanao. Kesultanan Maguindanao, sejak berdirinya tahun 1520-1926 diperintah oleh 22 Sultan.[40]

Selain kesultanan Sulu, Maguindanao, terdapat juga kesultanan-kesultanan lainnya yang berkontribusi besar bagi pengembangan Islam di Filipina dan bagi perjuangannya membela tanah airnya, Mindanao. Kesultanan tersebut, diantaranya adalah Kesultanan di Lanao. Kesultanan di Lanao, Mindanao, berdiri pada abad 16 pengaruh dari Shariff Kabungsuan, yang kemudian menjadi Sultan Maguindanao pada tahun 1521. Tidak seperti Kesultanan Sulu dan Maguindanao, kesultanan Lanao diperintah secara desentralisasi, sehingga berbentuk konfederasi.

---

[40] Sultan Maguindanao sejak berdiri 1520-1926, yaitu Sultan : (1) Syarif Kabungsuwan, pendiri Kesultanan Maguindanao (yang kemudian dikenal Mindanao), penggagas program Islamisasi dan pengembangan belajar Al Qur'an; (2) Sultan bangkaya, 1574-1578; (3) Sultan Dimangsangcay Adel, 1578-1585; (4) Sultan Gugu Sarikula, 1585-1597; (5) Sultan Laut Buisan, 1597-1619; (6) Sultan Muhammad Dipatuan Qudarat, 1619-1671; (7) Sultan Dundang Tidulay, 1671-1678 (?); (8) Sultan Baharaman, 1678-1699; (9) Sultan Kaharuddin Kuda, 1699-1702; (10) Sultan Bayan ul-Anwar, 1702-1736; (11) Sultan Amirudin di Tamontaka, 1710-1736; (12) Sultan Muhammad Tahiruddin, di Sibugay, Buayan, Malabang 1736-1748; (13) Sultan Rajah Muda Muhammad Khairuddin, 1733-1748 (Penguasa terpenting Maguindanao), (14) Sultan Paharuddin, 1755-1780; (15) Sultan Kibad Sahrial, 1805-1830; (16) Sultan Qadratullah Untung (dikenal juga dengan sebutan Sultan Ashraf Samalan Farid Qudratullah, atau Sultan Qudarat); (17) Sultan MuhammadMakakwa, 1854-1884; (18) Sultan Muhammad jalaluddin Pablu atau Sultan Wata, 1884-1896. Pada tahun 1888-1896, tidak ada Sultan resmi, karena terjadi rebutan kekeuasaan; (19) Sultan Taha Colo, 1896-1898, dan (2) Sultan Mastura Qudarat, 1998-1926. Sultan Mastura juga dikenal dengan nama Sultan Muhammad Hijaban Iskandan Qudarat yang memiliki pertalian darah dengan Datu Tan, Piang dari Cotabato dan dengan keponakan Tan Liu Yang yang menikah dengn Sultan Sulu Imam ul Alam Arpa (1915) penguasa spiritual tertinggi Sulu yang menggantikan Jamaluddin Kiram II. Lihat : www.royalsultanate.weeby.com.

ISLAM PASKA-KEMERDEKAAN FILIPINA

Filipina sebagai nation state memperoleh kemerdekaan dua kali. Pertama, kemerdekaan dari Spanyol yang dideklarasikan oleh Jenderal Filipino Emilio Aguinaldo pada tahun 1898. Kedua, kemerdekaan dari Amerika Serikat yang dideklarasikan pada tahun 1946. Sejak Paskakemerdekaan I dari Spanyol dan Paskakemerdekaan II dari Amerika, isyu politik-keagamaan kurang memperoleh perhatian. Kondisi ini, barangkali, disebabkan oleh faktor politik kebangsaan paskakemerdekaan. Pada tahun 1996, berlangsung Revolusi Filipina. Pada tahun 1898-1946 lebih terkonsentarsi pada isyu-isyu terkait dengan pendudukan Amerika Seritas atas Filipina. Pada tahun ini, peristiwa sejarah yang menonjol adalah terjadinya perang antara Amerika dan Filipina, sebagai negara bangsa. Filipina akhirnya, pada tahun 1902-1935 menjadi Pemerintah Insuler (Lihat : hal 14 History of Phillipines). Filipina, kemudian pada tahun-tahun berikutnya dipersiapkan menjadi negara transisi ke masa kemerdekaan. Sebelum Filipina peroleh kemerdekaan pada 1946, sejarah Filipina diisi dengan sejarah pendudukan Jepang pada sejak 1941 hingga 2 September 1945 saat Jepang menyerah kepada Sekutu, dengan meninggalkan kerugian besar bagi Filipina, dimana sekitar satu juta penduduk gugur dalam peperangan.

Bangsamoro[41]

Di bawah kekuasaan kesultanan Sulu maupun Maguindanao, pada masa itu, muslim yang hampir seluruhnya tinggal di Filipina bagian Selatan (Mindanao dan kepulauan Sulu sekitarnya) dapat menjalankan kegiatan keseharian dengan tenang. Walau secara ekonomik sebagian besar masih memprihatinkan, jika dibanding dengan Flipinos pemeluk Kristen di Filipina, tentunya.

Pada era paskakemerdekaan (setelah peroleh kemerdekaan penuh dari Amerika Serikat), sebagai bagian Filipina negara bangsa, dalam realitas sosial, politik maupun budaya muslim di negeri ini kurang peroleh haknya sebagai layaknya warga negara yang "merdeka". Sebagai minoritas,[42]

---

[41] Nama "Moro" yang disematkan dalam istilah "bangsamoro" dipergunakan oleh kolonial Spanyol untuk menyebut orang muslim di Mindanao, yang dikategorikan memiliki agama dan cara hidup yang sama dengan orangAfrika Utara yang berkuasa di Semenanjung Iberia untuk beberapa abad. Sedang, kata bangsa adalah bahasa Melayu, yang berarti bangsa. Jadi, Bangsamoro meruapakan pelebelan untuk membedakan orang muslim dari Filipino (penduduk Filipinan Kristen). Bangsamoro mendiami teritori yang meliputi daerah (berdasarkan jurisdiksi Pemerintah Filipina sebelum peroleh kemerdekaannya) Minadanao, kepulauan Sulu dan palawan. Mereka, secara etno-linguistik, terdiri dari orang Maguindanaon, Maranao, Tao Sug, Sama, yakan, Kaagan, Kalibugan, Sangil, Molbog, Palawani, baajau, Iranun, dan Jama Mapun, ditambah muslim asli Mindanao lainnya, seperti : Teduray, Manobo, Blaan, Higaonon, Subanen, T'boli. (See : Abhousd Syed M. Lingga,"Muslim Minority in the Phillipines", makalah dipresentasikan di Konferensi SEACSN bertemakan ***Issues and Challenges for Peace and Conflict Resolution in Southeast Asia***, Penang malaysia, 12-15 Januari 2004.

[42]Berdasarkan studinya, ada tiga kategori kelompok minoritas (*minority community*). Kelompok pertama, adalah penduduk migran minoritas. Termasuk kelompok ini adalah masyarakat pendatang (buruh) yang direkrut oleh Kolonial dari berbagai negara koloni untuk diperkerjakan di pertanian, pertambangan, industri, dsb. Komunitas ini, walau memiliki peran penting dalam perekonomian nasional,

muslim kurang memperoleh perhatian wajar dari Pemerintah Pusat. Perlakuan atau kondisi yang terjadi ini, menimbulkan persoalan baru paskakemerdekaan hingga kini belum terselesaikan terutama terkait dengan problem pencarian atau peneguhan identitas dan penuntutan tanah air (*homeland*). Persoalan-persoalan berbasis minoritas, yang terkait dengan fenomena marjinalisasi oleh Pemerintah (yang sudah menggejala sejak era kolonialisme Spanyol dan Amerika hingga Pemerintah Filipina), kurangnya perhatian dan diskriminasi layanan pembangunan menimbulkan lahirnya gerakan-gerakan protes kepada Pemerintah (*Government of the Republic of the Phillipines/GRP*). Ditambah lagi oleh kondisi politik internal muslim pada tahun 1960-an, dimana terjadi gejolak ketidak-puasan generasi muda muslim terhadap kepemimpinan kelompok tua (*old leaders*) yang melahirkan kelompok muda reformis (*reformer*).Namun, karena perbedaan

---

namun dewasa ini, tidak peroleh kehidupan nyaman. Perlakuan keras, kurangnya akses ekonomi, dan kebijakan represif Pemerintah merupakan fenomena yang terjadi di negeri ini. Mereka tidak peroleh sentuhan perhatian layaknya kepada pemilik negeri. Karena itu, kelompok ini menuntut pengakuan dan perlakuan yang sama dengan kelompok mayoritas dalam akses layanan dan kesempatan ekonomik. Kelompok kedua, penduduk asli (indigeneous people), yaitu penduduk pertama kali yang mendiami sebuah teritori. Karena kolonisasi, mereka menjadi minoritas. Kelompok ini, umumnya, menuntut perhatian dari Pemerintah dalam hal cara hidup, dan pembangunan ekonominya, serta memeilihara dan mengembangkan identitas, bahasa, dan agamanya dalam bingkai negaranya. Ketiga, kelompok masyarakat yang bergabung dengan Pemerintahahn baru. Pada masa kolonial, mereka memiliki posisi penting dalam berbagai hal teruatam dalam perlawanannya terhadap kolonial. Namun, seteleh peroleh kemerdekaan, kelompok ini menjadi masyarakat kelas tiga (third category) yang kurang peroleh perlakuan wajar. Aspirasi kelompok ini, adalah ingin membangun (menghidupkan kembali) sistem kehidupan (politik, ekonomi, budaya) sesuai dengan "world view", agama, budaya, dan norma sosial. W.K. Che Man, ***Muslim Separatism : The Moros of Southern Phillipines and the Malay Southern Thailand***, Quezon City : Ateneo de Manila Unverity Press, 1990, p.1

visi dan pendekatan perjuangannya, kelompok muda reformis ini, juga terbagi menjadi dua sebkelompok, moderat dan militan.[43] Kelompok moderat cenderung akomodatif dan koperatif dengan Pemerintah Filipina, sementara kelompok militan bersikap keras dan menggunakan model perang gerilya untuk mengekspresikan aspirasinya. Namun demikian, pada situasi politik tertentu, dalam prakteknya kedua kelompok reformis ini kerap bersatu sebagai pembela Islam dikarenakan rasa keterancaman oleh ekspansi Kristen ke Mindanao Selatan dan kehadiran tentara Pemerintah di tanah kelahiran mereka.

1. MNLF dan MILF: Misi dan Target

Klimak dari konflik politik Islam-Pemerintah atau Moro-Pemerintah ini, maka gelombang protes yang dilancarkan dalam upaya penuntutan hak dasar warga ini adalah kebangkitan organisasi Fron Pembebasan Nasional Moro yang lebih populer dengan sebutan *The Moro National Liberation Front,* disingkat *MNLF* (*Jabhat Tahrir Mooroo al Islamiyah*) dan Fron Pembebasan Islam Moro (lebih populer dengan sebutan *Moro Islamic Liberation Front,* disingkat *MILF*).[44] Organisasi "armed insurgence movement" MNLF

---

[43]Jane's Intelligence Review, April 2002, p.20-23. *www.fas.org/irp/world/para/milf.htm*

[44] MNLF adalah organisasi politik, didirikan oleh Nur Misuari pada tahun 1969. Tujuan MNLF memperjuangkan aspirasi Bangsamoro untuk memperoleh kemerdekaan *homeland* dan identitas Bangsamoro (Bangsamoro nation, Mindanao nation) dari Pemerintah Republik Filipina. MNLF beridiologi egalitarianism yang diorientasikan untuk peroleh keadilan, kesetaraan posisi bagi Bangsamoro, dan

dan MILF bertujuan sama yaitu membela atau mempertahankan *homeland*, dan melawan perlakukan diskriminasi, marginalisasi, dan kontrol politik dan ekonomi pemerintah yang tidak menguntungkan bangsa Moro.

MNFL adalah kelompok Islam yang dibentuk pada tahun 1960, oleh Nur Misuari—mahasiswa radikal kiri Univeristy of Phillipines, Manila. MNLF bertujuan memperjuangkan perolehan otonomi Bangsamoro di Filipina Selatan. Pada awalnya, pendirian MNLF sebagai protes atas pemberlakukan Martial Law, oleh Pemerintah Marcos (1972-1981) dan penyerangan atas komunitas muslim oleh "Vigilante groups of settlers". Misi MNLF yang beridiologi liberal nasional kiri adalah mengadvokasi kemerdekaan Moro. Untuk kepentingan ini, MNLF aktif dalam pembunuhan dan serangan teroris untuk tujuan ini, sehingga sering terjadi kontak senjata dengan pemerintah Filipina (GRF). Tujuan MNLF Pada tahun, 1976, Muammar Ghaddafy mempertemukan pemimpin MNLF (Nur Misuari) dengan GRF untuk merundingkan nasib Filipina Selatan. Dari pertemuan ini, ditanda-tangani MNLF-GRPH Tripoli Agreement of 1976, berisi penerimaan MNLF atas tawaran GRF menjadikan Filipina Selatan sebagai daerah semi-otonomi di Filipina. Dan, pada tahun 1996, pemerintahan Presiden Ramos menyetujui MNFL untuk memerintah Mindanao, dengan menetapkan sebagai Autonomous Region of Muslim

---

beribukota di Sulu. MILF adalah kelompok protes (rebel group) yang beraktifitas di Filipina Selatan.

Mindanao (ARMM). Namun, penandatanganan perjanjian ini, berujung pada pecahnya MNLF. Misuari megeluarkan Hasyim Salamat dari MNLF pada tahun 1977.[45]Bersama 57 tokoh MNLF lainnya melepaskan diri dari MNLF dan kemudian mendirikan organisasi pecahan baru, yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), pada tahun 1984, yang kemudian menjadi faksi terbesar di Filipina Selatan. Bahkan Muammar Gaddafi menjadi pendukung pendirian MILF. Perlu dicatat, dalam konflik politik Islam Mindanao antara Pemerintah dengan Moro, pada tahun1987 MNLF menerima tawaran semi-otonomi daerah Mindanao dari Pemerintah yang melahirkan penetapan Minadanao sebagai daerah otonom (*Autonomous Region of Muslim Mindanao*). Namun, sebaliknya MILF menolak tawaran solusi ini, dan melanjutkan aksi pemberontakan.

Gencatan sejata permusuhan Pemerintah Manila dengan MILF ditanda-tangani pada Juli 1997, namun tak berselang lama, perjanjian ini dihapus oleh Angkatan Bersenjata Pemerintah Presiden Joseph Estrada, pada tahun 2000. Sebagai respons reaktifnya, MILF mendeklarasikan "jihad" melawan Pemerintah, termasuk kota-kota di bawahnya dan warganya. Pada pemerintahan Presiden Gloria Arroyo, Pemerintah melakukan perjanjian gencatan sejata dengan MILF yang menghasilkan sejumlah kesepakatan.

---

[45] Setelah keluar dari MNLF, Misuari ke Kairo Mesir, dan tahun 1980 ke Lahore Pakistan untuk aktifitas diplomatik.

MILF adalah kelompok Sunni yang bermarkas di Filipina Selatan. Kelompok ini merupakan organisasi Bangsamoro yang bermisi utama memperjuangkan aspirasi, hak-hak bangsamoro sebagai bagian dari Pemerintah Republik Filipina. Berbeda dari MNLF, maka MILF cenderung lebih keras terhadap Pemerintah Filipina. MNLF lebih moderat, dan menerima pendekatan konsiliasi dengan Pemerintah, sehingga menerima gagasan semi-otonomi Filipina selatan. Sedang MILF lebih keras dan menuntut otonomi dan menggunakan model perang gerilya untuk ekspresikan aspirasinya. Kelompok lain, yang berkarakteristik berbeda dari MNLF dan MILF namun berkontribusi dalam kompleksitas situasikonfliktual di Filipina adalah Kelompok Abu Sayaf (ASG) dan Fron Demokratik Nasional (National Democratic Front/NDF) underbouw Partai Komunis Filipina.[46]

---

[46] NDF (National Democratic Front) adalah koalisi dari berbagai kelompok yang tak terwadahi oleh MNLF dan MILF. NDF meliputi koalisi kelompok yang menuntut keadilan sosial ekonomi, yang mewadahi organisasi buruh, perdagangan, pertanian, dan kelompokindigeneous Filipina. Tuntutan yang diperjuangkan NDF untuk menegakkan keadilan, demokrasi dan kebebasan bagi Filipinan, diantaranya tertuang dalam 12 poin program, yaitu : (1) Mempersatukan rakyat untuk mengeyahkan sistem semi-kolonial dan semi –feodal melaluinperang dan revolusi yang demikratik; (2) Mempersiapkan cara untuk membangun republik demokratik rakyat dan pemerintahan koalisi demokratik; (3) Memperkuat tentara rakyat dan sistem pertahahan; (4) Menegakkan dan meningkatkan hak-hak demokratik rakyat; (5) Menghentikan segela bentuk relasi tak seimbang dengan Amerika Serikat dan seluruh kekuatan imperialis dan entitas asing lainnya; (6) Mengimplementasikan reform pertanian, program, serta meningkatkan kerjasama pertanian, mengembangkan produk pertanian perdesaan melalui modernisasi dan industrialisasi perdesaan; (7) Menghilangkan dominasi amerika; (8) Mengimplementasikan program sosial secara komprehensif; (9)Mempromosikan budaya nasional (budaya rakyat) progresif; (10) Menegakkan hak-hak Bangsamoro, Cordillera people, dan penduduk asli lainnya untuk menentukan diri dan demokrasi;

ASG adalah kelompok kriminal kecil “penculikan dan pencari tebusan” yang mempergunakan modus operasi ekstrimis untuk memperoleh publisitas. ASG meyakini sebagai kelompok yang didukung oleh unsur Al Qaida dan sebagai anggota Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia.[47] Menyadari melalui perjuangan melalui jalur politik kurang berhasil, maka MNLF, MILF, dan ASG menerima bantuan asing untuk mencapai tujuannya. Setelah pendudukan Sovyet di Afganistan berakhir, para pejuang mujahidin Moro, kembali ke Filipina untuk melawan operasi militer Filipina. Dan, setelah bantuan asing dari Malaysia dan Lybia berakhir, MILF setuju utnuk melatih JI dan kembalinya para pejuang Al Qaeda untuk memberi bantuan finansial dan militer.NDF di bawah panji Partai Komunis Filipina merupakan kelompok oposisi Pemerintah sejak akhir Perang Dunia II. NDF dan MILF memiliki perjanjian untuk beroperasi di daerah berbeda. Antar keduanya, bekerjasama meskipun memiliki idiologi dan tujuan berbeda.

Pada era paskakemerdekaan Filipina kedua, 1946, kondisi politik Filipina cenderung dipenuhi oleh berbagai agenda terkait dengan persoalan penataan paskakemerdakaan

---

(11) Mengedapankan emansipasi revolusioner wanita pada semua aspek kehidupan; dan (12) Mengadopsi kebijakan asing yang aktif, independen, dan damai. (Lihat : ***National democratic Front of the Phillipines,*** International Information Office, (official website) dan *Program of the national Democratic Front of the Phillipines*, International Information Office, http://www.ndfp.net.joom15/index.php.

[47] JI (Jamaah Islamiyah) adalah oragnisasi ekstrim Indonesia yang menerapkan strategi/taktik teror. Anggotanya lebih dahulu dilatih di Kamp Latihan MILF Mindanao.

baik pada aspek eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk membangun tatanan kepemerintahan yang baik. Program-program keperencanaan, konsolidasi, dan integrasi tampak mewarnai situasi paskakemrdekaan Filipina sekitar tahun 1946-1960. Namun kemudian, ketika proses pembangunan (nasional) dimulai dan berproses, tak dapat dihindari, terdapat kelompok, pihak, atau masyarakat yang kurang tersentuh oleh proses pembangunan tersebut. Bertolak dari situasi pembangunan inilah, muncul gerakan-gerakan protes ketidak-puasan dari berbagai kelompok dengan motif atau latar belakang berbeda-beda. Gerakan protes kepada Pemerintah Filipina (Pusat) tumbuh karena kebijakan Pemerintah yang dinilai diskriminatif, marjinalisatif, dan sejenisnya terhadap komunitas tertentu.Intensitas dinamika protes terhadap Pemerintah memunculkan situasi konflik *multifaceted* di negerinya,walau dari pihak Pemerintah Filipina itu sendiri mengaku bukan karena faktor kebijakan marjinalisasi dan diskriminasi oleh Pemerintah, namun cenderung karena perbedaan persepsi tentang inkulsivitas teritori antar Pemerintah dengan kelompok muslim Mindanao, khususnya Moro pada era paskakemerdekaan dari Amerika Serikat. Di satu pihak, Pemerintah memandang bahwa teritori Mindanao dan Sulu menjadi bagian dari Republik Filipina, Pemerintah menganggap bahwa warga Filipina (*Filipino citizens*) adalah seluruh warga di bawah Repiblik Filipina, termasuk yang melawan Pemerintah. Pernyataan Presiden Ferdinand Marcos (1977) dalam laporannya kepada Batasang Bayan, bahwa "the Government

considers the MNLF citizens of the Republic even if they are in rebellion. As such, the agreements with the liberation movements are agreements between the Phillipines Government and its own nationals".Singkatnya, Pemerintah Filipina menyatakan bahwa warga Mindanao (Moro) adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Filipina yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan warga Filipino lainnya. Karena itu, meng-*claim* sebenarnya tidak ada kebijakan Pemerintah yang diskriminatif. Pemerintah memberi peluang warga Mindanao posisi di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—walau sangat sedikit. Sebaliknya, muslim memandang situasi politik dari perspektif berbeda. Muhammad al Hasan (Gowing, 1978:78), misalnya, menggambarkan muslim Mindanao, bahwa :

> "Kami (Moro dan Filipinos) itu orang berbeda, mengikuti idiologi, budaya, latar pendidikan yang berbeda. Kami punya konsepsi tentang kedaulatan yang berbeda. Filipinos meyakini bahwa kedaulatan ada di tangan mereka, sementara kami meyakini kedaulatan di tangan Tuhan. Lembaga-lembaga politik, sosial, ekonomi, dan pengadilan yang mereka warisi dari kolonial, yang diorganisir atas dasar pemisahan antara aspek kehidupan spiritual dan duniawi medupakan hal yang tidak cocok dengan apa yang kami yakini sebagai suatu kesatuan. Tuhan adalah Kekuasaan dan manusia adalah His vicegerent. Budaya kami dibangun atas dasar

keyakinan, prinsip ajaran Islam yang berbeda dari Filipinos…."[48]

Muslim Mindanao mengklaim memiliki bangsa yang berbeda karena latar sejarah dan identitas yang berbeda. Implikasinya, Mindanao menuntut hak untuk menentukan diri nasibnya, termasuk menuntut negara sendiri terutama di wilayah mayoritasnya.[49] Pengalaman keberhasilan perlawanan dan defensi terhadap penguasaan kolonial Spanyoldan Amerika, serta kesadaran perbedaan yang melekat sejak kesultanan Sulu dan Miguindanao di satu situasi dan realitas perlakuan terhadap muslim umumnya pada sisi lainnya, hakikat menjadi faktor akseleratif pertumbuhan gerakan-gerakan protes muslim terhadap Pemerintah paskakemerdekaan hingga kini. Kelompok muslim Mindanao khususnya, dalam upaya menuntut haknya terkait dengan *homeland* dan pengakuan identitas, dan

---

[48]We (Moro dan Filipinos) are different peoples adhering to different ideologies, having different cultures, and nurtured by different experiences. We have contradistinct conceptions of sovereignty. The Filipinos believe that sovereignty resides in them, but we believe that sovereignty belongs to God alone. The political, social, economic abd judicial institutions they inherited from the colonizers, organized on the basis of the separation of spiritual and mundane aspects of life, are incongruous with ours which are established on the postulates that life is a unity. God is the Sovereign and man is His vicegerent. Our culture, imbued with Islamic belief,tenets, and principles, is diametrically in contrast with what is known today as Filipinos culture which is the amalgamation of the residues of the colonizers' cultures. Our art, architecture, literature, and music have retained their Asian character which) is not true (of) theirs." Vide : Peter G. Gowing (1978), "Of Different Minds : Christian and Muslim Ways of Looking at Their Relations in the Phillipines", dalam ***International Review of Missions,*** 265 : 74-85.

[49] Rizal G. Buenda (2002) "A Re-examination of Ethnicity and Secessionist Movements in the Phillipines and Indonesia : The Moros and Acehnese", dalam ***Phillipine Political Science Journal*** 46:3-48.

pengembangannya, maka mereka menutut dibentuk pemerintahan otonomi bagi muslim Mindanao. Berdasarkan *Republic Acts No.6734* (dikenal juga sebagai "Organic Acts), pada 1 Agustus 1989, Pemerintah menyetujui memberikan otonomi bagi komunitas muslim Mindanao untuk mengatur hak dan kewajibannya sendiri. Sejak saat itulah, berdiri The Autonomous Region of Muslim Mindanao, yang memberi mandat secara konstitusional untuk mengatur muslim di kawasan Mindanao. Pada saat relatif berbarengan, tumbuh gerakan berbasis keagamaan dan idiologi, seperti kelahiran MNLF, MILF, ASG, NDP, dsb. dengan motif dan latar belakang interes berbeda, disamping Gerakan-gerakan berbasis ekonomi, budaya, dsb. muncul mewarnai kian ruwetnya kondisi Filipina sebagai entitas negara bangs,a[50] Sehingga, dalam perkembangannya, kawasan Mindanao dapat dikatakanbagai "*a melting pot*" kelompok pemberontak sempalan berbasis kelompok muslim militan pan-Asia, komunis, maupun milisia subetnik Mindanao atau Filipina Selatan. Ringkasnya, berikut dinarasikan alur sejarah penting terkait dengan keberadaan Islam yang mayoritas dianut di Filipina Selatan, khususnya Mindanao.

---

[50] Misalnya : Kilusang Magbubukid ng Pilipinasa (Gerakan Petani Filipina/Farmers' Movement of the Phillipines), dan NPA.

Tabel : 3
Peristiwa Penting Konflik antar Pemerintah dan Islam Moro Paskakemerdekaan (1946-sekarang)

Tahun	Peristiwa
1946	Tanggal 4 Juli 1946 Hari Kemerdekaan Filipina
1967	Di Mindanao, Nur Misuari mengorganisir Muslim National League
Maret 1968	Pemuda Muslim yang sedang menjalani latihan militer di Corregidor dibunuh tentara Filipina. Peristiwa ini dikenal sebagai Jabidah Massacre.
Mei 1968	Akibat Jabidah Massacre, muslim mengorganisir kelompok untuk memerangi Pemerintah dalam upaya pemisahan Mindanao dan Kepulauan Sulu dari Pemerintah Filipina. Nur Misuari mendirikan MNLF, dan membentuk Bangsamoro Army (Angkatan Perang Bangsamoro).
26-12-1968	Partai Komunis Filipina didirikan oleh Jose Maria Sison. Dan, tanggal 29 Maret 1969 New People's Army (Angkatan Perang Rakyat Baru) underbauw Partai Komunis Filipina dibentuk.
22-11-1971	Terjadi penembakan pembunuhan terhadap muslim, 40 orang meninggal di Barrio Tacub (populer dengan sebutan Tacub Massacre).
23-09-1972	Pemberlakukan resmi "Martial Law" oleh Presiden Marcos.
22-10-1972	Perang antara Moro dan Pemerintah
1973	Nur Misuari meninggalkan Filipina ke Lybia

23-12-1976	Penanda-tanganan Perjanjian Tripoli (Tripoli Agreement) oleh tiga pihak (Pemerintah Marcos, MNLF, dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Tripoli. Perjanjian Tripoli memberikan otonomi penuh muslim Filipina Selatan, yang meliputi 13 provinsi, yaitu : Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Davao del Sur, Cotabato Selatan, Cotabato Utara, Sultan Kudarat, dan palawan.
04-03-1977	Presiden Marcos mengumumkan Pemerintah Islam Bangsa Moro (Bangsamoro Islamic Government) untuk memberi otonomi kepada 13 provinsi.
17-08-1977	Referendum 13 provinsi yang hasil merupakan pelanggaran dari Tripoli Agreement.
21-08-1983	Pembunuhan Benigno Aquino di Manila, berakibat terjadinya demonstrasi dimana-mana sehingga reputasi Marco menurun tajam di masyarakat.
1984	Terbentuknya Moro Islamic Liberation Front (MILF) sebagai pecahan MNLF.
25-02-1986	Corazon Aquino disumpah menjadi Presiden Filipina.
09-04-1986	MNLF dan Pemerintah membuat perjanjian gencatan senjata, yang disebut Marawi City Joint Declaration, yang berisi bahwa otonomi Mindanao hanya meliputi 9, diantaranya provinsi : Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Tawi-Tawi, Basilan, Jolo, dan Palawan
02-09-1986	Misuari tiba dari Lybia dan berkampanye bagi 5 juta muslim (agar) diberi negara sendiri di Filipina.

05-09-1986	Presiden Aquino dan Nur Misuari bertemu di Zamboanga City untuk bicarakan mengakhiri perseteruan antara Muslim dan Pemerintah
10-12-1986	Perjanjian Gencatan Senjata antara Pemerintah dan Komunis
26-12-1986	Pembicaraan awal untuk negosiasi perdamaian antara MNLF dan Pemerintah di Jeddah, Saudi Arabia. Dan, pada 4 Januari MNLF melalui Nur Misuari menyetujui otonomi Mindanao (bukan kemerdekaan).
09-02-1987	Pembicaraan perdamaian antara Pemerintah dan Kelompok Muslim untuk otonomi muslim Mindanao dilanjutkan di Manila yang mengundang tiga kelompok "pemberontak", yaitu : MNLF, MNLF-Reformist, dan MILF. MILF tidak hadir, karena bukan OKI atau Muslim League yang mengundang. Hasilnya, disarankan MNLF membuat proposal untuk otonomi penuh bagi Mindanao.
09-04-1987	Pembicaraan perdamaian Pemerintah dan MNLF terhenti, karena terjadi peristiwa pertempuran antara tentara Pemerintah dengan Pemberontak Muslim di zamboanga del Sur. Peristiwa ini dinilai sebagai pernyataan perang. Pada bulan ini, juga terjadi pertempuran antaratentara Komunis dengan Pemerintah.
21-08-1987	Nur Misuari menolak pembicaraan baru tentang perdamaian antara Pemerintah dan MNLF.
1990 awal	Terbentuknya Abu Sayaf Group, pecahan MNLF, dipimpin Abdurrajak Abubakar Janjalani. Kelompok ini menyatakan bahwa Negara Islam Independen hanya bisa dibentuk melalui kekerasan.

Feb 1990	Tiga belas "pemberontak" dibunuh tentara Pemerintah dalam tembak-menembak di Mindanao.
Des 1991	Pertemuan Puncak OKI di Dakkar, Sinegal, memberi dukungan perlunya dilanjutkan pembiacaraan tentang perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MNLF.
Nov 1993	Perjanjian Gencatan Sejata ditanda-tangani di Jakarta antara Pemerintah Filipina dan MNLF. Juga disetujui untuk membentuk Komite Penyelesaian Masalah Mindanao.
Des 1993	Terjadi peledakan/pelemparan granat ke mesjid di Filipina Selatan, 8 jam setelah meledaknya bom di Gereja Roma Katolik, yang menewaskan 7 orang dan melukai 151 orang.
Okt 1994	Presiden Fidel Ramos mengadakan kunjungan resmi ke Saudi Arabia untuk bicarakan program perbaikan situasi Muslim di Filipina.
Des 1994	Pernyataan final (Final Statement) hasil pertemuan puncak OKI di Maroko dinilai positif/memuaskan untuk perbaikan situasi muslim di Filipina.
Maret 1995	Presiden Ramos berkunjung ke Iran untuk bicarakan penyelesaian masalah muslim Filipina dan implementasi syariah Islam di wilayah Mindanao.
April 1995	Sekitar 200 "pemberontak" muslim (anggota ekstrimis Abu Sayyaf) melakukan penyerangan bank, dan gedung di Kota Ipil Mindanao. Diduga, MNLF dan MILF terlibat dalam peristiwa ini. Penyerangan ini diduga merupakan provokasi agar terjadi perang antara Kristen dan Muslim. Pada beberapa hari kemudian, tentara Pemerintah membunuh 39 pemberontak muslim. Juga, angkatan udara

	membombardir pulau dekat Zamboanga yang menewaskan 4 orang muslim.
Mei 1995	Presiden Ramos membicarakan kembali rencana pembangunan 15 tahun di Mindanao, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, modernisasi perikanan, dan pembangunan industri pertanian.
1996	Presiden Fidel Ramos mengadakan pembicaraan dengan MILF tentang Negara Otonomi.
1998	Joseph Estrada terpilih jadi Presiden. Pada tahun ini, Estrada mendeklarasikan kebijakan "all out war" melawan MILF. Sebaliknya, MILF mendeklarasikan "Perang Jihad" terhadap Pemerintah.
2001	Estrada diusir oleh "People's Revolution" diganti Wakil Presidennya, Gloria Macapagal Arroyo yang menyerukan "genjatan sejata unilateral" dan memprakarsai pembicaraan dengan MILF.Pada tahun ini, Perjanjian Tripoli menyiapkan negosiasi-negosiasi untuk perdamaian.
2002	Militer Amerika mengadakan pelatihan bagi unit-unit lokal di Basilan dan Zamboanga untuk memerangi Abu Sayyaf
2003	Pecah perang, karena Pemerintah terlalu mngontrol MILF, dan bulan Maret tahun ini terjadi pemboman di Bandara Internasional Davao. Di tahun ini, Selamat Hasyim pimpinan MILF meninggal dunia, dan digantikan oleh Al Hajj Murad Ibrahim.
2005	Pemerintah mengumumkan "bulan-bulan perang" di wilayah MNLF di Mindanao, untuk penyerangan terhadap Abu Sayyaf, juga melawan NPA, MNLF, dan MILF.

2005-2009	Pada bulan-bulan di 2005-2009, dipenuhi konflik berupa penyerangan, penyanderaan, pemberontakan antara Pemerintah di satu pihak dengan rivalnya MNLF, MILF, dan NPA, yang diselingi pembicaraan damai sementara yang tindak menuntaskan masalah.
2009	Bulan Juli, Pemerintah dan MILF menanda-tangani perjanjian gencatan sejata. Bulan September MILF dan Pemerintah menanda-tangani perjanjian kerangka kerja (framework agreement), yang menunjuk International Contact Group—yang melibatkan OKI, Uni Eropa, dan LMS-- untuk menjadi penengah. Namun, sebulan kemudian (pada Oktober) terjadi kontak senjata antara Pemerintah dengan Kelompok Abu Sayyaf dan MNLF di Jolo. Tak berselang lama, pada bulan November sejumlah politisi, pendukung, dan wartawan dibantai penembak di Provinsi Maguindanao, Mindano. Desember-nya, pembicaraan antara pemerintah dan MILF berlangsung untuk pertama kalinya sejak 2008.
2010	Benigno Aquino terpilih menjadi Presiden Filipina. MILF dan MNLF menanda-tangani perjanjian untuk kordinasi lebih baik. Namun, perselisihan Pemerintah dengan NPA meningkat ekskalasinya. Tapi, di bulan Februari 2011, Pemerintah dan NPA melakukan negosiasi yang pertama sejak 2004. Sejak Juni tahun ini, terjadi sejumlah bencana di Mindanao, yaitu : banjir besar pada bulan Juni-September yang memindahkan hampir satu juta orang ke tempat pengungsian. Bulan Desember, terjadi bencana Badai Tropis Washi yang mengungsikan 200.000-an orang ke tempat aman di Mkindanao Utara.
2012	Bulan Oktober tahun ini, Pemerintah dan MILF menanda-tangani Perjanjian Damai, untuk

	mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Rencana implementasi pelaksanaan Otonomi Bangsamoro (untuk mengganti ARMM) direalisasikan pada tahun 2016.

Catatan :

Matrik ini merupakan kondensasi dari berbagai sumber : UNHCR *Refworld*, *Victoria Sites* of Wellington University,dan *AlertNet A Thomson* Reuters Foundation Sevice.

ARMM : VISI DAN PROGRAM

Dalam sejarah Filipina, Mindanao merupakan teritori Filipina yang terpisah, sehingga memiliki peluang untuk meneguhkan identitas dan mengembangkan kebudayaannya sendiri. Daerah Mindanao, secara historik, merupakan tanah air (ruang kehidupan) kelompok muslim sejak abad 15, bahkan sejak jauah sebelum kehadiran Spanyol mengoloni pada 1565, yaitu sejak datangnya para mubaligh muslim di Tawi-Tawi pada tahun 1380 dan berdakwah di tengah masyarakat penduduk asli.

Muslim Mindanao kian menguat, berkembang, dan

menemukan identitas "diri kelompok"nya saat berdirinya beberapa kesultanan di sekitarnya, seperti : Kesultanan Sulu, Kesultanan Maguindanao dan Buayan. Pada saat kolonialisme Spanyol, kesultanan-kesultanan tersebut secara idiologik, politik maupun kultural mempertahankan dan menjaga identitas muslim secara reguler dengan berbagai cara, termasuk dengan pendekatan perang dengan kolonial. ARMM meliputi wilayah berlokasi di kepulauan Mindanao teritori Republik Filipina, terdiri dari provinsi penduduk dominan muslim, yaitu Basilan (kecuali Isabela City), Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi yang meliputi wilayah seluas 12,288 Km2, dengan total penduduk 3,326.140 jiwa pada tahun 2007.[51]ARMM diinaugerasi pada 6 November 1990 di Cotabato ibukota ARMM.

Ada sejumlah program yang dilakukan bagi implementasi ARMM ini, terutama yang didanai oleh organisasi internasional, seperti World Bank. Program ini diorientasikan untuk pengurangan angka kemiskinan, keterbelakangan, dan penguatan politik Mindanao. Misalnya,

---

[51] Provinsi Basilan beribukota Isabela City berpenduduk 293,222 jiwa, Provinsi Lanao del Sur, ibukota Marawi (933,260 jiwa), Provinsi Maguindanao, ibukota Buluan (944,718 jiwa), Sulu, ibukota Jolo (719,290 jiwa), dan Tawi-Tawi beribukota Bongao berpenduduk 366,550 jiwa. Pada saat inisiasi, dilakukan plebisit di seluruh provinsi di Filipina Selatan, untuk memilih menjadi bagian ARMM atau tidak, yang meliputi penduduk provinsi : Basilan, Cotabato, Davao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Palawan, South Cotabato, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, Sulu, Zamboangan del Norte, dan Zamboanga del Sur, kemudian kota Cotabato, Dapitan, Dipolog, General Santos, Koronadal, Iligan, Marawi, Pagadian, Puerto Princesa, dan Zamboanga. Namun, dari wilayah tersebut hanya 4 (empat) provinsi saja yang ingin bergabung : Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi. (Lihat : "ARMM History and Organization", August, 2008).

adalah ARMM Social Fund Project (ASFP) yang diantaranya bertujuan :

(1) untuk meningkatkan kemampuan akses (bagi orang miskin dan dampak konflik) terhadap layanan ekonomi dan sosial, (2) meningkatkan kapasitas ekonomi, peroleh pekerjaan, dan pendapatan rumah tangga bagi perempuan dan siswa putus sekolah, (3) meningkatlam kohesi sosial dan kemitraan antara masyarakat yang tergabung dalam ARMM, serta (4) peningkatan potensi lokal.[52] Untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan angka buta huruf di muslim Mindanao, AusAid mendanai program Basic Education Assistance for Mindanao bagi ARMM (BEAM-ARMM).

PERKEMBANGAN ISLAM FILIPINA DEWASA INI

Islam merupakan agama wahyu. Sebagai agama, Islam merupakan sistem nilai, norma, dan tradisi yang bersumber pada Al-Qur'an dan As Sunnah (ucapan, tindakan, atau kebiasaan Rasulullah s.a.w.). Layaknya, sebuah agama, maka Islam memiliki tata ajaran yang fungsional bagi penataan kehidupan manusia pada berbagai aspeknya—politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan dimensi kehidupan lainnya. Karena itulah, deskripsi tentang kehidupan Islam di Filipina, secara substantif seharusnya berbicara aspek terkait dengan aspek ajaran Islam dan realisasinya di Filipina. Namun demikian, dalam tulisan ini berikut hanya memokus

[52] www.worldbank.org

pada persolan pendidikan dan dakwah Islamiyah dalam beberapa subaspeknya, karena aspek politikal dan lainnya sudah disinggung pada bab-bab sebelumnya dalam konteks historik.

1). Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Filipina, secara historik, tumbuh dan berkembang sejak kedatangan Islam di Filipina, yang dibawa para pedagang Arab, Melayu, dan India, pada sekitar abad 13, Pertama kali, berdasarkan geneologi Sulu, disebutkan bahwa Tuan Mashaika ditengarai sebagai orang pertama yang memperkenalkan Islam kepada penduduk di Sulu (Abubakar, 1983).[53] Berikutnya, pada pertengahan abad 14, Karim al-Makhdum tiba di Filipina, yang sepuluh tahun kemudian diikuti oleh bangsawan muslim Sumatera (Rajah Baguinda) yang mengabdikan dirinya kepada pemimpin lokal Sulu untuk berdakwah atau menyebarkan Islam di Mindanao.[54] Selanjutnya, Islam mengalami perkembangan relatif pesat bersama berdirinya Kesultanan Sulu yang berdiri pada tahun 1450 dengan Syariful Hasyim sebagai Sultan pertamanya. Selama pemerintahannya, sekitar 30 tahunan, Sultan Syariful Hasyim membuat kebijakan untuk pendirian masjid dan madaris (madrasah). Sebagian besar pendidikan madrasah

---

[53] Carmen A Abubakar, "The Islamization of Southern Phillipines : An Overview", dalam F. Landa Jocano (Ed.), ***Filipino Muslims : Their Social Institutions and Cultural Achievements***, Quezon City : Asian Center, University of the Phillipines.

[54] Abdulghafur M. Alonto, ***Management and Organization of Madrasah : The Madrasahs in the Phillipines and Its Role in National Integration***, Iligan City, Coordination Center for Research and Development, Mindanao State University-Illigan Institute of Technology.

diselenggarakan di rumah-rumah pandita atau guro (ustadz) dan di mesjid-mesjid. Mata pelajaran pokoknya adalah membaca dan menulis bahasa Arab sebagai ilmu alat membaca Al Qur'an. Dan, sistem pendidikan Islam seperti itu cukup lama berlangsung di Filipina Selatan khususnya, hingga beberapa abad di era kolonialisme Spanyol.

Sejak kemerdekaan, pada tahun 1946, sistem pendidikan di Filipina berubah dari sistem sebelumnya yang mengikuti sistem pendidikan Spanyol dan Amerika Serikat. Kondisi ini, tak luput juga berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam di Filipina, dimana Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan Islam, terutama di Mindanao untuk mengejar ketertinggalan akibat perlakuan masa lalu.[55]

Diantaranya, pada tahun 2004, Pemerintah memberlakukan Kurikulum Madrasah Standar (*Standard Madrasah Curriculum/SMC*) bagi madrasah, dan pengajaran bahasa Arab dan nilai ajaran Islam di sekolah umum, pengakuan atas sekolah-sekolah swasta di Kota Marawi, Sarang Bangun Zamboanga, dan Jolo.Kemudian, pada tahun

---

[55] Faktor sejarah Islam di Filipina menjadi salah satu penyebab ketertinggalan pendidikan di masyarakat muslim Filipina, khususnya di Mindanao. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak memadainya kualitas sekolah-sekolah di masyarakat Mindanao adalah akibat marjinalisasi terhadap muslim di negara Katolik ini. Latar belakang murid berstatus sosial-ekonomi bawah/rendah (miskin), latar pendidikan guru yang rendah, infrastruktur dan dukungan sistem lemah atau tidak memadai. Lihat : Joanne Moulton, ***Madrasah Education : What Creative Associates has Learned***, Creative Associates International, Inc., 2008, hal.21.

2005, AusAids mendanai proyek Basic Education Assistance for Mindanao (BEAM) atau Bantuan Pendidikan Dasar bagi Mindanao.

Bantuan ini bertujuan untuk memberi bantuan pada penguatan implementasi SMC, membantu izin operasional madrasah swasta. Perkembangan terakhir, pada Januari 2009, Depertemen Pendidikan Republik Filipina menanda-tangani "Memorandum of Agreement" dengan United States Agency for International Development (USAID) tentang bantuan sebesar US $ 86 juta bagi pendidikan Filipina, terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan di Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) dan wilayah Mindanao Pusat dan Barat.[56] Departemen Pendidikan di bawah Sekretaris Urusan (ke)-Islaman, Dr. Manaros B. Boransing, mendefiniskan istilah dan mengategorikan tipe madrasah di Filipina.

Kategori pertama adalah Madrasah Tradisional atau Madrasah Akhir Pekan (*Traditional* atau *Weekend Madrasah*). Madrasah Tradisional (MT) dikategorikan sebagai pendidikan agama non-formal. Pengajarannya diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu saja atau hari-hari yang disepakati oleh guru dan murid. Materi pelajarannya meliputi pelajaran agama, tidak mengacu pada kurikulum formal, tidak memberikan gelar/ijazah tapi hanya berorientasi agar lulusan bisa menjadi imam (pemimpin ummat) dan tidak membatasi usia peserta didik.

---

[56] James Konstantin Galvez dan Lianesca T.Panti (15 januari), US Provides $86 M aid for Quality Education, ***The Manila Times***.

Kategori kedua, Madrasah Pembangunan atau Formal. Madrasah pembangunan/formal (MP) merupakan sistem pendidikan agama terstruktur, berjenjang, dan diselenggarakan secara reguler. Jenjangnya meliputi *edadi* (pra-sekolah), Ibtidaiyah (Sekolah Dasar), dan Tsanawiyah (Sekolah Menengah). Mata pelajaran yang disediakan di MP ini meliputi pendidikan dan kebudayaan Islam, juga Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pengajaran. Akan tetapi, model pendidikan MP ini, tidak diakui dan tidak diakreditasi oleh Pemerintah (Departemen Pendidikan). Karena itu, siswa MP tidak bisa pindah ke sekolah umum reguler, karena kompetensinya dianggap kurang memadai.

Kategori ketiga, adalah Madrasah Swasta Standar (MS). Jenis ini dinilai sebagai jenis madrasah (pendidikan Islam) yang sudah sesuai dengan sistem pendidikan Filipina atau sudah memenuhi syarat sebagaimana dituntut Pemerintah melalui Department of Education Order No.51/2004, yang mengatur Kurikulum Standar Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Swasta. Dengan demikian,semua madrasah diharapkan bisa memenuhi persyaratan kurikulum jikalau ingin diakui dan diakreditasi.[57]

Dewasa ini, madrasah dijumpai di hampir seluruh wilayah Mindanao, terutama di daerah mayoritas muslim di

---

[57] Maranos B. Boransing, "Official Definition of Madrasah", Department of Education (tak bertanggal) bersumber dari The Office of the Undersecretary for Mindanao Affairs.

Pusat maupun di Mindanao Barat. Diperkirakan (pada tahun 2010), di Mindanao terdapat 600 hingga 1000 madrasah dengan jumlah murid sekitar 60.000 hingga 100.000 anak. Provinsi dengan jumlah madrasah lebih dari 100 buah, terdapat di Lanao del Sur, Basilan, dan Maguindano. Disamping, madrasah tersebut, Departemen Pendidikan memiliki 459 sekolah negeri yang mengajarkan agama Islam. Jumlah ini belum termasuk di Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) yang memiliki kebijakan pendidikan sendiri yang berbeda dengan kebijakan Departemen Pendidikan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya pemberian layan pendidikan agama, Pemerintah Filipinan melalui Departemen Pendidikan mengembangkan Road-Map untuk Peningkatan Pendidikan Dasar bagi Muslim Filipina, sebagai program komprehensif pembangunan pendidikan bagi muslim Filipina. Road-Map tersebut, diantaranya memuat prinsip-prinsip pengembangan pendidikan Islam sebagai bentuk layanan bagi umat islam Filipina—yang kini masih jauh tertinggal dari saudaranya warga Filipina non-muslim umumnya.[58] Road-Map tersebut diantaranya berisikan pernyataan, bahwa : (1) Setiap muslim, seperti warga Filipina lainnya, memiliki kemampuan

---

[58] Dibanding dengan standar nasional, maka sekolah-sekolah di wilayah ARMM masih tertinggal. Data terakhir menunjukkan bahwa kondisi penduduk di wilayah ARMM dibanding penduduk Filipina/FIL (nasional) adalah : buta aksara (39%ARMM, 15%FIL), drop-outer (23% ARMM, 13%FIL), pekerjaan tanpa pendidikan formal (27% ARMM, 3% FIL), Rata-rata Skor Nasional SLTP (37% ARMM, 51%FIL), Tamat Sekolah Dasar (33% ARMM, 64% FIL), Tamat SLTP (11% ARMM, 51% FIL). Lihat : Joanne Moulton, ***Madrasah Education : What Creative Associates has Learned***, Creative Associates International, Inc., 2008, hal.16.

intelektual dan latar pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi di negaranya. Muslim progresif adalah muslim yang patriotik, cinta damai dan memiliki kemampuan kompetitif untuk dunia kerja di tingkat lokal, nasional, maupun global; (2) Muslim sebagai warga negara Filipina memiliki kesempatan memperoleh status pendidikan lebih tinggi agar bisa berkontribusi bagi negara bukan saja di Mindanao, tapi di seluruh negeri; (3) Muslim Filipina hendaknya menjamin perdamaian abadi melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar sesuai kurikulum (Pemerintah) sehingga sama kualitasnya dengan warga Filipina lainnya (non-muslim); (4) Perlu penguatan sistem pendidikan madrasah (sekarang) sebagai unsur vital sistem pendidikan nasional (Filipina); (5) Proses perdamaian akan terbangun mantap jikalau muslim Filipina memiliki latar belakang pendidikan dasar yang berkualitas tinggi dan berbasis Islam yang bersahabat (Islamic-friendly quality), sehingga pada gilirannya bisa berkontribusi menghilangkan/menghapus sentimen (agama) separatis pada generasi muda kini dan mendatang.

Untuk mewujudkan "Road-Map" pendidikan Islam tersebut, maka Pemerintah mencanangkan sejumlah program, diantaranya : (1) Pengembangan dan pelembagaan pendidikan madrasah; (2) Pembaharuan (upgrading) pendidikan dasar sekuler di sekolah-sekolah dasar dan menengah dalam upaya pelayanan terhadap siswa muslim; (3) Pengembangan dan implementasi sistem pendidikan alternatif bagi siswa muslim putus sekolah; (4) Pengembangan dan

implementasi peningkatan pendidikan ketrampilan hidup bagi siswa madrasah dan muslim putus sekolah; (5) Mendukung program Pemerintah untuk menyediakan kualitas program pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak usia dini muslim Filipina, dan (6) Penyediaan anggaran khusus untuk membantu pendidikan muslim melalui Undang-undang Parlemen.

Madrasah swasta yang menerapkan SMC[59] dalam penyelenggaraan pendidikannya, diantaranya adalah : Madrasah Percontohan Terpadu (Pilot Integrated Madrasah) di Davao Oriental; Sekolah Islam Al Munawaroh, Davao City; WAMY Academy Gensan; Kumayl LC di Koronadal; Darul Uloom di Cotabato City, An Nahdloh Academy di Cotabato City; Madrasah Abubakar Cotabato City; Sultan Kudarat Academy Cotabato City; Kemudian, di Marawi City ARMM : Jamiato Jaanoubel Filibbin, Jamiato Marawi al Islamiya, Khatijah Pilot Madrasah, Princess Jawahir; di Lanao del Sur ARMM ada : Ma'ahad Montashir, Ma'ahad Aziziyah dan Sha'rawi, Madrasah Falah Al Khoirie, Ma'ahad Lanao, Ash Shalihien Integrated School, dll. Di Maguindanao ARMM terdapat : Ibnu Taymiyyah Academy, Ma'ahad Maguindanao, Madrasah Datu Tahir, Ma'ahad Rahmanie Al Islamie. Di Provinsi Kepulauan ARMM, terdapat : Ma'ahad Da'wah, Kulliyato Talipao, Child Madrasah.

---

[59] SMC merupakan kurikulum kombinasi antara subyek pelajaran RBEC (Bahasa Inggeris, Filipino, IPA, Matematika, dan Makabayan) dan pengajaran Bahasa Arab dan mata pelajaran Kajian Islam (Islamic Studies).

Untuk program tahun 2010-2011, terdapat 47 madrasah di wilayah ARMM, yaitu :

1. Ibn Taymiyyah Foundation Academy, Sultan Kudarat, Maguindanao
2. Maahad Minabay Karim Al Islamie, Buldon, Maguindanao
3. Sharif Awliya Academy, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao
4. Maahad Aziziyah Al Araby Al Islamy, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao
5. Sharif Aguak Ibn Ampatuan Islamic Memorial Academy, Pob Sharif Aguak, Maguindanao
6. Maahad Datu Tahir Al Araby Al Islamy, Mamasapano, Maguindanao
7. Maahad Montashir Al Islamy, Masiu, Lanao del Sur
8. Maahad Camalig Al Islamy, Marantao, Lanao del Sur
9. As Salihien Integrated School Foundation, Tamparan, Lanao del Sur
10. Maahad Falah Al Kahirie,Lumba-Bayabao, Lanao del Sur
11. Maahad As Saqofah Al Islamy, Madalum, Lanao del Sur
12. Maahad Madalum Al Islamy, Madalum Lanao del Sur
13. Maahad Al Aziziyah Al Araby Al Islamy, Butig, Lanao del Sur
14. Sha'arawi Integrated Pilot Madrasah, Butig, Lanao del Sur
15. Maahad Lanao Al Islamy, Malabang, Lanao del Sur

16. Dhayfullah Islamic Institute, Marawi City
17. Princess Jawahir Integrated Learning School, Marawi City
18. Jamiatu Muslim Mindanao, Matampay, Marawi City
19. Masiricampo Abantas Memorial Islamic and Science Academy, Marawy City
20. Ibnu Siena Integrated School Foundation, Biyaba, Marawi City
21. Khadijah Pilot Madarasah, Gov. Dr. Mutilan St. Marawi City
22. Jamiatu Marawi Al-Islamia Foundation, Marawi City
23. Jamiatu Janoubel Filibbien, Inc., Tuca-Poona Marantao, Marawi City
24. MSU-TCTO CIAS C.H.I.L.D School, MSU- Bongao, Tawi-Tawi
25. Maahad Da'awah Al-Islamie, Tinambakan, Lamitan, Basilan
26. Kulliyatu Talipao Al-Islamie, Talipao Proper, Talipao, Sulu
27. Amanoddin Mascara Integrated Learning Center, Marawi City Division
28. Ma'ahad Darul Uloolm Al-Islamie, Inc., Lalabuan, Tamparan, Lanao Del Sur I Division
29. Ma'ahad Mahardika Al-Arabie Al-Islamie, Kasanyangan, Bongao, Tawi-Tawi

30. Sahaya Integrated Learning Center, Sahaya Village, Patikul, Sulu
31. Southern Philippine Islamic Institute Foundation, Inc., Siasi, Sulu
32. Maahad Mahwil Ommiah Al-Irshadie, Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao
33. Madrasah Datu Manguda Timan, Pangi, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao
34. Ma'ahad Saada Al-Arabie Integrated School, Nabalawag, Pagatin, Datu Saudi, Maguindanao
35. Madrasatul Irshadil Islamiyah Al-Ibtidaiyah, Salbu, Datu Saudi, Maguindanao
36. Markazul Huzim, Pob. Datu Piang, Maguindanao
37. Ma'ahad Buldon Al-Arabie Al-Islamie, Mataya, Buldon, Maguindanao
38. Ma'ahad Lipawan Al-Arabie Al-Islamie, Lipawan, Barira, Maguindanao
39. Ma'ahad Minabay Al-Islamie, Inc., Minabay, Buldon, Maguindanao
40. Madrasah Nurul Ihsan, Kapatagan, Lanao Del Sur
41. Ma'ahadul Ershad Al-Islamie (Islamic Library), Hadji Buto Street Jolo, Sulu
42. Ma'ahad Kutawato As-Sharqi Al-Islamie (Eastern Kutawato Islamic Institute, Inc.), Pob. Buluan, Maguindanao

43. Madrasatu Dar-Alkhairie, Inc., Dalumangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao
44. Jamellah Madrasatol Muslimeen Al-Islamiah, Bubong, Madaya Lilod, Marawi City
45. Madrasatul Filibbeen As-Shamilah (Philippine Integrated School (PIS) Foundation, Inc.
46. Integrated School for the Science of Peace, Jaltik Foundation, Inc., Marawi City
47. Da'arul Uloum Foundation, Inc., Brgy. Tolali, Marawi City.[60]

2) Aspek Dakwah Islamiyah

Dakwah merupakan alat untuk penyebaran Islam, atau untuk peningkatan kualitas ajaran Islam. Karena itu, kegiatan dakwah menjadi sangat mendasar bagi pengembangan agama. Sebagai kelompok minoritas (muslim hanya 5 % dari total penduduk Filipina), masyarakat muslim Filipina membentuk organisasi dakwah yang dinamai Majlis Dakwah Islam Filipina (Islamic Da'wah Council of the Phillipines/IDCP)—semacam Majlis Ulama Indonesia. IDCP merupakan sebuah organisasi federasi dari 95 organisasi masyarakat muslim (LSM) yang terakreditasi oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan di

[60] Education in the Phillipines-Wikipedia, the free encyclopedia.htm.#cite_note-36

Filipina. IDCP juga merupakan anggota aktif dari Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia and the Pacific (RISEAP), World Assembly of Muslim Youth (WAMY), World Halal Council (WHC), dan World Federation of Islamic Mission, dll.

Program-program IDCP tidak hanya menyangkut program da'wah dalam spektrum sempit, namun menyangkut program lebih luas lagi. Dalam aspek da'wah, IDCP menyelenggarakan program untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan pengamalan ajaran Islam sebagai "way of life" sebagai tugas utamanya.Misalnya, menyelenggarakan program Radio penyiaran agama, Forum Dialog Muslim-Kristen, Pengajian/pemberian kuliah khusus bagi Muallaf; Publikasi buku, majalah, buletin, atau leaflet tentang Islam, serta sertifikasi makanan halal. Dalam aspek kesejahteraan sosial, IDCP menyelenggarakan program bantuan bagi masyarakat pengungsi dan terkena bencana, program kesehatan (medical mission); pelestarian lingkungan, program sanitasi dan air; bantuan modal kecil. Dalam aspek layanan sosial-keagamaan, IDCP menyelenggarakan program pelatihan imam dan pelaksanaan program/aktifitas keagamaan, pelaksanaan ibadah Ramadlan, seperti : zakat fitrah, intensifikasi pengajian, qurban, dsb. Dan, dalam aspek pendidikan IDCP membantu pelaksanaan penguatan/peningkatan kualitas pendidikan (lihat : *Aspek Pendidikan* dalam uraian sebelumnya).

3) Aspek Politik

Sejak awal tahun 1996 hingga pertengahan tahun 1999, konflik di Filipina Selatan terjadi sebagai lanjutan masalah yang belum terselesaikan, antara Pemerintah Filipina dengan kelompok muslim Moro (MNLF, MILF), serta gesekan Pemerintah dengan kelompok Abu Sayyaf, ditambah persoalan perselisihan antara umat Kristen dan Muslim di Mindanao.

Sebagai catatan akhir, pada Oktober 2012, pemerintah Filipina dan kelompok terbesar "pemberontak" Muslim Moro menanda-tangani sebuah perjanjian "perdamaian". Perjanjian ini diharapkan dapat mengakhiri konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok minoritas Moro yang berlangsung selama 4 dasa warsa,[61] di Filipina Selatan dalam upayanya menuntut "self-determination" bagi bangsanya. Setelah 15 tahun terjadi gesekan kekerasan melalui peperangan, pertempuran, atau pembunuhan, pada bulan Oktober 2012 ini, Pemerintah-MILF menanda-tangani perjanjian untuk akhir konflik Mindanao. Jikalau perjanjian ini kurang ditaati semua pihak seperti kebiasaan historik tentang perjanjian antara mereka sejak konflik, maka entah kapan hak dan identitas bangsamoro yang sebagian besar muslim bisa dimilikinya, serta entah kapan konflik di negeri ini bisa berhenti. Dengan kata lain, jikalau seperti itu

---

[61] Menurut Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), konflik Moro-Pemerintah telah memakan korban 150.000 orang lebih, dan sejak tahun 2000 telah memindahkan penduduk hampir 3 juta orang. National Statistics Office's, ***Census of Population Results of 2007.***

keadaannya, maka bukan mustahil, konflik muslim Filipina bakal menjadi sebuah fenomena *"the never ending conflict"* dalam peradaban dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Carmen A., "The Islamization of Southern Phillipines : An Overview", dalam F. Landa Jocano (Ed.), ***Filipino Muslims : Their Social Institutions and Cultural Achievements***, Quezon City : Asian Center, University of the Phillipines.

Alonto, Abdulghafur M.,***Management and Organization of Madrasah : The Madrasahs in the Phillipines and Its Role in National Integration***, Iligan City, Coordination Center for Research and Development, Mindanao State University-Illigan Institute of Technology.

Anderson, M.L dan H.F Taylor, ***Sociology : The Essentials***. Belmont, CA : Thomson Wadsworth, 2009.

Anthony Reid, "Islamization and Christianization in Southest Asia : The Critical Phase, 1550-1565", dalam ***Southest Asia in the Early Modern Era : Trade, Power, and Belief***(Anthony Reid, ed.), New York, Cornell University Press.

Asian Development Bank, Regional and Sustainable Development Department, Manila***Indigeneous***

People/Ethnic Minorities and Poverty Reductionin Phillipines, Phillipines, June 2002.

Aspillera, Parauman S., (1956) ***Basic Tagalog,*** Manila Time Publishing Co.

Bara, Hannibal., ***The History of the Muslim in Phillipines***.

Berry, J.W., dalam "Immigration, Acculturation, and Adaptation" dalam ***Applied Psychology : An International Review,***

Boransing,Maranos B., "Official Definition of Madrasah", Department of Education (tak bertanggal) bersumber dari The Office of the Undersecretary for Mindanao Affairs.

Buenda, Rizal G., (2002) "A Re-examination of Ethnicity and Secessionist Movements in the Phillipines and Indonesia : The Moros and Acehnese", dalam ***Phillipine Political Science Journal.***

Cannel, Fenella., ***Power and Intimacyin the Christian Phillippines,***Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

Che Man, W.K. , ***Muslim Separatism : The Moros of Southern Phillipines and the Malay Southern Thailand,*** Quezon City : Ateneo de Manila Unverity Press, 1990

Majapahit Overseas Empire, Digital Atlas of Indonesian History,

Dolan, Roland E., (Ed.), 1991, ***Phillipines : A Country Study,*** Washington, GPO for the Library Congress).

Francisco, Juan R., (1964) ***Indian Influences in The Phillipines with Special Reference to Language and Literature,*** Quezon City, University of Phillipines.

Galvez,James Konstantin., dan Lianesca T.Panti (15 januari), US Provides $86 M aid for Quality Education, ***The Manila Times***.

Gowing, Peter G., (1978), "Of Different Minds : Christian and Muslim Ways of Looking at Their Relations in the Phillipines", dalam ***International Review of Missions.***

Index Mundi, ***Phillipines Demographic Profile***, 2011.

International Information Office,***Program of the National Democratic Front of the Phillipines,*** http://www.ndfp.net.joom15/index.php.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the Philippines

Jane's Intelligence Review, April 2002

Josh McDowell & Don't Stewart, ***Handbook of Today's Religions*** , Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1983

Myron Malkiel dan Jirmounsky (1939), "The Study of The Artistic Antiquities of Dutch India", dalam ***Harvard Journal of Asiatic Studies 4***, Harvard-Yenching Institutes, 59- www/wikipedia.org/wiki/Nagarakretagama.

National Statistics Office's, ***Census of Population Results of 2007.***

wikipilipinas.org/index.php. Hispanic culture in the Phillipines. www.royalsultanate.weeby.com.

McKenna,Thomas.,***Muslim Rulers and Rebels,*** University of California Press, Berkeley, 1990.

Moulton, Joanne.,***Madrasah Education : What Creative Associates has Learned,*** Creative Associates International, Inc., 2008.

Nariyoshi Tamaru, "Soka Gakkai in Historical Perspective" dalam David Machahek dan Bryan Wilson, (eds.), 2000, ***Global Citizens : The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World,*** New York : Oxford University Press

Rasul, Jainal D., *Agonies and Dreams : The Filipino Muslims and Other Minorities*, Quezon City : Care Minority, 2003

Republic Acts No.8371 on ***The Indigeneous Peoples Rights Act*** (IPRA) of 1997, Chapter II, Section 3h.

Ricklefs, M.C., ***History of Modern Indonesia since c.1300,*** 2nd edition, Stanford : Stanford University Press, 1991.

Syed M. Lingga., Abhousad., Lingga,"Muslim Minority in the Phillipines", makalah pada Konferensi SEACSN bertemakan ***Issues and Challenges for Peace and Conflict Resolution in Southeast Asia,*** Penang Malaysia, 12-15 Januari 2004.

The Encyclopedia Americana, International Edition, 1974.

Wheatcroft, Andrew., ***Infidels : A History of the Conflict Between Christendom and Islam,*** 2003

Wilson, Bryan., eds., 2000, ***Global Citizens : The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World***, New York : Oxford University Press.

www.hinduwisdom.info/Glimpses_XV.htm tentang *"A Glorious Hindu Legacy : Indic Influence in Southeast Asia"*.

www.wikipedia.org/Hinduism in the Phillipines.

Wikipedia, Education in the Phillipines the free encyclopedia.htm.

Yinger, Milton, J., ***Religion, Society and the Individual : An Introduction to the Sociology of Religion***, The Macmillan, New York, 1960.

PROBLEMATIKA INTEGRASI MUSLIM DI FILIPINA PASKA KOLONIAL

Oleh: Arif Syibromalisi

PENDAHULUAN

Sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di Nusantara atau di kawasan yang sekarang menjadi Asia Tenggara merupakan salah satu tema kajian yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Persoalan sejarah awal masuknya Islam di kawasan ini pun hingga sekarang dapat dikatakan belum menemukan kesepakatan terutama mengenai kapan masuknya, siapa pembawanya, wilayah mana yang pertama kali diisalamkan, dan bagaimana proses pengislamannya. Sedangkan terkait dengan perkembangan-nya, banyak tema yang masih menyisakan berbagai pertanyaan. Misalanya, dari aspek politik, kapan komunitas Islam di wilayah ini mencapai kekuasaan politik dan menjadi sebuah "negara", wilayah mana saja yang mencapai kekuasaan politik tersebut dan dalam bentuk apa kekuasaan tersebut; bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan bagaimana pula hubungannya di antara berbagai wilayah yang memiliki kekuasaan politik tersebut.

Asia Tenggara adalah salah satu wilayah yang banyak menganut agama Islam. Wilayah tersebut sebelah Timur India sampai laut Cina yang mencakup Indonesia, Malaysia dan

Filipina Selatan yang terletak di Negara Filipina. Harry Benda membagi Asia Tenggara menjadi tiga (3) wilayah kutural atau berdasarkan atas pengaruh yang diterima wilayah tersebut. *Pertama*, wilayah *Indianized Sotheast Asia* adalah Asia Tenggara yang telah dipengaruhi orang-orang India (di-India-kan), seperti kerajaan kuno di Indonesia beragama Hindu dan Budha. *Kedua*, wilayah *Sinicized Southeast Asia* adalah Asia Tenggara yang telah dipengaruhi orang-orang Cina (di-Cina-kan) yaitu Negara Vietnam. *Ketiga*, wilayah *Hispanized Southeast Asia* adalah wilayah Asia Tenggara yang telah dipengaruhi orang-orang Spanyol (di-spanyol-kan) yaitu Negara Filipina.[1]

Negara Filipina merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara Filipina berbentuk Republik dan beribukota Manila City. Negara Filipina Merdeka pada tanggal 4 Juli 1946. Wilayah Filipina terletak di antara 5 derajat dan 21 derajat Lintang Utara serta 117 derjat dan 126 derjat Bujur Timur. Batas-batasannya, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina dan Pulau Formosa (Taiwan), Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah laut Kepulauan Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Filipina memiliki kurang lebih 7.107 pulau besar dan kecil, dengan perkiraan luas wilayahnya sekitar 300.000 kilometer persegi. Pulau terbesar di antara ribuan pulau

---

[1] Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), vi-vii.

tersebut adalah: Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Samar, Pulau Panay, Pulau Mindoro, Pulau Negros, Pulau Visayan, Pulau Palawan, Pulau Leyte, Pulau Bohol, dan Pulau Masbate.

Kota metropolitan Manila yang menjadi Ibu kota Republik Filipina terletak di wilayah Selatan Pulau Luzon. Kota terpenting lainnya di Filipina antara lain seperti Zamboanga, Davao, Tarlac, San Pablo, Batangas, Legaspi, Iloilo, Ormoc, Naga, dan kota Calbayong.

Secara umum keadaan alam di negara Filipina tidak jauh berbeda dengan Indonesia, begitu pula dengan corak penghidupan rakyatnya. Melihat kota-kota di Filipina memang terasa ada perbedaan suasana karena lebih kebarat-baratan, tetapi wialayah pedesaannya hampir tak berbeda dengan pedesaan kita.

Kepulauan Filipina juga kaya dengan wilayah hutan lindung yang masih asli di Luzon Utara dan Mindanao, daerah perbukitan, gunung-gunung, jurang-jurang curam, dan lembah-lembah yang subur. Danau-danau terbesar di Filipina terdapat Pulau Luzon, Danau Laguna de Bay, dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Karena keadaan alamnya termasuk subur, penduduk negeri ini sebagaian besar memperoleh penghasilan dari bertani dan berkebun. Sawah-sawah dijumpai hampir di semua kepulauan negeri itu.

Keadaan iklim di Filipina juga tidak berbeda jauh dengan Indonesia, Iklim di Kepulauan Filipina termasuk wilayah yang dipengaruhi oleh angin muson yang

memberinya dua jenis musim, yaitu musim hujan antara juni sampai Februari dan Musim Kemarau antara Maret sampai Juli. Di beberapa wilayah hujan turun amat lebat, sementara di wilayah lainnya agak jarang. Angin yang banyak membawa hujan adalah yang bertiup dari arah Barat Daya dan Barat Laut. Sebaliknya, bila angin taufan muncul dari arah Utara serta Timur Laut, seluruh wilayah Filipina mengalami penderitaan akibat serangnya.

Curah hujan tertinggi dialami Pulau Luzon. Curah hujan yang menimpa kota Manila bisa mencapai 1.200 mm setahunnya. Curah hujan tertinggi di Filipina mencapai 2.500 mm, dibandingkan dengan curah hujan tertinggi di negeri Belanda misalnya hanya sekitar 750 mm setahunnya.[2]

Agama Islam di Filipina merupakan agama terbesar yang kedua. sedangkan agama yang mendominasi atau mayoritas di Filipina adalah agama Katolik. Minoritas Muslim di Filipina dikenal dengan sebutan Muslim "Moro" (sebutan orang-orang Islam), komunitas Muslim Moro tersebut tinggal di kepulauan Mindanao dan Kepulauan Sulu. Kedua pulau inilah yang dahulu tidak berhasil di intervensi keyakinannya oleh penjajah spanyol dikarenakan terdapat dua Kesultanan Islam yang telah cukup lama berdiri dan mempunyai pengaruh kuat di selatan sebelum spanyol datang menjajah Filipina. Kedua kesultanan islam itu adalah Kesultanan

---

[2] Disarikan dari http://www.peradabanbangsa.com/2012/10/letak-geografi-dan-keadaan-alam-filipina.html yang bersumber dari Syahbuddin Mangandaralam. 1988. *Mengenal Dari Dekat Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*. Penerbit Remadja Karya. Bandung.

Maguindanao dan Sulu.Pada tahun 1975 jumlah orang Islam di Filipina sebanyak 3 juta orang Islam atau 7% dari seluruh jumlah penduduk negara tersebut adalah 42.070.600. Kelompok-kelompok Islam Filipina perkiraan pada tahun 1975 adalah Maguindanao, Maranao dan Iranun, Tausug, Samal, Yakan, Jama Mapun, Palawani dan Molbog (kelompok-kelompok palawan), Kalagan, Kolibugan, dan Sangil. Filipina selatan mayoritas beragama Islam terletak di kepulauan Mindanao dan kepulauan Sulu. Di kepulauan Mindanao terdapat kelompok terbesar yang penduduknya mayoritas beragama Islam yang dinamakan kelompok orang Maguindanao yang tinggal di Cotabato. [3]

Keberadaan umat Islam yang minoritas di tengah pemerintah dan masyarakat yang non-Muslim membuat Muslim Filipina (Moro atau Bangsamoro)[4] menghadapi berbagai macam penindasan dan perampasan hak, sehingga menuntut bangsa Moro melakukan perlawanan kepada pemerintah. Hal ini pula yang membuat Muslim Filipina menginginkan merdeka dari Filipina. Mereka menganggap hak-hak beragamanya tidak dipenuhi oleh pemerintah Non-islam di Filipina. Di sisi lain, posisi Pulau Mindanao dan Sulu yang berbatasan dengan Malaysia—yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam—semakin membulatkan tekad

---

[3] Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainurry (Jakarta: LP3ES, 1989), 2-3.

[4] Asal usul Moro adalah sebutan yang disematkan orang Spanyol kepada Muslim Filipina ketika penjajahan spanyol.

mereka untuk berserikat ke sana, daripada berintegrasi ke Filipina.

Seperti keadaan minoritas Muslim India yang menghadapi masalah kesetaraan hidup dengan orang non-Muslim di negeri yang sama. Mereka tidak dapat berjuang untu mengubah keadaan mereka. Mereka terpaksa menyelaraskan diri dengan apa yang mereka anggap sebagai hal yang pada dasarnya tidak dapat diselaraskan; yaitu tuntutan warga Negara Republik India yang umumnya non-Muslim dengan tuntutan Islam yang mensyaratkan keanggotaan dalam sebuah komunitas tertutup yang patuh kepada hukum islam (*syariát*). Begitu pula kaum minoritas Filipina yang terperangkap ke dalam dilemma. Di satu sisi harus menyelaraskan tuntutan konsepsi keimanan mereka yang tradisionalis. Sedangkan di sisi lain, mereka dituntut untuk menjadi warganegara yang modern, yang didominasi kaum non-Muslim dan melindungi kebebasan agama.[5]

Problematika inilah yang menghiasi kehidupan bangsamoro paska penjajahan Spanyol dan Amerika, di samping problem-problem lain seperti perampasan tanah dan lain-lain. Menarik untuk dibahas, bahwa cikal bakal gerakan separatis untuk merdeka dari Filipina sesungguhnya sudah ada semenjak zaman dua kesultanan Islam itu berdiri, dan sampai sekarang masih melakukan perlawanan kepada pemerintah.

---

[5] Peter G. Gowing, *Islam di Asia Tenggara*, Hasan Basari (Terj.), (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 105

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengaruh penjajahan Spanyol dan Amerika terhadap Muslim Filipina, kedudukan Muslim Filipina paska Kolonial serta penyebab keengganan Muslim Filipina untuk berintegrasi ke Negara Filipina.

PENGARUH KOLONI SPANYOL DAN AMERIKA

A. Pengaruh Koloni Spanyol terhadap Perkembangan Muslim Filipina

Sebelum masuk ke pengaruh koloni Spanyol, akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina. Keberhasilan Sultan Muhamad al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada 1453 yang dilanjutkan dengan blokade perdagangan kerajaan Turki Utsmani di Laut Tengah terhadap pedagang-pedagang Eropa Barat sehingga Bangsa Barat mencari daerah produsen rempah-rempah merupakan alasan kedatangan Spanyol ke Filipina. Dengan keberhasilan Spanyol dan Portugis menghalau dan menghancurkan kekuatan Islam di semenanjung Iberia tahun 1942, membuat Portugis dan Spanyol berkembang menjadi kekuatan "Pelindung agama Kristen" yang direstui Paus di Roma untuk menaklukkan daerah-daerah baru untuk dikristenkan. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari antara Spanyol dan Portugis maka Paus Alexander pada tahun 1494 di Todersillas membut perjajian yang dikenal dengan Perjanjian Todersillas yang berisi membagi dunia

menjadi dua. Daerah-daerah di sebelah barat garis Todersillas menjadi milik Spnyol dan bagian timur milik Portugis.

Pada tahun 1521, Ferinand de Magelhaens, seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk Raja Karel V dari Spanyol berhasil mendarat di Pulau Cebu di Filipina. Atas nama Raja, sesudah upacara Missa dipasanglah sebuah salib sebagai tanda bahwa tanah itu dijadikan bagian dari kerajaan Spanyol Raya. Konflik pun terjadi antara penduduk asli dengan para pendatang asing ini. Dalam pertempuran Magelhaens tewas. Sisa anak buahnya kembali ke Spanyol untuk melaporkan semua yang terjadi. Mereka menamakan kepulauan yang telah mereka temukan itu dengan nama Pulau St. Lazarus.

Pada mulanya raja kurang memperhatikan atas kepulauan ini, karena sedang sibuk membendung kekuatan Protestanisme di negerinya. Baru pada tahun 1526 raja mulai memikirkannya, kemudian mengirimkan sebuah tim yang dipimpin oleh Fernando Cortez, penakluk Mexico untuk menyelidiki kepulauan ini. Dua orang anak buahnya meninggal. Pada tahun 1542 berangkatlah Laksamana Ruy Lopez dan Vilalobos dari Puerta Navidad (Mexico) ke Filipina. Vilalobos menganti nama kepulauan St. Lazarus menjadi Philipinese sebagai tanda kehormatan kepada putera mahkota Don Philips II, putera Maharaja Karel V. Setelah secara resmi berkuasa mengganti ayahnya, Philips II mencurahkan semua kekuatannya untuk menguasai kepulauan yang dinisbatkan pada namanya.[6]

---

[6] Disarikan dari *http://chaerolriezal.blogspot.com/2012/12/filipina-di-bawah-penjajahan-spanyol.html*. Tanggal akses 18/12/12

Spanyol datang ke bumi Filipina untuk menjajah pada abad 16 atau sekitar tahun 1565 M. Mereka berlabuh di Cebu, salah satu pulau yang berada di utara Mindanao. Secara umum, tujuan mereka adalah untuk menyebarkam agama (motif agama) dan mencari kekayaan (motif ekonomi), di bawah nama Raja Philip II yang kemudian menjadi asal usul nama Philippines (Filipina).[7] Motif agama ini terlihat lebih kental pada penjajahan Spanyol terhadap Filipina. Mereka melakukan katolikisasi terhadap masyarakat Filipina.

Akan tetapi Spanyol hanya berhasil melakukan katolikisasi di bagian tengah dan utara, sedangkan di selatan mereka tidak berhasil melakukan katolikisasi terhadap dua kesultanan Islam, yaitu kesultanan Maguindanao dan Sulu. Dua kesultanan di pulau Mindanao ini cukup kuat dan mengakar sehingga mampu memobilisasi perlawanan rakyatnya. Tercatat, kedua kesultanan ini terus menerus melakukan perlawanan dari semenjak penjajahan Spanyol hingga berakhirnya penjajahan Amerika.[8] Yegar menjelaskan Muslim Sulu dan Mindanao menganggap mereka telah menjadi bagian dari Dar Islam dan melawan penjajahan Spanyol adalah jihad atau "perang suci. Walaupun Sulu dan Mindanao mempunyai musuh yang sama, yaitu bangsa

---

[7] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, (Kansas: School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Forth Leavenworth, 2009) h. ii

[8] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), h. 45

spanyol dan bangsa Filipina yang ter-kristen-kan, keduanya tidak melakukan upaya koordinasi antara keduanya.[9]

Sebelum Spanyol datang pada abad 16 M, dakwah Islam telah mencapai Manila yang sekarang menjadi ibukota Filipina, yang terletak di wilayah utara negara tersebut dengan tanpa perlawanan fisik maupun perang. Nama Manila sendiri diadopsi dari kata *Fi Amanillah* (dalam lindungan Allah), yang menurut catatan sejarah sebelum Spanyol datang menjajah di tahun 1565, para sultan Islam dari Brunei Darrussalam dan Johor sudah terlebih dahulu menempati wilayah tersebut.[10]

Untuk memuluskan tujuan penjajahan yang bermotif ekonomi, Spanyol menggunakan politik *devide and rule* (pecah belah dan kuasai). Sedangkan untuk memuluskan motif agama, mereka melakukan *mission-sacre* (misi suci/kristenisasi).[11] Telah terjadi peperangan selama 334 tahun di Filipina, antara Bangsamoro dan Spanyol. Spanyol yang jauh dari Eropa kekurangan tenaga dan sumber untuk meneruskan peperangan melawan Bangsamoro. Menyadari fakta ini, mereka tidak mungkin menang kecuali menggunakan strategi lain yaitu mengandu domba antara orang Filipina yang telah masuk Katolik untuk memerangi

---

[9] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace,* h. 10

[10] Lihat *http://peperonity.com/go/sites/mview/muallaf/24657194*. tanggal akses 19/12/12.

[11] Ajid Thohir, *Kajian Sejarah Islam di Filipina*, makalah yang disampaian dalam *Workshop Historiografi Islam di Asia Tenggara*, 1-3 Desember 2012 di Hotel Bukit Indah Purwakarta.

Bangsamoro. Spanyol menanamkan benih perpecahan antara kedua kelompok tersebut. [12]

Dengan trik kekerasan, persuasi atau menundukkan secara halus dengan hadiah-hadiah, orang-orang Spanyol dapat memperluas kedaulatannya ke seluruh perkampungan *(barangay)* Filipina yang terpencar-pencar secara luas. Genderang perang Kristen dan Islam bernama 'Perang Moro' mulai digelar. Politik perang sebangsa pun digulirkan. Para penjajah Spanyol membuat peta pertempuran antara indo-Kristen (para pribumi Filipina yang telah ter-Kristenkan) dengan orang-orang Moro (sebutan orang-orang Spanyol untuk menamakan pribumi Filipina yang beragama Islam karena mereka mempunyai kepercayaan yang sama dengan orang-orang Moor Spanyol).[13]

Kendati demikian, Spanyol tidak pernah berhasil menundukkan Bangsamoro yang dikomandoi oleh dua kesultanan yang selalu memimpin perlawanan dengan sengit. Sepanjang sejarah kolonialisme Spanyol di Filipina, tercatat paling tidak terdapat enam kali periode peperangan antara bangsa Moro dengan Spanyol.

Perang Moro I, diawali dengan kedatangan bangsa Spanyol pada tahun 1565 yang dipimpin oleh Don Miguel Lopes de Lagaspi dan berakhir ketika mereka berhasil menjajah Brunei Darussalam di Borneo pada tahun 1578. Dua

---

[12] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, h. 10

[13] Lihat *http://peperonity.com/go/sites/mview/muallaf/24657194.* Tanggal akses 19/12/12

tahun kemudian peperangan berlanjut kembali, pasukan Lagaspi berhasil mengalahkan Raja Sulaiman, kepala pemerintahan di Manila dan menyerahnya Raja Lakadula yang memerintah di Tondu. Sejak saat itu secara resmi Filipina dijajah Spanyol.

Perang Moro II tahap ini berlangsung antara tahun 1587-1599. Perang Moro III dimulai dengan penyerangan kaum Muslim ke Kepulauan yang telah dikuasai Spanyol. Berakhir pada tahun 1635, ketika Spanyol atas bantuan orang-orang Jesuit berhasil membuat benteng kuat di Zamboanga. Perang Moro IV dititikberatkan pada keberhasilan Sultan Nasrudin dalam mempersatukan kaum muslim yang tersebar di berbagai pulau di bawah kepemimpinannya dalam sebuah perjanjian persekutuan pada tahun 1645. Beberapa daerah yang bergabung antara lain: Lanao, Zamboanga, Davao, Cotabato, Cagayan de Auro dan Bukitnon. Pada tahun 1656, Sultan Nasrudin mengumandangkan seruan jihad kepada seluruh kaum muslim untuk memerangi Spanyol. Pada tahun 1663 Spanyol berhasil diusir dari wilayah Zamboanga dan berjanji tidak akan melakukan intervesi terhadap sultan-sultan di wilayah selatan.

Sedangkan Perang Moro V berkecamuk sejak tahun 1718, ketika pasukan Spanyol ingin mencoba lagi menaklukan Zamboanga dan berakhir ketika Spanyol berhasil menaklukan ibukota Kesultanan Sulu, Jolo. Perang Moro VI pecah pada tahun 1851 ketika Spanyol menduduki ibukota Sulu, Jolo dan berakhir dengan perjanjian yang dipaksakan paa tahun 1876. Tahap akhir Perang Moro ini tidak berarti perlawanan kaum

Muslim padam, diberbagai tempat berkecamuk perlawanan terhadap Spanyol pada tahun 1898, ketika pasukan Amerika Serikat berhasil mengusir Spanyol dari Filipina. Filipina pun memasuki era baru di bawah penjajahan Amerika Serikat. Di bawah penjajahan Amerika Serikat kekuatan Islam nyaris lumpuh sama sekali, kecanggihan persenjataan dan altileri tentara Amerika Serikat telah berhasil meruntuhkan sebagian milisi Islam.[14]

Setelah Spanyol kalah perang dari Amerika Serikat pada tahun 1898 M, mereka memasukkan dua Kesultanan Islam atau wilayah Mindanao ke dalam wilayah yang diserah terimakan kepada AS dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan *Paris Treaty*.[15]

Pada tahun 1896, pemberontakan kaum Kristen yang dikepalai Emilio Aguinaldi di pulau sebelah utara Luzon memastikan bahwa Spanyol sudah tidak mendominasi dan menaklukkan Mindanao. Spanyol lebih konsentrasi menumpas pemberontakan itu sehingga Mindanao menjadi sumber ekonomi untuk misi perlawanan. Aguinaldo mencoba untuk memperoleh dukungan dari Muslim dengan mengakui kaum Muslim sebagai bagian intergral orang Filipina. Akan tetapi kaum Muslim tidak menggubris permintaan Aguinaldo karena mengaggap Spanyol dan orang Kristen adalah musuh mereka. Kebencian terhadap orang Filipina Kristen inilah

---

[14] Disarikan dari *http://chaerolriezal.blogspot.com/2012/12/filipina-di-bawah-penjajahan-spanyol.html*. Tanggal akses 18/12/12

[15] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai,* h. 45

yang terbawa ketika Amerika datang ke Mindanao setelah koloni Spanyol dikalahkan oleh Amerika pada tahun 1898.[16]

Selain dengan politik *devide and rule* (pecah belah dan kuasai), *mission-sacre* (misi suci/kristenisasi), trik kekerasan dan persuasi, penjajahan Spanyol di Filipina dilakukan dengan kegiatan misi dan kerja-kerja sosial. Di wilayah utara para padri sangat giat untuk mewujudkan pusat-pusat katolik. Disekeliling geraja dan biara, didirikan bangunan-bangunan sekolah, badan-badan amal dan sebagainya. Mereka juga giat melakukan kerja sosial seperti membuat jembatan, jalan raya dan saluran-saluran air. Maka dalam waktu singkat bermunculan desa-desa katolik. Selain membawa pengaruh Barat, para paderi menggunakan adat-istiadat setempat untuk tujuan tertentu. Misalnya, mereka menerjemahkan kitab suci Injil ke dalam bahasa Tagalok untuk memudahkan cara penggunaannya bagi penduduk asli Filipina. Para paderi juga diberi hak untuk menguasai tanah-tanah yang luas. Lambat laun, kekuatan ekonomi dan perdagangan dunia serta harga-harga tanah menjadi mahal, membanjirlah dari Eropa para paderi Katolik yang lebih mengutamakan urusan duniawi daripada tugas keagamaannya. Mereka lama kelamaan menjadi tuan tanah yang serakah yang mampu mengintimidasikan penduduk karena kekayaan mereka. Mereka menggencet dan memeras para petani Filipina. Tanah-tanah rakyat mereka ambil begitu saja. Pada zaman ini struktur kekuasaan secara politis masih dipegang oleh

---

[16] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, h. 12

pemerintah Spanyol. Namun, kekuatan sosial ada di tangan kaum paderi.

Kepincangan sosial melahirkan kemiskinan di kalangan rakyat dan oleh Joze Rizal diabadikan dalam bukunya Noli Me Tangere (Jangan Sentuh Aku) yang berkisah tentang kebusukan dan kesewenang-wenangan pemerintahan Spanyol serta penindasan para pemimpin Gerja Katolik. Tanah-tanah milik rakyat dikuasai seenaknya oleh kaum paderi, tetapi pemerintah Spanyol mencegahnya. Karena bangsa Filipina dianggap tidak lebih dari hewan yang mereka sebut Indio. Para Indio hanya berharga di mata orang Spanyol karena mereka mempunyai tenaga untuk diperas dan tanah-tanah untuk dikuasai. Untuk melangengkan kekuasaaannya, kaum paderi katolik berusaha menguasai pemerintahan melalui pejabat-pejabat yang banyak melakukan kesalahan. Dengan senjata pengampunan dosa para paderi berhasil memaksa mereka untuk berpangku tangan pada setiap kegiatan gereja yang merugikan penduduk pribumi. Bila pejabat itu membangkan, mereka dapat dipermalukan dalam setiap khotbah di gereja-gereja dan tidak diberi pengampunan dosa.

Kekayaan semakin bertumpuk di tangan para pemimpin gereja. Dengan kekayaan itu mereka berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa disamping pemerintah Gubernur Jenderal yang memerintah dari istana Malacanang, yang tidak patuh pada keinginan gereja, dengan mudah dicopot karena pengaruh Gereja sudah sampai di Madrid. Kedaaan ini terus menerus berlangsung

berabad-abad selama Filipina berada di bawah penjajahan Spanyol. [17]

B. Pengaruh Koloni Amerika terhadap Perkembangan Muslim Filipina

Spanyol kalah perang dari Amerika Serikat pada tahun 1898 M. Dibanding Spanyol, Amerika lebih sukses mendekati Bangsamoro, sehingga selama 21 tahun, Amerika dapat membangun kehidupan masyarakat Moro yang bisa diajak bekerjasama. Amerika melakukan perubahan sosial-ekonomi dengan membangun infrastuktur yang massif. Mereka juga melucuti senjata orang Moro, akan tetapi tetap membiarkan kaum Muslim melaksanakan ajaran Islam.

Proyek infrastruktur Amerika adalah puncak kesuksesan pasukan Amerika di Sulu dan Mindanao. Pada mulanya, perlawanan terhadap proyek ini sangat sengit. Sekolah-sekolah pemerintah yang dibangun di mana-mana, sehingga membuat bangsamoro takut sekolah-sekolah pemerintah itu akan menggusur sekolah-sekolah tradisional mereka yang berbasis Islam. Seperti yang dilakukan Jenderal Bliss, ia memberikan peralatan dan dukungan terhadap sekolah-sekolah tradisional Islam. Ia ingin membuktikan bahwa Amerika tidak berusaha meng-kristenisasi kaum Muslim.[18]

---

[17] Disarikan dari http://chaerolriezal.blogspot.com/2012/12/filipina-di-bawah-penjajahan-spanyol.html. Tanggal akses 18/12/12

[18] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, h. 12

Infrastruktur yang dibangun Amerika diantaranya rel kereta api dan jalan-jalan umum yang melintasi Mindanao. Begitu pula sambungan telefon yang menghubungkan seluruh pulau, sehingga memungkinkan orang Amerika dan orang Filipina Kristen berhubungan dengan orang-orang di pedalaman.

Pada tahun 1910, Brigjen Bliss menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Brigjen Pershing. Pershing meneruskan reformasi sosial-ekonomi di daerah Selatan. Namun, ia meneruskan langkah pada 1913 untuk melucuti senjata bangsamoro. Pelucutan senjata ini menjadi keputusan yang tidak popular/ lemah, karena bangsamoro menginginkan tersedianya senjata untuk melawan perlakuan orang Filipina-Kristen. Beberapa desa memang mau dilucuti dan menyerahkan senjata mereka, akan tetapi di beberapa area seperti pulau Julu di Sulu, 5000 orang Moro memutuskan untuk memerangi penjajah Amerika, sehingga Amerika terpaksa menghancurkan pejuang Muslim itu yang terus menerus melawan Amerika.[19]

Sebagai pemerintahan, Amerika Serikat lebih agresif daripada Spanyol, bukan saja mereka mulai mengeksploitasi daerah-daerah kosong jarang penduduk yang masih luas di Pulau Mindanao, akan tetapi mereka juga mendatangkan transmigran dari bagian utara dan tengah- yang notabene

---

[19] *Ibid*, h. 13

beragama Katolik- untuk kepentingan Industri dan pengembangan pertanian serta perkebunan.[20]

Hingga pada tahun 1970 penduduk Muslim di Mindanao secara keseluruhan dengan Lumad[21] lainnya tinggal sekitar 30% di kepualauan Mindanao, selebihnya adalah para pendatang yang beragama katolik. Dengan kebijakan transmigrasi ini, penduduk Muslim atau Muslim Moro kemudian terdesak ke pinggiran dan terkonsentrasi di beberapa daerah saja. Kini hanya tinggal sekitar empat provinsi yang mayoritas Muslim.[22]

Yang menarik adalah Amerika tidak terlalu peduli dengan misi agama, yaitu mengajak bangsamoro masuk ke agama Islam. Bangsamoro pun mengakui itu, akan tetapi menurut Yegar, mereka memilih untuk diatur oleh yang bukan orang Filipina Kristen, karena orang Muslim berkeyakinan bahwa orang Filipina Kristen selalu menciba menghancurkan budaya dan tradisi yang berjalan dengan agama Islam. Amerika membiarkan kaum Muslim melaksanakan ajaran mereka selagi tidak mengganggu atau bertentangan dengan undang-undang Amerika. Bangsamoro tidak pernah mendapati sikap itu pada penjajahan Spanyol, karena bangsa Spanyol hanya membawa missionaris dan tentara yang membunuh atau memaksa mereka untuk masuk Kristen. Muslim Moro mengapresiasi pandangan kebebasan

---

[20] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*, h. 47

[21] Lumad adalah penduduk asli Filipina yang masih animin atau *pagan.*

[22] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*, h. 48

beragama Amerika, akan tetapi tidak bisa memahami prosedur hak kepemilikan properti bangsa Amerika.

Kondisi inilah yang terjadi pada bangsamoro dan Amerika. Bangsa amerika tidak mengetahui bagaimana hak kepemilikan menurut Muslim, bangsa amerika melihatnya dengan kacamata Barat, bukan kacamata Islam. Muslim Moro melihat property adalah bagian dari komunitas dan dapat dipakai oleh siapa saja dalam komunitas itu. Berbeda dengan pemerintah Amerika di Mindanao, yang membiarkan tanah mereka jika dapat dapat dibuktikan kepemilikannya. Pembuktian inilah yang dirasa berat oleh bangsamoro, karena mereka tidak mengetahui secara pasti asal usul tanah dari leluhur mereka. Dari situlah konflik properti komunal terjadi.[23]

Muslim Moro meyakini tanah mereka adalah bagian dari hak leluhur yang tidak dapat diperjualbelikan atau berpindah tangan kepada orang lain. Tanah, menurut mereka adalah kepunyaan Allah yang diperuntukkan untuk komunitas Dar Islam. Departemen Mindanao dan Sulu yang dijalankan oleh penjajah Amerika untuk berintegrasi dengan orang Filipina Islam berkuasa di Filipina Selatan sejak 1914-1920. Departemen ini menginginkan perpindahan orang Filipina Kristen dari pulau yang sudah over-populasi seperti Luzon agar dapat membangun sumber natural dan ekonomi potensial yang diberikan di Mindanao.

---

[23] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace,* h. 14

Untuk menggabungkan ekonomi Moroland ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan AS yang sangat kapitalistis seperti *Land Registration Act No. 496* (November 1902) yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian *Philippine Commission Act No. 718* (4 April 1903) yang menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datu, atau kepala Suku Non-Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah. Demikian juga *Public Land Act No. 296* (7 Oktober 1903) yang menyatakan semua tanah yang tidak didaftarkan sesuai dengan Land Registration Act No. 496 sebagai tanah negara, *The Mining Law of 1905* yang menyatakan semua tanah negara di Filipina sebagai tanah yang bebas, terbuka untuk eksplorasi, pemilikan dan pembelian oleh WN Filipina dan AS, serta *Cadastral Act of 1907* yang membolehkan penduduk setempat (Filipina) yang berpendidikan, dan para spekulan tanah Amerika, yang lebih paham dengan urusan birokrasi, untuk melegalisasi kalim-klaim atas tanah.

Pada intinya ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum Muslimin (tanah adat dan ulayat) oleh pemerintah kolonial AS dan pemerintah Filipina di Utara yang menguntungkan para kapitalis.

Pemberlakukan *Quino-Recto Colonialization Act No. 4197* pada 12 Februari 1935 menandai upaya pemerintah Filipina yang lebih agresif untuk membuka tanah dan menjajah Mindanao. Pemerintah mula-mula berkonsentrasi pada

pembangunan jalan dan survei-survei tanah negara, sebelum membangun koloni-koloni pertanian yang baru. NLSA - *National Land Settlement Administration* - didirikan berdasarkan Act No. 441 pada 1939. Di bawah NLSA, tiga pemukiman besar yang menampung ribuan pemukim dari Utara dibangun di propinsi Cotabato Lama.

Bahkan seorang senator Manuel L. Quezon pada 1936-1944 gigih mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang Utara dengan tujuan untuk menghancurkan keragaman (homogenity) dan keunggulan jumlah Bangsa Moro di Mindanao serta berusaha mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Filipina secara umum.

Kepemilikan tanah yang begitu mudah dan mendapat legalisasi dari pemerintah tersebut mendorong migrasi dan pemukiman besar-besaran orang-orang Utara ke Mindanao. Banyak pemukin yang datang, seperti di Kidapawan, Manguindanao, mengakui bahwa motif utama kedatangan mereka ke Mindanao adalah untuk mendapatkan tanah. Untuk menarik banyak pemukim dari utara ke Mindanao, pemerintah membangun koloni-koloni yang disubsidi lengkap dengan seluruh alat bantu yang diperlukan. Konsep penjajahan melalui koloni ini diteruskan oleh pemerintah Filipina begitu AS hengkang dari negeri tersebut. Sehingga perlahan tapi pasti orang-orang Moro menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri.[24]

---

[24] Disarikan dari http://www.angelfire.com/id/sidikfound/moro.html. Tanggal akses 19/12/12

Penguasaan Filipina oleh Anerika mendapat kecaman dari bangsa Eropa karena ditangkap telah melanggar Doktrin Monroe, yang isinya mengatakan bahwa Amerika anti Kolonialisme dan Imperalisme. Amerika dianggap sebagai ancaman baru bagi bangsa Eropa atas kekuasaannya di Asia. Untuk meredakan kecaman tersebut, Amerika menyatakan Filipina semata-mata untuk menjalankan eksperimen imperialisme. Artinya Filipina akan dijadikan model negara dengan sistem kekuasaan liberal seperti Amerika di wilayah Asia.

Pada tahun 1919 delegasi Filipina di bawah Manuel Quezon pergi ke Amerika untuk menuntut kemerdekaan penuh atas Filipina. Amerika menjawab dengan mengirimkan *The Wood Forbes Mission* tahun 1922, yang isinya menyatakan bahwa Filipina belum mampu untuk merdeka. Bangsa Filipina menolak ucapan *Wood Forbes*. Senat Filipina meletakan jabatannya, dan menuntut kemerdekaan penuh.

Secara umum, masa kekuasaan Amerika di Filipina yang berlangsung dari tahun 1898 sampai tahun 1946 terbagi atas 3 periode seperti di bawah ini:

Periode Tahun 1898-1942: Amerika melakukan pembinaan terhadap sistem kekuasaan yang akan diterapkan di Filipina melalui perjanjian damai dengan para tokoh nasionalis pada tahun 1907. Isinya, antara lain menjamin kemerdekaan Philipina untuk 50 tahun yang akan datang.

Periode Tahun 1942-1945: Amerika mengalami kekalahan di Pasifik yang mengakibatkan Filipina dikuasai

oleh Jepang. Pada tanggal 2 Januari 1942 Manila, ibu kota Filipina, jatuh ke tangan Jepang. Jendral Deuglas Mac Arthur meninggalkan Filipina untuk menyusun pasukan sekutu di Australia. Pada tanggal 6 Mei 1942 seluruh Filipina jatuh ke tangan Jepang.

Kekalahan Jepang untuk pertama kalinya adalah dalam pertempuran di laut Karang, yang merupakan titik balik bagi kemenangan Jepang. Sejak itu Jepang menggunakan bangsa Filipina sebagai teman di bawah Presiden Laurel untuk menghadapi sekutu. Tetapi dengan mendaratnya Sekutu di Filipina, dan kemudian kalahnya Jepang terhadap Sekutu maka Republik Filipina membuat Jepang lenyap kembali (22 Oktober 1945).

Setelah Perang Dunia II selesai, Amerika Serikat menepati janjinya untuk memberi kemerdekaan kepadaan Filipina. Pesawat terbang jepang berhasil menenggelamkan kapal perang *Price of wales* dan *Repulse* di Laut Natuna tahun 1942, menyebabkan tentara Sekutu merosot. Tak lama kemudian Amerika Serikat membuat pesawat terbang B29 untuk menggempur Jepang dengan menjatuhkan bon atom di *Hiroshima* dan *Nagasaki*. Maka berakhirlah Perang Dunia II, lebih cepat dari yang diperkirakan.

Periode tahun 1945-1946: Jepang mengalami kekalahan dari sekutu, berarti kekuasaan Amerika masuk kembali di Filipina.[25]

---

[25] Disarikan dari http://chaerolriezal.blogspot.com/2012/12/filipina-di-bawah-penjajahan-spanyol.html. Tanggal akses 18/12/12

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kolonial Spanyol dan Amerika adalah pada bagaimana kolonial merespon permintaan bangsamoro. Toleransi terhadap keimanan bangsamoro menandai aturan Amerika. Sedangkan sebaliknya, pemaksaan untuk masuk katolik dan intoleransi terlihat pada aturan kolonial Spanyol. Namun di sisi lain, Amerika Serikat juga lebih agresif daripada Spanyol, dari segi eksploitasi daerah-daerah kosong jarang penduduk yang masih luas di Pulau Mindanao. Bahkan, Amerika mendatangkan transmigran dari bagian utara dan tengah-yang notabene beragama Katolik- untuk kepentingan industry, pertanian serta perkebunan, serta memberikan tanah milik Muslim kepada imigran tersebut. Setelah Perang Dunia II, akhirnya Filipina menerima kemerdekaannya dari USA pada tahun 1946. Orang Filipina Muslim mengambil alih kekuasaan dan memerintah Muslim di Mindanao. [26]

KEDUDUKAN MUSLIM MINORITAS MORO DAN PROBLEM INTEGRASI DI FILIPINA

A. Stigma Negatif Terhadap Islam Moro

Suku Bangsa Moro adalah sebuah suku yang terdapat di Filipina, Indonesia bahkan tersebar di berbagai pulau. Di antaranya di Maluku dengan nama Pulau Moro Tai, di Sumatera terdapat kecamatan Moro di Kabupaten Karimun

---

[26] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, h. 14

Kepulauan Riau. Di Filipina Suku Moro yang berada di Mindanao adalah suku etnoreligius yang terdiri atas 13 suku yang mendiami Filipina bagian Selatan. Daerah kelompok ini meliputi bagian selatan Mindanao, kepulauan Sulu, Palawan, Basilan dan beberapa pulau yang bersebelahan. Suku Moro merupakan suku bangsa pelaut yang gigih dan dapat beradaptasi di berbagai tempat mereka berdiam. Sebagian besar mereka berdiam di Mindanao Filipina.

Pulau kalimantan bagian timur yang berumpun Bangsa Moro bernama Suku Bajau. Suku Bajau adalah suku bangsa yang tanah asalnya Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajau menggunakan bahasa Bajau. Suku Bajau sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Suku Bajau juga merupakan anak negeri di Sabah. Suku-suku di Kalimantan diperkirakan bermigrasi dari arah utara (Filipina) pada zaman prasejarah. Suku Bajau yang Muslim ini merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan dan menduduki pulau-pulau sekitarnya, lebih dahulu daripada kedatangan suku-suku Muslim dari rumpun Bugis yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar. Wilayah yang terdapat suku Bajau, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan utara, dan lain-lain.[27]

---

[27] Diambil dari *http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moro*. Tanggal akses 19/12/12

Mindanao dan Sulu merupakan tanah air Muslim Filipina yang terletak di bagian selatan dan memanjang sejauh 100 mil di utara garis khatulistiwa. Area ini memiliki posisi strategis karena merupakan pusat lalu lintas laut di antara Timur Jauh dan Malayu karena terletak di utara Sulawesi dan barat Negara bagian Sabah, Malaysia. Luas Mindanao dan Sulu adalah 102,000 KM persegi dan terkenal dengan kesuburan serta kaya akan sumber nabati dan mineral. Sebanyak setengah bagian pulau Mindanao adalah berupa hutan.

Muslim Filipina banyak terdapat di sebelah Barat pulau Mindanao di bawah Kepulauan Sulu. Lebih spesifik lagi, konsentrasi Muslim Filipina berada di dua provinsi, yaitu Lanao dan Maguindanao.[28]

Islam masuk ke kawasan Mindanao pada abad 14, namun baru sekitar abad 16 terbangun kesultanan Islam di Sulu dan Maguindanao. Secara umum terdapat dua bentuk masyarakat di kawasan yang sekarang disebut Filipina. Di sebelah selatan dikenal dengan komunitas Muslim yang monoteis dan mereka yang animis atau pagan yang menempati bagian tengah dan utara wilayah itu. Tidak ada catatan konflik antara Muslim dan kaum animis atau pagan tersebut sebelum Spanyol masuk untuk menjajah pada abad 16 atau tepatnya tahun 1565 M. Bahkan waktu itu, dakwah

---

[28] Hannbal Bara, *The History of The Muslim in the Philippines*, artikel diambil dari http://www.ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/articles-on-c-n-a/article.php?igm=4&i=232

islam telah mencapai Manila, yang terletak di bagian utara Negara itu. Islam masuk ke bagian utara tanpa perlawanan fisik atau perang. Ada beberapa komunitas Muslim hidup di Manila yang telah masuk Islam sekitar abad 15 sebelum Spanyol masuk ke daerah tersebut.

Ketika Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada rakyat Filipina pada tahun 1947, Kesultanan Maguindanao dan Sulu termasuk di dalamnya. Sebelum penyerahan kemerdekaan itu, sultan Sulu mengirimkan surat kepada Kongres dan Presiden Amerika bahwa kepulauan Mindanao khususnya Kesultanan Sulu menolak untuk menjadi bagian dari Negara Filipina. Mereka ingin tetap menjadi bagian dari Negara Amerika serikat dan tidak bergabung dengan Negara Filipina. Namun permintaan itu tidak digubris Amerika dan kepulauan Mindanao tetap menjadi bagian dari Filipina.

Dua peristiwa, yaitu penyerahan kedaulatan Kesultanan Sulu oleh Spanyol ke penjajah Amerika Serikat yang dianggap ilegal dan surat permintaan Sultan Sulu kepada Presiden dan Kongres Amerika Serikat untuk tidak bergabung dengan Negara Filipina merdeka, itu menjadi tonggak sejarah bagi gerakan separatisme di kepulauan Mindanao: bahwa Bangsamoro dari awal tidak bersedia menjadi bagian dari Negara Filipina.[29]

---

[29] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai,* h. 46

Kaum minoritas Muslim di Filipina secara popular disebut Moro[30], yang berkonotasi menghina dan melambangkan kedudukan Muslim yang umumnya tidak menyenangkan dalam menghadapi orang-orang Mayoritas. Sebutan ini pertama kali diberikan orang Spanyol pada abad 16, meniru sebutan orang-orang Mauritania Afrika Utara yang diislamkan (Bangsa Moor) yang di bawah pimpinan Arab menaklukkan dan memerintah Spanyol selama delapan abad. Setelah berabad-abad sebutan ini berubah menjadi sebuah label penghinaan ketika kaum Muslim Filipina dengan gigih melawan penaklukan Spanyol.[31]

Orang-orang Muslim Filipina tak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang teologi klasik, filsafat, serta rumusan-rumusan hukum Islam, bahkan mereka mencampuradukkan sebagian tahayul pra-Islam dan adat dengan asas-asas Islam, walaupun sebagian besar mereka mengetahui ajaran dan kewajiban dasar Islam. Bersamaan dengan itu, di antara kaum Muslim Filipina terdapat sejumlah orang yang terpelajar dalam hal agama Islam. Dari orang-orang itulah muncul orang-orang yang diakui sebagai Ulama, yakni pemuka agama yang memenuhi syarat untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut urusan keagamaan dan hukum.

Bagi Muslim Filipina, Islam telah memberikan pemahaman tentang doktrin bahwa Islam melindungi mereka

---

[30] Julukan Moor atau Moro artinya 'tidak bertuhan, buta huruf, dan jahat'

[31] Peter G. Gowing, *Islam di Asia Tenggara*, Hasan Basari (Terj.), (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 113

dari pemikiran-pemikiran yang mengganggu. Islam membimbing mereka kepada tujuan yang lebih luasa dan lebih kekak dalam hidup ini yaitu (menuju) kehendak Allah, seperti makna yang terkandung dalam kata "islam" atau "muslim" yang berarti penyerahan diri. Hal ini yang menjadi ideologi iman yang penting bagi keberadaan mereka dan memberikan makna pada kehidupan mereka. Sehingga setiap ancaman terhadap ideologi ini, tidak dapat dibiarkan sehingga menyebabkan kematian psikologis (ruhani) bagi mereka. Orang-orang Muslim Filipinan telah mengalami kematian bilogis dengan banyaknya pertempuran melawan orang-orang non-Muslim dalam rangka mempertahankan kemerdekaan kampung halamannya (yang mereka sebut dengan Dar Islam). Walaupun tak sanggup mencegah penaklukkan fisik terhadap kampung halaman mereka, dan mereka dimasukkan ke dalam bangsa Filipina, orang-orang Muslim masih melanjutkan perjuangan dengan segala macam cara untuk melawan ancaman-ancaman terhadap identitas mereka yang secara psikologis berakar pada Islam.[32]

Moro National Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF)

Paska kemerdekaan Filipina, pada rentang tahun antara 1946 - 1972, lahirlah gerakan Moro National Liberation Front (MNLF). Setelah menerima kemerdekaan, pemerintah

---

[32] Peter G. Gowing, *Islam di Asia Tenggara*, Hasan Basari (Terj.), (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 120

Filipina baru menyadari pentingnya membangun politik dan ekonomi Mindanao dan Sulu. Muslim Mindanao tidak ingin bergabung di bawah pemerintah Filipina. Mereka lebih menyukai berada di bawah koloni Amerika daripada menjadi bagian dari pemerintah Filipina yang Kristen. Hal ini disebabkan trauma yang dialami mereka ketika berada di bawah koloni Spanyol. Migrasi ke Mindanao digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah menginginkan para imigran itu memanfaatkan daerah pertanian potensial yang dimiliki Mindanao. Akan tetapi disinilah terjadi konflik, seperti yang dikemukakan di atas. Orang-orang Islam Mindanao tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah disana. Sedangkan orang-orang Filipina Kristen dapat dengan mudah merebut tanah mereka, karena pemerintah local-yang notabene Kristen- dengan mudah menerbitkan dokumen tanah itu, sehingga dapat merebut tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati Muslim.

Menurut Yegar, Bangsamoro biasanya berdasarkan tradisi tak tertulis. Sedangkan Kristen sangat mengedepankan dokumen legal.[33] Bangsamoro menganggap pemerintah Filipina tidak tanggap terhadap aturan tradisional mereka, sehingga membuahkan kekecewaan yang berujung pada antipasti terhadap orang asing yang menyerbu tanah mereka. Alhasil, Bangsamoro merasa telah ditipu dan dikhianati dalam masalah tanah leluhur mereka.

---

[33] Yegar, Robin L. "Moro Insurgent and the Peace Process in the Phillippines, "In *Countering Terrorisme and Insurgency in the 21th Century: International Perspective*., edited by. James J.F. Forest, 249

Ketika Manuel Quezon (presiden Persemakmuran) menyatakan bahwa undang-undang nasional akan ditetapkan secara sama terhadap orang-orang Islam dan Kristen, mendapat reaksi keras dari kelompok Islam, karena secara mencolok mengabaikan sistem-sistem sosial dan hukum tradisional Islam, undang-undang nasional itu lebih banyak mengambil dari etika Kristen dan sejarah sosial Barat. Sebagian pemimpin Islam berkeyakinan bahwa peraturan pemerintah yang baru itu merupakan rencana jahat yang disengaja untuk mematikan Islam di Philipina (Majul, 1989:8-20). Setelah kemerdekaannya Philipina tanggal 4 Juli 1946, Masyarakat Moro tetap melanjutkan perjuangannyabagi kemerdekaan Moro. Pemerintahan Philipina yang baru tetap melanjutkan kebijakan masa kolonial yakni melakukan tindakan-tindakan reprersif kepada gerakan separatis Moro. [34]

Pada tahun 1957 pemerintah Filipina membentuk Komisi Integrasi Nasional (*Commision of National Integration*/CNI) yang bertujuan menyamakan standar kehidupan Muslim Filipina dengan warga Kristen Filipina, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan politik, sehingga tercipta masyarakat yang menyatu antara Islam dan Kristen. Akan tetapi banyak Muslim Filipina yang tidak menanggapi niat baik pemerintah membentuk komisi ini dengan anggapan mereka akan kehilangan budaya keislaman mereka di bawah penjanjian itu.

---

[34] Diambil dari *http://tugas-makalah.blogspot.com/2012/06/islam-di-philipina.html*. Tanggal akses 19/12/12

Komisi ini menyediakan kesempatan pendidikan kepada orang Moro yang dahulu tidak pernah didapat. Beberap orang Moro masuk ke berbagai Universitas dii Manila dan Mindanao. Mereka mempelajar banyak hal, seperti teknis, kedokteran, seni dan lain sebagainya. Sejak saat itu, orang Moro banyak yang terpelajar dan dilirih oleh dunia, selain problematika tanah air mereka. Universitas memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Moro untuk berdialog tentang problem-problem yang mereka hadapi. Bahkan mereka juga dapat bebas berdialog tentang problem yang menjadi perhatian pemerintah. Dialog-dialog dan diskusi-diskusi itu justru menimbulkan efek yang lebih jauh. Ironisnya, justru misi universitas akhirnya tidak sejalan dengan misi komisi (CNI) yang menginginkan perdamaian antara Islam dan Kristen. Hal ini disebabkan, kesempatan pendidikan yang diberikan kepada bangsamoro justru menjadikan mereka dapat memperkuat jaringan antar sesama bangsamoro sehingga dapat mengungkapkan problem mereka kepada komunitas dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, hal ini menguak fakta yang selama ini terjadi bahwa mereka yang selalu diperlakukan tidak adil. Dari universitas-universitas in, lahirlah pemimpin-pemimpin muda, terpelajar dan penuh dengan ideology "radikal".[35]

Pemindahan masyarakat katolik Filipina ke wilayah Mindanao terus dilakukan. Menjelang tahun 1960, tingginya para pemukim baru yang berasal dari Filipina Utara dan

---

[35] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, h. 18

Tengah membuat Moro menjadi minoritas di wilayah tinggalnya sendiri. Pemerintahan Filipina mengeluarkan sejumlah undang-undang yang mensyahkan pengambilan tanah yang secara turun-temurun dimiliki penduduk Muslim Moro guna pembangunan proyek perkebunan dan pemukiman. Kondisi perekonomian yang semakin menurun dikalangan penduduk Muslim Moro ditambah lagi derngan kasus pembunuhan di Jabaidah telah memicu lahirnya gerakan Muslim Merdeka (Muslim Independence Movement/MIM)[36] di tahun 1968. Gerakan ini mampu memobilisasi lintas kelompok dan kepentingan local di kalangan Bangsamoro di grass-root untuk menuntut keadilan dan bahkan kemerdekaan meskipun masih bersifat lokal di Mindanao. Namun kesenjangan dan kekejaman yang berlanjut telah memunculkan pemimpin-pemimpin dari kalangan Muslim baru bukan hanya di lokal Mindanao melainkan juga di Manila dan Luar negeri. [37]

Gerakan ini dapat diatasi oleh pemerintah Filipina dengan menberi posisi yang strategis kepada tokoh-tokoh MIM. Hal ini menimbulkan kekecewaan pada kader-kader muda dibawah pimpinan Nur Misuari. Kader muda itu membentuk Front Pembebasan Nasional Moro (Moro National Liberation Front/MNLF), pada tahun 1971.[38]

---

[36] Di beberapa sumber menyebutkan kepanjangan MIM adalah *Mindanao Independence Movement* atau Gerakan Mindanao Merdeka.

[37] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai,* h. 72

[38] Sumber lain menyatakan, MNLF berdiri pada tahun 1969. MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace,* h. 18

Organisasi yang dikenal sangan militan. [39] Nur Misuari kala itu adalah professor di University of The Philippines di Manila.

Tujuan dari organisasi ini adalah memperjuangkan kemerdekaan penuh dari tanah Moro. Akan tetapi Presiden Ferdinand Marcos menaggapi gerakan itu dan berbagai perlawanan di Mindanao dengan memberlakukan Martial Law atau keadaan darurat perang pada tahun 1972 dengan mengirim tentera besar-besaran ke Mindanao untuk menumpas pemberontakan dan gerakan tuntutan merdeka yang mulai membesar. Reaksi keras dari presiden ini mengundang dukungan massif dari Bangsamoro semakin kuat kepada MNLF. Pemberlakuan UU darurat perang oleh presiden Marcos telah menelan korban sedikitnya 100 ribu orang sipil dan tentara di kedua belah pihak.[40] Hal ini mengundang simpati dan keterlibatan pihak internasional dari negara-negara Islam di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang saat itu diketuai presiden Libya, Moammar Qaddafy. Moammar Qaddafy memfasilitasi upaya damai antara MNLF sebagai representasi Bangsamoro dengan pemerintah Filipina, sehingga pada tanggal 23 Desember 1976 tercapai *Peace Agreement* (PA) Tripoli.

Perjanjian ini memberikan peluang pembentukan wilayah Mindanao sebagai suatu wilayah otonom yang

---

[39] Diambil dari *http://tugas-makalah.blogspot.com/2012/06/islam-di-philipina.html*. Tanggal akses 19/12/12

[40] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*, h. 73

meliputi 13 propinsi dan 9 kota. Di samping itu, juga dilakukan akaomodasi terhadap sejumlah kombatan MNLF dari Bangsamoro Army dan relawan MNLF ke dalam kesatuan AFP (Armed Force of the Philippines) dan Kepolisian Filipina. Dalam proses pembicaraan hingga tercapainya PA Tripoli tersebut, MNLF telah mengubah tuntutan dari merdeka atau memisahkan diri ke tuntutan otonomi di bawah Negara kesatuan Republik Filipina.[41] Marcos bersikeras bahwa untuk menentukan daerah otonomi itu perlu diadakan referendum.

Perubahan tuntutan ini kemudian menjadi salah satu alasan uang memancing deputi Misuari, Salamat Hashim tidak menyetujuinya, sehingga berdirilah Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islam Liberation Front/MILF) pada tahun 1983. Organisasi ini diperkirakan membawa lebih dari separo pendukung MNLF termasuk sebagian pasukan bersenjata bergabung ke MILF. Sementara MILF secara resmi dideklarasikan dan menyatakan melakukan perlawanan politik dan bersenjatan dengan tuntutan merdeka, maka dalam waktu yang bersamaan pembicaraan realisasi PA Tripoli antara MNLF dan Pemerintah terus berlanjut. [42]

Dengan pecahnya MNLF dan MILF membuat kekuatan Bangsa Moro terpecah menjadi faksi-faksi yang melemahkan perjuangan mereka secara keseluruhan. Tekanan semakin terasa hebat dan berat ketika Ferdinand Marcos

---

[41] *Ibid*, h. 74

[42] *Ibid*, h. 74

berkuasa (1965-1986). Dibandingkan dengan masa pemerintahan semua presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling represif bagi Bangsa Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos.

Perkembangan berikutnya, MLF sebagai induk perjuangan Bangsa Moro akhirnya terpecah. Pertama, Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang berideologikan nasionalis-sekuler. Kedua, Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan Hashim Salamat, seorang ulama pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan.

Namun dalam perjalanannya, ternyata MNLF pimpinan Nur Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-Reformis pimpinan Dimas Pundato (1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani (1993). Tentu saja perpecahan ini memperlemah perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi Bangsa Moro.

Disatu pihak mereka menghendaki diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik (diwakili oleh MNLF), sementara pihak lainnya menghendaki perjuangan bersenjata/jihad (diwakili oleh MILF). Semua pihak memandang caranyalah yang paling tepat dan efektif. Namun agaknya Ramos telah memilih salah satu diantara mereka

walaupun dengan penuh resiko. "Semua orang harus memilih, tidak mungkin memuaskan semua pihak," katanya. Dan jadilah bangsa Moro seperti saat ini, minoritas di negeri sendiri. [43]

Front Pembebasan Nasional Moro di Filipina Selatan hendaknya dipahami sebagai produk identifikasi Islam yang kuat dari kaum minoritas Muslim ini. Mereka bukan gejala islam yang khas di Asia Tenggara. Di lain sisi, ada kaum Muslim yang berpikiran tradisionalis, mereka juga tidak melupakan gerakan-gerakan yang membantu mereka mengatasi kekauatan-kekuatan seperti kolonialisme, sekularisme, komunisme, dan sebagainya, yang mengancam ideologi-iman mereka yang koprehensif.

B. Problem Integrasi Muslim Moro terhadap Pemerintah

Ketegangan dan tindak kekerasan antara kaum Muslim dan Non-muslim di Filipina terus meningkat tahun-tahun belakangan ini, yang menambah ketidakstabilan di kawasan ini serta memperburuk perekonomian Negara ini. Kaum muslim Filipina terperangkap dalam sebuah dilema, di satu sisi mereka harus menyelaraskan tuntutan konsepsi mereka yang agak tradisionalis mengenai keimanan Islam (syariat), di sisi lain, mereka dituntut menjadi warga Negara modern yang

---

[43] Disarikan dari *http://suhaimi-jaya.blogspot.com/2012/11/umat-islam-di-filipina-adalah-salah.html*

di dominasi kaum non-Muslim dan melindungi kebebasan agama.

Dilema ini diperumit dengan keberadaan muslim Filipina terpusat di provinsi-provinsi bagian selatan, di kawasan yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam.

Muslim Filipina beranggapan bahwa kewarganegaraan mereka yang sekarang tidak mungkin diseleraskan dengan ketaatan terhadap Islam sebagian menjelaskan eksistensi gerakan-gerakan separatis Muslim yang gigih— yang melakukan perang gerilya melawan kekuatan-kekuatan pemerintah. Kaum separatis menginginkan kemerdekaan, meskipun sebagian menyukai perserikatan dengan Malaysia pada akhirnya. Tetapi, pada kenyataannya, kampung halaman mereka telah diakui secara internasional sebagai bagian wilayah nasional Filipina, dan sangat kecil kemungkinannya dapat memisahkan dari Negara itu. [44]

Sejak seperempat terakhir abad 16, orang-orang spanyol melancarkan "Perang Moro" yang berlangsung selama 300 tahun sebelum kesultanan Muslim di Mindanao dan Sulu mengakui kedaulatan Spanyol dengan terpaksa. Begitu pula Amerika yang menggantikan kedaulatan spanyol selanjutnya melancarkan operasi militer dalam rangka "menentramkan" orang-orang Muslim Filipina selama kurang

---

[44] Peter G. Gowing, *Islam di Asia Tenggara*, Hasan Basari (Terj.), (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 105

lebih dua dasawarsa abad ini. Dan menjelang tahun 1920 pemerintahan yang berkuasan di daerah Muslim adala di tangan administrator Kristen Filipina. Sesuai dengan kebijakan “Filipinisasi” dari Amerika yang menghendaki pemerintahan sendiri bagi orang-orang Filipina dalam sebuah persemakmuran (1935) dan akhirnya menjadi sebuah Republik (1946).

Maka dengan alasan nasionalis, pemerintah Filipina paska kemerdekaan melakukan konsolidasi kekuasaan terhadap provinsi-provinsi selatan yang didiami kaum Muslim. Pemerintah ingin melakukan integrasi administratif dengan memasukkan daerah-daerah muslim ke dalam sistim politik nasional yang berpusat di Manila, sehingga praktis, pemerintah menempatkan pejabat-pejabat yang Kristen untuk mengelola daerah selatan. Hingga tahun 1950, provinsi-provinsi Muslim di Filipina selatan diperintah oleh Gubernur-gubernur yang diangkat Manila yang kebanyakan Kristen.

Selain integrasi administratif, pemerintah juga melakukan integrasi ekonomi dan mendorog keterlibatan selatan dalam pembangunan-pembangunan Negara. Hal ini dilakukan agar provinsi-provinsi selatan tidak memberatkan dalam masalah keuangan, sehingga ditariklah pajak-pajak dalam berbagai bentuk. Di samping pemerintah berkeinginan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya alam daerah selatan Muslim untuk digunakan dalam memajukan perekonomian nasional.

Taktik pemerintah inilah yang banyak membuat berang Muslim di daerah selatan, dikarenakan pemerintah melakukan banyak sertifikasi tanah-tanah pertanian di Mindanao dan disediakan untuk orang-orang Kristen dari provinsi utara dan tengah yang bertransmigrasi ke wilayah selatan. Hal ini membuat hubungan Muslim dan non-Muslim di provinsi selatan memanas.[45]

Sebenarnya upaya eksploitasi dan sertifikasi tanah-tanah kosong jarang penduduk di Pulau Mindanao ini sudah berlangsung semenjak koloni Spanyol. Bahkan pada penjajahan Amerika lebih agresif dengan mendatangkan penduduk lain (transmigran dari Utaran dan Tengah) untuk kepentingan industrialisasi dan pengembangan pertanian dan perkebunan. Kebijakan transmigrasi ini dilanjutkan oleh pemerintah Filipina paska kemerdekaan secara besar-besaran. Para transmigran tersebut diberi tanah luas lengkap dengan sertifikatnya yang sebagian besar diambil dari tanah milik penduduk Muslim setempat yang belum memiliki akta tanah resmi. [46]

Karena hak-hak Bangsamoro yang dirampas itulah menjadi salah satu alasan bangsamoro tidak mau berintegrasi dengan pemerintah, disamping alasan-alasan lain seperti hal memperoleh pendidikan dan lain sebagainya.

---

[45] Peter G. Gowing, *Islam di Asia Tenggara*, Hasan Basari (Terj.), (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 107-108

[46] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*, h. 47

Menurut MAJ Thomas G. Wilson, Jr. dalam Monographnya, konflik antara bangsa Moro yang diwakili Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan pemerintah Filipina bukanlah disebabkan persoalan agama *an sich*, akan tetapi lebih kepada masalah teritorial. Akar permasalahan ini dapat ditelusuri semenjak 400 tahun lalu ketika penyebaran islam terjadi melalui pulau Sulu dan Mindanao, Penjajahan Spanyol, Penjajahan Amerika dan peraturan Pemerintah Filipina semenjak 1946.

Bangsa Moro di selatan Filipina telah berjuang lebih kurang 400 tahun untuk otonomi. Hasilnya adalah pemerintah Filipina memberikan otonomi daerah untuk Muslim Mindanao (ARMM) kepada MNLF. Hal ini membuat preseden baik untuk perdamaian di Filipina Selatan. Taktik yang sama digunakan pula kepada Moro Islamic Libertion Front (MILF) pada 2008, pemerintah memberikan perluasan ARMM yang dikenal dengan Memorandum of Agreement for Ancestral Domain (MOA-AD) akan tetapi Pengadilan Tinggi Filipina menganulir dan membatalkan perjanjian tersebut.

MOA-DA tersebut menjanjikan hak teritorial yang lebih luas kepada MILF. MILF menginginkan daerah leluhur mereka seperti dulu sebelum dimasuki oleh imigran Kristen ke pulau Mindanao. Perluasan ARMM itu akan memberikan tanah, pemerintahan, perkembangan sosial ekonomi yang lebih luas dan perdamaian antara muslim dan kristen di Filipina Selatan.

Akan tetapi pemerintah Filipina merasa keberatan memberikan perluasan tanah tersebut, karena menganggap MILF mempunyai keterkaitan dan hubungan ketergantungan dengan jaringan teroros global seperti Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Selain itu, batu sandungan perdamaian pemerintah dengan MILF adalah karena MILF tidak mau mengakui konstitusi Filipina. Selama MILF tidak mau mengakui konstitusi Filipina, maka tidak akan terwujud perdamaian antara keduanya.[47]

Bangsa Moro di jajah oleh kolonial Filipina pada tahun 1940 dan sejak tahun itu tidak ada perubahan bagi Bangsa Moro, meskipun telah memperoleh kemerdekaan dari Amerika. Pemerintah Filipina meneruskan kebijakan dari kolonial Spanyol yakni pembunuhan orang-orang Muslim Bangsa Moro yang didukung oleh kolonial Amerika Serikat. Pada tahun 1915 Amerika menyempurnakan penduduk bangsa Moro dengan cara membuka imigrasi orang-orang Kristen dari utara, pada awalnya imigrasi tersebut berjalan dengan lambat, kemudian setelah tahun 1939 imigrasi tersebut mengalami perkembangan yang pesat sampai terjadi kekhawatiran perimbangan.

Perkembangan imigrasi tersebut lebih didorong oleh pemerintah Filipina yang merdeka. Pemerintah Filipina juga mendorong dan diam-diam mendukung kelompok kriminal yang membunuh orang-orang Muslim Bangsa Moro,

---

[47] MAJ Thomas G. Wilson, JR. *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, h.

membakar desa-desa mereka dan mengambil tanah-tanah kosong mereka digunakan untuk pemukiman orang-orang Kristen.[48]

UU kepemilikan tanah yang dibuat oleh pemerintah Filipina tidak hanya menciptakan perubahan terhadap komposisi penduduk Bangsa Moro, akan tetapi merubah struktur kepemilikan tanah sekaligus status social. Hal tersebut merupakan awal dari munculnya konflik horizontal. Melalui *land acts* (undang-undang tanah), pemerintah berperan dominan dalam menciptakan konflik antara orang-orang Kristen dan Bangsa Moro yang kemudian berkembang menjadi konflik vertikal ketika kesadaran Bangsa Moro bergolak dalam berbagai gerakan-gerakan separatis yang menuntut *self determination*.[49]

Paparan tersebut menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro berawal dari konflik horizontal. Konflik horizontal adalah suatu konflik hubungan interaksi antara kelas sosial atau kelompok sosial yang sengaja menciptakan sebuah konflik dan adanya jdukungan untuk mewujudkan suatu kondisi atau keadaan yang dikehendaki. Konflik horizontal apabila dihubungkan dengan konflik di Filipina yakni berawal dari adanya imigrasi orang-orang Kristen ke daerah orang-orang

---

[48] Ali M. Kettani, Ali M. *Muslim Minorities In The World Today/ Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Penerjemah: Zarkowi soejoeti (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 196-197.

[49] Erni buduwanti,*"Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina Gerakan Separatism Moro"* dalam *Prosiding Seminar*, 83

Islam di Mindanao bagian Filipina Selatan, kemudian dari peristiwa tersebut dapat dukungan dari pemerintah Filipina yakni dengan adanya pembentukan undang-undang kepemilikan tanah untuk para orang-orang Kristen yang tinggal di tanah-tanah orang-orang Islam, akhirnya Islam di tempat tinggalnya sendiri menjadi minoritas karena kedatangan orang-orang Kristen dari utara Filipina. Dampak dari kejadian tersebut tidak hanya merubah penduduk Islam jadi minoritas akan tetapi juga merubah status sosial dalam kepemilikan tanah.

Konflik horizontal berkembang menjadi konflik vertikal, konflik vertikal adalah suatu konflik hubungan interaksi antara satu kelas sosial ataukelompok sosial yang berbeda tingkatan akibat adanya pertentangan kepentingan yang difasilitasi atau kelompok sosial yang berbeda di satu pihak dengan satu kelompok di pihak lainnya. Apabila konflik vertikal dihubungkan dengan permasalahan di Filipina yakni karena adanya undang-undang kepemilikan tanah yang mendapat dukungan dari pemerintah Filipina, mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan separatisme yang memisahkan diri dari pemerintahan Filipina untuk memperoleh kemerdekaan atas Bangsa Moro di Filipina Selatan. Munculnya gerakan-gerakan separatisme menandakan bahwa adanya kebangkitan Islam di Filipina.

Konflik yang terjadi atas perlakukan orang-orang Kristen terhadap orang-orang Islam tidak hanya perampasan tanah yang dilakukannya, akan tetapi juga melakukan pemerasan kekayaan Bangsa Moro untuk menghasilkan

keuntungan yang lebih besar. Akibatnya terjadi kepincangan situasi sosial dan ekonomi di antara dua kelompok tersebut. Selain dari konflik tersebut diperburuk dengan terjadinya kasua-kasus pembunuhan missal yang dilakukan oleh ILAGA (organisasi para-militer Kristen yang didukung oleh pemerintah Filipina), seperti pembunuhan besar-besaran di Jabidah dan masjid Manila. [50]

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pada masa pemerintahan presiden Marcos, MNLF dan MILF lahir. Ketegangan antara Pemerintah dan MNLF dibalas presiden Marcos dengan pemberlakuan keadaan darurat perang dan pengiriman pasukan untuk memerangi Muslim di Mindanao. Hal ini yang membuat perhatian internasional terusik sehingga terbitlah PA Tripoli atas inisiatif presiden Libya, Moammar Qaddafy.

Ketika ketegangan-ketegangan itu masih berlangsung, terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Marcos ke Corazon Aquino melalui *People Power* pada 1986. Berbeda dengan pendahulunya yang menggunakan tangan besi, Aquino cenderung lebih lembut dan berusaha meyakinkan Bangsamoro akan niat baik pemerintah pusat untuk menyelesaikan ketegangan dan kekerasan di wilayah Selatan. Niat baik ini ditunjukkan Aquino sebagai presiden beberapa bulan setelah dilantik menjadi presiden menemui Misuari di kota Jolo, ibu kota Propinsi Sulu yang merupakan markas MNLF. Kedatangannya adalah untuk melanjutkan

---

[50] *Ibid*, h. 84-85.

pembicaraan damai yang sempat terhenti pada masa presiden Marcos.

Aquino berhasil mengajak Misuari kembali ke meja perundingan. Aquino sendiri tampaknya menganggap formula PA Tripoli masih relevan dan tetap dijadikan pijakan untuk melanjutkan kembali pembicaraan di masa pemerintahannya, sembali mengabaikan tuntutan merdeka dari MILF. Aquino menerjemahkan PA tersebut ke dalam bentuk Undang-unfang tentang Organic Act on Autonomy for Muslim Mindanao yang kemudian dimasukkan ke dalam perubahan Konstitusi 1987 dengan nama ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao). Akan tetapi pada perjalanannya, untuk terbentuk ARMM, pemerintah mensyaratkan dilakukan plebisit/referendum. Persyaratan ini ditolak oleh MNLF karena dianggap menyimpang dari PA Tripoli. Namun pemerintah Filipina memaksakan plebisit tersebuh dan hasilnya sangat mengecewakan. Plebisit yang dilaksanakan pada 19 November 1989 ini hanya menghasilkan empat propinsi yaitu Tawi-tawi, Sulu, Maguindanao, dan Lanau de Sure, yang menyatakan bergabung ke dalam ARMM dari 13 yang dituntut MNLF. Sedangkan tidak satupun dari 9 kota yang berada di luar cakupan propinsi tersebut memilih bergabung. MNLF menganggap pelaksanaan perjanjian ini tidak fair, sehingga mengundang kemarahan sebagian sayap MNLF, juga mengundang makin tingginya perlawanan MILF. Ketegangan dan kekerasan semakin meningkat.[51]

---

[51] Ahmad Suaedy, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai,* h. 76

Pada masa presiden Fidel V. Ramos yang menggantiakan Aquino pada tahun 1993, ia mencoba merintis kembali pembicaraan dengan MNLF dengan menjanjikan pengembalian wilayah seperti termaktub dalam PA Tripoli dengan memasukkan klausul terpenting pada *Final Peace Agreement* (FPA) yang ditandatangani di Jakarta 2 September 1996, yaitu *"the final peace agreement constitutes the full implementation of the Tripoli Agreement"*. MNLF menganggap perjanjian itu akan mengembalikan wilayah ARMM yang meliputi 13 propinsi dan sembilan kota meskipun secara bertahap.

Sesuai dengan perjanjian tersebut, maka dibentuklah institusi transisi bernama SZOPAD (Special Zona for Peace and Development) yang meliputi wilayah yang diklaim MNLF dan PA Tripoli. Selain itu, dibentuk pula dua institusi yang memfasilitasi penguatan terhadap SZOPAD, yaitu SPCPD (Shoutern Philippines Council for Peace and Development) dan Consultative Assembly (CA) yang bertugas selama tiga tahun untuk memperkuat wilayah-wilayah tersebut agar dapat memiliki otonomi kemandirian politik regional dengan kekuasaan lebih besar dan cakupan wilayah lebih luas.

Akan tetapi perjalanan menuju ARMM mendapat tantangan yang tidak mudah, baik dari pusat maupun dari lokal Mindanao. Tantangan dari pusat adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yakni kantor kepresidenan yang mengelola seluruh program-program yang sudah disebutkan di atas. Ketika ARMM mengajukan dana

untuk pelaksanaan program yang meliputi rencana SZOPAD dengan wilayah lebih luas dan program yang massif, *budget* itu direduksi secara signifikan atau hanya cukup untuk kebutuhan operasional tanpa dana pembangunan. Beberapa alasan yang diberikan oleh kantor presiden tentang reduksi *budget* ARMM ketika itu adalah bahwa karena *budget* pusat sudah dialokasikan sebelumnya sehingga ajuan anggaran oleh ARMM dan SPCPD tidak bisa dikabulkan keseluruhan. Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa kendala dana itu disebabkan karena krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997-1998. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu disengaja oleh pemerintah pusat dalam hal ini kantor presiden untuk menggagalkan MNLF dalam program ARMM. Nur Misuari yang waktu itu menjadi Gubernur ARMM termasuk yang berpendapat bahwa hal itu merupakan kesengajaan untuk menggagalkan program ARMM.

Tantangan kedua adalah penentangan terhadap pembentukan SPCPD itu sendiri justru datang dari terutama masyarakat Katolik di Mindanao. Mereka menyuarakan ketidak setujuannya baik melalui para pemimpin lokal maupun mereka yang menjadi perwakilan di Manila sebagai anggota Kongres dan Senator. Di samping itu mereka juga mendapat dukungan dari para anggota Kongres dan Senator yang berasal dari luar Mindanao. Salah seorang penulis tentang ARMM, Carmen Abubakar menyimpulkan, bahwa perjanjian yang tertuang dalam naskah FPA Jakarta itu pelaksanaannya terlalu tergantung pada pusat—dalam hal ini kantor presiden—di mana presiden juga tergantung pada

suara mayoritas parlemen dan posisi politik presiden itu sendiri. Dalam perjanjian tersebut, menurut Abubakar, MNLF sebagai pelaksanan ARMM bersifat pasif dan juga tiadanya keterlibatan dan bantuan dari luar negeri yang bersifat independen.

Ketiga adalah kritik yang muncul dari anggapan kurangnya sosialisasi ke tingkat *grass-roots* sehingga masyarakat non-MNLF dan non-Muslim merasa tidak dilibatkan dan tidak mempunyai rasa memiliki terhadap program ARMM ini. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak setuju untuk menghalangi kesuksesan ARMM dengan membangun opini negatif di masyarakat, khususnya masyarakat tingkat bawah. Mereka membangun opini publik bahwa program ARMM tersebut tidak memiliki efek positif terhadap mereka. Dari aksi ini mulai muncul tuduhan terhadap Nur Misuari bahwa dalam pelaksanaan ARMM ini, Misuari hanya mengedepankan orang-orang MNLF terdekatnya, dengan merekrut bekas kombatan khususya yang berasal dari suku Tausug dalam MNLF, suku darimana Misuari berasal. Misuari juga dianggap mengabaikan penduduk non-Muslim, Katolik maupun Lumad, dan juga suku Maguindanao yang merupakan mayoritas di pulau Mindanao. Suku Maguindanao adalah mayoritas anggota MILF yang merupakan rival MNLF. Dari situasi itu muncul pula ketegangan kesukuan antara suku Tausug dan suku Maguindanao.

Harapan yang melambung dari klausul "*the full implementation of the Tripoli Agreement*" dalam FPA yang telah

mengundang Nur Misuari untuk kembali memimpin pelaksanaannya dengan terpilih menjadi Gubernur ARMM segera mengalami demoralisasi.

Sementara itu kemenangan Joseph E. Estrada pada Mei 1998 menggantikan Fidel Ramos membawa Filipina ke arah strategi "perang total (*all-out war*)" terhadap Mindanao khususnya MILF. Bersamaan dengan kemenangannya itu, kursi anggota Kongres partai Estrada juga bertambah besar yang tentu saja mendukung kebijakan-kebijakannya. Dipicu oleh insiden pengambilalihan sebuah balai kota di Kota Kuaswagandi Selatan oleh MILF maka Estrada dengan keamanan ketat mengunjungi tempat itu sembari mendeklarasikan *all-out war* menghadapi MILF. Ia memborbardir basis dan pusat komando MILF Camp Abu Bakar di pedalaman kota Cobato dan berbagai *camp* tentara the *Bangsamoro Islamic Armed Forced* (BIAF), yaitu pasukan bersenjata milik MILF. Dalam waktu yang sama, sejak naik menjadi presiden sesugguhnya Estrada telah melakukan intervensi terhadap ARMM dengan menyingkirkan orang-orang MNLF dari lembaga itu dengan memasukkan orang-orang non-MNLF ke dalamnya terutama orang dari pusat.28 Intervensi Estrada itu menimbulkan ketegangan di ARMM maupun di Mindanao pada umumnya. Namun, meskipun kebijakan Estrada telah memakan banyak korban tetapi situasi itu tidak berlarut karena *People Power II* meruntuhkan kepresidenan mantan bintang film itu karena tuduhan skandal korupsi.

Kemudian naiklah wakil presiden Gloria Macapagal-Arroyo sebagai presiden pada 2001. Dilatari oleh konflik dengan Estrada, Arroyo segera mendeklarasikan strategi sebaliknya, yaitu *all-out peace* atas Mindanao segera setelah ia mengambil alih kursi presiden. Arroyo segera melakukan pembicaraan dan menyusun kembali program untuk ARMM serta melaksanakan kembali *plebisit* di wilayah ARMM yang lain. Pada saat yang sama jadwal pemilu ARMM semakin dekat. Ketidakpuasan terhadap kinerja Nur Misuari menjadi alasan bagi pemerintahan Arroyo untuk mengajukan calon lain untuk jabatan Gubernur ARMM. Penyingkiran orang-orang MNLF sejak Estrada dan niat Arroyo untuk mengajukan calon lain untuk Gubernur ARMM, membuat rasa *frustrasi* di kalangan MNLF dan juga Misuari. Situasi itu mendorong Misuari untuk melakukan aksi pemberontakan yang kemudian mengantarkannya ke penjara hingga tahun 2009. Campur tangan Arroyo atas pencalonan Gubernur ARMM pengganti Misuari membuat ARMM pada periode berikutnya dibayang-bayangi oleh patronase pemerintah pusat.

Di sisi lain, Arroyo juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan Bangsamoro dengan melakukan pembicaraan pendahuluan dengan MILF untuk pertama kalinya setelah kebijakan *all-out war* Estrada. Pembicaraan itu sekali lagi mengantarkannya ke Tripoli pada 2001 yang menghasilkan sebuah perjanjian gencatan senjata dan berjalannya *peace talk* GRP-MILF. Keputusan perundingan itu meliputi jaminan dan pengembalian keamanan, pembangunan

kembali daerah-daerah pusat konflik yang rusak akibat kebijakan Estrada, dan melanjutkan pembicaraan *ancestral domain*, sebuah bentuk tuntutan otonomi oleh MILF. Poin *ancestral domain* itu kemudian menjadi salah satu bahan pokok proses pembicaraan perjanjian damai selanjutnya yang kemudian disebut MOA-AD (*Memorandum of Agreement on Ancestral Domain*). Dari perundingan ini, GRP secara resmi mengakui keberadaan MILF yang kini diperkirakan memiliki pasukan bersenjata BIAF sebanyak 12 ribu personel yang tersebar di berbagai *camp* dan sebagian menyatu dengan masyarakat umum. Direktur the *Institute for Bangsamoro Studies* (IBS) yang juga penasehat senior MILF, professor Abhoud Lingga berpendapat dengan melihat liku-liku pembicaraan damai dan otomi antara GRP dengan gerakan Mindanao apakah itu MNLF maupun MILF, menyatakan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada kesungguhan dan konsistensi dari pemerintah pusat untuk mencari jalan damai dengan memberikan hak lebih besar kepada minoirtas Muslim di Mindanao. Setiap presiden, lanjutnya, pada awalnya tampak serius kecuali Estrada, untuk membangun kepercayaan dan membuka pembicaraan perjanjian dengan Bangsamoro. Itu hanya dalih ketika para presiden itu dalam keadaan lemah dalam setiap awal pemerintahannya. Namun, lanjutnya, mereka akan melupakan dan bahkan balik badan ketika mereka mapan dan kuat secara politik. Selanjutnya, para presiden itu hanya akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh mayoritas.[52]

---

[52] *Ibid*, h. 77-83

Usaha terakhir Bangsmoro yang menginginkan hak politiknya sebagai warga Negara Filipina adalah penandatanganan kesepakatan negosiasi MOAAD atau lengkapnya disebut *Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain Aspect of the GRP-MILF Tripoli on Peace of 2001* yang sedianya akan ditandatangai pada pada 5 Agustus 2008 oleh Presiden Arroyo. MOAAD ini sudah berjalan tiga tahun setengah dihitung dari topik itu dibicarakan, dan hampir dua belas tahun dihitung dari mulai dirintisnya pembicaraan MILF-GRP sejak 1997. Pengumuman ini, misalnya, ditandai dengan disepakatinya status dan cakupan wilayah dalam draft MOA-AD oleh Tim Panel dari kedua belah pihak dengan apa yang disebut *Bangsamoro Juridical Entity* (BJE) yang, di samping meliputi wilayah ARMM yang ada, juga ditambah dengan wilayah lain yang mencakup tidak kurang dari 712 *barangay* (desa), meskipun cakupan wilayah itu harus diputuskan melalui *plebisit*.

Tambahan 712 *barangay* dalam draf tersebut berada di bawah provinsi-provinsi meliputi South Cotabato, Palawan, Zamboanga City, Sultan Kudarat, North Cotabato, Lanao, dan Zamboanga de Sure. Draf perjanjian ini menempatkan tanah air Bangsamoro (*Bangsamoro Homeland*) sebagai bersifat otonom dengan basis hukum yang kuat atas kepolisian, lembaga keamanan internal *(internal security forces)* serta pendidikan tersendiri. Dasar hukum itu juga memberikan hak kepada BJE untuk membentuk institusi sendiri tentang sistem perbankan dan finansial dan sejumlah institusi politik lainnya

serta memiliki otoritas penuh untuk mengelola sumber daya alam di dalam wilayah teritori BJE dengan bagi hasil 75-25.

Namun, draf itu segera menunai kritik dan protes, terutama dari para politikus yang berasal dari wilayah mayoritas Katolik di Mindanao yang akan terkena dampak BJE di luar wilayah ARMM, baik di masyarakat Mindanao maupun para senator dan anggota Kongres di Manila. Kritik itu antara lain menuduh bahwa pemerintah telah tunduk di bawah tuntutan separatis yang akan merusak integritas teritorial. Terjadi pergerakan dan mobilisasi massa bersama para penguasa daerah-daerah yang potensial terkena perluasan BJE. Mobilisasi itu sesungguhnya juga dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan *prejudice* tentang Islam di Mindanao. Sebagaimana banyak dipublikasikan melalui media maupun hasil-hasil riset, Mindanao diekspos merupakan sasaran terbesar program *counter-terrorism* Presiden US George W. Bush untuk Asia Tenggara paska peristiwa 9/11 2001 di New York karena adanya jaringan terorisme internasional dan JI (Jamaah Islamiyah).

Dan pada 14 Oktober 2008, SC benar-benar mengeluarkan keputusan bahwa draf MOA-AD dinyatakan sebagai bertentangan dengan hukum dan konstitusi Filipina atau "contrary to law and the Constitution" dan karena itu, harus dibatalkan. SC mengemukakan tiga alasan dari keputusan "*contrary to law and constitusional*" tersebut. *Pertama*, tidak adanya cukup konsultasi selama proses pembicaraan MOA-AD terhadap masyarakat yang akan terkena dampak dari perjanjian tersebut sehingga melanggar hak mereka

untuk mendapatkan informasi. *Kedua*, tidak adanya jaminan bahwa konsekuensi dari isi perjanjian tersebut bagi amandemen konstitusi padahal isinya dianggap bertentangan dengan konstitusi negara Filipina. *Ketiga*, penetapan sifat hubungan yang menggunakan kata-kata "*associative* [*and*] *characterized by shared authority and responsibility*." Kalimat tersebut, menurut penafsiran SC, adalah kata yang biasa digunakan dalam perjanjian negara koloni untuk menuju ke merdeka. Karena itu akan bertentangan dengan prinsip kesatuan wilayah Negara Filipina (*national integrity*).

MOA-AD sesungguhnya bukanlah sebuah kesepakatan final atau *Final Peace Agreement* yang mencakup keseluruhan, tetapi itu adalah tahap yang sangat mendasar dan penting mengenai nasib Bangsamoro di Mindanao baik dalam serangkaian perjanjian damai MILF-GRP sebelumnya maupun di masa depan. Dalam draf itu misalnya ditegaskan bahwa *"The legitimate grievances of the Bangsamoro people arising from any unjust dispossession of their territorial and proprietary rights, customary land tenures, or their marginalization"*. Dengan demikian, dalam draf tersebut ada pengakuanketertindasan di masa lalu di satu pihak dan upaya rehabilitasi yang mendasari draf ini di lain pihak. Sesungguhnya draf ini juga telah diantisipasi berdasarkan pengalaman tidak mengenakkan atas PA dan FPA MNLF-GRP sebelumnya yang mendapatkan tantangan dari Kongres dan masyarakat Katolik di Mindanao. Pada saat itu yang sering dipersoalkan adalah adanya persyaratan perubahan konstitusi. Maka di dalam draf ini tidak dimasukkan adanya persyaratan amandemen konstitusi

dengan menekankan pada sisi hak-hak minoritas yang dijamin oleh hukum internasional dan telah diratifikasi oleh hukum Filipina dengan menggunakan konsep *ancestral domain*. Undang-Undang yang sama tentang *ancestral domain* telah diundangkan dan diberlakukan di Filipina atas *indigenous peoples* dan Lumad.

Kandungan yang ada di dalam draf MOA-AD, menurut Rudy B. Rodil, mantan anggota Tim Panel dari pihak pemerintah Filipina dalam negosiasi MNLF-GRP dan professor ahli Lumad, sangat adil mengingat sejarah peminggiran dan minoritisasi Bangsamoro. Menurutnya, nasib Muslim Mindanao atau Bangsamoro sejajar dengan Lumad atau *indigenous people* sebagai minoritas dan sejarah penderitaan dan keterbelakangan kini. Karena itu mereka layak mendapatkan apa yang mereka miliki sebagaimana UU tentang *ancestral domain* atas Lumad dan *indigenous people*. Menurut Rodil, "MOA-AD merupakan bagian dari tuntutan mereka yang layak". Abhoud Lingga, salah seorang anggota penasehat senior MILF dan juga direktur the Institute for *Bangsamoro Studies* (IBS), menunjukkan bahwa hak *selfdetermintation* bagi Bangsamoro masuk kualifikasi dalam berbagai ketentuan PBB meliputi *common historical tradition; racial or ethnic identity; cultural homogeneity; linguistic unity; religious or ideological affinity; territorial connection; andcommon economic life.* Selanjutnya Lingga menegaskan bahwa bagi Bangsamoro self-determination adalah, *"the essence of the Bangsamoro struggle for self-determination is the realization of their*

collective right to freely determine their political status vis-a vis the Republic of the Philippines"[53]

Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh kepada pemerintah Republik Filipina. Hal ini diungkapkan oleh Majul. *Pertama*, bangsa Moro sulit menerima Undang-Undang Nasional karena berasal dari Barat dan Katolik dan bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Ketiga, adanya trauma dan kebencian yang mendalam pada bangsa Moro atas program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka.[54]

Disamping perjuangan bersenjata melalui organisasi seperti MNLF, MILF, masyarakat sipil juga melakukan pendekatan damai dan demokratis dibawah pengawasan PBB, melalui Bangsamoro People's Consultative Assembly yang melakukan pertemuan pada tahun 1996 dan 2001. Pertemuan pertama, yang menurut laporan dihadiri lebih dari satu juta orang, menghasilkan pernyataan untuk mendirikan kembali negara dan pemerintahan Bangsamoro. Hal ini semakin nyata dalam pernyataan bersama yang dideklarasikan oleh ratusan ribu Bangsamoro yang ikut serta dalam Rapat Umum untuk

---

[53] *Ibid*, h. 84-87

[54] Disarikan dari *http://suhaimi-jaya.blogspot.com/2012/11/umat-islam-di-filipina-adalah-salah.html*. Tanggal akses 20/12/12

Perdamaian dan Keadilan in Cotabato City dan Davao City pada 23 Oktober 1999, di Marawi City pada 24 Oktober 1999, dan di Basilan pada 7 Desember 1999. Dalam serangkaian rapat umum mereka mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pemerintah Filipina: *"…kami percaya bahwa satu-satunya solusi berguna dan abadi bagi hubungan yang tidak sehat dengan pemerintah Filipina adalah pengembalian kebebasan kami yang secara ilegal dan imoral telah dicuri dari kami, dan kami diberi kesempatan untuk mendirikan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai sosial, relijius dan budaya kami"*. Sikap ini dipertegas dalam pertemuan kedua, yang dilaksanakan pada tahun 2001 dan dihadiri sekitar dua setengah juta orang, yang menyatakan "Satu-satunya solusi yang adil, bermakna dan permanen untuk persoalan Mindanao adalah kemerdekaan rakyat dan wilayah Bangsamoro sepenuhnya". Dan hingga sekarang masyarkat moro masih berjuang untuk merdekan atau otonami dengan wilayah yang diperluas.[55]

PENUTUP

Muslim minoritas Filipina yang diwakili oleh penduduk di pulau Mindanao dan Sulu sampai saat ini masih mengalami penindasan dan diskriminasi oleh pemerintah paska koloni Spanyol dan Inggris sehingga membuat Bangsamoro –sebutan untuk muslim minoritas Filipina—enggan berintegrasi dengan pemerintah Filipina, walaupun

[55] http://saripedia.wordpress.com/2012/02/21/sejarah-perkembangan-islam-di-filipina-selatan/

secara *de facto* mereka masuk ke dalam wilayah Filipina. Hal ini bisa dirunut dari sejarah Muslim Filipina yang diwakili dua kesultanan Sulu dan Mindanao ketika diberikan kemerdekaan oleh Amerika Serikat tidak ingin bergabung dengan pemerintah Filipina. Kedua kesultanan itu memilih tetap menjadi bagian Amerika Serikat dengan mengirimkan surat protes kepada Kongres dan Presiden Amerika Serikat, akan tetapi surat protes itu tidak digubris. Penindasan demi penindasan mereka alami seiring dengan bergantinya presiden di Filipina. Hak politik sebagai warganegara yang setara dengan masyarakat Kristen Filipina tak kunjunga didapat. Melalui jalan yang berliku – sampai detik ini—perjuangan Muslim Filipina tak kenal henti dan lelah. Berbagai cara ditempuh, baik baik dengan jalur politik, negoisasi untuk mendapatkan hak-hak mereka. Ketidakpuasan atas sikap pemerintah inilah yang melatarbelakangi munculnya konflik yang tak kunjung reda di Filipina sampai saat ini.

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini:

1. Spanyol datang ke bumi Filipina untuk menjajah pada abad 16 atau sekitar tahun 1565 M. Mereka berlabuh di Cebu, salah satu pulau yang berada di utara Mindanao. Secara umum, tujuan mereka adalah untuk menyebarkam agama (motif agama) dan mencari kekayaan (motif ekonomi), di bawah nama Raja Philip II yang kemudian menjadi asal usul nama Philipippes (Filipina). Motif agama ini terlihat lebih kental pada penjajahan Spanyol terhadap

Filipina. Mereka melakukan katolikisasi terhadap masyarakat Filipina. Akan tetapi Spanyol hanya berhasil melakukan katolikisasi di bagian tengah dan utara, sedangkan di selatan mereka tidak berhasil melakukan katolikisasi terhadap dua kesultanan Islam, yaitu kesultanan Maguindanao dan Sulu. Dua kesultanan di pulau Mindanao ini cukup kuat dan mengakar sehingga mampu memobilisasi perlawanan rakyatnya. Tercatat, kedua kesultanan ini terus menerus melakukan perlawanan dari semenjak penjajahan Spanyol hingga berakhirnya penjajahan Amerika. Yegar menjelaskan Muslim Sulu dan Mindanao menganggap mereka telah menjadi bagian dari Dar Islam dan melawan penjajahan Spanyol adalah jihad atau “perang suci. Walaupun Sulu dan Mindanao mempunyai musuh yang sama, yaitu bangsa spanyol dan bangsa Filipina yang ter-kristen-kan, keduanya tidak melakukan upaya koordinasi antara keduanya. Untuk memuluskan tujuan penjajahan yang bermotif ekonomi, Spanyol menggunakan politik *devide and rule* (pecah belah dan kuasai). Sedangkan untuk memuluskan motif agama, mereka melakukan *mission-sacre* (misi suci/kristenisasi). Telah terjadi peperangan selama 334 tahun di Filipina, antara Bangsamoro dan Spanyol. Spanyol yang jauh dari Eropa kekurangan tenaga dan sumber untuk meneruskan peperangan melawan Bangsamoro. Menyadari fakta ini, mereka tidak mungkin menang kecuali menggunakan strategi lain yaitu mengadu domba antara orang Filipina yang telah masuk Katolik

untuk memerangi Bangsamoro. Spanyol menanamkan benih perpecahan antara kedua kelompok tersebut. Dengan trik kekerasan, persuasi atau menundukkan secara halus dengan hadiah-hadiah, orang-orang Spanyol dapat memperluas kedaulatannya ke seluruh perkampungan *(barangay)* Filipina yang terpencar-pencar secara luas. Genderang perang Kristen dan Islam bernama 'Perang Moro' mulai digelar. Politik perang sebangsa pun digulirkan. Para penjajah Spanyol membuat peta pertempuran antara indo-Kristen (para pribumi Filipina yang telah ter-Kristenkan) dengan orang-orang Moro (sebutan orang-orang Spanyol untuk menamakan pribumi Filipina yang beragama Islam karena mereka mempunyai kepercayaan yang sama dengan orang-orang Moor Spanyol). Kendati demikian, Spanyol tidak pernah berhasil menundukkan Bangsamoro yang dikomandoi oleh dua kesultanan yang selalu memimpin perlawanan dengan sengit. Pengaruh Spanyol terlihat pada intevensi agama yang dilakukan, sehingga mayoritas warga Filipina memeluk Kristen, padahal sebelumnya telah di Islamkan oleh kesultanan Brunei.

Sedangkan pengaruh kolonial Amerika dapat disimpulkan bahwa Amerika telah berjasa dalam membangun infrastruktur di Sulu dan Mindanao. Walaupun pada mulanya, perlawanan terhadap proyek ini sangat sengit. Sekolah-sekolah pemerintah yang dibangun di mana-mana, sehingga membuat bangsamoro takut sekolah-sekolah pemerintah itu akan menggusur sekolah-sekolah

tradisional mereka yang berbasis Islam. Seperti yang dilakukan Jenderal Bliss, ia memberikan peralatan dan dukungan terhadap sekolah-sekolah tradisional Islam. Ia ingin membuktikan bahwa Amerika tidak berusaha meng-kristenisasi kaum Muslim. Infrastruktur yang dibangun Amerika diantaranya rel kereta api dan jalan-jalan umum yang melintasi Mindanao. Begitu pula sambungan telefon yang menghubungkan seluruh pulau, sehingga memungkinkan orang Amerika dan orang Filipina Kristen berhubungan dengan orang-orang di pedalaman.

Akan tetapi di sisi lain, sebagai pemerintahan, Amerika Serikat juga agresif mengeksploitasi daerah-daerah kosong jarang penduduk yang masih luas di Pulau Mindanao. Amerika juga mendatangkan transmigran dari bagian utara dan tengah- yang notabene beragama Katolik- untuk kepentingan Industri dan pengembangan pertanian serta perkebunan. Hal ini membuat penduduk Muslim di Mindanao secara keseluruhan dengan Lumad lainnya tinggal sekitar 30% di kepualauan Mindanao, selebihnya adalah para pendatang yang beragama katolik.

Yang menarik adalah Amerika tidak terlalu peduli dengan misi agama, yaitu mengajak bangsamoro masuk ke agama Kristen.

2. Kaum minoritas Muslim di Filipina secara popular disebut Moro, yang berkonotasi menghina dan melambangkan kedudukan Muslim yang umumnya tidak menyenangkan dalam menghadapi orang-orang Mayoritas. Sebutan ini

pertama kali diberikan orang Spanyol pada abad 16, meniru sebutan orang-orang Mauritania Afrika Utara yang diislamkan (Bangsa Moor) yang di bawah pimpinan Arab menaklukkan dan memerintah Spanyol selama delapan abad. Setelah berabad-abad sebutan ini berubah menjadi sebuah label penghinaan ketika kaum Muslim Filipina dengan gigih melawan penaklukan Spanyol. Orang-orang Muslim Filipina juga tak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang teologi klasik, filsafat, serta rumusan-rumusan hukum Islam, bahkan mereka mencampuradukkan sebagian tahayul pra-Islam dan adat dengan asas-asas Islam, walaupun sebagian besar mereka mengetahui ajaran dan kewajiban dasar Islam. Secara politik, bangsamoro dianggap penduduk kelas 2 atau lebih rendah dari penduduk lain yang beragama Kristen. Kedudukan mereka hampir-hampir disamakan dengan Lumad/ indegous people yang merupakan penduduk asli Filipina yang pagan.

3. Sudah semenjak Filipina belum merdeka, Muslim Filipina selalu berjuang mendapatkan hak hidup dan beragamanya. Sampai pada saat penyerahan kedaulatan dari Amerika kepada pemerintah Filipina (GRP), Bangsamoro enggan berintegrasi kesana, karena khawatir kultur dan hak mereka tidak terjamin. Akan tetepi garis takdir memaksa Bangsamoro yang muslim untuk masuk ke dalam pemerintahan Filipina yang mayoritas Kristen. Sehingga apa yang dikhawatirkan terjadi. Pergolakan, perlawanan dan kekerasan tidak dapat dihindarkan. Setali

dua uang, pemerintah paska kemerdekaan tak ubah seperti penjajah. Pemerintah "seakan-akan" selalu ingin merangkul Muslim minoritas tersebut, terkecuali Estrada. Akan tetapi, sampai saat ini pemenuhan hak tersebut masih terabaikan. Problem mendasar adalah adanya masalah struktural di balik gagalnya negoisasi pemerintah dengan muslim Filipina yang diwakili MNLF dan MILF, yaitu usaha *status quo* bagi pelaku dan pemilik kekuasaan untuk terus mengontrol terhadap wilayah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Artinya, pemerintah setengah hati dalam melakukan negoisasi terkait otonomi daerah Muslim sesuai dengan PA Tripoli.

Selain itu, menurut Majul Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh kepada pemerintah Republik Filipina. Hal ini diungkapkan oleh Majul. *Pertama*, bangsa Moro sulit menerima Undang-Undang Nasional karena berasal dari Barat dan Katolik dan bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Ketiga, adanya trauma dan kebencian yang mendalam pada bangsa Moro atas program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ajid Thohir, *Kajian Sejarah Islam di Filipina*, makalah yang disampaian dalam *Workshop Historiografi Islam di Asia Tenggara*, 1-3 Desember 2012 di Hotel Bukit Indah Purwakarta.

Ali M. Kettani,. *Muslim Minorities In The World Today/ Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*. Penerjemah: Zarkowi Soejoeti, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Azra, Azyumardi, *Renaisans Islam Asia Tenggara*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999

Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, Terj. Eddy Zainurry, Jakarta: LP3ES, 1989.

Erni buduwanti,*"Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina Gerakan Separatism Moro"* dalam *Prosiding Seminar*.

G. Gowing, Peter, *Islam di Asia Tenggara*, Hasan Basari (Terj.), Jakarta: LP3ES, 1990

Mangandaralam, Syahbuddin, *Mengenal Dari Dekat Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal.* Penerbit Remadja Karya. Bandung.

Suaedy, Ahmad, *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*, Jakarta: The Wahid Institute, 2012

Wilson, JR, MAJ Thomas G., *Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace*, Kansas: School of Advanced Military

Studies United States Army Command and General Staff College Forth Leavenworth, 2009

Yegar, Robin L. "Moro Insurgent and the Peace Process in the Phillippines, "In *Countering Terrorisme and Insurgency in the 21th Century: International Perspective*., edited by. James J.F. Forest

WEBSITE

Hannbal Bara, *The History of The Muslim in the Philippines*, artikel diambil dari *http://www.ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/articles-on-c-n-a/article.php?igm=4&i=232*

http://www.peradabanbangsa.com/2012/10/letak-geografi-dan-keadaan-alam-filipina.html

http://rupanx.tripod.com/aj1113/teori_dan_pendekatan_sejarah.htm

http://chaerolriezal.blogspot.com/2012/12/filipina-di-bawah-penjajahan-spanyol.html

http://peperonity.com/go/sites/mview/muallaf/24657194.

http://chaerolriezal.blogspot.com/2012/12/filipina-di-bawah-penjajahan-spanyol.html.

http://www.angelfire.com/id/sidikfound/moro.html. Tanggal akses 19/12/12

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moro. Tanggal akses 19/12/12

http://tugas-makalah.blogspot.com/2012/06/islam-di-philipina.html.

http://suhaimi-jaya.blogspot.com/2012/11/umat-islam-di-filipina-adalah-salah.html

JEJAK KOMUNITAS MUSLIM DI BURMA (MYANMAR)

(Fakta Sejarah yang Terabaikan)

Oleh: Ridwan Bustamam

PENDAHULUAN

Secara umum, baik versi pemerintahan, sejarawan, maupun akademisi, lebih cenderung mempublikasikan bahwa di Burma terdapat 135 suku, yang terbesar antara lain adalah Arakan (Rakhaing), Burman, Chin, Kachin, Shan, Kayah (Karenni), Karen, dan Mon.[1] Manun demikian, tidak ditemukan data sensus yang dapat diandalkan terkait populasi etnis minoritas di Burma, meskipun pemerintah mengklaim bahwa di Burma terdapat 135 "ras". Etnis Kachin, Karen, Karenni, Shan, Chin, Mon, dan Rakhine (Arakan) mampu menunjukkan garis keturunan mereka secara historis dan menegosiasikan batas-batas wilayahnya dengan pemerintah. Pupulasi etnis yang ada di Burma dapat digambarkan sebagai berikut: Burman yang merupakan mayoritas 50 juta orang (50-75%); kelompok minoritas terbesar berikutnya adalah Shan (9%) dan Karen (7%); sedangkan etnis

---

[1] Lihat antara lain James Clad (et.al) (Ed.), 2011, *The Borderlands of Southeast Asia (Geopolitics, Terrorism, and Globalization),* Washington, D.C.: The Center for Strategic Research Institute for National Strategic Studies by National Defense University Press, hlm.197.

Mon, Rakhine, Chin, Kachin, Karen, Rohyinga, Kayan, Cina, India, Danu, Akha, Kokang, Lahu, Naga, Palaung, Pao, Tavoyan, dan Wa populasinya hanya sekitar 5% atau kurang dari jumlah itu.[2] Negara mengklaim bahwa 3% dari penduduk Myanmar terdiri dari umat Islam, namun penelitian lain menunjukkan populasi bisa setinggi 13%, Muslim diyakini berjumlah sekitar tujuh juta di Myanmar.[3] Masyarakat Burma sebenarnya berasal dari orang 'Mongoloid', yang dapat dibagi menjadi tiga subkelompok utama, yaitu: Tibet-Burman, Sino-Thailand, dan Mon-Khmer.[4] Buddhisme merupakan bagian integral dari budaya Burma. Sebab, Buddhisme telah dipraktekkan di Burma selama sekitar 1500 tahun. Berbagai prasasti agama Buddha ditemukan seluruh negeri, terutama di wilayah Bagan (Pagan).[5] Bagan

---

[2] Chizom Ekeh, "Minorities in Burma", dalam *Briefing: Minority Rights Group International*, Minority Rights Group International 54 Commercial Street, London E1 6LT, United Kingdom, October 2007, hlm.1-5. Data lain menyebutkan bahwa Agama-agama besar negara adalah: Budha 89%, Kristen 4% (Baptis 3%, Katolik Roma 1%), Muslim 4%, animisme 1%, lainnya 2%. Lihat, By R. Lee Hadden, 2008, *The Geology of Burma (Myanmar): An Annotated Bibliography of Burma's Geology, Geography and Earth Science*, Alexandria- Virginia: Topographic Engineering Center September 2008, hlm.16.

[3] Rianne ten Veen, *Myanmar's Muslims (The Oppressed of the Oppressed),* Wembley: (First published in Great Britain in 2005) Islamic Human Rights Commission, hlm.6

[4] *By Harn Yawnghwe*, 2000/2001, Bringing about Change in Burma,Brussels: Euro Burma Office European Office for the Development of Democracy in Burma, hlm. 8-9.

[5] Burma telah terlibat dalam perdagangan internasional melalui jalur laut dan darat semenjak sebelum abad kesepuluh. Daerah sungai Irrawaddy dan Salween merupakan rute untuk transportasi pemunpang maupun barang. Sungai tersebut menghubungkan Teluk Benggala dengan Yunnan. Sedangkan perdagangan melalui rute darat sepeti Bengal, Assam, dan Yunnan juga melewati daerah tersebut.

tidak hanya mewakili awal dari bersatu negara Burma, tetapi juga melambangkan Burma sebagai “Theravada Buddhisme”.[6] Penting juga disinggung bahwa bahasa resmi Mynmar adalah (ဗမာစာ, *ba.ma ca* [bəmàsà]). Meski secara resmi bernama 'bahasa Mynmar', banyak pihak yang menyebutnya 'bahasa Burma'. Bahasa ini merupakan bahasa ibu bagi etnis Bamar, Rakhine, dan sub-etnis Bamar lainnya. Bahasa ini termasuk dalam rumpun Sino-Tibet.[7]

Lieberman mencatat bahwa kekuasaan raja Pagan di Burma telah berkembang terutama dalam abad ke-10 dan abad ke-11. Lihat, Geoff Wade, 2009, “An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900–1300 CE”, dalam *Journal of Southeast Asian Studies, 40 (2)*, p. 221–265 June 2009. The United Kingdom: The National University of Singapore, hlm,246-247.

[6] Charlotte Kendrick Galloway, 2006, Burmese Buddhist Imagery of the Early Bagan Period (1044 – 1113), 2 Volumes, A *thesis* submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University, hlm.iv.

[7] http://www.omniglot.com/writing/burmese.htm, diakses 10 Desember 2012. Berikut contoh teks bahasa Burma:
လူတိုင်းသည် တူညီ လွတ်လပ်သော ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် လည်းကောင်း၊ တူညီလွတ်လပ်သော အခွင့်အရေးများဖြင့် လည်းကောင်း၊ မွေးဖွားလာသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၌ ပိုင်းခြား ဝေဖန်တတ်သော ဉာဏ်နှင့် ကျင့်ဝတ် သိတတ်သော စိတ်တို့ရှိကြ၍ ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်း မေတ္တာထား၍ ဆက်ဆံကျင့်သုံးသင့်၏။

BURMA
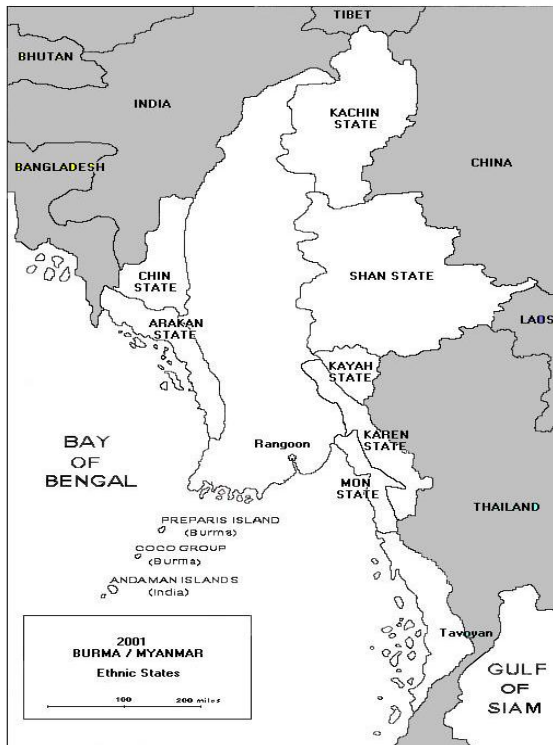
Sumber: Harn Yawnghwe (2000/2001)

Orang-orang yang dikenal Eropa sebagai "Birman", "Barman", atau "Burma" tinggal di wilayah barat Indo-China, yang berada di sepanjang sungai Irawadi. Mereka adalah penduduk yang paling banyak di bagian tengah sungai. Gunung-gunung yang terikat dengan embah sungai di kedua sisinya dihuni oleh suku milik keluarga besar yang disebut Burma. Orang Burman berabad-abad yang lalu dibentuk

menjadi bangsa oleh persatuan suku Mongoloid, yang kemudian menempati lahan yang masih rumah ras mereka.[8] Mr. Hodgson menganggap, suku-suku utama yang terdekat dengan Burma (sekarang) tinggal di perbatasan bagian selatan-timur Tibet adalah Mishmi dan Abor. Suku lain yang sedikit sudah bercampur adalh Chingpaw atau Singpho. Mereka adalah ras yang sama dengan orang yang dikenal sebagai Kakhyen, tinggal di bukit timur Bamoa, dan mereka datang sekitar dua abad yang lalu dari arah utara. Prof. Max Muller menggolongkan bahasa dari suku Mishmi, Abor, Burma, Singpho, dan beberapa lainnya sebagai subdivisi Lohitic dari Bhotiya, sekarang umumnya disebut Tibet-Burman. Sedangkan Tai atau Siam cabang dari masyarakat Indo-China, yang disebut sebagai Shan Burma, yaitu suku pertama yang bermigrasi dari daerah asal mereka di Asia Tengah ke selatan, dan menetap di sepanjang sungai Mekong, Menam, Irawadi, dan Brahmaputra. Suku-suku sekarang tinggal di pegunungan Arakan, terutama Kami dan Khyeng termasuk dalam keluarga yang sama.[9]

Menurut Yunus, penulisan sejarah lengkap tentang Arakan belum mampu dipenuhi oleh sejarawan secara objektif. Memang sejauh ini telah terbit berbagai tulisan tentang peristiwa yang terjadi di Arakan oleh sejarawan modern, baik sebagai bab tersendiri dalam buku-buku sejarah,

---

[8] Lieut.Geneeal Sie Aethur P. Phayee, 1883, *History of Burma Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim, And Arakan (From The Earliesttime To The End Of The First War With British India),* London:Teubner & Co., Ludgate Hill., hlm.1-2.

[9] Lieut.Geneeal Sie Aethur P. Phayee, *ibid.,* hlm.6-7.

atau dalam mata pelajaran lain yang relevan dengan sejarah Arakan. Sumber lama tentang sejarah Arakan juga telah tersedia, baik berupa kronik, buku-buku, maupun artikel yang ditulis dalam bahasa Burma di Arakan oleh penulis berbeda, namun banyak kontroversi dan sering "tergelincir" sehingga jauh dari kebenaran. Distorsi sejarah dan warisan orang Arakan sering terjadi karena adanya bias kepentingan kelompok yang kuat.[10] Kesimpulan yang tepat tentang kehidupan sosial-budaya, politik, dan keagamaan orang Arakan juga belum dapat ditarik dengan baik, tanpa melakukan studi mendalam tentang sejarah kontemporer India, Bengal, Tripura, Burma, dan Asia Tenggara pada khususnya, serta dunia Islam pada umumnya yang telah berinteraksi dengan Arakan dalam jangka yang panjang. Selain itu, untuk memahami kebenaran sejarah, penting juga dipelajari berbagai tulisan tentang wilayah, koin, dan temuan arkeologi lainnya, termasuk monumen dan kuil, bahasa dan skrip serta nama-nama tempat, sungai, pegunungan dan hal terkait lainnya sebagai bagian dari refleksi sejarah Arakan. Penelitian tentang sejarah suatu bangsa bukanlah pekerjaan oleh satu orang, tetapi merupakan tugas kolektif, berkesinambungan, dan menjadi tanggung jawab rakyatnya.[11]

Arakan yang sekarang menjadi provinsi di barat Burma, pernah menjadi negara merdeka sampai tahun 1784. Faktor

---

[10] Dr Mohammed Yunus, *A History of Arakan (Past and Present),* Edisi Pertama terbitkan tahun 1994, t.tp., hlm.5. Mohammed Yunus adalah Presiden Rohingya Solidarity Organisation (RSO), Arakan.

[11] Mohammed Yunus, *ibid,* hlm.3-4.

geografi Arakan telah memiliki pengaruh penting pada perjalanan sejarahnya. Arakan berhasil mempertahankan dirinya sebagai kerajaan independen sampai hampir akhir abad ke-18 terutama karena posisi geografisnya yang strategis. Luas total Arakan selama periode Inggris adalah sekitar 20.000 mil^2. Arakan membentang dari utara ke selatan memiliki tanah pegunungan di sepanjang pantai timur Teluk Bengal, bersentuhan dengan Bangladesh di barat laut, India di utara dan Hills Chin di timur laut, dan berpotongan dengan Burma lewat pegunungan panjang dari Arakan Yoma hingg fisiografi alami timur dalam. Arakan memiliki 176 mil daerah laut, sementara tanah perbatasan dengan Bangladesh secara tradisional berfungsi sebagai "Pintu Gerbang" ke Timur Jauh. Karena memiliki 360 km daerahpantai yang panjang di bagian barat, membuat Arakan begitu mudah untuk komunikasi laut dengan negara lain. Arakan juga memiliki tujuh sungai, yaitu Naf, Mayu, Kaladan, Lemro, Ann, Tangup, dan Sandoway. Sungai Naf melayani garis batas antara Arakan dan Bangladesh. Kaladan sungai terpanjang yang muncul dari luar Hill Tracts Arakan dan mengalir ke Teluk Bay Bengal di Akyab, sebagai pelabuhan dan ibukota Arakan. Wilayah Arakan yang memiliki pegunungan, hutan lebat, sungai dan anak sungai. Massal dari total lahan luas permukaan ditutupi dengan hutan, yang di bagian selatannya lebih sempit dan berbatu. Daerah pantai Arakan juga terdapat pulau-pulau, Ramree dan Cheduba adalah yang terbesar. Pelabuhan air di pantai pulau Ramree yang berdekatan dengan Kota Kyaukpyu, dapat menampung kapal-kapal besar. Lembah-

lembah di utara Arakan, seperti daerah Kaladan dan Lemro begitu subur dan terkenal sebagai *Dhanavati* atau lumbung beras. Tercatat bahwa sampai awal Perang Dunia Kedua, daerah tersebut mampu mengekspor beras dalam jumlah besar untuk Chittagong, Calcutta, Madaras, Colombo, dan Kochin. Pada tahun 1950-an Akyab sendiri memiliki 50 pabrik padi yang sebagian besar tetap bekerja setiap saat sepanjang tahun. Selain beras, Arakan terkenal sebagai penghasil kayu alami. Ketertarikan awal para pedagang Arab di Arakan adalah karena kaya sumber daya alam dari tanah, juga karena masyarakatnya yang sopan. Kayu besi Arakan yang dikenal sebagai *Pyinkadow* biasanya digunakan untuk membangun dan memperbaiki kapal sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Selain hutan *Pyinkadow,* Arakan juga menghasilkan secara alami kayu jati berkualitas tinggi, bambu yang berlimpah, karet, dan perkebunan teh. Daerah pantai juga kaya dengan ikan, dan udang berkualitas tinggi terdapat di sepanjang muara anak sungai. Arakan bahkan kaya sumber daya mineral, meskipun minyak bumi dan mineral lainnya sumber daya lainnya sampai sekarang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Di daerah Arakan terdapat 17 kota. Ibu Kota Akyab terletak di daerah sungai Arakan utara dan pegunungan Kaladan, juga berfungsi sebagai pelabuhan utama Arakan. Transportasi dan komunikasi di Arakan umumnya menggunakan jalur air. [12]

---

[12] Mohammed Yunus, *ibid*, hlm.7-8.

Mohammed Yunus memastikan bahwa istilah Arakan berasal dari Bahasa Arab atau Persia yang memiliki arti yang sama dalam kedua bahasa. "Arakan" merupakan bentuk jamak yang diambil dari bahasa Arab dari kata *rukn* yang berarti pilar atau tiang. Istilah tersebut menggamberkan prinsip dasar Islam yang disebut 'lima rukun Islam'. Kata Arakan juga menandakan tanah Islam atau perdamaian. Sebab, nama Arakan menjadi populer setelah ditaklukan negara Muslim pada 1430. Bahasa Persia kemudian menjadi bahasa pengadilan di kesultanan Bengal independen, yang menaklukkan Arakan dan terus menjadi bahasa resmi Arakan sampai dengan 1845. Raja Arakan kemudian mendirikan apa yang dikenal sebagai "Arakan Empire". Nama Arakan sendiri mungkin diberikan oleh raja Arakan yang mempertahankan hubungan baik dengan Sultan Bengal. Penulis seperti Ain-i-Akbar, Baharistan-i-Ghaibi dan Siyar-ul-Mutakherin menyebut Arakan dengan istilah Arkhang. Orang Eropa seperti Medieval, Van Liscoten, dan lainnya menyebut Arakan dengan istilah di era modren, seperti Arracan, Arracoo, Orrakan, dan Arrakan.[13]

Salah satu koin yang ditemukan di Arakan dicetak oleh Shah Sultan Bahadur tertanggal 965 H (1557-1558 M). Koin ini ditulis dalam bahasa Persia dengan kalimat syahadat di sisi depan dan nama Arakan pada sisi sebaliknya. Koin serupa dicetak oleh pendahulunya Sultan Muhammad Shah 962 H (1554-1555 M), juga dengan prasasti yang menggunakan nama Arakan. Kedua koin tersebut telah diawetkan di

---

[13] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.7.

Museum India, Calcutta. Koin Muhammad Shah dengan inskripsi yang sama juga ditemukan dikonservasi dalam British Museum. Ada sejarawan yang berkomentar: "Memang benar bahwa dalam buku sumber Persia nama pada koin tertulis *Arkhank* dan itu sedikit variasinya. Kemungkin istilah tersebut merupakan bentuk Eropa atau bentuk plural dari istilah Arab, yang lebih "akrab" atau dimengerti oleh pencetaknya daripada bentuk lain dari suatu nama negara. Jadi bentuk inskripsi tersebut mungkin kata sebagai nama pencetak uang". Dari prasasti koin di atas dapat disimpulkan bahwa nama Arakan telah digunakan setidaknya sejak pertengahan abad ke-16.[14]

Nama Arakan di atas tidak muncul hanya sebagai contoh solidaritas dalam bahasa. Berbagai nama tempat penting, sungai, dan pegunungan di Arakan juga menggunakan nama asal Persia atau Arab. Sebagai contoh, nama ibukota Arakan adalah Akyab (*Ek-ab*) yang berarti tanah air satu. Dalam bahasa Persia seperti kata Punjab (*Panj-ab*) berarti tanah lima perairan. Sedangkan nama sungai seperti Kaladan (*intelektual*), Naf (*saraf*), Kulapanj (*lima puluh orang terpelajar*) juga berasal dari Persia atau Arab. Semua itu memberi kesaksian tentang fakta bahwa Islam telah eksis di wilayah yang sekarang disebut sebagai Arakan. Dengan demikian, istilah Arakan dan wilayah Arakan terkait dengan komunitas Islam. Hanya saja, beberapa sejarawan cukup "menyesatkan", sebab menggunakan istilah Arakan yang hanya sinonim dengan Magh (Rakhaing). Padahal dalam

[14] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.8.

pengertian umum semua orang dari Arakan, baik Muslim atau umat Buddha harus disebut Arakan. Magh Buddha dari Arakan yang menyebut diri mereka Rakhaings, menerjemahkan istilah Arakanese sebagai Rakhaing dalam Bahasa Burma, yang memberi kesan bahwa Rakhaing dan Arakan identik, termasuk Muslim Arakan karena istilah Muslim tidak menggunakan Rakhaings. Faktanya, tentara Inggris yang telah mengambil bagian dalam Kampanye Arakan selama Perang Dunia Kedua menulis: *"When we withdrew.... was followed by a bitter internecine struggle for land and power between the Arakanese and the Maughs, two sections of the population attributing Arakanese to the Muslims"*[15] (Ketika kita menarik diri ....muncul pertikaian pahit terkait wilayah dan kekuasaan antara komunitas Arakan dan Maughs, sebagian dari penduduk yang bertikai "menghendaki identitas" Arakan sebagai Muslim").

Menurut Mohammed Yunus, istilah *Roang/Rohang/ Roshang* adalah beberapa nama lama (kuno) dari Arakan. Istilah tersebut kemungkinan diambil dari kata *rahham* (berkat, rahmat) dalam bahasa Arab yang berarti "yang diberkahi Allah". Para pedagang Arab dan Persia dari masa awal telah menggunakan istilah tersebut di zaman kerajaan Vesali, setidaknya satu abad sebelum Chandras sebagai nama kerajaan yang mereka kunjungi. Orang-orang Arab pernah terdampar di sebuah pulau di pantai barat Arakan, yang disebut tanah *Rahham al-Barriy,* dan dalam bahasa Arab berarti "tanah rahmat Allah". Istilah ini dalam kata serapan di Burma

---

[15] Mohammed Yunus, *ibid.,* hlm. 8-9.

sedikit berubah menjadi *Rambre,* sementara istilah Inggris untuk kata tersebut jauh berubah menjadi *Ramrhee*. Rahma atau *Jazirat al-Rahmi* yang disebutkan oleh ahli geografi Arab mungkin yang dimaksud kerajaan Raham pada abad ke-9 dan ke-10, kemudian diserap menjadi kata Roang/Rohang/Roshang. Beberapa ahli geografi Arab seperti Ibnu Khurdadhbih, Al-Mas'udi, dan Yaqut telah mendeskripsikan bahwa Rahmi atau Rahma terletak di suatu tempat di lepas pantai antara Teluk Benggala dan Selat Malaka (*Bahr Salahit*), tetapi masih samar-samar sehingga sangat sulit untuk menunjukkan lokasi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kata "jazirah" digunakan tidak hanya untuk menunjukkan pulau tetapi juga pertanahan. Solaiman, seorang pedagang yang hidup di pertengahan abad ke-9 menyebutkan bahwa raja Rahmi adalah seorang penguasa yang kuat dengan 50.000 gajah dan 150000 tentara. Gajah itu bahkan saat ini ditemukan dalam jumlah besar di hutan Arakan dan berbukit di wilayah Chittagong. Berdasarkan catatan dalam Arakan kronik, Richard Forster menjelaskan bahwa selama pemerintahan Mahatoing Tsandaya pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9 M, beberapa kapal asing rusak di pantai pulau Ranbyi (atau Rambree).[16]

Secara keseluruhan, Mohammed Yunus berasumsi bahwa Jazirat-al-Rahmi menurut geografi Arab ini adalah kerajaan Rahmi sebagai negara Mogen (Magh atau Maugh

---

[16] Richard Forster, "Magh Marauders, Portuguese Pirates, White Elephants and Persian Poets: Arakan and Its Bay-of-Bengal Connectivities in the Early Modern Era", dalam *EXPLORATIONS: a graduate student journal of southeast asian studies, Volume 11, Issue 1*, Spring 2011, hlm.4.

dalam istilah Inggris), yaitu penduduk Buddha Arakan. Sedangkan Sir A.P. Phayre menemukan hubungan etimologis antara istilah Rahmi oleh penulis arab dengan istilah Ramu. Menurut Phayre, Ramu merupakan tempat di selatan Chittagong, dan hanyalah sisa-sisa kerajaan kuat yang dibayangkan oleh orang Arab sebagai Rahma, Rahmi atau Ruhmi. Pandangan Sir A.P. Phayre ini tidak dapat dijadikan argumen karena fakta bahwa "Ramu tidak pernah lebih dari satu kerajaan, yang keberadaan tidak pernah otoritatif atau independen dalan sejarah, juga sering kali bedara di bawah kekuasaan Arakan sebelum abad ke-15. Jika diduga bahwa kerajaan itu mungkin telah ada pada abad ke-9 dan ke-10 sebagaimana penulis geografi Arab, maka dapat dikatakan dengan keyakinan bahwa pernah jadi sebuah kerajaan besar telah menjadi kekuatan subbenua. Deskripsi kerajaan Rahmi oleh penulis Arab tidak sesuai dengan keberadaan Ramu abad ke-9 dan ke-10, tetapi cocok untuk deskripsi kerajaan Rohang. Dalam hal ini, pendapat Rashiduddin cukup memadai, bahwa di tahun 1310 nama Arakan telah muncul sebagai Rahan yang sangat mirip dengan Rohang, dalam tulisannya, "The country of Rahan (Arakan) is Subjected to the Khan". Jadi, Arakan kuno yang dikenal dengan nama Roang/Rohang/ Roshang merupakan kesepakatan banyak sejarawan dan penulis sejarah.[17]

Terdapat dua komunitas etnis utama di Arakan, yaitu: 1) orang Rohingya sebagai penduduk mayoritas Arakan, yang secara keseluruhan menganut agama Islam; 2) orang Magh

[17] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.10-11.

(Rakhaing), penduduk minoritas yang mengaku beragama Buddha. Sebelum tahun 1942, Arakan telah didiami dalam waktu yang sangat panjang oleh etnis Rohingya maupun Magh. Namun selama tahun 1942, gerakan anti-Muslim membuat kaum Muslim Arakan selatan terdorong ke utara, Magh Buddha kemudian mengambil alih bagian selatan Burma sehingga mereka sekarang menjadi mayoritas. Di Arakan juga mesih terdapat sebuah "perkampungan" suku di beberapa perbukitan Arakan, yang sebagian besar mereka penganut animisme dengan jumlah yang masih signifikan. Nama suku tersebut adalah Kami, MRO, Chaungtha, Saak, Dagu, Chaw, Khaungtso, Ahnu, dan Kon. Namun demikian, ras utama mereka adalah Mro, Kami, Chaungtha, dan Chin. Mohammed Yunus menjelaskan bahwa istilah Rohingya berasal dari kata *Rohai* atau *Roshangee*, kemudian mengalami penyimpangan terminologi menjadi *Rohingya*. Rohai dan Roshangee adalah istilah yang menunjukkan penduduk Muslim yang menghuni Arakan "tua" (Rohang/Roshang/Roang). Dalam kaitan ini, di antara penduduk Muslim Chittagong terdapat dua karakter etnis yang berbeda. Salah satunya dikenal sebagai *Chatganiya* dan yang lainnya disebut *Rohai*. Meskipun mengaku beragama yang sama (Islam), tetapi mereka memiliki tradisi budaya yang berbeda. Rohais dari Chittagong saat ini dapat dikatakan merupakan penduduk Muslim yang melarikan diri Arakan (Rohang), akibat kekejaman Burman yang menguasai Arakan tahun 1784 M. Sebanyak 50% dari total penduduk Chittagong di distrik Rohais dapat dilacak berasal dari Arakan. Asal-usul

orang Rohingya yang dapat dilacak adalah orang Arab, Moor, Turki, Persia, Moghul, Patthan dan Bangalees (Bangladesh). [18]

Bahasa Rohingya sendiri berkembang secara unik karena merupakan bahasa campuran, yang dikembangkan selama kursus lebih dari seribu tahun. Bahasa resmi Arakan adalah bahasa Persia semenjak masa awal raja Mrauk-U sampai tahun 1845, termasuk 22 tahun berikutnya di luar penaklukan Arakan oleh kolonial Inggris. Selama Mrauk-U berkuasa, kontak dengan Bengali begitu ramah dan "kuat". Sebagai bukti, sastra Bengali telah berkembang di pengadilan Arakan. Banyak penyair Muslim terkenal yang dilindungi oleh para raja Arakan seperti Shah Alawal (Sayyid Alaol[19]), Daulat Qazi, Siddiqi Magan, Thakur Magan, dan lainnya. Mereka menulis dalam bahasa Persia dan Arab atau dalam bahasa Rohingya, yaitu bahasa campuran yang mereka kembangkan sendiri dari bahasa Bengali, Persia, Arab dan Arakan (Rakhaing). Meskipun Bahasa Rohingya tersebar luas selama era raja-raja Arakan, keberadaannya sebagai bahasa tertulis telah berkurang terutama setelah dihancurkan oleh Burman pada tahun 1784, kemudian tidak dilestarikan dengan baik oleh pemerintah kolonial.[20]

---

[18] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.11.

[19] Istilah yang digunakan Richard Forster untuk menuliskan nama Shah Alawal, *ibid.* hlm.67.

[20] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.11.

Menurut U Khin Maung Saw, "Rohingya" bukanlah kata yang berasal dari Burma atau Bengali.[21] Dia telah mencoba melacaknya di semua literatur dan ensiklopedi, bahkan dari Maurice Collis, seorang sejarawan terkenal yang banyak menulis artikel dan buku-buku tentang Arakan, tetapi tidak pernah menyebut kata "Rohingya" dalam karyanya. Demikian pula dengan penulis kolonial Inggris terkait Burma dan India tidak pernah menggunakan kata "Rohingya". Para ulama dan sejarawan Muslim juga tidak mengetahui arti maupun asal kata "Rohingya". Satu-satunya hal yang dapat mereka katakan adalah bahwa ada banyak pemberontak di Burma pada tahun 1949. Salah satu kelompok pemberontak itu dipiimpin kelompok fanatik Muslim bernama Mir Cassim, yang ingin mengubah Arakan Utara menjadi Negara Muslim yang terpisah dari "Arakanistan" dan bergabung dengan Pakistan. Kelompok ini menamai diri mereka "mujahid". Sebagian besar pejuang "Mujahid" dan keluarga mereka merupakan imigran ilegal yang tinggal di bekas negara bagian Arakan dalam Kesatuan Burma. Pemerintah U Nu pernah menawarkan hadiah 20.000 kyats kepada mereka yang dapat menangkap Cassim hidup atau mati. Akan tetapi, para "mujahid" akhirnya dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Burma di tahun 1950. Cassim melarikan diri ke Pakistan

---

[21] U Khin Maung Saw, “The Rohingyas, Who Are They? The Origin of the Name Rohingya", dalam Uta Gartner and Jens Lorenz (Ed.), *Traditional and Modernity in Mynmar: Proceedings of an International Conference Held in Berlin,* from May 7 th to May 9 th, 1993 (hlm.89-99). Berikut salah satu kitipan wawancara U Khin Maung Saw, yang terjemahannya sbb, “Setiap kali saya bertanya kepada seorang Burma atau Arakan (Rakhine), saya mendapat jawaban "Kami tidak tahu, itu bukanlah kata dari kami", bahkan muncul jawaban bahwa mereka belum pernah mendengarnya.

Timur. Dia ditembak mati oleh orang tak dikenal di kota Cox's Bazar tahun 1966 sehingga pemberontakan "Mujahid" berakhir. Selama kampanye untuk pemilu tahun 1960, U Nu berjanji menjadikan Arakan (Rakhines) dan Mons negara bagian. Setelah ia memenangkan pemilihan dan menjadi perdana menteri, gerakan untuk pembentukan negara bagian Arakan dan juga Mon muncul. Sementara pemimpin Muslim Bengali juga memulai gerakan anti negara bagian Arakan dan meminta status yang sama dengan Arakan (Rakhines). Ketika tuntutan mereka ditolak dengan alasan bahwa mereka bukan ras pribumi, beberapa Muslim Bengali berpendidikan mulai menulis fakta historis untuk membuktikan bahwa mereka adalah Muslim Arakan pribumi.[22]

Hanya saja, beberapa sejarawan yang muncul secara instan menuliskan sejarah mereka secara "konyol". Misalnya, ada yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah orang Arab yang menetap di Arakan setelah kapal dagang mereka karam di dekat Pulau Ramree, lepas pantai Arakan pada abad ke-8. Sementara Maurice Collis menulis bahwa "Bengal" masuk ke dalam kekuasaan Islam tahun 1203 M. Namun batas ekstrim timurnya sampai di Bengal, tidak pernah masuk ke Indo-Cina. Pengaruh kedatangan Islam di Arakan tahun 1203 sampai 1430 diabaikan oleh Collis.

Di sisi lain, menurut U Khin Maung Saw, ada berbeda versi cerita tentang asal usul "Rohingya" yang tidak dapat diterima karena berasal dari cerita seperti dongeng. Meskipun

---

[22] U Khin Maung Saw, *ibid.*

beberapa penulis menggunakan berbagai kisah dalam publikasi ilmiah mereka, tetapi cerita-cerita yang digunakan untuk menjelaskan kata "Rohingya" sebagai fakta sejarah yang "aneh".[23] Tetapi jika dicernati fakta sejarah, pada abad ke-7

---

[23] Menurut U Khin Maung Saw, ada sekitar lima versi cerita tangtang Rohingya. *Versi pertama* menyatakan bahwa nama "Rohingya" berasal dari kata *Rwahaung ga kyar* dalam pengucapan orang Burma Arakan, yang berarti "macan dari desa tua". Sebab, "Muslim Rohingya" adalah prajurit yang baik di daerah asal mereka, yang menetap di Arakan setelah kapal karam dan diselamatkan sebagai tentara bayaran. Itu sebabnya mereka disebut "macan dari desa tua." Versi cerita pertama tersebut mesti dipertimbangkan, sebab para tentara bayaran Muslim, yang bertugas di Kerajaan Mrauk-U disebut "Kamans" yang bermakna "Pemanah", dan keturunan mereka masih hidup damai in Arakan (Negara Bagian Rakhine dari Uni Myanmar) bersama orang-orang Burma dan Arakan Buddha. Orang Burma umumnya menggunakan kata *Haung* yang berarti tua, tetapi dalam dialek di Arakan (Rakhine) kata *Si u* (*Hsoe*) sering diganti untuk istilah *Haung*. Dalam semua kronik dan buku-buku sejarah tentang Arakan Burma yang dikarang penulis asing (Barat) juga tidak ditemukan kata seperti *Rwahaung ga kyar* (tentara bayaran). Artinya, versi ini bertentangan dengan fakta sejarah dan ilmu linguistik.[23] Menurut U Khin Maung Saw, memang ada fakta sejarah yang berasal dari kisah *Rwahaung ga kyar*, yaitu setelah Perang Dunia II sebagian besar etnis Rakhine telah menetap di desa-desa di Arakan-Timur (dekat perbatasan Burma dengan Pakistan) karena terjadinya gelombang imigrasi di Bengali. Desa-desa yang disebut *Rwahaung* (dalam pengucapan Arakan) diartikan "desa tua" oleh otoritas Burma. Sementara menurut dialek Chittagong dari bahasa Bengali bahwa kata "payaja" berarti desa. Akan tetapi, istilah *Rwahaung ga Kyar* ini telah disalahgunakan oleh Muslim Bengali berpendidikan, yaitu penulisan sejarah tentang tentara bayaran Muslim pada tahun 1950-an, kemudian "dirubah" menjadi kisah yang terjadi 12 abad sebelumnya atau abad ke-8, yang disebut dengan istilah *Burma Ba Tha*.

Versi cerita kedua juga sangat mirip dengan versi pertama. Versi ini menyatakan bahwa kata "Rohingya" adalah derivasi dari kata *Ro wan hnya* (dalam pengucapan Arakan Burma), yang berarti "seluruh ras yang mendapat perlindungan dari raja". Versi ini juga memiliki kesamaan dengan "kisah" penyelamatan kapal pelaut Arab yang karam tersebut. Setelah Muslim ini diberi jabatan sebagai penjaga istana Arakan, mereka disukai oleh raja Arakan karena kejujurannya, sehingga raja memberi mereka nama "*Ro wan hnya* " (orang-orang yang jujur, baik, dan hidup dalam masyarakat mereka sendiri). Hanya saja, nama raja ketika itu tidak disebutkan dalam "cerita". Jadi, kisah tersebut harus dipertimbangkan karena bersifat ahistoris.

Versi ketiga menceritakan bahwa pernah ada seorang pangeran muslim yang dikenal dengan nama Mohammed Rahin, yang meminta perlindungan dari Arakan selama pemerintahan Mrauk-U. Mohammed Rahin dan para pengikutnya yang dikalahkan oleh ayahnya, sebagai penguasa ketika terjadi revolusi di Istina Mogul. Selanjutnya raja Arakan memberi mereka suaka politik, keturunan mereka kemudian disebut keturunan *Rahingya*, yang makna berasal dari istilah *Rahin*. Berdasarkan fakta sejarah, Pangeran Shah Shuja (adik Aurang Zebe sebagai Kaisar Mogul), yang "putus asa" untuk mendapatkan tahta Mogul, kemudian mengungsi ke Arakan di tahun 1660. Raja Arakan, Sanda Thudhamma, menerima Shah Shuja, keluarga, dan pengikutnya. Mereka diberikan suaka politik pada awalnya, tetapi kemudian Raja Sanda Thudhamma ingin mengambil salah satu putri Shah Shuja sebagai istrinya. Karena Sanda Thudhamma adalah seorang Buddha dan telah memiliki ratu lainnya, Shah Shuja menolak perintah kerajaan dan berkata lebih baik putrinya mati daripada menikah dengan seorang "kafir". Raja Sanda Thudhamma menjadi sangat marah dan memerintahkan untuk membunuh semua pengungsi Mogul. Inilah penyebab utama pecahnya perang antara Arakan dan Mogul tahun 1666. Hasilnya, wilayah Chittagong-Burma dianeksasi oleh Mogul dari kekuasaan raja Arakan. Peristiwa tersebut merupakan awal dari kejatuhan kerajaan Mrauk-U. Versi ketiga ini bertentangan dengan fakta sejarah, antara lain: 1) nama Pangeran Mogul adalah Sha Shuja dan bukan "Rahin"; 2) "revolusi di istana" itu dilakukan terhadap kakaknya, bukan terhadap bapaknya; 3) semua pengungsi Mogul dibunuh oleh Raja Sanda Thudhamma sehingga tidak meninggalkan keturunan seorang pun. Faktanya, orang yang menyebut diri mereka "Rohingya" atau yang menganggap dirinya sebagai keturunan Mogul memiliki kulit gelap seperti Bengali, dan mereka hanya dapat berbicara bahasa Bengali dengan dialek Chittagong.

Versi keempat menceritakan bahwa adanya yang disebut Kesultanan Roang, yang telah taklu- kepada Kerajaan Mrauk-U. Kesultanan Roang mengirimkan putranya Shah Ali dan 1000 pengikutnya ke pengadilan Mrauk-U untuk mempelajari bahasa, sastra, dan budaya Arakan. Setelah selesai belajar, mereka selanjutnya menetap di Arakan. Keturunan mereka kemudian dipanggil "Roang ane Gya", yang berarti keturunan Roang. Versi ini memiliki beberapa dasar historis meskipun menyimpang dari beberapa fakta sejarah. Memang pangeran legendaris Shah Ali itu ada seperti disebutkan dalam berbagai kronik dan literatur tentang Arakan, yang mendukung adanya Kesultanan Islam yang disebut "Roang Tanah Muslim". Sebagai rasa hormat yang tinggi kepada raja Arakan, Min Phalaung, dan menteri Maha Pyinyagyaw, Sultan telah mengirim anaknya Shah Ali dan seribu pengikutnya ke istana Arakan untuk mempelajari Mranmar (pengucapan Myanmar di Burma) bahasa, sastra, dan budayanya. Namun sumber-sumber sejarah tidak pernah menyatakan bahwa mereka menetap di Arakan. Jadi, muncul keraguan bahwa ada keturunan mereka tinggal lebih dari tiga abad di Arakan, memiliki setidaknya fasih berbicara dalam dialek Arakan dari bahasa Burma, juga mengenal budaya Arakanese atau tradisi Burma. Faktanya, sebagian Muslim di distrik Shwebo-Burma dikenal

Kerajaan Mrauk-U belum berdiri dan Arakan sendiri diperintah Dinasti Dhanyawaddy. Tidak ada bukti sejarah dan situs pemukiman Muslim ketika Dinasti Dhanyawaddy maupun kota tua yang dapat dilihat di dekat kota kecil Kyauktaw. Di sana tidak ditemukan sepotong bukti budaya Arab atau agama Islam, kecuali situs non-Buddhis yang merupakan peninggalan Hindu. Cerita versi kelima ini juga tidak pernah terdengar sebelum 1960. Cerita tentang “Rohingya” justru menjadi “terang” melalui informasi dari Kyemon U Thaung, wartawan terkenal pada koran *Bamakhit* (Era Burma) semenjal tahun 1950-an. Menurut U Thaung, istilah atau nama "Rohingya" diciptakan oleh kelompok kommunis bagi pemberontak "Mujahid Bendera Merah". Pada saat itu, "Mujahid" dan komunis "Bendera Merah" bersekutu melawan pemerintah U Nu. "Mujahid" ingin mendapatkan

---

sebagai "Burma Muslim". Mereka adalah Muslim keturunan India yang merupakan “tentara bayaran” dan “pelayan” para raja Burma. Sekarang mereka sudah berasimilasi ke dalam masyarakat Burma. Sebagian besar mereka mengenal bahasa, sastra, dan tradisi Buddhis Burma bahkan jauh lebih baik daripada beberapa umat Buddha Burma. Di distrik Shwebo juga terdapat beberapa Katholik Roma yang dikenal sebagai *Bayinji*, yaitu keturunan Portugis ditangkap di kota Syriam (Tanyin) dekat Rangoon (Yangon) pada awal abad ke-17. Meskipun nama dan agama mereka berbeda dari penduduk asli, akan tetapi mereka memahami dengan baik tradisi dan bahasa Burma.

Versi kelima menceritakan bahwa pada abad ketujuh, setelah kapal pedagang Arab karam di dekat Pulau Ramree, beberapa pelaut Arab dibawa ke pengadilan Mrauk-U oleh penjaga pantai Arakan. Raja Arakan (yang tidak disebutkan namanya dalam cerita ini) bertanya kepada mereka " Siapa dan dari mana asal Anda?” Para pelaut yang tidak mengerti dialek Arakanese dari bahasa Burma, berpikir bahwa raja akan membunuh mereka, sehingga “berteriak” dalam bahasa mereka "Ronja", yang berarti "berilah kemurahan kepada kami”. Raja sendiri mengira bahwa jawaban pelaut itu adalah "mereka orang-orang dari Ronja”, dan memutuskan untuk mebiarkan mereka tinggal di kerajaan. Sejak saat itu mereka dan keturunannya disebut "Ronja”, derivasi dari kata *Rohinja* atau *Rohingya*.

nama baru yang memiliki hubungan dengan sejarah mereka. Tujuannya adalah untuk mengklaim kewarganegaraan Burma karena sebagian besar "Rohingya" adalah imigran ilegal. Terkait akar nama "Rohingya", Thakhin Soe, pemimpin "Bendera Merah" di Arakan mungkin telah menemukan kata *Roang Pree*, sehingga sangat mungkin menyerap kata itu dalam bahasa Inggris menjadi "Roangians", yang berarti orang-orang Roang, yaitu para "mujahid" natural yang ingin mendapatkan nama baru, memiliki hubungan dengan sejarah Arakan, dan mengidentifikasi diri mereka sebagai keturunan negara yang dulu tidak takluk kepada Arakan. Istilah tersebut sangat mungkin diterima oleh umum karena kata "Roangians" juga bisa diucapkan oleh "mujahid" dengan aksentuasi Bengali. Oleh karena itu, kata "Rohingya" merupakan derivasi dari kata "Roangians, Ro-an-gians, dan Ro-han-gians". Sebab, kata ini hanya diciptakan di “hutan”, maka tidak mengherankan bahwa setiap dokumen tertulis tentang Rohingya tidak dapat ditemukan sampai sekarang.

Dengan demikian, mama "Rohingya" bukanlah nama sejarah maupun nama suatu etnis minoritas di Burma. Sedangkan Muslim Burma dan Muslim Arakan yang berjumlah sekitar 4% dari populasi Burma, tidak sama dengan apa yang disebut "Rohingya" sehingga akar masalahnya bukan merupakan konflik antara Buddha dan Muslims. Kata "Rohingya" paling mungkin ditemukan dari kelompok Komunis "Bendera Merah" untuk memenuhi keinginan "Pemberontak Mujahid" di tahun 1950. Kata "Rohingya" paling mungkin merupakan derivasi dari istilah kata Inggris "Roangians" yang berarti orang-orang dari tanah "Roang".

Setidaknya, 80% dari orang "Rohingya" saat ini adalah imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh karena bencana alam, kelaparan and alasan lainnya. Masalah Rohingya tidak dapat dibandingkan dengan Karen, Kachin, dan masalah etnis Shan di Burma pada umumnya, sebab "Muslim Rohingya" tidak masuk dalam kategori yang sama dengan etnis minoritas. Namun demikian, mereka tetap harus mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Burma melalui prosedur hukum, termasuk penulisan fakta kesejarahan "Muslim Rohingya" secara jujur".

Terkait peristilah Rohingya, istilah Magh tidak diragukan lagi berasal dari Bengali, tetapi arti yang tepat dari kata dan derivasi utamanya tidak jelas. Analisis yang paling memuaskan adalah yang menghubungkannya dengan salah satu kerajaan kuno Magadha-raj di India. Orang Arakan Buddha saat ini dapat dilacak asalnya dari Magadah, meskipun mereka telah berasimilasi dengan Mongolia dan kehilangan karakter India. Derivasi dari kata Magh yang paling mungkin adalah *Magadhi* (kata sifat untuk nama yang tepat) atau Maghi/Magi/Mog. Dalam kamus Inggris belakangan, kata Mog, Mogen, Mogue, muncul untuk menyebut istilah nama Arakan dan orang-orang di sekitar abad ke-15 dan ke-16 M. Fakta sejarah menunjukkan bahwa selama lebih dari dua abad (mulai pertengahan abad ke-16 sampai 1784) Burma menaklukan Arakan, orang Magh Arakan (asal Bengal) berkolusi dengan Portugis (Firingi) yang identik dengan bajak laut, keganasan, kekejaman, dan pelanggaran hukum. Mereka menguasai wilayah

pendudukannya dengan label atau nama tercela, yaitu "Magher Mulluk", yang berarti tanah tanpa hukum, keadilan, dan kepemilikan. Beberapa sejarawan meragukan apakah perampok Magh yang rakus melakukan penjarahan itu memiliki kesamaan ras dengan umat Buddha Magh yang tinggal di Arakan dan Bangladesh sekarang. Akan tetapi, Mohammed Yunus dan sejarawan Shahaduddin tidak meragukan semua fakta sejarah mengenai nenek moyang orang Magh saat ini yang memang merupakan "Magher Mulluk". Atas dasar inilah, orang Magh telah dicap buruk selama berabad-abad lalu, menjadi malu besar jika keturunan mereka memiliki nama Magh. Mereka lebih suka menyebut diri mereka Rakhaing, keturunan yang langsung berhubungan dengan Arakan dan Muslim. Dalam kronik Arakan, kata Rakhaing berasal dari *Rakkapura* atau tanah *Rakkash* (seorang pria buas), yang dalam bahasa Pali disebut *Rakkha* atau *Raksasas*. Rakkash menandakan rakasa setengah binatang setengah manusia. Klaim sejarah Arakan didasarkan pada legenda atau mitologi belaka. Tidak ada bukti sejarah apapun untuk mengklaim substansi sejarah Arakan (kuno). Istilah Rakhaing sebenarnya diambil dari kata Roang/Recon, sebagai nama lama Arakan. Sidi Ali Chelibi, seorang navigator Turki pertengahan abad ke-16, menulis istilah itu dengan *Rakanj*. Mungkin orang Birma-Mongolia mengalami kesulitan fonetik dalam mengucapkan kata-kata Arab, yang dimulai dengan huruf alif, seperti ucapan Arakan menjadi *Rakan*. Namun demikian, istilah Rakan, Rakanj, Arkhank, Recon, Arraco, dan Arrcan telah digunakan oleh para sejarawan. Penggunaan istilah yang berbeda itu semuanya berhubungan erat dengan

Roang atau Arakan. Jadi, sama sekali tidak terkait dengan Rakkapura seperti yang diklaim dalam Arakan kronik.[24]

EKSISTENSI KOMUNITAS MUSLIM DI KERAJAAN BURMA PRAKOLONIAL

Penulisan sejarah Islam di Burma, baik yang berkaitan dengan kemunculan Islam di Arakan sekitar abad ke-8 dan pertumbuhan komunitas ini, tampaknya sering "bersinggungan" dengan sebuah komunitas Rohingya[25] di negara Burma. Mohammed Yunus mampu menawarkan kerangka sejarah ini dalam melihat keterhubungan masyarakat Rohingya mulai dari Arakan awal hingga saat ini. Dia telah mempelajari dan menggali berbagai sumber penulisan yang diambil dari jumlah yang mengesankan. Sejarah Muslim Rohingya tidak hanya dilihat sebagai bagian dari sejarah nasional atau politik Burma/Myanmar, tetapi juga dalam perspektif dampak peradaban Islam di Asia Tenggara[26].

---

[24] Khin Maung Saw, *ibid.* hlm.5. Lihat juga, Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.11-14.

[25] Hingga saar ini, istilah Rohingya masih menjadi suatu perdebatan sendiri. Para aktivis Rohingya dan sejarawan biasanya menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang menunjukkan atau mengacu pada Muslim di Arakan. Sejarah penggunaan istilah Rohingya dapat didalami lebih lanjut dari tulisan Aye Chan, " The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), "dalam *SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484*.

[26] Memang istilah 'Asia Tenggara' hampir tidak digunakan dalam sastra Arab modern. Bagi mereka, orang timur dan Timur Tengah yang berbahasa non-Arab disebut 'Asia'. Lihat, 2008, Monique Skidmore and Trevor Wilson (eds), Dictatorship, *Disorder and Decline in Myanmar*, The Australian National University: ANU E Press Canberra, Australia, hlm.177. Secara umum para sejarawan asing (Barat) memahami

Statistik kaum Muslimin di Asia Tenggara yang melebihi 50% dari total penduduk wilayah ini, menunjukkan pentingnya sejarah umat Islam di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Muslim Arakan, dan Muslim di Thailand, Filipina, Kamboja serta Vietnam, meskipun mendapat "ditekan" dari waktu ke waktu tetapi harus disadari bahwa dampak peradaban besar Islam di wilayah tersebut telah begitu mengakar. Terlepas dari sejarah komunitas Muslim Arakan, dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa isu yang mengundang perdebatan peneliti. Misalnya penjelasan tentang penyebab sebenarnya Raja Narameikhla melarikan diri dari Arakan ke Bengal pada 1404. Apakah itu karena perselisihan komunal atau karena agresi politik Raja Burma semata? Perdebatan lain yang menarik perhatian peneliti

---

bahwa yang dimaksud dengan Asia Tenggara adalah 11 negara asia yang meliputi Indonesia (termasuk Timor Leste), Malaysia, Singgapura, Brunai Darussalam, Filipina, Thailand, Mynmar/Burma, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Papua New Gini bisanya tidak dimasukkan dalam kategori Asia Tenggara. Lihat, Charles Hirschman and Jennifer Edwards, 2007, "Social Change in Southeast Asia", in George Ritzer (Ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology Vol. 9,* Oxford: Blackwell Publishing., hlm, 4374. Bandingkan dengan, Hefner, Robert W. (ed.), 2009, "Review Article: Alternative Education or Teaching Radicalism? New Literature on Islamic Education in Southeast Asia (Holger Warnk)", dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs 4/2009*, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press. Terkait pengaruh Islam dari Timur Tengah, Asia Tenggara mewakili subkultur khas yang sebagian besar ditentukan oleh hubungan komunikasi di sekitar di Selat Malaka. Ketika agama Islam, berkembang pesat di dunia pada abad ke-16, sebagai contoh bahwa Asia Tenggara mulai mengadopsi tradisi menulis Islam dengan karakter lokal. Bahasa Melayu merupakan lingua franca yang digunakan dengan cara yang hampir sama dengan subkelompok besar Islam lainnya seperti Turki, Urdu, Persia, dan Swahili. Lihat, Anthony Reid, t.t., "Inaugural Lecture: Approaching 'Asia' from the Southeast: Does the Crisis Make a Difference?", dalam *Asian Studies Institute Inaugural Lecture 1*, Wellington: Victoria University of Wellington, hlm. 11.

berhubungan dengan latarbelakang adopsi atau penggunakan nama Muslim oleh sebelas raja Arakan (dari 1430 hingga 1531). Apakah hal itu menandakan bahwa mereka menjadi Muslim atau hanya untuk memanfaatkan situasi politik ketika itu? Terlepas dari beberapa kelemahan buku ini dalam kerangka kesejarahan, tetapi penelitian ini dipadang layak dan popularitasnya cukup luas di antara spesialis sejarah serta pembaca umum di seluruh dunia.

Sementara itu, tesis Leider menekankan pada kenyataan pengaruh Islam di Arakan selama periode Mrauk-U, meskipun tidak langsung berkaitan dengan asal-usul dari setiap komunitas Muslim di Arakan. Sejarawan "amatir" Barat telah melakukan banyak kesalahan karena menulis sejarah Islam di Arakan dalam konteks etnis Rohingya, yang "dibingkai" dengan masalah pengungsi di perbatasan Bangladesh-Myanmar/Burma dalam kaitannya dengan masa kolonial. Hal tersebut "seolah-olah" melebihi dari sejarah masa lalu Muslim di Arakan itu sendiri. Artinya, diskusi tentang pengaruh Islam di wilayah Arakan paling tidak harus merujuk pada dua fakta "utama". *Pertama*, hubungan politik dan konflik antara kesultanan Bengal di wilayah Mogul dengan seluruh periode kerajaan Arakan. Sebab, hubungan itu sebagian besar bermusuhan atau perang permanen. Fakta ini telah ditekankan oleh semua penulis, baik penulis Bengali maupun Inggris. Dalam sumber-sumber Islam, angkatan laut kerajaan Arakan umumnya disajikan sebagai sekelompok yang mengerikan, yaitu bajak laut yang merajalela di laut selatan dan tenggara Bengal. Kegiatan ekonomi yang paling

menonjol dari Arakan dikenal dengan istilah Mugs atau Maghs, yang di Bengal hingga saat ini digambarkan sebagai “serangan budak”. Respons sultan dan gubernur Bengal terhadap serangan Arakan telah menjadi peperangan yang ulet dan panjang. Terutama perluasan kekuasaan Islam ke Tenggara Bengal dan penaklukan dan kontrol atas wilayah Chittagong, sebagai kerajaan Hindu Tripura dan semi-otonom Portugis.[27]

Fakta *kedua*, yang belum cukup dihargai oleh sejarawan adalah hubungan komersial antara Bengal dan Arakan. Sebab, Arakan selalu menjadi bagian dari komersial jaringan dari Teluk Benggala dan Samudera Hindia. Selama berabad-abad para pedagang dari India dan Asia Tenggara telah datang ke Arakan, yang pada umumnya pedagang Muslim. Mereka tidak datang sebagai musuh, mereka datang dan diterima untuk berdagang secara “damai”. Argumen beberapa sejarawan tentang Muslim di Arakan telah membangun berbagai tesis, antara lain: (a) Muslim berpengaruh di pengadilan Rakhuin *pran kri*: penulis sejarah hanya menyebut negara asal mereka; (b) Peristiwa pembuangan Man Raja: Co Mwan di India dan penaklukan dari takhtanya adalah karena bantuan tentara Muslim; (c) penggunaan nama 'Muslim' menjadi identitas tertentu para raja Arakan antara paruh pertama abad ke-15 dan awal abad ke-17; (d) koin perak Arakan merupakan tiruan Koin Bengali yang berisi tulisan Persia, yang dikeluarkan antara abad 15

---

[27] *Ibid.*

dan awal abad ke-17. Koin Arakan terbut ada yang monolingual, bilingual, dan trilingual, yaitu menggunakan bahasa Bengali, Persia, dan Arakan; (e) kehadiran dua penyair Bengali yang terkenal di istana Arakan, Dawlat Kadi tinggal selama beberapa tahun di istana Raja Thirithudhamma (1622-1638), juga Sayyid Al-Awwal di istana Raja Sa tui: (1645-1652). Pada pengadilan Rosang (sejarawan menyebutnya Arakan), penyair dilindungi oleh menteri, mereka diperkenalkan melalui puisi dengan nama dan judul yang khas Islam; (f) kehadiran pemanah Persia sebagai penjaga kerajaan Arakan telah dikaitkan dengan kedatangan Shah Shuja, saudara kaisar Mogul yang berlindung di Arakan pada November 1660. Shah Shuja tewas pada tahun 1661 dalam keadaan yang telah menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang siapa yang harus disalahkan.

Menurut Mohammed Yunus, orang-orang Arab adalah orang-orang terkemuka pelayaran dan maritim dari zaman dahulu. Mereka telah memiliki kontak dengan Asia Selatan, Asia Timur Selatan dan Timur Jauh mulai abad ketiga H (ketujuh M). Sejak itu orang-orang Arab telah mendirikan koloni perdagangan kecil sepanjang pantai selatan Asia dan bagian timur perairan Asia Selatan, termasuk Arakan sampai dengan Sumatera, Jawa, dan Maluku. Pada pertengahan abad ketujuh M, merupakan babak baru bagi bangsa Arab dengan munculnya Islam sebagai kekuatan agama, sosial, dan politik dunia. Setelah seratus tahun kematian Nabi Muhammad, mereka menjadi penguasa dari sebuah kerajaan besar Roma. Dominasi mereka disepanjang lautan dari dua cekungan

Mediterania, Laut Merah, dan Samudera Hindia. Kita dengan mudah menemukan permukiman Arab yang semarak dengan praktik keagamaan dan sosial di sepanjang Konkan, Malabar, pantai Coromandal, di Maladewa dan Ceylon. Aktivitas komersial mereka juga meluas ke Andaman, penduduk Nicobar, pantai Arakan, Malaya, Sumatera, dan Jawa. Islam datang ke daerah ini tanpa dukungan politik apa pun dan jauh dari gejolak selama berabad-abad. Mr. R.B. Smart, penulis Gazetteer Burma, menyatakan: "Mahataing Sandya naik tahta tahun 788 M, ia telah mendirikan kota baru (Vesali) sebuah situs Ramawadi tua, dan meninggal setelah memerintah 22 tahun. Dalam pemerintahannya beberapa kapal yang rusak (karam) di pulau Ramree dan kru kapalnya dikenal sebagai Mohamedan (Islam). Mereka dikirim ke Arakan dan menetap di desa-desa. Dalam periode yang sama, Arakan kronik menyatakan bahwa Muslim faqir dan darwis (orang kudus) telah mengunjungi pantai Arakan. Salah satu fakta secara luas diketahui adalah adanya Kuil Muslim yang disebut Badr Moqam. Pendriannya digagas oleh para pengikut atau pemuja Pir Badrudin Badri-i-Alam, populer dikenal sebagai Pir Badar di sepanjang garis pantai Arakan. Legenda Tonki Hanifar, Khayafurir Tonki (kuil) di wilayah Mayu, kuil dari Babaji Shah Monayam dari Ambari, dan Pir Badr Shah di Akyab, semua merupakan bukti nyata kedatangan orang-orang kudus di arakan awal abad ke-8 M.[28]

---

[28] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm. 17. Lihat juga, Dr. Habib Siddiqui, "A Long History of Injustice Ignored Rohingya: The Forgotten People of Our Time",

Pandangan tersebut banyak didukung oleh sejarawan dalam konteks "persentuhan" atau transaksi bisnis (perdagangan). Tetapi dalam konteks Islam telah dikenalkan sebagai agama pada penduduk Burma setempat umumnya berpendat dimuali abad ke-13 M, misalnya Monique Skidmore dan Trevor Wilson bersadarkan sumber Myanmar dan non-Myanmar yang ditelitinya, menyimpulkan bahwa Islam telah mencapai pantai Arakan (Rakhine), Myanmar semenjak 712 H melalui pedagangan jalur laut, yang dilakukan dalam bentuk praktek tasawuf oleh orang Arab oceangoing. Konversi penduduk lokal menjadi Muslim lebih karena pilihan bukan pemaksaan, dan fenomena yang sama juga kecenderungan terjadi di semua negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia . Islamisasi tidak dilakukan dalam bentuk invasi ke Myanmar, yang telah memiliki kepercayaan atau agama lokal.[29]

Komunitas Muslim terbentuk melalui kegiatan dakwah Islam yang berkarakter moral dan unggul oleh para pedagang dan sufi Arab, terutama di antara penduduk setempat yang masih penganut animisme. Di samping itu, banyak orang Arab menikah dengan wanita setempat dan menetap di kota dan desa secara permanen. Para pedagang Arab ini menggunakan jalur darat di Arakan Yoma ke Burma

---

dalam http://www.islamawareness.net/Asia/ Burma/ roarticle003.html, diakses 22 November 2012.

[29] Geoff Wade, "An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900–1300 CE", dalam *Journal of Southeast Asian Studies, 40(2), pp 221–265 June 2009*. The National University of Singapore: Printed in the United Kingdom., hlm. [hlm.246-247]. Lihat juga, Monique Skidmore and Trevor Wilson, *ibid*., hlm.117.

bagian atas, kemudian diteruskan ke Cina. Sedangkan perjalanan dengan jalur air adalah melalui Malaka, Sumatera, dan Jawa ke arah Timur Jauh. Para pedagang Arab biasa kembali ke Timur Tengah dengan menggunakan rute yang sama melalui Arakan. Selama berabad-abad populasi Muslim Arakan telah tumbuh dalam jumlah besar sebagai akibat dari proses dakwah dan imigrasi baru. Pada abad ke-13 Islam telah menyentuh hati dan jiwa rakyat antara Afrika, pesisir Atlantik, dan Bengal. Arakan yang berdekatan dengan Bengal dan telah memiliki Populasi Muslim sendiri memberi pengaruh luar biasa bagi perkembangan Islam di Arakan sejak abad ke-13. Raja Arakan bernama Narameikhla, lebih memilih untuk berlindung di Muslim Bengal ketimbang Tripura Buddha atau negara Hindu India. Narameikhla sendiri pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengadilan Gaur di India, ketika belajar ide-ide revolusioner di bidang Matematika dan ilmu pengetahuan alam, sekaligus keyakinan monoteistik Islam. Wilayah Arakan di utara, selama periode satu abad terbatas pada yang kini disebut Bangladesh-Burma. Sementara distrik Chittagong tidak diragukan lagi di bawah kontrol Sultan Bengal sampai 1540 M. Pendapat Phayre bahwa Chittagong pernah berada di bawah kendali raja Arakan tahun 1482-1532 tidak didasarkan pada fakta sejarah. Sebab, Birma dan Mons dapat "diusir" dari daerah selatan Arakan adalah berkat bantuan raja Bengal, tanpa dukungan mereka mungkin tidak pernah bisa bermimpi mendapatkan kembali negara mereka.[30]

---

[30] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.18-22.

Baru-baru ini telah ditemukan salah satu koin Sultan Mrauk-U berlokasi di dekat kota Arakan. (hlm.22) Koin adalah dokumen yang unik dalam sejarah Arakan. Sebab, ketika Muslim masuk Bengal tahun 1203, mereka memperkenalkan jenis inskripsi berupa mata uang koin dari Mrauk-U yang dibuat dengan model sedemikian rupa. Dengan bukti sejarah itu, menjadi jelas bahwa telah terjadi kebangkitan peradaban modern di Arakan. Koin perak dari berbagai desain dan denominasi juga telah ditemukan di Burma/Myanmar. Pada mata uang tertua di Asia Tenggara tertulis dikeluarkan di Arakan (daerah pesisir barat Myanmar) antara tahun 454 dan 476. Yang paling dominan dari semua mata uang Asia Tenggara kuno, dihiasi dengan motif "matahari terbit", tampaknya berasal dari daerah Pyu tengah dan atas Myanmar, sebagaimana dilaporkan dari Sri Ksetra, Halin, dan Beikthano, serta pusat situs lain . Ketika situs kerajaan besar Pagan didirikan pada abad ke-9, para arkeolog gagal menemukan mata uang yang terkait dengan situs ini atau lainnya. Bahkan selama dua abad berikutnya, juga tidak ditemukan bukti arkeologi untuk penggunaan mata uang.[31]

Beberapa nama sultan yang dikenal dengan koin. Sumber Arakan tertulis tidak menyebutkan mereka secara pasti. Seperti Arakan numismatik telah kurang dipelajari sampai sekarang, penggunaan nama Muslim pada koin tampaknya menjadi politik tersendiri, itu dapat ditafsirkan

---

[31] John N. Miksic, 2002, "Early Burmese Urbanization: Research and Conservation", dalam *Asiml Pcrspcetillcs, Vol. 40, No.1*, University of Hawai'i Press. Hlm.99.

sebagai ekspresi penguasa atasan politik atas komunitas Muslim di wilayah selatan Chittagong dan mungkin di bagian Arakan juga, tetapi pentingnya penggunaan nama Muslim tidak boleh pula berlebihan. Abad ke-15 dianggap sebagai waktu yang tepat dari keberadaan koin Bengali. Tidak menherankan jika raja-raja Arakan beberapa waktu kemudian mencoba untuk meniru tetangga mereka yang maju, dan mulai menggunakan koin perak yang dibuat serupa. Ketika dianalisis sejarah koin Arakan dari pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-18, dapat digambarkan dengan jelas bahwa telah terjadi evolusi. Di pertengahan abad ke-5 Prasasti berada di Persia saja. Pada pertengahan abad ke-16, seratus tahun kemudian ditemukan koin bilingual dan meliputi tiga bahasa. Tetapi mulai dari tahun 1634 prasasti pada koin hanya terdapat di Arakan saja. Ini adalah fakta yang mencolok untuk melihat bahwa pada saat kerajaan Arakan berada di puncaknya, dan Muslim hadir di pengadilan dan perannya menonjol di kerajaan itu, raja-raja Arakan tidak merasa terdorong untuk menggunakan nama Muslim lagi untuk menyatakan kekuasaan mereka.[32]

Pada 1404 wilayah Arakan ditaklukkan oleh kerajaan Burma, ketika itu Narameikhla melarikan diri ke Bengal. Dia diterima dengan baik oleh Sultan Bengak bernama Giyathuddin Azam Shah (1390-1411), yang merupakan sultan

---

[32] Jacques P. Leider, 2008, "These Buddhist Kings with Muslim Names: A discussion of Muslim influence in the Mrauk-U Period", dalam http://shanyoma.org/History-eBooks/Buddhist-Kings-with-Muslim-names.pdf?set_language=en&cl=en, diakses 8 Desember 2012

Bengal terbesar dan paling terkenal dibanding Sultan shahi Ilyas. Pada waktu itu, Ibu Kota Bengal berada di Pandua (Firozabad). Giyathuddin Azam Shah adalah pelindung dan tokoh besar Islam di Bengal. Selama 24 tahun di pengasingan, raja Arakan (Narameikhla) dekat dengan orang-orang paling terpelajar seperti Sultan Bengal, termasuk pemimpin spiritual terkenal bernama Noor Kutb Alam. Dia belajar banyak hal dari Bengal tentang budaya, politik, Islam sehingga benar-benar mengubah pemikiran dan gaya hidupnya. Narameikhla memeluk Islam dan mengadopsi nama Muslim menjadi Shah Solaiman (dalam Arakan kronik disebut Sawmuan). Sultan Bengal bernama Jalauddin Mohammad Shah dengan berbagai upaya berhasil mengambil-alih kerajaan Arakan, dan mendudukkan kembali Solaiman Shah ke tahtanya pada 1430 M. Solaiman Shah menguasai sebuah situs baru kesultanan yang dikenal sebagai Mrauk-U atau Pattahri Quillah di tahun 1433, dan satu tahun kemudian ia meninggal.[33] Banyak sejarawan yang memilih kesimpulan Phayre dan Harvey, bahwa kembalinya Narameikla ke Arakan dengan dukungan tentara 'Muslim' dari Bengal, sangat mungkin telah ikut andil dalam penyebaran Islam ke dalam masyarakat Arakan pada umumnya. Belakangan, Abdul Karim memperkuat pendapat ini dengan mengutip sebuah silsilah abad ke-18 dari Bengal, misalnya pernyataan bahwa di Bengala (Bengal) di kerajaan Gaur, ada Wazir bernama Hamiduddin. Anaknya Burhanuddin meninggalkan negara dengan pengikutnya dan tentara kemudian menetap di Roshang [Arakan]. Mengingat

[33] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.21-22.

bahwa Burhanuddin adalah seorang tentara yang menonjol, raja menunjuknya sebagai Lashkar Wazir atau kepala tentara/pasukan.[34]

Hubungan Mrauk-U dengan kesultanan Bengal tetap terjaga dan harmonis. Arakan membayar upeti dan belajar sejarah serta politik kepada Bengal. Tercatat beberapa Sultan yang secara berturut-turut memerintah Arakan sejak tahun 1430-1638, berikut nama-nama mereka yang disertai dengan nama dalam bahasa Pali.[35]

1. Solaiman Shah (Narameikhla), 1430-1434 M;
2. Ali Khan (Meng Khari) 1434-1459 M;
3. Kalima Shah (Ba Saw Phyu) 1459-1482 M;
4. Mathu Shah (Doulya) 1482-1492;
5. Mohammed Shah (Ba Saw Nyo) 1492-1493 M;
6. Nori Shah (Ran Aung) 1493-1494 M;
7. Sheikh Modullah Shah (Salingathu) 1494-1501 M;
8. Ili Shah (Meng Raza) 1501-1523 M;
9. Ilias Shah (Kasabadi) 1523-1525 M;
10. Jalal Shah (Meng Saw Oo) 1525 M
11. Ali Shah (Thatasa) 1525-1531 M;
12. Zabuk Shah (Min Bin) 1531-1553.
13. Sikandar Shah (Min Phalaung) (1571-1593)

---

[34] Richard Forster, *Ibid.* hlm.65-66.

[35] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm. 22-31.

14. Salim Shah (Min Raza Gyi) (1593-1612)
15. Hussain Shah (Min Khamaung) (1612-1622)
16. Salim Shah II (Thiri Thudamma) (1612-1638)

Zabuk Shah (Min Bin) merupakan salah satu penguasa terkuat dalam sejarah Arakan. Dia naik tahta pada tahun 1531 dan mendirikan apa yang dikenal sebagai "Kerajaan Arakan". Dua peristiwa penting telah memberi kesempatan kepada Zabuk Shah untuk melakukan konsolidasi dan memperbesar kekuasaannya, yaitu kedatangan Portugis dan perang sipil di Bengal. Orang-orang Portugis sudah memasuki Arakan tahun 1517, empat belas tahun sebelum Zabuk Shah berkuasa. Zabuk Shah memilih kembali ke kota Mrauk-U dan menjadikannya benteng terkuat. Ia mempekerjakan Portugis untuk membangun pertahanan dan persenjataan modern berupa meriam, juga mengangkat mereka sebagai perwira militer untuk melatih dan melengkapi tentara bayaran dari berbagai etnis, baik asing maupun domestik, termasuk armada laut yang dipandu oleh pelaut Portugis. Zabuk Shah, dengan cara ini, menjadi tuan modern yang kuat senjata. Kesempatan kedua adalah perang sipil di Bengal. Perubahan politik di Bengal pada tahun 1538 juga mengakhiri loyalitas dan persahabatannya dengan Kerajaan Arakan. Zabuk Shah mengambil keuntungan melemah berbagai pihak, terutama Bengal dan Moghul yang bersaing untuk merebut kendali terhadap Chittagong. Pada tahun 1546, Tabin Shwehti, raja Burma dari dinasti Toungoo menyerang Arakan di cuaca dingin. Tabin Shewhti berhasil menguasai pantai barat, tetapi

tidak mempu menumbus kota Mrohaung (Mrauk-U), yang merupakan benteng pertahanan Zabuk Shah yang sempurna. Ia mampu mempertahankan aset dan kekuasaannya hingga meninggal tahun 1553. Zabuk Shah adalah seorang Muslim yang mampu memadukan berbagai elemen dalam meayarakat. Arakan telah berubah menjadi sebuah kerajaan, membentuk pengadilan di Gaur dan Delhi, memili istana, para budak, dan algojo. Selain itu, ia menerapkan prinsip-prinsip kebebasan beragama, pemikiran, gerakan, budaya, dan semua hak-hak dasar. Shah Zabuk menghiasi Mrauk-U dengan masjid, pagoda dan monumen yang tidak Indo-Islam atau India, tapi dari jenis tertentu yang kemudian dikenal sebagai 'Arsitektur Muslim Bengali '. Setelah Zabuk Shah meninggal (1553), takhta kerajaan dirampas Dikka, yang menjalankan roda pemerintahan dengan buruk dan hanya bertahan selama dua tahun (1553-1555). Arakan dirampas kembali oleh Magh Buddha, dan karenanya tidak pernah lagi "menggunakan" nama Muslim. Setelah berlangsung pemerintahan yang buruk Magh selama lebih dari dua dekade, Sultan Sikandar Shah (Min Phalaung), putra layak Zabuk Shah berhasil naik tahta di kerajaan Arakan pada tahun 1571. Ia harus waspada melawan agresif Burman Raja Bayin Naung (1551-1581), penerus Tabin Shwehti yang sebelumnya gagal menaklukkan Arakan. Peristiwa yang paling menonjol di zamannya adalah mengambil kekuasaan Tripura atas Chittagong. Ancaman kemudian datang dari kaisar Moghul yang menganggap Chittagong wilayah yurisdiksi mereka. Sikandar Shah berhasil menjalin hubungan politik dengan

Portugis, dan memberikan mereka fasilitas untuk menjalankan perdagangan di Arakan. Hubungan tersebut sempat dikhianati Portugis, Antonio de Souza Godinha, angkat senjata melawan raja Arakan dan merebut benteng Chittagong sekitar 1590 M. Tetapi masalah itu kemudian dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi.[36]

Sikandar Shah digantikan oleh putranya Salim Shah (Min Raza Gyi) tahun 1593. Di masanya pemerintahan Arakan mencapai puncak kebesarannya. Wilayah kekuasaan Arakan meluas dari Dhaka dan Sundarbans sampai ke Moulmein. Shah Salim dapat membangun kembali tentara kosmopolitan yang kuat dan angkatan laut di masa Sultan Zabuk Shah, dan mencoba bekerja sama dengan Portugis dalam politik maupun perdagangan. Namun Portugis bagaikan pedang bermata dua, hanya mau mebantu ketika ada pemerintahan pusat yang kuat di Mrohaung. Ketika ancaman Burman di timur berkurang setelah kematian raja Naung Bayib, di barat laut Moghuls telah semakin menegaskan otoritas mereka. Portugis "berbalik" dan memberikan kesulitan besar bagi raja Arakan. Hubungan harmonis Arakan dan Portugis segera berubah menjadi permusuhan. Pada tahun 1602, Portugis merebut Sondip dari raja Bakla dan membuat raja Arakan merasa kerajaannya terancam. Hubungan bermusuhan antara kedua belah pihak akhirnya mencapai puncak pada tahun 1607, karena pengkhianatan dan kejahatan Portugis yang di beri tempat di kerajaan Arakan. Salim Shah akhirnya

[36] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm. Hlm.22-31

memerintahkan untuk membantai penduduk Portugis. Sekitar enam ratus Portugis kehilangan nyawa, sebagian lari ke hutan, sedangkan yang lain berhasil mencapai kapal dan keluar melalui jalur laut, di antaranya adalah Sebastio Gonzales.[37]

Menurut Richard Forster, peran Sebastio Gonzales di Teluk Bengal mesti dikaji lebih jauh. Sebab, meskipun dia kemudian ikut andil dalam mempercepat kejatuhan kejayaan Arakan. Namun pendapat yang mengatakan bahwa tentara bayaran Portugis seperti Filipe de Brito dan Sebastien Gonzales Tibau sebagai penyamun dan "bajingan", tidak adil dicantumkan dalam literatur sejarah. Filipe de Brito sendiri begitu sukses dalam memimpin armada Arakan yang bekerja keras dari daerah pesisir Bengal. Ia bahkan dipromosikan menjadi kapten penjaga kerajaan di Mrauk-U sebelum menjadi Gubernur Pelabuhan Syriam di Burma pada tahun 1599, sebuah tempat yang segera dibentengi dan dirubahnya menjadi pemerintahan independen. Demikian pula dengan Sebastien Gonzales Tibau, yang sempat melakukan serangan balik terhadap Mrauk-U yang pernah mengusirnya. Raja Arakan telah menghukum pengkhianatan De Brito pada tahun 1607 dan orang Portugis di Dianga yang kemungkinan bersekutu dengan Syriam. Tibau melakukan perlawanan terhadap Mrauk-U dengan berbagai cara, termasuk meminta

---

[37] Khin Maung Saw, "On the Evolution of Rohingya Problems in Rakhine State of Burma", dalam http://www.narinjara.com/pdf/On_the_evoulution_of_Rohingya_Problem.pdf, hlm.17-18, diakses tanggal 8 Desember 2012. Lihat juga, Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.27-28.

bala bantuan tentara Portugis dari Goa. Meskipun memiliki armada laut yang memiliki persenjataan yang baik , juga menikmati beberapa dukungan dari Kapal Belanda hadir di pelabuhan, tetapi armada Portugis itu tidak cocok untuk bermanuver di Arakan yang lebih banyak sungainya. Armada Portugis dengan demikian tidak dapat berbuat banyak, dan Tibau menghilang dari catatan sejarah.[38]

Masa pemerintahan berikutnya, Hussain Shah (Min Khamaung) [1612-1622] juga Salim Shah II (Thiri Thudamma) [1612-1638] tidak lebih dari masa perang perebutan wilayah kekuasaan yang bersifat laten, baik perang dengan Portugis yang diselingi rekonsiliasi dan pengkhianatan, perang dengan musuh lama raja-raja Magh Burma, perang dengan penguasa Moghul yang terus mengancam, juga perang dengan penguasa Bengal yang ingin mengulagi kejayaannya. Bukan hanya itu, pada masa Salim Shah II juga terjalin hubungan persahabatan dengan Belanda di Batavia, yang membutuhkan pasokan beras dan budak secara reguler untuk permukiman mereka di Indonesia. Belanda bahkan membuka pabrik di Mrohaung untuk melaksanakan perdagangan dengan Arakan. Selama pemerintahan Salim Shah II ini pula, kelaparan yang mengerikan menimpa Arakan di 1631-1635 M. Harga pangan terangkat sampai empat kali lipat dari harga normal, kelaparan tersebut disebabkan oleh kegagalan panen selama beberapa tahun secara berturut-turut. Setelah kematian Salim Shah II karena adanya intrik di istana tahun 1638, periode

[38] Richard Forster, *Ibid.*, hlm.73-74.

kebesaran Arakan berakhir dan mulai mengalami penurunan. Ia digantikan oleh putranya Meng Sani namun dibunuh Narapati (pencinta ratu janda). Ia berasal dari Magh Buddha biasa yang merebut tahta kerajaan. Meskipun Narapati mencoba mendapatkan dukungan dari rakyat dengan "menfitnah" para pendahulunya, tetapi upayanya selalu gagal. Perebutan kekuasaan ketika itu berubah menjadi puncak konspirasi mendalam untuk merebut kekuasaan dari umat Islam. Narapati kemudian digantikan oleh keponakannya Thadomintra tahun 1645. Selama pemerintahannya, hubungan dengan Belanda memburuk karena penyitaan dan penutupan pabrik Belanda di Mrohaung. Orang-orang Arakan banyak menderita sebagai akibat dari berbagai gangguan internal. Thadomintra harus bergantung pada Portugis untuk melindungi perbatasan barat laut Chittagong dari penetrasi Moghul. Tahun 1652, Sanda Thudamma, anak Thadomintra menjadi raja Arakan. Belanda membuka kembali pabrik mereka di Mrohaung setelah terjadi kesepakatan dengan Batavia.[39]

Setelah Chittagong lepas, wilayah kekuasaan Mrauk-U berkurang dengan munculnya kabupaten Akyab, Kyaukpyu dan Sandoway. Sebab, daerah Burma bagian bawah yang telah dimenangkan oleh Salim Shah I dan Salim Shah II, semuanya memilih untuk kembali ke Burma. Arakan adalah tidak berkembang setelah 250 tahun sebelumnya, yaitu ketika pertama kali ditaklukkan oleh umat Islam. Sebanyak 26 raja

---

[39] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm. 33. Bandingkan dengan Dr. Habib Siddiqui, "A Long History of Injustice Ignored Rohingya...", *ibid.*

telah memerintah Arakan setelah kematian Sanda Thudamma sampai diduduki kembali oleh Burma pada tahun 1784. Antara jatuhnya Chittagong (1666) dan Sanda Wizaya (1710), terdapat sepuluh raja yang berkuasa hanya sekitar dua. Antara Sanda Wizaya dan Nara Abaya (1742), memerintah rata-rata di bawah 2 tahun. Tujuh raja terakhir sampai 1784, rata-rata memerintah hanya tiga tahun. Abad terakhir dari Arakan independen ditandai dengan perselisihan antarkomunitas. Orang Kaman, unit pemanah Muslim yang melayani Raja Arakan, berada di atas angin karena didukung oleh tentara Afghanistan dari utara India. Dari tahun 1666 sampai 1710, peta politik Arakan benar-benar berada di tangan mereka. Sepuluh Raja dimahkotai dan dicopot oleh mereka selama periode itu. Akhirnya, Sanda Wizaya (1710-1731), seorang Buddhis berhasil meraih kekuasaan. Ia mendeportasi orang Kaman ke Ramree, Thinganet, atau Tharagon dekat Akyab. Keturunan mereka masih menggunakan nama Kaman (Kaman Persia = busur). Mereka berbicara Arakan tetapi tetap mempertahankan keyakinan Islam mereka dan ciri sebagai Afghanistan. Sanda Wizaya mati terbunuh dan beberapa raja berikutnya mengalami hal yang sama. Dua raja terakhir, Sanda Thadita (1777-1782) dan Thamada (1782-1785) adalah Muslim. Mereka memilik keturunan Kaman yang sebelumnya dideportasi ke Ramree oleh Sanda Wizaya. Menurut G.E. Harvey, "Yang terakhir adalah Raja Thamada (1782-1785), otoritasnya lemah dari raja sebelumnya, karena ia berasal dari ras hina Ramree".[40]

[40] Khin Maung Saw, *ibid.* hlm.19-22. Lihat juga, Mohammed Yunus, *ibid.*,

Beberapa sejarawan, misalnya Dr SB Qanungo, raja Arakan memiliki nama Muslim karena ingin mengidentifikasi diri mereka yang memiliki kontrol atas Chittagong, atau sebagai tanda kedaulatan mereka atas bagian dari Bengal. Sebagian sejarawan juga berkomentar "setelah raja Ran Aung (putra Daulya) memerintah selama beberapa bulan tahun 1494 M, kekuasaan direbut oleh Tsa Langgatha (paman Ran Aung). Tidak ada lagi nama Muslim digunakan, yang menunjukkan lenyapnya mereka dari Chittagong". [41] Tetapi ditemukani sumber-sumber sejarah bahwa raja tersebut benar-benar menggunakan nama Muslim. Nama Muslim Ran Aung adalah Nori Shah, dan nama Tsa Langgatha adalah Shekmodullah Shah. Selain itu, juga bertentangan dengan fakta bahwa semua raja tersebut menggunakan nama Muslim, seperti: Ran Aung (Nori Shah), Salingathu (Shekmodullah Shah), Meng Raza (Ili Shah), Kasabadi (Ilias Shah), Meng Saw Oo (Jalal Shah), dan Thatasa (Ali Shah). Fakta bahwa pelestarian nama raja Muslim juga dikuatkan dengan koin dari dua raja Arakan, Ilias Shah dan Ali Shah, ditemukan di Mrauk-U. Berikut foto koin dan inskripsinya.[42]

---

hlm. 36. Bandingkan dengan, U Khin Maung Saw, *Ibid.*, hlm.89-99

[41] Jacques P. Leider berpendapat lebih ekstrim lagi, menurutnya hanya ada satu raja Arakan yang namanya muslim, dan lebih populer daripada nama Arakan-nya. Dia adalah saudara dari Raja Naramit-hla, yaitu Mng Saw Mwan, seorang pangeran yang baik hati, saleh dan berbudi luhur., *ibid*.

[42] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm. 40-42.

Ali Shah, a title used by Thatasa, 1525 AD

Obv.:	لا اله لا	lā ilah illā
(Kalima)	الله محمد	Allah Mohammed
	رسول الله	rasūl Allah
	خلد الله	Khallad Allah
	الملكه	al Mulkahu

There is no God but Allah. Mohammed the Messenger of Allah.
May Allah perpetuate nis Kingdom

Rev.:	الرحمن ابو	al rahman abu
	المظفر علیشه	Al-muzaffar Ali Sh(ah)
	سلطان خلد	Sultān Khallad
	الله ما ...	Allah (? Mulkahu)

Sultan Ali Snah, Father of the victorious (and merciful)
May Allah perpetuate his Kingdom
Dia.: 29 mm Wt.: 10.17 gm (BM)

? **Ilias Shah** (ascribed by Phayre to Ilias Shah, 1523 AD, but this reading is uncertain)

Obv.: Kalima, as 7.1
Rev.: – – –

ابو النصر — abu al nasr (?)

Dia.: 32 mm Wt.: 9.62 gm (BM)

Koin-koin raja Arakan merupakan fakta bahwa raja-raja pada kenyataannya sudah Muslim. Salah satu koin Sultan Ali Shah (Thatasa - 1525 M) ditemukan baru-baru ini di Mrauk-U, tertulis dalam bahasa Persia, di sisi depan, yang diterjemahkan (Inggris) sebagai berikut:[43]

> *"There is no God but Allah, Mohammed the Messenger of Allah. May Allah perpetuate his Kingdom".*

Di sisi sebaliknya, juga tertulis dalam bahasa Persia, berbunyi terjemahannya sebagai berikut: *"Sultan Ali Shah, father of the victorious. May Allah perpetuate his Kingdom".*

Beberapa sejarawan masih cenderung melihat identitas Arakan sebagai Kerajaan Buddha, meskipun mengakui bahwa setelah menjadi independen dari Sultan Bengal, raja-raja Arakan telah melanjutkan praktik melestarikan penggunaan nama Muslim, inskripsi (Kalema: *syahadatain*) pada koin, medali, dan lencana Negara, dan menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa pengadilan. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan komunitas Muslim yang besar. Sebagaian sejarawan mempertanyakan, mengapa raja mulai dari Narapatigyi hingga Sanda Thudamma tidak menanggung nama Muslim, dan koin tidak bertuliskan Kalema? Tidak ada alasan yang cukup untuk menjelaskan klaim bahwa mereka tetap Beragama Buddha, meskipun raja terus menggunakan nama Muslim dan koin mereka bertuliskan dengan Kalema.

---

[43] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm. 43-44.. Lihat juga, U Khin Maung Saw, *Ibid.*, hlm.89-99

Terlepas dari perdebatan penggunaan nama tersebut, fakta telah menjelaskan posisi penting yang Muslim dalam sejarah Arakan seperti Ketua Menteri, Menteri Senior, Sekretaris, Gubernur, Qazis, Jabatan di Pengadilan, Penyair, dan Jenderal Angkatan Darat juga pernah diduduki oleh umat Islam. Menteri Kepala di masa Salim Shah II (Thiri Thudamma), menurut Dagh Register Belanda di Batavia, adalah seorang Muslim bernama Lascar Zuzil/Lascar Wazir. Karya Daulat Qazi dan Alawal memberikan referensi kuat tentang sejumlah Muslim pemegang jabatan penting di atas, misalnya Lashkar Wazir, Ashraf Khan, Qureishi Magan Thakur, Suleiman, Sayed Musa, Sayed Mohammed Khan, Navraj Majlis, Sayed Shah dan sebagainya. Namun, untuk sebagian besar periode, tetap bahwa raja-raja Muslim memiliki keturunan dari penduduk asli Arakan hingga daerah pedalaman. Komunitas Muslim di Arakan belakangan juga ditempati oleh imigran dari berbagai negara seperti Arab, Mesir, Suriah, Turki, Abyssinian, Rumi (Byzantian), Khorasani, Uzbeg, Nothern India, Deccanian, Assam, Bangalee, Kotanese, Achenses, Cochinese, Asia Tengah, dan sejumlah bangsa. (hlm.45)

Monumen bersejarah Islam yang dibangun pada masa raja-raja Arakan, yang ada sampai saat ini antara lain: 1) Masjid Magya atau Masjid Musa, terletak di perbukitan dekat desa Maung Tha Gon, Mrohaung, yang dibangun pada abad ke-14; 2) Masjid Sandikhan yang terletak di desa Kawalong dekat Mrauk-U (Mrohaung), Masjid ini dibangun

oleh Jenderal Sandi Khan di abad ke-15 (1433); 3) Masjid Alam Lashkar dibangun pada tahun 1668 di desa Pan Mraung, dekat kota Minbya modern; 4) Masjid Shuja dibangun oleh Pangeran Shah Shuja tahun 1661 di Mintayabyin di Mrauk-U; 5) Masjid Qazi dibangun oleh Qazi terkenal di kota Minbya dekat Gunung Krit; 6) Masjid Qazi dari Zaliyapara di kota Kyauktaw dan; 7) Masjid Musa Dewan, merupakan masjid terbesar di Akyab, dibangun pada abad ke-17.[44]

Kerajaan Arakan telah dibangun dalam kontak kebudayaan yang erat dengan Sultanat Muslim di Bengal sejak abad kelima belas. Ketika ada kekacauan politik sebagai akibat dari pemisahan negara Afghanistan dari Bengal, juga kemajuan kerajaan Moghul, bangsawan Afghanistan dan para pejabat Muslim lainnya banyak yang melarikan diri menuju kabupaten paling timur Bengal. Beberapa bangsawan tersebut menemukan tempat berlindung di pengadilan Arakan, yang kemudian mampu mengisi posisi penting di pemerintahan. Di bawah bimbingan beberapa intelektual Muslim, para imigran melanjutkan peendalaman terhadap sastra Bengali. Penyair Muslim yang menonjol di pengadilan Arakan pada abad ke-17 adalah Daulat Qazi (Qadi), Alaol (Al Awwal?), Magan Siddiqi (Thakur) dan Mardan. Daulat Qazi menulis *Sati Mayna O Lor Chandrani* atas permintaan dan di bawah bimbingan Ashraf Khan, sebagai seorang Muslim

[44] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm. 45-46.

bermazhab Hanafi yang menjadi penasihat dan menteri pertahanan di zaman Salim Shah II (Thiri Thudamma) 1622-1638. Daulat Qazi sangat memuji sosok Ashraf Khan yang melindungi banyak imigran Muslim lainnya dari Sayyid, Syaikh, Mughal, dan Pathan (baik kelompok Brahmana, Ksatria dan Sudra). Daulat Qazi meninggal sebelum dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, yang kemudian diselesaikan oleh Alawal. Selain menjadi prajurit yang baik, Alawal adalah seorang ulama besar, penyair dan musisi, menguasai sejumlah bahasa seperti Arab, Persia, Sansekerta, Bengali dan Hindi. Kualitasnya menarik perhatian Magan Siddiqi (Thakur), menteri dari dua raja Arakan secara berturut-turut (1645-1660), Magan menugaskan Alawal menerjemahkan *Padmawati* (epik Hindi yang terkenal romantis karya Malik Mohammed Jaisi) ke dalam bahasa Bengali. Pekerjaan tersebut mampu diselesaikan Alawal sekitar tahun 1651. Di samping itu, dia berhasil menulis cerita romantis *Saiful Mulk Badiuzzamal* (selesai sekitar 1655-1659), menulis komposisi *Half-Paikar* (tujuh potret) berdasarkan penyair Persia Nizam Ganjabi (selesai tahun 1660). Meskipun karya utamanya bersifat terjemahan dari bahasa Persia, Alawal tidak diragukan lagi merupakan salah satu penyair sastra Bengali terbesa.[45]

Pada tahun 1784 Raja Ava, Bodawphaya, menyerbu Arakan melalui darat dan laut, yang kemudian memperoleh kemenangan secara sempurna. Penyerbuan Bodawphaya ini

[45] Habib Siddiqui, *ibid.* hlm.5. Lihat juga, Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.46-47.

menandakan berakhirnya kemerdekaan Arakan. Jatuhnya Mrauk-U adalah pukulan mematikan bagi Rohingya. Seluruh kekayaan material material dan budaya Islam diratakan dengan tanah. Ribuan Muslim dan Buddha nasionalis dihukum mati. Sekitar 20000 tawanan, termasuk tentara Muslim, pengrajin, dan pekerja digiring ke luar dari Burma. Ratusan dari mereka mati di jalan dekat bukit Arakan. Sementara orang Buddha Mahamuni dihormati dan dibawa pergi ke Burma. Gambar peristiwa ini masih ada di pagoda Arakan di kota Mandalay. Angkatan Darat Bodawphaya juga mengambil prasasti atau relik Hindu dan Buddha. Setelah 40 tahun, pemerintahan Bodawphaya di Arakan berakhir, yang ditandai dengan tirani dan kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penduduk diwajibkan untuk melayanani militer dan diberlakukannya kerja paksa. Pemungutan pajak berada di luar kemampuan orang biasa. Ribuan tawanan Arakan harus bekerja sebagai budak selama tujuh tahun penuh dalam pembangunan sebuah pagoda di Burma. Tirani ini membuat putus asa penduduk sehingga ribuan mereka melarikan diri melintasi perbatasan menuju ke Chittagong. Pada 1798, sekitar dua pertiga dari penduduk Arakan dapat dikatakan telah meninggalkan tanah air mereka. Dalam satu tahun saja (1798), tidak kurang dari sepuluh ribu orang masuk ke Chittagong, diikuti oleh yang lainnya dalam jumlah lebih banyak lagi. Di tahun 1811, salah satu Chinbyan, seorang pengungsi Arakan dikenal sebagai Raja Bering, mengorganisir pemberontakan terhadap Birma. Dia

mengerahkan sejumlah besar pasukan menyeberangi perbatasan ke Arakan dan mengepung Mrohaung. meskipun saat itu ia gagal mengambil kembali Mrohaung. Memanfatkan terjadi ketegangan hubungan antara Birma dan Inggris pertengahan 1811, Chinbyan berhasil menguasai seluruh provinsi Arakan. Selanjutnya terjadi perang berkepanjangan antara pasukan Chinbyan melawan Burma hingga Chinbyan meninggal pada tahun 1815. Kondisi Arakan selama pemerintahan Bodawphaya ini dirangkum secara singkat oleh Harvey: "Dari tahun pertama dipenaklukan tahun 1785, Arakan telah dalam kekacauan. Pemberontak Arakan beralasan bahwa mereka tidak melawan pemerintah, tetapi melawan tirani. Pada tahun 1797, lebih 2000 orang diminta untuk bekerja pada pagoda Mingun. Genderang perang pun "ditabuh", tahun demi tahun pertempuran tidak pernah berhenti. Arakan yang sebelumnya pernah terpadat, berubah menjadi gurun, kota-kota yang sepi dan ditumbuhi hutan, yang bisa dilihat hanyalah "kehancuran dan kematian".[46]

---

[46]Lihat, Nicholas Tarling, *The Cambridge History of Southeast Asia Volume Two: The nineteenth and twentieth centuries,* Cambridge Histories Online : Cambridge University Press, 2008, hlm.34-35. Lihat pula, International Federation of Human Rights Leagues FIDH, "International Mission of Inquiry Burma: repression, discrimination and ethnic cleansing in Arakan", dalam *Report: April 2000*, hlm.5. Lihat juga Mohammed Yunus, *ibid.,* hlm. 50-51.

PERAN STRATEGIS KOMUNITAS MUSLIM BURMA PADA ERA KOLONIAL

Fenomena pergerakan orang Arakan selama pendudukan Inggris telah diringkas oleh Phayre bahwa sejumlah keturunan mereka melarikan diri di tengah kesulitan negara mereka dan menetap di bagian selatan Chittagong, pulau-pulau pantai, dan bahkan Bengal secara bertahap kembali ke tanah ayah mereka, yang ditinggalkan tiga puluh atau empat puluh tahun sebelumnya. an Kapal laut penuh dengan laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dengan semua barang bawaannya, mereka mungkin dari Bengal. Menurut Mohammed Yunus, pendapat Phayre "menyesatkan" dan mengandung bias bahwa sebagian besar Muslim masuk Arakan selama era Inggris. Faktanya adalah bahwa keluarga Muslim, yang sebelumnya telah diusir oleh Burma, telah kembali ke rumah mereka di Arakan ketika perdamaian memang ada seperti yang dijelaskan oleh Phayre. Akan tetapi, sejak 1942 kerusuhan anti-Muslim sampai hari ini sebagai akibat dari operasi pembersihan etnis berkepanjangan, sebanyak satu juta orang Rohingya telah dipaksa meninggalkan Arakan. Pada era pemerintah Inggris, Akyab berkembang menjadi pusat perdagangan karena peningkatan sistem transportasi dan komunikasi. Buruh musiman dari negara tetangga Chittagong sering datang ke Arakan untuk bekerja, dan biasanya kembali ke "kampung" mereka di akhir musim. Banyak juga pedagang masuk ke Arakan untuk melakukan bisnis permodalan di Kota Akyab. Sebagian besar imigran yang masuk Arakan selama pemerintahan Inggris,

kembali selama Perang Dunia Kedua dan sisanya pascaanti asing yang digerakkan ole Ne Win di tahun 1960-an.[47]

Orang-orang Inggris mengakhiri aneksasinya terhadap Burma secara keseluruhan pada tahun 1885. Sebuah organisasi bernama Young Men's Buddhist Association (YMBA), yang dipimpin oleh mahasiswa dari perguruan tinggi Rangoon didirikan pada tahun 1906. Organisasi ini awalnya ditujukan untuk mempromosikan Buddhisme, pendidikan, dan untuk pelayanan sosial. The YMBA mulai masuk ke wilayah politik mulai 1917. YMBA mengubah dirinya menjadi General Council of Burmese Association (GCBA), yang lebih berbasis dan mengusung simbol nasionalisme Burma. Mereka berjuang dengan pemerintah British untuk memperjuangkan hak-hak Burma. Semangat anti orang asing telah "mengipasi" GCBA dan kelompok lainnya, termasuk para biksu Buddha khususnya.. Kerusuhan "Anti-India" akhirnya pecah pada tahun 1930 di Rangoon. Sebuah organisasi baru, *Do Ba Ma Asiayone* (Kami Asosiasi Burman), didirikan oleh mahasiswa muda yang menyebut diri mereka *Thakins* (master) yang mengirim gelombang anti-India ke seluruh negara. Masyarakat Buddha Burma menyerang mereka tanpa pandang bulu, dan tidak membedakan apakah Muslim asli seperti Rohingya di Arakan, Zerbades di Burma pusat, Panthay di Burma timur dan selatan, dan Burma imigran India yang masuk selama era kolonial. Memang terjadi

---

[47] Nicholas Tarling, *ibid.*, hlm.35-36. Lihat juga, Habib Siddiqui, "A Long History of Injustice Ignored Rohingya...", *ibid.*

pemisahan Burma dari British India, dan pemberian 'Home Rule' (internal pemerintahan) pada tahun 1937, para *Thakins* mendapat kontrol penuh dari pemerintah. Tetapi hanya satu tahun setelah pemisahan tahun 1938, kerusuhan anti Islam pecah lagi di Rangoon. Ketika Inggris menarik diri, urusan administrasi di bagian Arakan dipercayakan kepada U Kyaw Khine seorang Magh Buddha, yang membuat Maghs sangat senang. Para Thakins juga mulai kelaur dan terlibat dalam berbagai penjarahan. Muslim adalah korban alami mereka. Para Thakins juga menyita semua senjata dari pada petugas keamanan yang ditinggalkan oleh Inggris untuk menjaga keamanan publik. Thakins juga menyita semua lisensi senjata api dari kaum Mmuslimin. Sekarang Thakins telah menjadi baik bersenjata sedangkan Muslim dibiarkan dengan tangan kosong hanya dengan semangat Iman (iman).[48]

Setelah hilangnya Hindu dari kerajaan Vesali timur, dua agama utama Budha dan Islam tumbuh berdampingan di masyarakat pra-Mrauk U-Arakan. Tetapi skala besar konversi agama menjasi Muslim merupakan hasil kegiatan dakwah oleh Muslim “terhormat”, sufi, dai, dan pedagang. Populasi Muslim Arakan telah tumbuh secara substansial selama era pra-Mrauk-U, terutama setelah munculnya kerjasama politik dengan Muslim di Bengal tahun 1203. Selama lima ratus tahun (957-1430) sebelum penaklukan Muslim, Arakan menjadi tanah suci untuk agama Buddha. Kehadiran Mahamuni dihormati, citra Buddah di Arakan membuat tempat ini

[48] Mohammed Yunus, *ibid.*, hlm.53-60.

diziarahi oleh Buddhis sedunia. Arian Magadah Buddhis secara bertahap telah berasimilasi dengan Mongolia dan Tibet-Burman, yang seagama dengan mereka panjang lima abad. Menurut Mohammed Yunus, hilangnya independensi Arakan tahun 1374, 1406, dan terakhir pada tahun 1784 adalah karena Buddhis yang fanatik. Mereka berilusi bahwa agama Islam merupakan ancaman besar untuk agama Buddha mereka, seperti yang diberitakan oleh mereka seagama Birma, para fanatik berjuang mati-matian untuk melenyapkan Muslim dari Arakan. Pembantaian Muslim 1942, di mana lebih dari 100'000 orang tewas, merupakan hasil dari sikap orang-orang fanatik.[49]

Secara historis, Burma tidak pernah menjadi negara kolonial yang independen, tetapi selalu diperlakukan sebagai provinsi India. Dengan demikian, para penguasa (raja) di Burma lebih terbiasa memikirkan tentang otoritas kekuasaan, ketimbang mengurusi kehidupan sosial-politik rakyatnya. Hal tersebut diistilahkan Lucian Pye (mantan pejabat Inggris di Burma) sebagai "curiously impersonal system ".[50] Burma tidak diberi kesempatan oleh Inggris untuk berpartisipasi dalam urusan politik kenegaraan sampai pemisahan Burma dari India pada tahun 1937 (10 tahun sebelum merdeka). Para tokoh yang terlibat ke dalam dunia politik dan kenegaraan setelah tahun 1937 juga tidak memiliki keterampilan yang

---

[49] *Ibid.*, 37-38.

[50] Syed Serajul Islam, "Myanmar's (Burma) Road to Socialism and Indonesia's "New Order": A Comparative Analysis", dalam *Asian and African Studies, 5, 1996, 2, 183.196*

memadai. Kekurangpiawaian para politisi dan negarawan serta tentara ini, menyebabkan Burma gagal mempertahankan stabilitas negara pascakemerdekaan.[51]

Aung San, pemimpin nasional Burman, yang pada awalnya membantu Jepang menyerang negaranya, beralih untuk mendukung pasukan Sekutu di hari-hari terakhir Inggris masuk kembali ke Burma. Setelah Jepang menyerah pada 1945 dan kemenangan Pasukan sekutu, terjadi kesepakatan perang tentang pemberian kemerdekaan kepada Myanmar secara penuh. Akhirnya, perjanjian Aung San (*The Atlee-Aung San*) ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1947 di London, yang memberi kemerdekaan penuh kepada Mynmar, dalam satu tahun pemilu dan dalam waktu empat bulan untuk menyiapkan Majelis Konstituante. Sayangnya, nasib Arakan telah disegel begitu lama sebagai akibat dari sikap fanatik orang Magh. Mereka sudah menyerahkan kemerdekaan Arakan ke Thakins sebagai imbalan kerja sama mereka untuk melenyapkan komunitas Muslim Arakan. Kerusuhan komunal yang berkobar beberapa kali, telah melebar kesenjangan hubungan antara dua komunitas tersebut. Masyarakat Arakan tidak bisa bersatu bergerak untuk masa depan mereka. Sebelum Burma merdeka, tanggal 24-26 Desember 1945, diadakan All Burma Burman Muslim Conference di Pyinmana. Pertemuan ini bertujuan

---

[51] Swapna Bhattacharya (Chakraborti), "Islam in Arakan: An Interpretation from the Indian Perspective: History and the Present", Rohingya League for Democracy (Burma) RLDB, 1 December, 2012

untuk menyatukan semua Organisasi Muslim Burma menjadi satu badan saja. Usulan kelompok General Council of Burma Muslim Association (GCBMA) kalah satu suara oleh kelompok yang disebut The Muslim Burma Kongres (BMC). Mr. Razak terpilih Presiden BMC. Selanjutnya BMC memutuskan untuk bergabung dengan Anti Fascist Peoples Freedom League (AFPFL), yang dipimpin oleh Aung San. Namun demikian, kelompok GCBMA terus bergerak sendiri untuk representasi masyarakat yang terpinggirkan. Mereka meminta pemerintah Inggris untuk mengakui Muslim Arakan sebagai kebangsaan yang terpisah dari Buddhis Arakan, dan menggunakan pengaruhnya untuk memberi mereka otonomi daerah. Di sisi lain, etnis lainnya di Burma seperti Karen, Kachin, Shan, dan Kayah tidak siap mendukung Aung San untuk bergabung dalam Uni Burma, mengingat pengalaman masa lalu yang pahit mereka dengan orang Burman. Mereka menuntut kemerdekaan penuh atau otonomi regional daerah mereka masing-masing. Sementara pemerintah Brithish meminta Aung San untuk mencapai konsensus semua negara bagian Burma, sebagai prasyarat untuk pemberian kemerdekaan. Aung San mencoba mendiskusikan hal tersebut dengan para pemimpin dari berbagai negara bagian, dalam rangka mengusung slogan budaya dan agama mereka dengan rumus 'Bhinneka Tunggal Ika'. Tetapi masyarakat perbatasan enggan. Muslim menahan diri bergabung dengan AFPFL Aung San karena sikap diskriminatif Magh Burman, dan bersikeras pemberian Otonomi kepada mereka. Dengan banyak kesulitan, Aung

San telah berupaya mengadakan konferensi di Pang Panjang, Shan State, untuk menegosiasikan status dari berbagai komunitas di pascaindependen Burma. Setelah konferensi Panjang Pang, diselenggarakan pemilihan umum pertama untuk Majelis Konstituante pada bulan April 1947. Namun pemerintah sementara Burma sengaja mengecualikan pemilu di utara Arakan dengan berbagai alasan. Dengan demikian, Muslim Arakan telah dikeluarkan sabagai partisan dalam penyusunan Konstitusi Burma pertama. Perbedaan antara pihak yang bersaing tetap "serius" di saat kemerdekaan, dan dalam memposisikan ideologi dan bentuk kekuasaan negara. Para komunis dan Peoples Voluntary Organisation (PVO) tetap bergerak "di bawah tanah". Di Arakan, kelompok Magh nasionalis juga melakukan bergerak serupa, bergabung dengan komunis dan PVO, memperjuangkan kemerdekaan Arakan.[52]

Berdasarkan Perjanjian Panglong tahun 1947 tersusunlah Uni Konstitusi Burma. Etnis di luar Burma seperti Shan, Kachin, Kayah dan Divisi Chin pada awalnya yakin bahwa sistem federal terwujud, tetapi dalam kenyataannya kekuasaan tidak diserahkan kepada mereka. Dengan terbunuhnya Jenderal Aung San, Inggris engan ikut campur atas pemerintahan Burma, pasca-Perang Dunia II

---

[52] Aye Chan, "The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)", *SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484*, hlm. 410-411. Lihat juga, Insani Yardim Fakfi, Büyük Karaman Caddesi Taylasan Sk., *ARAKAN REPORT No.3* Fatih - İstanbul – Turkey. Lihat pula Chizom Ekeh, "Minorities in Burma", *ibid.*, hlm.1-5. Bandingkan pula dengan, Mohammed Yunus, *ibid*, hlm. 61-63.

dan ketidakpastian Perang Dingin, serta pemberontakan tentara dari Partai Komunis Burma setelah kemerdekaan Burma tahun 1948, maka non-Burman yang tidak memperoleh pengakuan status independen memutuskan untuk mengangkat senjata melawan pemerintah Burma. Pada tahun 1958, Jenderal Ne Win diundang oleh Perdana Menteri U Nu untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Tujuannya, mewujudkan 'Pemerintah Caretaker' untuk menstabilkan situasi politik di Burma. Akibatnya Burma jatuh kepada perang saudara yang lebih dalam dan lebih luas.[53]

Pada tahun 1958, situasi politik di Burma menjadi semakin kacau. Presiden U Nu akhirnya menyerahkan secara sukarela pemerintahan kepada militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Pemerintah militer berupaya memulihkan ketertiban, hukum dan mereorganisasi birokrasi. Dua tahun kemudian, pemilu Burma diadakan dan U Nu kembali berkuasa. U Nu memiliki komitmen untuk menegakkan demokrasi dan mengumumkan rencananya untuk membuat Buddhisme sebagai agama negara. Hal ini menyebabkan pemberontakan di kalangan etnis non-Buddhis minoritas makin meningkat. U Nu akhirnya berencana mengubah Burma menjadi federasi, memberikan etnis “minoritas” otonomi yang lebih besar.

[53] Harn Yawnghwe, *ibid.* hlm.11. Lihat juga, Commonwealth of Australia, *Burmese Community Profile*, Layout and design by Production and Digital Communication –National Communications Branch – DIMA, August 2006, hlm.3.

Rencana tersebut membuat militer marah karena khawatir muncul perselisihan sipil yang lebih besar.Pada tanggal 2 Maret 1962, Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan U Nu melalui kudeta militer. Ne Win membubarkan parlemen, partai politik dilarang, kebebasan sipil dibatasi, dan U Nu ditangkap atas kegagalan politiknya. Pemerintahan militer (junta) kemudian mendirikan Dewan Revolusioner Birma (BRC), yang terdiri dari 17 pemimpin militer. Mereka mengumumkan program ekonomi radikal dan reformasi politik yang disebut "Burmese Way to Socialism". Reformasi didasarkan pada ideologi Buddha dengan pola pikir okonomi sosialis.

PENUTUP

Penulisan sejarah Islam di Burma, baik pada periode awal maupun periode belakangan, mau tidak mau hampir selalu dikaitkan dengan Muslim di Arakan dan etnis Rohingya. Sejarah Arakan tidak dapat “diisolasi” sebagai sejarah kerajaan di seputar Sungai Irawadi atau Lembah Bengal, tetapi sebagai sesuatu yang tersendiri dan sejajar dengan sejarah kerajaan yang menonjol di sekitar Burma. Sebab, studi tentang sejarah Arakan merupakan bagian yang rumit dari sejarah budaya dan ekonomi dari seluruh daerah Burma jika dikaitkan dengan dominasi Burma oleh Mon, kekuasaan Bengal di India dan aktor imperialisme Portugis, Belanda, dan Inggris. Penelitian Leider fokus pada pengaruh Muslim dan kehadirannya di Arakan, dan lebih khusus lagi

pada pengadilan Arakan awal abad ke-15 sampai akhir abad ke-18. Leider menjawab keraguan tentang pengaruh Kesultanan Bengal di kerajaan Arakan, sebab Arakan adalah kerajaan Buddha yang memiliki minoritas Muslim selama beberapa abad.

Oleh karena itu, berkembangnya agama tertentu di periode tertentu di Bengal, baik Buddha, Hindu atau pun Islam telah memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberagamaan di Burma, khususnya Arakan selama periode yang sama. Arakan pada kenyataannya merupakan periode kelanjutan dari Chittagong, yaitu setelah Bengal menjadi wilayah Muslim tahun 1203, budaya yang dihasilkan dan pengaruh politik kaum Muslim sangat penting dalam sejarah Arakan. Hanya saja, setelah penaklukan Muslim terhadap Arakan tahun 1430, penyebaran Islam melalui darat lebih lanjut ke Burma terhalang oleh pegunungan yang sulit antara kedua negara. Dalam perspektif historis, provinsi Arakan yang berbatasan dengan India Timur, pada awalnya adalah tanah India dengan populasi yang mirip dengan Bengal sampai kedatangan Mongolia dan Tibeto-Birma di Arakan. Abad kesepuluh merupakan masa-masa awal penyebaran Islam di Arakan, terutama setelah Bengal menjadi wilayah Muslim tahun 1203. Namun penduduk Muslim Arakan maupun Buddha Arakan selalu mempertahankan status independen mereka sebelum pembentukan Dinasti Mrauk-U oleh Solaiman Shah (Narameikhla) pada 1430. Selama seratus tahun, 1430-1530 Arakan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Bengal hingga para sejarawan menyebut Arakan

sebagai wilayah taklukkan Bengal. Meskipun jumlah komunitas dan kekuasaan Muslim baru tumbuh secara substansial sejak pembentukan Dinasti Mrauk-U oleh Shah Solaiman, tetapi para sejarawan tidak bisa memungkiri objektifitas pembentukan komunitas Muslim di Arakan melalui penelusuran masa lalu yang panjang.

Dapat disimpulkan bahwa selama tiga dekade pertama abad ke-15 di Burma, etnis Burma dari wilayah Ava dan etnis Mon dari wilayah Pegu saling bersaing untuk melakukan “kontrol” terhadap kerajaan Mrauk U, yang berdiri tahun 1430 dengan ibukota Arakan. Pada pertengahan abad ke-15, kerajaan Arakan berkembang pesat dan lebih kuat, bahkan mendorong ekspansi militernya ke Chittagong. Akhir 15 dan awal abad ke-16 merupakan tanda periode kelemahan dan memerintah yang singkat, tetapi di pertengahan abad ke-16 merupakan titik puncak dari sejarah kerajaan Mrauk U ketika dipimpin Raja Mong Ba (1531-1553). Masa itu kebesaran dan kemegahan Arakan meluas, tepatnya dari 1580 sampai sekitar 1690, yang ditandai dengan penaklukan wilayah Chittagong, yaitu wilayah “tetangga” besar mereka yang sedang melemah, juga keuntungan munculnya semangat aliansi yang luar biasa untuk menekan pengaruh asing. Namun abad ke-18 sepenuh dianggap sebagai abad penurunan hingga Arakan ditaklukkan kerajaan Burma independen oleh rajanya Bodawphaya pada bulan Januari 1785.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony Reid, t.t., “Inaugural Lecture: Approaching 'Asia' from the Southeast: Does the Crisis Make a Difference?”, dalam *Asian Studies Institute Inaugural Lecture 1*, Wellington: Victoria University of Wellington

Aye Chan, " The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), "dalam *SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484*.

Charles Hirschman and Jennifer Edwards, 2007, “Social Change in Southeast Asia”, in George Ritzer (Ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology Vol. 9,* Oxford: Blackwell Publishing.

Charlotte Kendrick Galloway, 2006, Burmese Buddhist Imagery of the Early Bagan Period (1044 – 1113), 2 Volumes, A *thesis* submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University

Chizom Ekeh, “Minorities in Burma”, dalam *Briefing: Minority Rights Group International*, Minority Rights Group International, London: United Kingdom, October 2007

Commonwealth of Australia, *Burmese Community Profile*, Layout and design by Production and Digital Communication –National Communications Branch – DIMA, August 2006

EBO Briefing Paper No.2 2009

Geoff Wade, "An Early Age of Commerce in Southeast Asia, 900–1300 CE", dalam *Journal of Southeast Asian Studies, 40(2), pp 221–265 June 2009*. The National University of Singapore: Printed in the United Kingdom.

Hefner, Robert W. (ed.), 2009, "Review Article: Alternative Education or Teaching Radicalism? New Literature on Islamic Education in Southeast Asia (Holger Warnk)", dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs 4/2009*, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press.

Habib Siddiqui, "A Long History of Injustice Ignored Rohingya: The Forgotten People of Our Time", dalam http://www.islamawareness.net/Asia/Burma/roarticle003. html, diakses 22 November 2012.

Harn Yawnghwe, 2000/2001, Bringing about Change in Burma,Brussels: Euro Burma Office European Office for the Development of Democracy in Burma

Insani Yardim Fakfi, Büyük Karaman Caddesi Taylasan Sk., *ARAKAN REPORT No.3* Fatih - İstanbul – Turkey.

International Federation of Human Rights Leagues FIDH, "International Mission of Inquiry Burma: repression, discrimination and ethnic cleansing in Arakan", dalam *Report: April 2000*

John N. Miksic, 2002, "Early Burmese Urbanization: Research and Conservation", dalam *Asiml Pcrspcetillcs, Vol. 40, No.1*, University of Hawaii Press.

Jacques P. Leider, 2008, "These Buddhist Kings with Muslim Names: A discussion of Muslim influence in the Mrauk-U Period", dalam http://shanyoma.org/History-eBooks/Buddhist-Kings-with-Muslim-names.pdf?set_language=en&cl=en, diakses 8 Desember 2012

James Clad (et.al) (Ed.), 2011, *The Borderlands of Southeast Asia (Geopolitics, Terrorism, and Globalization),* Washington, D.C.: The Center for Strategic Research Institute for National Strategic Studies by National Defense University Press

Khin Maung Saw, "On the Evolution of Rohingya Problems in Rakhine State of Burma", dalam *http://www.narinjara.com/pdf/On_the_evoulution_of_Rohingya__Problem.pdf*, diakses tanggal 8 Desember 2012.

Lieut.Geneeal Sie Aethur P. Phayee, 1883, *History of Burma Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim, And Arakan (From The Earliesttime To The End Of The First War With British India),* London:Teubner & Co., Ludgate Hill.

Mohammed Yunus, *A History of Arakan (Past and Present),* Edisi Pertama terbitkan tahun 1994 (online), t.tp.

Monique Skidmore and Trevor Wilson (eds), 2008, Dictatorship, *Disorder and Decline in Myanmar*, The Australian National University: ANU E Press Canberra, Australia

Nicholas Tarling, 2008, *The Cambridge History of Southeast Asia Volume Two: The nineteenth and twentieth centuries,* Cambridge Histories Online : Cambridge University Press

R. Lee Hadden, 2008, *The Geology of Burma (Myanmar): An Annotated Bibliography of Burma's Geology, Geography and Earth Science*, Alexandria- Virginia: Topographic Engineering Center September 2008

Rianne ten Veen, *Myanmar's Muslims (The Oppressed of the Oppressed),* Wembley: (First published in Great Britain in 2005) Islamic Human Rights Commission

Richard Forster, "Magh Marauders, Portuguese Pirates, White Elephants and Persian Poets: Arakan and Its Bay-of-Bengal Connectivities in the Early Modern Era", dalam *EXPLORATIONS: a graduate student journal of southeast asian studies, Volume 11, Issue 1*, Spring 2011

Syed Serajul Islam, "Myanmar's (Burma) Road to Socialism and Indonesia's "New Order": A Comparative Analysis", dalam *Asian and African Studies, 5, 1996, 2.*

Swapna Bhattacharya (Chakraborti), "Islam in Arakan: An Interpretation from the Indian Perspective: History and

the Present", Rohingya League for Democracy (Burma) RLDB, 1 December, 2012

http://www.omniglot.com/writing/burmese.htm, diakses 10 Desember 2012

The Equal Rights Trust, Burning Homes, Sinking Lives: A Situation Report on Violence against Stateless Rohingya in Myanmar and Their *Refoulement* from Bangladesh, London: The Equal Rights Trust June 2012

U Khin Maung Saw, "The Rohingyas, Who Are They? The Origin of the Name Rohingya", dalam Uta Gartner and Jens Lorenz (Ed.), *Traditional and Modernity in Mynmar: Proceedings of an International Conference Held in Berlin,* from May 7 th to May 9 th, 1993

LAMPIRAN:

(Semua Foto diambil dari Dr Mohammed Yunus, A History of Arakan (Past and Present), Edisi Pertama terbitkan tahun 1994 [versi online])

1. Peta Nomor (7) - Sebuah peta yang menunjukkan batas-batas Arakan di bawah pendudukan Inggris

A map showing boundaries of Arakan under British occupation.
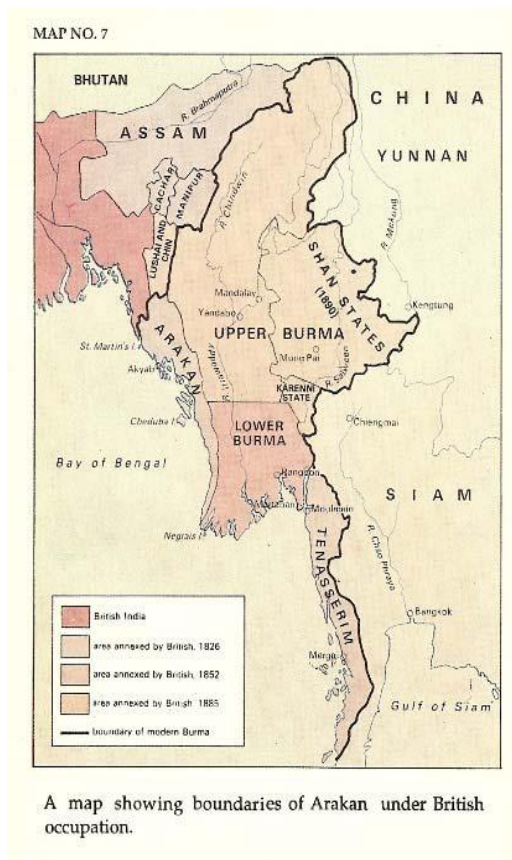
2. Plat Nomor (1) - suatu kubah Masjid Badr Maqaam- terletak di pantai berbatu di bagian selatan dari Akyab didirikan oleh orang-orang Arab di bagian awal dari abad ke-7 Masehi

The one-dome curious Mosque Badr Maqaam-situated on the rocky coast in the southern part of Akyab was said to be founded by the early Arabs in the later part of the 7th century A.D.

3. Plat Nomor (2) - The grand Jam-e-Masjid Akyab dibangun pada abad ke-17 adalah salah satu masjid terbesar di Arakan. Wakaf tanah di sisi utara telah diambil alih oleh pemerintah

PLATE NO. 2

The grand Jam-e-Mosque of Akyab built in the 17th century is one of the biggest mosques in Arakan. Its Waqf land on its northern side has been takan over by force.

4. Plat Nomor (3) - Masjid Sandikhan dibangun pada tahun 1433 Masehi oleh Jenderal Sandikhan di Patthari Qillah (Mrohaung).

PLATE NO. 3
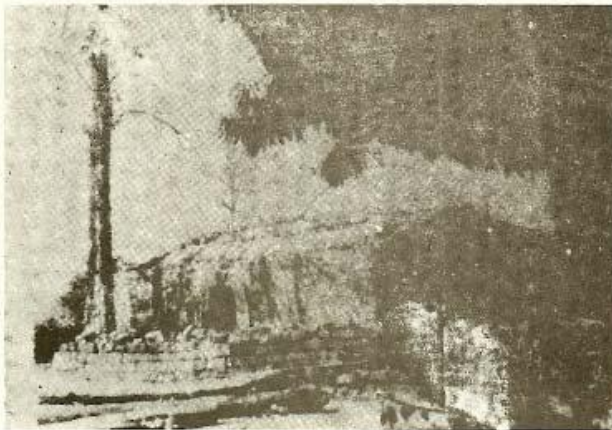
Sandikhan mosque built in1433 C.E. by Gen. Sandikhan at Patthari Qillah (Mrohaung).

5. Plat Nomor (4) - Struktur Ruined Masjid Musa yang dibangun pada abad ke-14 yang terletak di Patthari Qillah (Mrohaung).
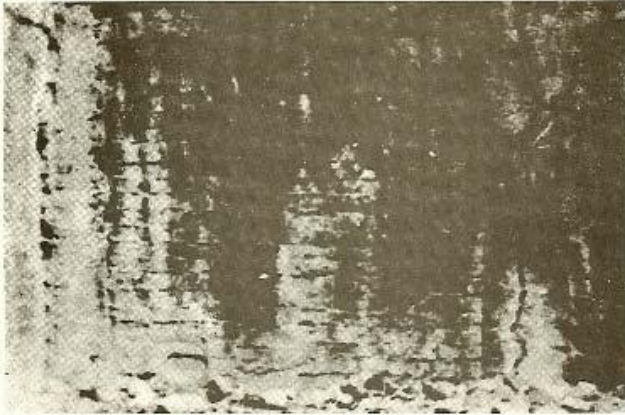
Ruined structure of Musa mosque built in the 14th century situated at patthari Qillah (Mrohaung).

6. Plat Nomor (5) - Sebuah piring batu dengan tulisan Arab yang ditemukan di dalam pagoda Theingyitaung di Patthari Qillah (Mrohaung).

A stone plate with Arabic inscriptions found inside the Theingyitaung pagoda at Patthari Qillah (Mrohaung).

7. Plat Nomor (6) - piring batu unik dengan tulisan Arab ditemukan terukir di dinding di Nanragone, Patthari Qillah (Mrohaung).

PLATE NO. 6

Another stone palte with Arabic inscriptions found engraved in a wall at Nanragone, Patthari Qillah (Mrohaung)

PERKEMBANGAN ISLAM DI BURMA PASCA KEMERDEKAAN:

MENELISIK KAUM MINORITAS MUSLIM ROHINGYA

Oleh: Ali Fahrudin

PENDAHULUAN

Burma atau Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1948. Ibukotanya Rangoon. Luasnya lk. 261.789 m2. Sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh, sebelah timur Laos dan Thailand, sebalah utara dengan RRC, dan sebelah selatan dengan Teluk Benggala.

Burma adalah negara federasi. Selain Burma, terdapat negara-negara bagian lainnya, yaitu: Chin, Kachin, Karen, Kayah, dan Shan. Adapun penduduknya berasal dari keturunan Burma sendiri, Karen, India, Pakistan, Bangladesh, China, Kachin, Chins, Shans, Mons, dan Arakanese.

Sejak tahun 1948 sampai 1958, Burma menentukan bentuk Parlementer dengan Perdana Menterinya U Nu pada April 1958.Karena timbulnya krisis politik, Jenderal Ne Win mengambil alih jabatan Perdana Menteri. Dalam pemilihan umun tahun 1960, Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan dan menyatakan tidak lagi berlaku konstitusi 1947 dan menempatkan Burma di bawah kekuasan Dewan revolusi.

U Nu menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi dari Burma, karena mayoritas penduduknya beragama Buddha. Agama minoritas lain adalah Islam, Kristen, dan Hindu.[1]

Komunitas muslim yang terdapat di Myanmar ada 3 kelompok: 1) Muslim Burma atau Zerbadee, merupakan komunitas yang paling lama berdiri dan berakar di wilayah Shwebo. Diperkirakan mereka merupakan keturunan dari para mubalig yang datang dari timur tengah dan Asia selatan serta penduduk muslim awal yang kemudian beranak pinak dengan masyarakat Burma. 2) Muslim India, Imigran Keturunan India, merupakan komunitas muslim yang terbentuk seiring kolonisasi Burma oleh Inggris. 3) Muslim Rohingya (Rakhine) yang bermukim di negara bagian Arakan atau Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh. Komunitas Islam yang paling banyak adalah Muslim Rohingya.[2]

Islam masuk ke Myanmar khususnya wilayah Arakan pada abad ke-1 H/7 M yang dibawa oleh para pedagang Arab yang datang ke Akyab, ibu kota Arakan. Namun, komunitas Muslim di Arakan dalam proses islamisasi memakan waktu yang lama untuk mewujudkan suatu kekuasaan, mereka baru dapat mendirikan Negara Islam Arakan pada abad ke-8 H/14 M. Proses penyebaran Muslim dari pantai Arakan kemudian lanjut ke selatan dan masuknya Islam ke Myanmar tidak

---

[1]Lukman Harun, *Potret Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 225-226

[2] Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Myanmar, diunduh 11-12-2012

hanya dibawa oleh para pedagang Arab, Muslim Malaysia dan India juga mempunyai peranan yang penting dalam penyebaran Muslim di Myanmar.

Kekuasaan Islam di Arakan, yang mayoritas merupakan suku Rakhine dan sebagiannya yang beragama Islam adalah suku Rohingya, berjalan lebih kurang selama 350 tahun dengan 48 orang sultan yang memerintah silih berganti, sehingga dijajah oleh Burma pada tahun 1784 dan penjajahan ini berlanjut dengan diambil alih oleh British pada tahun 1822. Pada tahun 1880-an orang-orang Islam di India berbondong-bondong hijrah ke Myanmar, sehingga jumlah Muslim semakin meningkat di Myanmar.Pada tahun 1948, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Myanmar.Dengan demikian, Arakan daerah kekuasaan Islam menjadi daerah kekuasaan Myanmar.Hal ini membuat Muslim tidak senang, karena mereka diperlakukan secara kejam oleh pemerintah bahkan kewarganegaraan mereka dinafikan.[3]

Setelah Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948, pemerintah Myanmar senantiasa waspada terhadap kedudukan Muslim yang penting di ibu kota negara. Namun, agar terjadi stabilitas nasional, Perdana Menteri U Nu merekrut semua elemen agama untuk duduk dalam pemerintahannya, termasuk dari Islam.Dengan perekrutan ini menjadikan sebagian mereka ada yang mempunyai jabatan penting di pemerintahan, di samping keterlibatan mereka dalam urusan perniagaan.Hal ini membuat komunitas Muslim

---

[3] Lihat: *http://micankom.blogspot.com/2011/01/sejarah-islam-masuk-ke-myanmar.html*, diunduh 11-12-2012

memperoleh kemewahan dari hasil perdagangan. Di lain pihak, pemerintah junta militer tidak suka dengan keberadaan mereka sehingga melahirkan sentimen bagi pemerintah Myanmar. Sementara itu, Perdana Menteri U Nu yang dikenal sebagai tokoh yang merangkul suku minoritas di Burma dibunuh.Karena pemimpin dari sipil dianggap tidak dapat meredam pergolakan politik, maka junta militer pada tahun 1962 dibawah kendali Ne Win, memegang kendali kekuasaan.[4]Dari sinilah, mulai terjadinya banyak kekerasan dan ketidakadilan penguasa kepada suku minoritas, terutama Rohingya yang beragama Islam.

Rasa sentimen yang begitu mendalam juga menyebabkan munculnya tindakan keganasan dari pemerintah Myanmar terhadap orang Muslim tanpa perikemanusiaan. Tahun 1930-an merupakan permulaan era kemelaratan dan penindasan bagi orang-orang Islam di Myanmar. Beberapa serangan kejam telah dilakukan terhadap Muslim pada tahun 1931 sampai 1938 dan serangan yang paling ganas serta kejam telah terjadi di Yangon dan Mandanay. Di perkirakan dalam peristiwa tersebut sebanyak 200 orang Muslim terbunuh akibat keganasan tentara Myanmar.Tanah-tanah Muslim dirampas, pemerintah dengan masyarakat Buddha juga menindas masyarakat Islam dengan memeras uang dan memaksa mereka memberi upeti serta memenjarakan mereka dengan sewenang-wenang.

---

[4]Inggrid Panontongan, *Dominasi Politik Militer di Burma-Myanmar 1948-2002,* (Depok, Skripsi FISIP, 2002), h. 63

Sebagian umat Islam diusir dan tidak boleh kembali ke kampung halamannya.Menjelang tahun 1971 dan tahun-tahun berikutnya, kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim terus meningkat tajam. Pada tahun 1977 pemerintah Myanmar melancarkan Operasi Raja Min yang juga dikenal dengan Operasi Naga Min, yaitu operasi benci untuk memeriksa semua penduduk dan mengklasifikasikan mereka kepada dua kategori, yaitu penduduk Burma dan rakyat asing.

Orang-orang Buddha mulai di tempatkan di daerah-daerah Muslim dan mesjid-mesjid dibakar, gedung-gedung perniagaan milik orang-orang Islam di kota Akyab juga dibakar. Orang-orang Islam diejek, dipukul dan dibunuh sewenang-wenang, wanita-wanita diperkosa serta sebagian besar dipaksa menikah dengan tentara Myanmar yang beragama Buddha. Kondisi yang lebih parah lagi pada tahun 1964 orang Muslim tidak dibenarkan lagi melaksanakan ibadah haji, walaupun pada tahun 1980 kebijakan itu dicabut tetapi perbelanjaannya sangat mahal dan terpaksa melalui berbagai prosedur yang sangat rumit.[5]

Itulah sedikit peristiwa yang melatar belakangi penulisan tentang kaum minoritas Muslim Rohingya di Burma ini. Mereka yang memiliki tanah air tidak dianggap sebagai warga Negara, padahal mereka ada sebelum Negara Myanmar ini dimerdekakan oleh Inggris.

Kajian ini ingin mengungkap sejarah kelompok minoritas Muslim Rohingya yang berada di Burma setelah

---

[5] Ibid.

kemerdekaannya tahun 1948 sampai tahun 2012 ini. Ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain Asal usul suku Rohingya, yang sampai saat ini tidak diakui oleh pemerintah yang berkuasa di Myanmar saat ini, Latarbelakang tindakan kekerasan terhadap suku Rohingya yang mayoritas beragama Islam, serta tindakan yang dilakukan suku Rohingya ketika mengalami penindasan yang menimpa mereka.

SEKILAS TENTANG MUSLIM ROHINGYA

1. Kondisi Politik Pemerintah Burma

Pada tahun 1948, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Burma. Setelah merdeka, Pemerintah Burma sempat menjanjikan Arakan akan menjadi daerah yang diberikan otonomi khusus. Namun, setelah pemerintahan Burma semakin kuat dan menjadi sebuah negara besar, janji otonomi itu tidak pernah diberikan.Bahkan, hak asasi manusia Muslim Rohingya dilanggar.Keadaan semakin buruk ketika Junta Militer berkuasa.Upaya pembersihan terhadap umat Muslim atau kaum Rohingya pun dilakukan.Mereka ingin mengganti populasi umat Muslim di daerah itu dengan populasi umat Buddha.[6]

Perubahan nama Negara dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung pada tanggal 18 Juni

---

[6] Lihat di *http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Myanmar*, diunduh pada tanggal 11-12-2012

1989. Perubahan nama Negara menjadi Myanmar ditujukan untuk menghilangkan kesan rasial yang melekat pada nama Burma.

Berdasarkan data dari CIA, 68 % dari total penduduk negara ini adalah etnis Burmese, yang berarti nama Burma hanya mewakili etnis atau suku Burmese, sementara Burma merupakan negara dengan penduduk multi etnis. Selain etnis mayoritas Burmese, terdapat juga berbagai etnis minoritas lain seperti: Shan, Karen, Rakhine, Chinese, Indian, Mon, Rohingya, dan etnis lainnya yang menempati luas wilayah yang cukup besar yaitu sekitar 40% yang letaknya tersebar di wilayah pinggir atau perbatasan Negara Myanmar. Maka dari itu, perubahan nama tersebut bertujuan agar etnis non-Burmese mempunyai rasa menjadi bagian dari negaranya.

Nama Negara baru (Myanmar) diikuti dengan ibu kota negara baru yaitu Naypyidaw. Ibu kota negara baru ini bukan perubahan nama dari Yangon menjadi Naypyidaw namun terjadi pemindahan lokasi ibu kota. Pemindahan ibu kotanegara ini dilakukan oleh junta militer pada 7 November 2005 ke Naypyidaw yang berarti "tempat tinggal para raja". Diantara beberapa alasan terkait pemindahan ibu kota negara Myanmar, ada sebuah alasan klasik yaitu pemindahan tersebut dilakukan untuk mengikuti sebuah tradisi Myanmar pada masa dinasti yang gemar memindahkan ibu kota. Namun tentunya pemindahan ibu kota negara tersebut telah menghabiskan biaya yang cukup besar dan berpengaruh

terhadap anggaran belanja negara.[7]

Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang Juga merupakan anggota dari organisasi regional ASEAN memiliki rezim pemerintahan Junta Militer yang dikenal dengan nama *The State Peace and Development Council* (SPDC). SPDC merupakan perubahan dari *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) sejak tangga1 18 September 1997.Junta mi1iter telah berkuasa di Myanmar sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh Unu pada tahun 1962.

Ne Win bersama PM Maung Maung Kha menja1ankan po1itik dan pemerintahan otoriter.Keberadaan dan eksistensi Militer yang kuat di Myanmar mengakar dengan membuat konstruksi bangunan konstitusi untuk mendukung keberadaan mereka sehingga membuat demokrasi hanya wacana yang tidak diwujudkan pada demokrasi yang sesungguhnya dimana kekuasaan berada di tangan sipil.

Semenjak berkuasanya junta mi1iter, sudah banyak terjadi aksi demonstrasi dari rakyat Myanmar, baik itu yang dimotori oleh para aktivis mahasiswa maupun tokoh agama yaitu biksu.Para demonstran mengecam kekuasaan mi1iter di kursi pemerintahan yang seharusnya dija1ankan oleh sipil.Aksi demonstrasi ini disikapi oleh pemerintah mi1iter dengan tindak kekerasan dan tidak sedikit memakan korban.Demontrasi terbesar sepanjang sejarah berkuasanya mi1iter di Myanmar terjadi pada 8 Agustus 1988. Demonstrasi

---

[7]Lihat di *http://www.library.upnvj.ac.id* diakses pada tanggal 11 Desember 2012

ini dikenal dengan generasi 88 yang melibatkan banyak pelajar dan biksu sebagai bentuk perlawanan terhadap Ne Win dan menuntut sistem demokrasi junta militer tanpa ragu-ragu memberangus demonstrasi damai dengan kekerasan yang menewaskan 3000 aktivis mahasiswa dan anggota partai oposisi.

Perjuangan rakyat Myanmar melalui aksi demostrasi ini berhasil membuat Jenderal Ne Win sebagai pemimpin junta militer mengundurkan diri, meskipun telah mengorbankan nyawa kurang lebih 3.000 orang yang meninggal akibat tindakan keras dari tentara pemerintah. Pengunduran diri Jenderal Ne Win bukan berarti akhir dari kekuasaan Junta Militer, tetapi kekuasaan tersebut digantikan oleh Jenderal Maung Maung.Meskipun masih berlatar belakang militer, namun kebijakan jenderal Maung Maung lebih cenderung bersifat demokratis.Hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi kekuasaan junta militer di kursi pemerintahan, sehingga pada akhirnya terjadi kudeta untuk kedua kalinya oleh Jenderal Saw Maung pada 19 September 1988.

Junta Militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung berstatus sebagai State *Law and Order Restoration Council* (SLORC). Dibawah kepemimpinan Saw Maung, kebijakan yang dikeluarkan tidak banyakmembawa perubahan bagi Myanmar. Bahkan, demi alasan kestabilan politik, SLORC mengeluarkan rancangan hukuman mati bagi para demonstran lewat aturan yang disahkan legislatif pada 31 Mei 1989, sebagai bukti dari demokrasi oleh Saw Maung yang hanya sebagai simbol.

Pada 23 April 1992, Saw Maung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus pemimpin SLORC dan memilih Jenderal Than Shwe sebagai penggantinya. Di awal kepemimpinannya, Jenderal Than Shwe merubah nama *State Law and Order Restoration Council* menjadi *State Peace and Development Council*.

Junta militer di Myanmar dapat dikatakan sangat bersifat rasial.Bagaimana tidak, kudeta yang dilakukan oleh militer didominasi oleh etnis Burmese atau Burma, yang juga merupakan etnis mayoritas di Myanmar.Itu berarti kekuasaan atas pemerintahan Myanmar dikuasai oleh satu etnis yaitu etnis Burma. Hal tersebut pasti akan berdampak pada kebijakan junta militer yang lebih bersifat memihak dan menguntungkan etnis Burma. Kondisi inilah yang memicu terjadinya perlawanan dari rakyat Myanmar terhadap pemerintah militer terutama dari etnis non-Burma yang merasa tertindas dan adanya ketidakadilan.[8]

Etnis selain Burma yang jumlahnya minoritas (kurang lebih 38 %) dan beragama selain Bhudda merasa tidak diperhatikan. Etnis-etnis itu antara lain: Karen, Shan, Indian, Chines, Mon, Arakan (mayoritas Muslim, termasuk di dalamnya etnis Rohingya), Kachin, Chin dan lain-lain.[9]Dalam hal ini, Rohingya lebih merasa "dianaktirikan" karena sampai saat ini mereka belum diakui sebagai bagian dari

---

[8]Lihat di http://www.library.upnvj.ac.id diakses pada tanggal 11 Desember 2012

[9]GeorgeA.Theodorson, *Minority Peoples in The Union of Burma*, Journal of Southeast Asian History,Vol.5, No.1(Mar.,1964), 4-16

Myanmar.Mereka dituntut untuk menerima apapun dari politik yang dilakukan oleh junta militer, yang mayoritas etnis Burma yang beragama Bhudda.Mereka dituntut untuk mengikuti apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah, tanpa ada pilihan.

2. Asal-Usul Muslim Rohingya

Rohang, adalah sebutan kata arakan sebelumnya.Arakan merupakan tempat yang cukup terkenal bagi para pelaut Arab sebelum adanya Islam. Saat itu, banyak orang-orang, seperti Arab, Moor, Turki, Moghuls, Asia Tengah, dan Bengal yang datang sebagai pedagang, prajurit, dan ulama. Mereka datang melalui jalur darat dan laut.[10]

Pendatang tersebut banyak yang tinggal di Arakan dan bercampur dengan penduduk setempat.Pencampuran suku tersebut membentuk suku baru, yaitu suku Rohingya.Oleh karena itu, Muslim Rohingya menetap di Arakan sudah ada sejak abad ke-7 dan mereka tidak terbentuk dari satu suku saja.Mereka terbentuk dari percampuran berbagai suku yang berbeda.[11]

Menurut catatan PBB, Rohingya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar.Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim

---

[10] Mohammad Ashraf Alam, *"A Short Historical Background"*, terdapat di situs *http: //www.Rohingyatimes.i-p.com/history/history maa.html*, diakses 16-12-2012

[11]*Ibid.*

sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai Kadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Jadi, jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya sub-etnis Chittagonia yang tinggal di Bangladesh Tenggara [12].

Suku Rohingya sebenarnya adalah orang-orang Islam dengan budaya mereka sendiri yang jelas terlihat di daerah Arakan.Hal itu karena mereka menurunkan agama mereka pada seluruh keturunan mereka dari bangsa Arab, Moor, Turki, Moghuls, Asia Tengah, dan Bengal dan beberapa bangsa Indo-Mongol.Pencampuran dari berbagai suku, membuat penampakan fisik unik mereka seperti tulang pipi yang tidak begitu keras, mata mereka tidak begitu sipit (seperti orang Rakhine Magh dan orang Burma), hidung mereka tidak begitu pesek.Mereka lebih tinggi dari orang Rakhine Magh tetapi kulit mereka lebih gelap, beberapa dari mereka kulitnya kemerahan, tetapi tidak terlalu kekuningan.[13]

Penduduk Rohingya hidup dengan bercocok tanam.Hasil produksi pertanian utama di Arakan berasal dari

---

[12]Lihatdi*http://mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah. html*,diakses pada tanggal 11-12-2012

[13]*Ibid.*

Rohingya. Sebagian penduduk yang lain, bekerja sebagai nelayan, pedagang, pengrajin tangan, dan tukang kayu. Oleh karena diskriminasi menimpa mereka, penduduk Rohingya mulai kehilangan tanah dan menjadi tuna wisma.Lahan perkebunan mereka diambil oleh masyarakat Budha yang datang dari dalam dan luar Arakan pada tahun 1942.Selain itu pajak tinggi terhadap hasil pertanian dan pengambilalihan tanah membuat mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami kelaparan.Jumlah pengusaha semakin menurun, mereka tidak diizinkan melakukan kegiatan bisnis secara bebas.Rezim militer telah melarang mereka mendapatkan hak kebebasan di kotanya. Hal itu berdampak pada kehidupan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari muslim Rohingya.[14]

Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Narameikhla (1430-1434).Setelah dibuang ke Bengal, Narameikhla lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal.Seiring dengan berkuasanya Narameikhla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal ke wilayah Arakan, Rakhine.Dalam perkembangannya, jumlah pemukim Muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine.Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja

---

[14] Nurul Islam, *"Facts About The Rohingya Muslims Of Arakan"*, terdapat di situs *http:// www.Rohingya.com/rahi/summary.htm*

sebagai petani.Oleh karena itu, sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris.[15]

Ketika Inggris melakukan sensus penduduk pada 1911, pemukim Muslim di Arakan sudah berjumlah 58 ribu orang. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang Bengali memilih masuk ke Rakhine. Sejak tahun-tahun ini pulalah mulai timbul konflik dengan penduduk lokal yang mayoritas merupakan penganut Buddha.Bertambahnya jumlah penduduk imigran membuat penduduk lokal khawatir.

Menurut Sejarawan Jacques P. Leider, dia mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan.Mereka menyebut diri mereka "Rooinga". Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "rahma" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "rogha" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruhadi Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya.Hal ini menunjukan bahwa Rohingya bukanlah etnis baru di Arakan.[16]

---

[15]Tulisan Toto Suhardijanto, *Fakultas Ilmu Pengetahuan & Budaya, Universitas Indonesia,* lihat di http://pembela-aswaja.blogspot.com/2012/08/mengenal-sejarah-etnis-rohingya.html diakses 11-12-2012.

[16] Ibid.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Muslim Rohingya

Masyarakat Rohingya adalah penganut agama Islam yang taat. Sebagian besar dari muslim Rohingya, para laki-lakinya menumbuhkan janggut dan para wanita memakai jilbab. Rumah-rumah mereka dikelilingi oleh dinding-dinding bambu yang tinggi. Di Arakan, di setiap desa terdapat masjid dan madrasah. Laki-laki Rohingya salat berjamaah sedangkan para wanita salat di rumah.

Semua kegiatan sosial seperti menolong orang miskin, janda dan anak yatim, serta acara pernikahan dan kematian dilakukan oleh suatu lembaga sosial yang ada di setiap desa.Lembaga tersebut disebut *Samaj*.Ulama dalam lingkungan Muslim Rohingya memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam masalah hukum, seperti masalah keluarga Muslim Rohingya.[17]

a. Pendidikan Muslim Rohingya

Sebelum junta militer berkuasa tahun 1962, Muslim Rohingya memiliki posisi yang sama dengan masyarakat mayoritas Budha. Akibat kemiskinan, diskriminasi sosial dan serangan yang terus melanda mereka, jumlah pelajar-pelajar muslim Rohingya menurun drastis. Pendidikan tingkat dasar, apalagi tingkat tinggi, tidak bisa dengan mudah mereka dapatkan.

---

[17] Nurul Islam, *"Facts About The Rohingya Muslims of Arakan"* terdapat di situs *http:// www.Rohingya.com/rahi/summary.htm*, diunduh 10-12-2012

Terdapat sejumlah sukarelawan di sekolah-sekolah agama untuk memberikan pendidikan pada pelajar-pelajar Muslim Rohingya. Namun, dengan adanya berbagai larangan, minimnya dana dan fasilitas membuat mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa menciptakan pemuda-pemuda yang berpendidikan untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat Rohingya.[18]

b. Status Politik Muslim Rohingya

Sebelum 1962, Muslim Rohingya dikenal sebagai etnis bangsa pribumi Burma.Mereka memiliki perwakilan di parlemen Burma, beberapa dari mereka diangkat menjadi menteri, sekretaris parlemen, dan di beberapa posisi pemerintahan lainnya. Setelah rezim militer berkuasa, secara sistematis hak politik mereka dicabut, pegawai-pegawai pemerintahan yang sebelumnya diduduki oleh muslim Rohingya diganti oleh orang-orang Budha Arakan.

Pada awal kemerdekaan, Budha Arakan fundamentalis sering menuduh nasionalisme muslim Rohingya sebagi pro Pakistan. Berdasarkan tuduhan tersebut, Muslim Rohingya sulit menjadi tentara, pejabat sipil, polisi dan kepala desa di wilayah mereka sendiri. Keadaan tersebut semakin parah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang menyatakan bahwa mereka bukan penduduk asli Burma.Pemerintah tidak lagi mengizinkan mereka untuk

---

[18]*Ibid.*

berpartisipasi dalam kehidupan politik pemerintahan Burma.[19]

c. Muslim Rohingya dan Masalah Sosial Budaya

Secara umum, pemerintah sebenarnya mencanangkan kebijakan untuk memberi kebebasan kepada penduduk dalam menjalankan agama mereka masing-masing.Pada kenyataannya, pemerintah menerapkan banyak larangan, khususnya terhadap kelompok minoritas.Kitab suci al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahas lokal, tidak dapat diimpor secara legal.Izin untuk mendirikan masjid sangat sulit untuk didapatkan.[20]

Dalam hal bepergian ke luar negeri seperti menjalankan ibadah haji atau menghadiri pertemuan keagamaan dengan luar negeri sebenarnya diperbolehkan. Namun, pembatasan dan pengawasan yang ketat serta kesulitan lain menghadang kelompok minoritas muslim ini. Seperti, pembatasan masa berlakuknya visa, sulitnya pengurusan paspor, dan kecurigaan atas segala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok minoritas muslim di dalam dan di luar negeri. Contoh perlakuan yang dilakukan pemerintah Burma pada tahun 1962, tentang aturan pembatasan haji.Pada tahun tersebut, jamaah haji Burma berkisar sampai 500 orang.Namun dengan adanya kebijakan uang ketat di era

---

[19]*Ibid.*

[20]*Ibid,* h. 59

pemerintaha militer, jumlah tersebut turun drastis manjadi rata-rata hanya 16 orang.Itupun hanya diberikan kepada orang-orang yang belum pernah haji.[21]

Dalam pengaturan soal organisasi keagamaan, pemerintah menerapkan suatu mekanisme yang mewajibkan setiap organisasi keagamaan kelompok harus mendaftarkan diri pada Menteri dalam Negeri dengan tembusan ke Menteri Agama.Namun persoalan yang timbul ketika salah satu di antara organisasi tersebut memperoleh kesempatan untuk membuka rekening bank.Organisasi tersebut diharuskan membuat tembusan ke Dewan Gereja Burma bukan ke Menteri Agama.[22]

d. Muslim Rohingya Dan Masalah Ekonomi

Burma adalah negara yang perekonomiannya bertulang punggung pada pertanian, yang didominasi oleh hasil panen tunggal, yakni beras.Beras adalah pangan pokok, di samping sebagai komoditis ekspor utama bagi Burma.Produksi padi menggunakan kira-kira sepuluh dari luas lahan yang ditanami dan menyerap kira-kira 70% dari angkatan kerja Burma. Ekspor beras menyumbang antara 40 dan 50% terhadap total pendanaan ekspor Burma dari 1870-an sampai 1965. Beras juga merupakan barang penting, walaupun jumlahnya tidak ditentukan. Dalam distribusi

---

[21]*Ibid.*

[22]Ibid. 59

illegal, beras juga diperdagangkan ke luar negeri, terutama ke negeri-negeri yang bertentangan dengan Burma, yakni Bangladesh, India, China, dan Thailand.[23]

Muslim Rohingya yang mayoritas petani yang berada di wilayah Arakan Utara mendapatkan aturan baru dari pemerintah Myanmar yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka.Aturan baru menyebutkan, bahwa petani, buruh pemotong kayu dan bambu, serta pekerja agrobisnis, harus menjual produk mereka kepada agen yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam harga yang sudah ditentukan. Mereka dilarang menjual produknya kepada orang lain. Untuk memperoleh fasilitas tersebut para agen telah memberikan uang yang banyak kepada pemerintah.

Kondisi di atas diperparah lagi dengan kewajiban untuk membayar berbagai macam pajak.Bila musim panen, para petani diharuskan menjual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan.Di samping itu, pajak padi dihitung dari prosentase luas tanah yang dimiliki oleh petani, bukan dari hasil panen.Perhitungan ini merugikan petani Rohingya yang sebagian besar dari mereka mempuanyai tanah tidak subur.Dengan kondisi tanah seperti itu dan pemerintah yang tetap memberlakukan pajak padi berdasarkan luas tanah, membuat banyak petani Rohingya yang tidak mampu membayar pajak.[24]

---

[23] Mya Than dan Joseph L.H. Tan, *Transisi Ekonomi 1990-an: Tantangan dan Dilema Myanmar,* (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 117

[24]Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya*, h. 60

Pada tahun 1989, pemerintah militer Burma mengeluarkan kartu identitas baru untuk penduduk, kartu identitas tersebut tidak hanya memuat foto, nama orang tua, dan alamat, tetapi memuat asal suku bangsa dan agama. Kartu identitas baru itu harus selalu di bawa ke manapun mereka pergi.Kartu itu juga dibuat sebagai persyaratan jika ingin membeli tiket untuk bepergian, mendaftarkan anak sekolah, melamar pekerjaan, termasuk semua kedudukan sebagai pegawai negeri, menjual atau membeli tanah, dan kegiatan sehari-hari lainnya.Muslim Rohingya tidak diperbolehkan memiliki kartu identitas tersebut. Hal itu membuat mereka mengalami kesulitan bila akan bepergian. Mereka diperkenankan bepergian, setelah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.[25]

KOMUNITAS MUSLIM ROHINGYA DI NEGARA BURMA

1. Hubungan Pemerintah Dengan Muslim Rohingya

Ada beberapa periode dalam masa pasca kemerdekaan Myanmar, dimana pada waktu-waktu tersebut kaum muslimin mendapatkan berbagai terror fisik dan non-fisik sehingga mereka berusaha berjuang untuk mengatasi kemelut yang mereka hadapi dengan perlawanan seadanya.

---

[25]Ibid., h. 61

a. Pemberontakan Muslim Rohingya di Masa Pemerintahan U Nu

Pada bulan agustus 1948, delapan bulan setelah kemerdekaan, terjadi kekacauan yang luar biasa.Banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan, seperti Komunis Bendera Merah (*Red Flag Communist*), Komunis Bendera Putih (*White Flag Communist*), dan *White Comrade*.Mereka merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah karena tidak bisa menentukan daerahnya sendiri, seperti yang diharapkan di beberapa ras lain, yaitu Shan, Kachin, dan Karen.

Muslim Rohingya pun dirugikan, dengan status mereka dalam pemerintahan non-muslim, ketika pejabat-pejabat Islam digantikan oleh orang-orang Budha.Pengungsi-pengungsi Budha yang berada di bagian Arakan Selatan diperbolehkan untuk kembali ke rumah dan desa, dari tempat mereka dipindahkan beberapa tahun sebelumnya.[26] Melihat keadaan ini, muslim Rohingya memanfaatkan kesempatan dari aksi gerakan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan komunis. Mereka menuntut berdirinya Negara otonom.Namun, pemerintah menolak kedua tuntutan tersebut.Akibatnya, gerakan komunis mencabut dukungan mereka untuk AFPFL (*Anti-Fascist People's Freedom League*) dan memilih *Arakan National Union Organization* (ANUO) dalam pemilihan. Sementara itu, muslim Rohingya memulai pemberontakan di bawah gerakan Mujahidin. Gerakan

---

[26]Christie, Clive J. A, *A Modern of History Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism.* (London: Tauros Academic Studies an imprint of I.B Tauris Publisher, 1996), h. 168

tersebut dibentuk pada deklarasi Dobboro Chaung, Agustus 1947, dipimpin oleh Jafar Hussain atau lebih dikenal dengan nama Jafar Kawal (pada oktober 1950 Jafar kawal dibunuh. Kepemimpinan Mujahidin digantikan oleh penerusnya, Cassim).[27] Pemimpin muslim mulai menyerukan jihad melawan pendudukan Arakan, dan target utama penyerangan ini adalah penduduk lokal beragama Budha, bukan perwakilan pemerintahan pusat.[28]

Oleh karena lemahnya pemerintah pusat pada waktu itu, ditambah dengan kekacauan yang terjadi di Burma, gerakan yang dilakukan Mujahidin berkembang semakin cepat.Dalam setahun pemberontakan Mujahidin menguasai sebagian besar wilayah Arakan Utara serta menarik perhatian warga Rangoon pada waktu itu.Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan kejatuhan Burma dalam ketidakstabilan politik.Pemerintah juga tidak memulai tindakan pencegahan hingga 1951.[29]

Pada awal timbulnya pemberontakan, banyak pemimpin-pemimpin Islam yang berkhutbah tentang pembelaan terhadap Islam atau melakukan jihad ketika ada yang meneyerang hak serta wilayah umat Islam. Dengan istilah yang lebih spesifik, pemberontak dan warga muslim Arakan yang tidak secara langsung mendukung pemberontakan inginkan adalah pemberian daerah khusus

---

[27] Smith, Martin, *Burma: Insurgency and The Politics of Etnicity*, (New York: st. Martin's Press, 1991), h. 129

[28] Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya*, h. 65-66

[29]Christie, Clive J. A, *A Modern of History Southeast Asia*, h. 168.

bagi umat Islam, sebuah "Negara bagian perbatasan". Seperti halnya yang disebut oleh pertemuan muslim di Maungdaw pada April 1947, daerah yang bukan pemisahan dari Burma, tetapi dari dominasi umat Budha di Arakan.[30]

Antara tahun 1951-1954, tentara Burma lebih memfokuskan perhatiannya terhadap Arakan.Serangkaian aksi diadakan untuk meredam tindakan gerakan Mujahidin.Diantaranya menangkap dan mengasingkan pemimpin Mujahidin, Cassim, ke Pakistan pada bulan Juni 1954. Aksi tersebut berpuncak pada November 1954 dengan nama "*Operation Mansoon*". Tujuan utama operasi tersebut adalah untuk memecah persatuan pemberontak muslim langsung di daerah mereka. Akibatnya, kegiatan Mujahidin berfokus pada penyelundupan beras dan imigran gelap ke Pakistan untuk mendapatkan senjata.Pemberontakan melemah dan menjadi semi kejahatan yang menjadikan masyarakat sipil menjadi korban.

Hampir semua sektor kehidupan di Arakan dikuasai oleh Budha Arakan.Mulai dari birokrasi pemerintahan sipil, militer, perdagangan, dan jasa.Muslim Rohingya sangat dimarginalkan, kesempatan mereka untuk menjadi polisi, kepala desa, pegawai pemerintah sangat kecil dibanding Budha. Polisi dan kepala desa di daerah-daerah muslim banyak digantikan oleh orang-orang Budha. Muslim di Arakan juga diperlakukan tidak adil. Mereka dijarah, diperas, dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan.

---

[30]Ibid.

Akibat ancaman dan penggusuran oleh kaum Budha, muslim Rohingya yang diusir pada tahun 1942 tidak bisa kembali ke desanya lagi. Akibatnya, ribuan pengungsi Rohingya hidup di tempat-tempat pengungsian di India dan Pakistan.Sementara itu, tanah-tanah dan harta benda mereka di Arakan dirampas.Para Mujahidin Rohingya mengangkat senjata karena segala protes dan tuntutan mereka tidak didengar oleh pemerintah Rangoon.Pemerintah Rangoon malah mendukung terjadinya pembasmian etnis dan menghilangkan identitas etnis Rohingya dengan mengambil kembali tanah-tanah Rohingya untuk Budha.Pemerintah justru mengadakan operasi militer besar-besaran untuk membantai dan mengusir Rohingya dari tanah kelahirannya.Rohingya menghendaki keadilan.Mereka berharap dapat menjadi warga Negara Burma di bawah aturan hukum, bukan di bawah dominasi tirani.[31]

Sayangya, tidak tercapai kesepakatan antara komisi yang mewakili pemerintah dan pihak pemberontak.Pemerintah tetap menempuh kekerasan militer untuk melumpuhkan pemberontakan.Para pemberontak bertempur sengit melawan polisi dan angkatan bersenjata Burma yang ditempatkan di Arakan untuk mengepung wilayah ini dalam waktu yang relative panjang.Pada tahun 1949, militer Burma berhasil menguasai pelabuhan Akyab sedangkan para pemberontak menguasai seluruh wilayah Arakan Utara. Gerakan-gerakan pemberontakan muslim juga

---

[31]Ibid. 154

terjadi di bagian lain propinsi Arakan. Pada tahun 1954, Cassim, pemimpin muda militan dan berpendidikan, menjadi pemimpin dari setiap gerakan yang dilakukan oleh Muslim Rohingya. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil memperoleh dukungan dalam jumlah yang besar. Namun, pada tanggal 13 September 1966 Cassim dibunuh oleh orang yang tak dikenal di daerah Cox's Bazar. Kematiannya menyebabkan gerakan muslim Rohingya mengalami kemunduran.[32]

Dari tahun 1951 sampai 1954, militer Burma mengadakan serangan besar-besaran terhadap gerilyawan Rohingya.Hal itu membuat gerilyawan Rohingya terpaksa mundur dari wilayah yang didudukinya.Operasi militer pemerintah pada bulan November 1954, pada akhirnya menghancurkan basis pertahanan terakhir dari para Mujahidin Rohingya.Beberapa pemimpin utama pemberontakan terbunuh dalam pertempuran ini.Keberhasilan operasi militer ini membuat perlawanan Rohingya menurun.Kekuatan Rohingya semakin memudar dan terpecah-pecah ke dalam kelompok-kelompok kecil.Pada akhirnya, gerakan Mujahidin tidak lagi menjadi ancaman bagi pemerintah Burma.[33]

Setelah berakhirnya operasi militer yang terorganisir dari para Mujahidin, pemerintah Burma masih melancarkan tuduhan bahwa para Mujahidin mendorong masuknya ribuan imigran gelap dari Chittagong, yang sangat padat

---

[32]Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya*, h. 73

[33]Riza Sihbudi,ed., *Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara,* h. 154

penduduknya, ke Arakan. Para imigran ini, karena faktor kesamaan agama sangat mudah membaur dengan muslim Rohingya di Arakan Utara. Mereka, seperti halnya Rohingya, hidup dari pertanian subsistem dengan menggarap lahan-lahan kosong di Arakan.Pemimpin-pemimpin Rohingya menolak tuduhan tersebuut. Mereka mengatakan pemerintah Rangoon tidak hanya melancarkan tuduhan yang tidak benar, tetapi juga melakukan propaganda untuk mencegah para pengungsi Rohingya, yang dulunya melarikan diri ke Pakistan, untuk kembali ke tanah air dengan menuduh mereka berasal dari Chittagong yang menyusup ke Burma secara illegal.[34]

Salah satu dampak dari pemberontakan di Arakan adalah makin bangkitnya kesadaran untuk memperjuangkan Arakan sebagai wilayah otonom bagi muslim Rohingya. Mereka yang berhaluan moderat juga menuntut Arakan menjadi Negara bagian tersendiri (*State of Arakan*) di bawah persatuan Burma yang memiliki hak-hak kesempatan yang sejajar dengan daerah bagian lainnya. Sebagian besar dari Rohingya, khususnya yang tinggal di daerah Buthidaung dan Maungdaw, lebih menekankan tuntutan pembentukan Arakan sebagai wilayah otonom yang bertanggung jawab langsung pada pemerintah pusat di Rangoon, dengan menyingkirkan semua pejabat pemerintahan Arakan yang beragama Budha.[35]

---

[34]Ibid., h. 155

[35]Ibid.

Antara 1960 sampai 1962, masyarakat Rohingya berjuang untuk memperbaiki status Arakan. Pada waktu pemilihan umum April 1960, U Nu berjanji jika partainya memenangkan pemilu, dia akan menjadikan Arakan sebagai wilayah Negara bagian yang otonom dan sejajar dengan Negara-negara bagian laiannya di bawah persatuan Burma. Setelah mencapai kemenangan, U Nu membentuk komisi yang bertugas mengumpukan segala permasalahan dan aspirasi muslim Arakan.[36]

Pada tahun selanjutnya, U Nu memenuhi janjinya setelah *regional autonomy communission* tahun 1948, mengumumkan pembentukan Negara Mon dan Arakan, yang akan diselesaikan pada tahun 1962. Akan tetapi, kelompok Mujahidin yang tidak puas meneruskan pemberontakan untuk memaksa dan meminta hak beragama Islam dan pemisahan yang legal dari daerah terdepan Mayu dari Burma. Walaupun pemerintah merasa mendapatkan dukungan selama tahun 1961 dengan menyerahkan 500 tentara gerilya Mujahidin bersenjata berat yang dipimpin oleh Rauschid Bullah dan Mustafiz, yang aktif diperbatasan Pakistan semenjak merdeka, banyak penduduk lokal Budha dan Islam yang berkata bahwa terdapat potensi konflik yang tidak terlihat oleh pemerintah Burma.[37]

Rohingya Jamieatul Ulama merupakan salah satu organisasi yang menyerahkan memorandum yang mencatat

---

[36]Ibid.

[37]Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya*, h. 75

semua aspirasi dan pandangan muslim Rohingya. Memorandum tersebut di antaranya menyebutkan bahwa muslim Rohingya menghendaki wilayah otonom yang langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat Rangoon. Pemenuhan tuntutan tersebut merupakan persyaratan untuk menghentikan kasus-kasus penyelundupan dan datangnya imigran gelap sehingga perdamaian dan ketertiban dapat terpelihara di Arakan.[38]

Sebuah pemerintahan lokal yang terpisah dari yang lainnya perlu didirikan di Arakan untuk membantu meningkatkan standar hidup masyarakat muslim Rohingya yang selama ini sangat bergantung pada pertanian subsistem. Melalui birokrasi lokal yang otonom, muslim Arakan mengharap segala pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Budha Arakan terhadap kaum muslim bisa ditindak langsung.[39]

Muslim Rohingya tidak keberatan dengan dibentuknya Negara bagian Arakan asal disertai persyaratan bahwa Arakan juga harus memiliki Dewan Regional yang memiliki otonomi penuh untuk menanggulangi masalah-masalah lokal.Eksekutif di tingkat pusat harus mempertimbangkan saran Dewan Regional dalam menunjuk dan menempatkan orang-otrang yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Negara bagian Arakan.Begitu pula dalam hal mencari penyelesaian masalah regional Arakan, pejabat pusat

---

[38]Riza Sihbudi,ed., *Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara,* h. 155

[39]Ibid.,h. 156

harus mendengar pula nasihat dan bahan-bahan pertimbangan yang diajukan Dewan Regional.Pemerintah Regional Arakan sudah semestinya mendapatkan pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab langsung dari pemerintahan pusat di Rangoon guna mengatasi masalah ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan agama. Wakil-wakil dari wilayah Maungdaw dan Buthidaung, meskipun pada dasrnya ,menyetujui pembentukan Negara bagian Arakan, mereka menolak wilayah mereka (Maungdaw, Buthidaung, dan sebagian dari Rathedaung) menjadi bagian dari *the state of Arakan*. Muslim di ketiga wilayah ini menempati posisi mayoritas. Oleh karenanya, menurut anggapan mereka, menyatukan Islam dengan Budha Arakan ke dalam satu Negara bagian, sama artinya dengan mengundang pertumpahan darah baru.[40]

Pandangan muslim di Akyab dan di wilayah Arakan lainnya, tempat muslim menjadi minoritas, tentang rencana pembentukan Negara bagaian Arakan, lebih konpleks lagi. Mereka tidak keberatan dengan ide pembentukan Negara bagian Arakan sepanjang ada jaminan hak-hak muslim di dalam konstitusi maupun praktiknya sehari-hari. Mereka juga menuntut persamaan hak, baik Budha maupun muslim Arakan secara bergiliran menduduki posisi sebagai kepala Negara bagian Arakan. Bila kepemimpinan dipegang oleh umat Islam, maka wakilnya Budha.Demikian pula dengan posisi Dewan Negara bagian, bila ketuanya Budha, maka

---

[40]Riza Sihbudi,ed., *Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara,* h. 155

wakilnya dari umat Islam.Begitu seterusnya, setiap mendudukkan personel dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan, diatur secara bergantian antara umat Islam dan Budha.[41]

Mereka juga mengusulkan pada pemerintah Rangoon agar sepertiga dari jabatan kementerian dipegang muslim. Begitu pula halnya dalam menempatkan figur-figur yang menjalankan pemerintahan negara bagian, suara delegasi muslim harus didengar terlebih dahulu. Jumlah kaum muslim yang menduduki posisi penting di pemerintahan, kementerian, parlemen harus proporsional sesuai dengan prosentase jumlah muslim secara keseluruhan.

Pada 1 Mei 1961, pemerintah Rangoon membentuk daerah perbatasan Mayu (*Mayu Frontier*) yang meliputi Maungdaw, Buthidaung, dan bagian barat Rathedaung. Daerah tersebut merupakan wilayah administrative militer, bukan merupakan suatu pemerintahan otonom.Namun, karena pembentukan zona militer ini tidak menjadikan Arakan sebagai sub ordinat dari pemerintah Rangoon, pemimpin-pemimpin Rohingya dapat menyetujuinya. Persetujuan ini tampak, khususnya setelah pemerintahan administratif militer yang baru berhasil menekan pemberontakan-pemberontakan lokal dan memulihkan keamanan dan perdamaian di wilayah Mayu.[42]

---

[41]Ibid., h. 157

[42]Ibid.

b. Gerakan Muslim Rohingya Masa Pemerintahan Ne Win

Pemerintah AFPFL (*Anti-Fascist People's Freedom league*) mengirimkan *Burma Territorial Force* (BTF) yang dipimpin oleh Mayor Tha Kyaw untuk menghentikan gerakan Mujahidin.Akhirnya, Mujahidin termasuk pemimpinnya, Cassim melarikan diri ke Pakistan Timur dan pada tahun 1959 gerakan Mujahidin tidak berjalan.

Awal 1962, pemerintah mengajukan draft pembentukan Negara bagian Arakan tanpa memasukkan wilayah Mayu ke dalamnya. Namun, sesudah terjadi kudeta di bawah pimpinan Ne Win pada Maret 1962, rezim baru Burma tersebut membatalkan rencana pembentukan Negara bagian Arakan dan membubarkan gerakan Mujahidin.Hingga kini, cita-cita untuk membentuk wilayah Arakan yang otonom masih terkatung-katung.Arakan tetap di bawah kontrol represif dari pemerintahan militer Burma.[43]

Partai militer *Burmese Socialist Programme Party* (BSPP) telah mengekang kebebasan seluruh rakyat Burma, membatasi gerak politik dan melarang publikasi apapun yang bernada anti pemerintah.Penduduk dihalang-halangi untuk bepergian ke daerah-daerah tertentu, dan jarang sekali diberi paspor untuk ke luar negeri.Semua industri dan bank-bank dinasionalisasikan dan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat terhadap perdagangan oleh pemerintah. Semua

[43]Riza Sihbudi,ed., *Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara,* h. 158

hal tersebut dilakukan dengan alasan akan membawa Burma ke dalam sosialisme.

Jenderal Ne Win membuat sebuah perencanaan yang bertujuan mengusir setiap orang yang beragama Islam keluar dari Burma.Umat Islam yang masih tersisa diintegrasikan ke dalam masyarakat Budha.Partainya mengadakan suatu propaganda besar-besaran yang bertujuan menuduh orang-orang Islam sebagai unsure-unsur yang anti pemerintah. Mereka mengatakan bahwa umat Islam merupakan orang asing di Negara itu meskipun pada kenyataannya mereka telah bergnerasi-generasi tinggal di sana. Pihak militer dan alat-alat kekuasaan Negara lainnya diperintahkan untuk menghancurkan segala yang berbau Islam dalam masyarakat, dengan melakukan segala bentuk penindasan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan.

c. *Rohingya Independence Force* (RIF) dan Perkembangannya.

Umat Islam di Arakan terperangkap di antara situasi yang tidak pasti. Banyak warga muslim yang mengalami kesulitan untuk membentukkan status kewarganegaraan mereka dan takut akan hak mereka untuk menetap di dalam negeri. Seorang mantan mahasiswa dari Universitas Rangoon, Muhammad Jafar Habib, mereformasi gerakan Mujahidin dengan nama baru, *Rohingya Independence Force* pada 26 Maret 1963 di Maungdaw, Arakan Utara. Mengikuti jejak pendahulunya, Mujahidin, RIF merupakan gerakan sebagai

bentuk protes terhadap kudeta militer Ne Win dan pelanggaran organisasi muslim seperti *Rohingya Students Union* dan *Rohingya Youth League*. Sedikit sekali yang diketahui mengenai RIF, akan tetapi laporan mengenai kontak senjata dengan pihak pemerintah kadang kala muncul ke media. Tahun 1969, RIf berubah nama menjadi *Rohingya Independence Army* (AIR) dipimpin oleh Jafar Habib.[44]

Pada tanggal 12 September 1973 berdiri *Rohingya Patriotic Front* (RPF) dengan pemimpinnya Jafar Habib di Sack Dala.Organisasi ini merupakan perubahan dari *Rohingya Independence Army* (AIR). Setelah kemerdekaan Bangladesh, banyak terjadi perubahan di RPF dan akhirnya, pada Juni 1974, RPF direkonstruksi, dipimpin oleh Jafar Habib, Presiden Nurul Islam, Wakil Presiden, dan Sekretaris Umum Shabbir Hussain. Tujuan organisasi ini sama dengan organisasi sebelumnya, yaitu membentuk negara otonomi Islam.[45]

Gerakan yang terinspirasi oleh munculnya semangat pan-islamisme di dunia ini, mengkampanyekan ketidakadilan yang dirasakan oleh muslim di Arakan. Namun, gerakan ini hanya mendapat sambutan yang kecil dan akhirnya terpecah ke dalam beberapa faksi.

Pakta dengan Rohingya Patriotic Front disetujui pada 1973. Walaupun kelompok Mujahidin dapat mempersenjatai beberapa ratus penduduk muslim dengan bantuan

---

[44]Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya*, h. 80

[45]Ibid.

Bangladesh sepanjang sungai Naaf, secara militer perjanjian ini tidak terlalu segnifikan.

Sementara itu, Zafar Sani mereorganisasi unit gerilya di antara komunitas muslim di wilayah agak ke utara sepanjang sungai Naaf. Pada awalnya, kelompok muslim *National Liberation Party* yang dipimpin oleh Sani bekerja di antara aliansi dengan *Rakhine 'Nationalist' Front, Communist Party of Arakan* (CPA), dan *Arakan National Liberation Party* (ANLP). Melimpahnya *supply* senjata selama perang kemerdekaan Bangladesh, membuat kelompok muslim*National Liberation Party* menjelma menjadi kelompok pengacau nomor dua di negara tersebut setelah *Communist party of Burma* (CPB), tahun 1970.

Pada tahun 1982, salah satu faksinya membentuk *Rohingya Solidarity Organisation* (RSO), dan kemudian sempalannya membentuk *Arakan Rohinya Islamic Front* (ARIF) pada tahun 1986.Keduannya berkedudukan di selatan Bangladesh.

Organisasi-oraganisasi ini merupakan organisasi yang didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang tak henti-hentinya melakukan penindasan. Salah satu dampak dari pemberontakan di Arakan adalah semakin bangkitnya kesadaran untuk memperjuangkan Arakan sebagai wilayah otonom bagi muslim Rohingya. Kendati peerlawanan kekerasan tidak memberikan hasil optimal, pemberontakan itu tetap memberikan efek politik di

lingkungan muslim Burma, yaitu kesadaran tentang otonomi Arakan.[46]

Menanggapi perlawanan di wilayah Arakan, disampinng melakukan penyerangan militer, pemerintah juga sempat beberapa kali bernegoisasi.Pemerintah tidak mampu menumpas habis gerakan ini, terutama kendala geografi. Sebaliknya, pemberontakan muslim Rohingya tidak kunjung besar. Hal itu karena di antara mereka sendiri cenderung terpecah ke dalam kelompok-kelompok kecil.[47]

d. Operasi Naga Min

Pada tahun 1978, pemerintah Burma melancarkan operasi militer untuk mengusir muslim Rohingya dari Arakan. Mereka dianggap sebagai komunitas ilegal di tanah kelahiran mereka sendiri. Operasi yang disebut dengan Operasi Naga Min (*Dragon King Operation*/ Operasi Raja Naga) ini memaksa 200.000 muslim Rohingya mengungsi ke Negara Bangladesh untuk melarikan diri dari peganiayaan. Padahal saat itu jumlah penduduk yang bermukim di Bangladesh sudah mencapai 156.630 orang. Operasi tersebut meliputi relokasi paksa muslim disertai pemerkosaan, pembunuhan, dan penggusuran masjid.[48]

Setelah melalui perundingan dan bantuan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi, Burma menerima kembali

[46]Riza Sihbudi,ed., *Problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara,* h. 155

[47]Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya*, h. 81

[48]Ibid. 83

186.965 muslim Rohingya untuk menetap di Arakan, di bawah perjanjian Decca pada tahun 1979. Akan tetapi, rezim yang berkuasa saat itu menyalahkan semua kekacauan kepada orang-orang Bengal. Menurut mereka, yang menyebabkan kekacauan dan yang menyerang desa Budha di Arakan dilakuakan oleh "kelompok bersenjata Bengal", "kelompok perampok Bengal", dan "ektremis Islam". Sejak saat itu, ribuan orang Islam Burma terus mengungsi ke berbagai Negara, seperti Pakistan, Mesir dan Negara-negara Arab lainnya.Mereka dianggap sebagai "Palestina Baru" di Asia.[49]

e. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982

Tidak lama setelah operasi Naga Min berlangsung, pada tahun 1982, penguasa militer Burma mengeluarkan sebuah dekrit tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Burma. Di dalam undang-undang tersebut, muslim Rohingya dicoret hak kewarganeraannya dan mereka menjadi tidak mempunyai negara (*Stateless*). Ne Win memaklumatkan bahwa muslim Rohingya adalah rakyat tanpa Negara (*People wihout state*).[50]

Pemerintah Burma mengeluarkan*Burma Citizenship Law 1982*. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

National such as The Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, or Shan and ethnic groups as have settled in any of

---

[49]Ibid.

[50]"Apa Salah Kami Sebagai Muslim?", terdapat dalam situs, http://www.eramuslim.com/br/dn/ 34/6244.1.v.html

the territories included within the state as their permanent home from a period anterior to 1185. B. C., 1823 A. D. are Burma Citizens.

Berdasarkan pasal ini seharusnya etnis Rohingya memiliki kewarganegaraan Myanmar, tetapi dalam pasal 4 dinyatakan bahwa *"The Council of state may decide whether any ethnic group is national or not,"* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya.[51]

Padahal, status warga Negara sangat penting bagi penduduk muslim Rohingya. Dengan memperoleh status warga Negara, mereka bisa memperoleh kemudahan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan itu telah menyebabkan kaum muslim Rohingya semakin mengalami penindasan, penyiksaan, tekanan, dan kematian di tangan penguasa tirani militer Burma. Pembunuhan yang tidak terhitung jumlahnya, pelecehan terhadap wanita Islam, tindakan penangkapan yang sewenang-wenang, pengurungan dalam penjara, serta perlakuan dengan cambuk, sampai hukuman mati yang semena-mena.Selain itu, pemerintah juga menghilangkan segala ciri yang berbau keislaman. Sehingga muslim Rohingya dilarang untuk memelihara janggut, memakai kopiah dan penutup kepala yang lain, serta memakai jilbab (tutup kepala bagi kaum wanita). Akibatnya, sekitar 20.000 muslim

---

[51] Tamia Dian Ayu Faniati, *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Etnis yang tidak memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar* (Depok: Skripsi Fak. Hukum Program Hukum UI, 2012)

Rohingya dibunuh oleh rezim militer di antara tahun 1962 sampai tahun 1984.[52]

2. Komunitas Muslim Rohingya Masa Kini

a. Kondisi Muslim Rohingya

Kebijakan "Burmanisasi" dan "Budhanisasi" yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar berusaha untuk mengeluarkan dan memarjinalkan warga Muslim Rohingya di tanahnya sendiri di Arakan, padahal mereka adalah suku asli di wilayah Arakan atau sekarang disebut Rakhine.Etnis Rohingya mengalami intoleransi karena mereka Muslim dan identitas etnis dan ciri-ciri fisik dan bahasa mereka dianggap berbeda dengan *mainstream*. Oleh karenanya, mereka selalu menjadi subyek penyiksaan utamanya sejak 1962, ketika rezim militer U Ne Win mengambil alih pemerintahan negara Burma.

Rezim militer Thein Sein yang kini berkuasa juga menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar pada Rohingya. Lebih buruk lagi, ia memasukkan Rohingya pada daftar hitam (*blacklisted*). Peringatan dari berbagai pihak, terutama dari PBB, tidak dihiraukan. Setiap ada pengamat ataupun badan PBB yang ingin mengetahui secara persis apa yang terjadi disana dijawab bahwa apa yang terjadi adalah

---

[52]Zaman kegelapan Islam dan Ketibaan Era Kebangkitan Islam, *"Burma Penduduk yang Berhadapan dengan Kezaliman Penganut Buddha"*, diambil dari situs: http://www.harunyahya.com/malaysian/ buku/kebangkitanislam19.php.

sebaliknya. Peristiwa yang baru terjadi merupakan kerusuhan rasial antar suku dan tidak berkaitan dengan pemerintah, demikian yang seringkali diungkapkan Pemerintah Myanmar.

Etnis Rohingya tidak ada keinginan untuk merdeka dan memisahkan diri dari *Union of Myanmar*.Mereka hanya ingin diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.Bebas bergerak dan berpindah kemanapun serta bebas berekspresi, beribadah dan menjalankan keyakinan agamanya.

Menurut *Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan* (PIARA), pernyataan pemerintah atau pengamat yang mengatakan bahwa perjuangan etnis Rohingya didukung dan dikelola oleh kelompok 'teroris' seperti Al Qaeda dan Jama'ah Islamiyah adalah fitnah belaka. Etnis Rohingya tidak ingin dan juga tidak punya kapasitas untuk menjadi kelompok teroris apalagi untuk mendirikan negara sendiri dengan cara-cara terror dan kekerasan.[53]

Pada tahun 1948 - 1962 etnis Rohingya diakui sebagai salah satu dari 136 etnis yang eksis di Myanmar. Bahkan ada etnis Rohingya yang menjadi anggota parlemen dan menteri pada kabinet Myanmar sebelum tahun 1962. Ketika U Ne Win berkuasa pada tahun 1962, maka mulailah pengingkaran etnis Rohingya sebagai etnis yang sah berkewarganegaraan Myanmar.Puncaknya adalah pada Undang-Undang

---

[53]Lihat http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan-488287.html. diunduh pada tanggal 11-12-2012

Kewarganegaraan Burma tahun 1982 yang meniadakan Rohingya sebagai etnis yang diakui di Myanmar. Selanjutnya peniadaan ini adalah juga penghilangan dan pembatasan hak etnis Rohingya dalam hal :

1) Hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat
2) Hak untuk menikah dan memiliki keturunan
3) Hak atas Pendidikan
4) Hak untuk berusaha dan berdagang
5) Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah
6) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang dialami oleh etnis Rohingya antara lain :

1) Pembunuhan massal dan sewenang-wenang
2) Pemerkosaan
3) Penyiksaan
4) Penyitaan tanah dan bangunan
5) Kerja Paksa dan Perbudakan
6) Relokasi secara paksa
7) Pemerasan[54]

Akibat kekerasan struktural yang berlangsung begitu panjang, maka warga Rohingya terpaksa mengungsi dan

---

[54] Ibid.

menjadi *'manusia perahu'*, mencari negeri aman yang mau menerima mereka di Asia Tenggara atau di negeri manapun di seluruh dunia. Tidak jarang para manusia perahu itu tenggelam ataupun mati karena kelaparan dan kehausan di tengah laut.Banyak pula yang ditahan atau diperlakukan semena-mena d1i negara-negara transit atau di negara-negara penerima mereka.

Saat ini ada 1.5 juta orang Rohingya yang terusir dan tinggal terlunta-lunta di luar Arakan/ Myanmar. Kebanyakan mereka mengungsi di Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, UAE, Malaysia, Thailand, Indonesia dan lain-lain.

b. Pembantaian Terhadap Rohingya

Pada tanggal 3 Juni 2012 warga Rakhine bekerjasama dengan militer Burma, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 Muslim Myanmar (non Rohingya) yang dalam perjalanan pulang dari Thandwe ke Mandalay dalam rangka perjalanan da'wah Jama'ah Tabligh. Disinyalir bahwa peristiwa ini merupakan bentuk balas dendam yang berlebihan dan sistematis terhadap kasus perkosaan yang melibatkan dua pria Muslim dan satu pria Buddhist terhadap seorang gadis Rakhine Buddhist, yang kebenarannya juga masih dipertanyakan.

Kekerasan di atas adalah bagian dari perencanaan dan serangan yang sistematis yang didesain untuk memusnahkan populasi Rohingya yang tersisa di Arakan dan menjadikan Arakan sebagai "*Muslim-free region.*'

Jam malam dan pembatasan gerak ini diberlakukan di Arakan Utara selama dua bulan, tapi hanya berlaku untuk warga Muslim. Tidak untuk warga Rakhine. Angkatan bersenjata hampir semua adalah Rakhine atau pro dengan Rakhine. Jam malam ini memberikan legitimasi untuk angkatan bersenjata dan ekstrimist Rakhine untuk membunuh, memperkosa, dan menangkap Muslim Rohingya secara massal.[55]

Target penangkapan adalah Ulama Rohingya dan pemuda-pemuda Rohingya yang terpelajar termasuk anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Mereka yang ditahan kemudian menjadi hilang ataupun tetap ditahan namun tanpa pengadilan sama sekali. Banyak juga yang kemudian dihukum mati.Mereka yang lari dan mengungsi tak punya tempat mengungsi lain selain pergi ke hutan dan terusir ke laut.

Warga Rohingya tak dapat pergi kemana-mana. Jangankan lagi pergi ke luar negeri, di dalam daerahnya sendiri susah bergerak. Mereka dilemahkan dan dilumpuhkan. Kondisi ini membuat sukar mengetahui jumlah korban jiwa yang pasti.Jumlah korban tewas dari warga Rohingya dan Rakhine diperkirakan sampai pertengahan Agustus berjumlah ratusan jiwa (sumber lain menyebutkan ribuan jiwa). Sekitar 100.000 orang Rohingya terusir dan mengungsi ke tempat-tempat yang tidak aman.Ratusan warga

[55]Lihat http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan-488287.html. diunduh pada tanggal 11-12-2012

jadi korban penembakan dan tak mendapat penanganan medis yang memadai.Ribuan warga Rohingya menderita kelaparan dan terjangkiti penyakit serius.Jenazah warga Rohingya yang tewas tak dikembalikan kepada keluarganya, ada laporan bahwa jenazah tersebut dikremasi, dikubur di pekuburan massal ataupun dibuang ke laut.Banyak warga Rohingya yang masih hilang dan diduga keras telah dibunuh.Inilah yang terjadi disana, sebagaimana diungkap oleh PIARA.[56]

c. Media yang Bias dan Diskriminatif

Kekerasan di Arakan terhadap orang Rohingya mulanya tidak diketahui oleh dunia. Hanya media-media lokal yang anti Muslim dan *xenophobic* yang dapat beroperasi dan menyebarkan informasi-informasi yang palsu (fabricated). Petugas kemanusiaan banyak yang dihalangi untuk ke Arakan bahkan ditangkap. Bahkan pemerintah Myanmar memberi peringatan kalau tidak disebut menghalangi PBB dan beberapa organisasi di bawahnya, seperti: UNHCR dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di Arakan.

Dengan minimnya media yang independen, informasi yang akurat dan berimbang, ekstrimis Rakhine amat leluasa untuk melakukan kejahatan genosida tanpa diketahui oleh publik dunia.

---

[56] Ibid.

d. Pengebirian Agama

Sejak awal Juni 2012, hampir semua masjid di ibukota Arakan yaitu Sittwe/Akyab dan sekolah-sekolah Islam telah dihancurkan atau dibakar.Sebagian masjid dan madrasah lain di Maungdaw dan Akyab yang ditutup dan Muslim tak boleh beribadah di dalamnya. Termasuk di bulan Ramadhan ini. Mereka yang mencoba untuk shalat akan ditangkap dan dihukum.

Slogan popular di Myanmar saat ini adalah :*"Arakan is for Rakhines. Arakan and Buddhism are synonymous. There is no Rohingya in Arakan. Drive them out to their country– Bangladesh".*

Pemimpin oposisi Burma, Aung San Suu Kyi tetap diam tak bereaksi terhadap kasus Rohingya.Sementara, sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa, termasuk Inggris terlalu percaya kepada pemerintah Myanmar untuk mengatasi krisis. Bahkan Inggris membuka kantor dagang di Naypydaw dan AS menghentikan penjatuhan sanksi untuk Myanmar.

Sangat memprihatinkan bahwa Bangladesh, negara tetangga terdekat dari Arakan, menutup pintu untuk pengungsi Rohingya dan mengirim mereka kembali ke laut. Perdana Menteri Bangladesh Sheik Hasina dalam wawancara dengan media sudah menyebutkan bahwa masalah Rohingya adalah masalah Myanmar bukan masalah Bangladesh. Negeri Bangladesh sudah *overcrowded*, tak bisa lagi menampung pengungsi Rohingya. Lebih jauh lagi, tiga lembaga kemanusiaan internasional, MSF, ACF dan Muslim Aid UK juga dilarang beroperasi di Bangladesh dengan alasan

akan membuat pengungsi Rohingya betah tinggal di Bangladesh.[57]

e. Solusi untuk Krisis Rohingya

Krisis Rohingya adalah karena konflik etnis dan penyiksaan atas dasar SARA.Mereka adalah korban dari kejahatan dan pembantaian yang disponsori oleh negara (*state-sponsored massacre*), dengan target utama adalah pembersihan etnis Rohingya.

Etnis Rohingya tidak memiliki 'teman' dan tak terlindungi di dalam maupun di luar negara Myanmar.Walaupun secara normatif, sejatinya, hukum internasional dan instrumen HAM internasional telah mengatur perlindungan terhadap kelompok minoritas. Myanmar juga telah memiliki pengaturan terhadap kejahatan semacam *genocide* dan *crime against humanity*.Namun, dalam kasus kejahatan terhadap etnis Rohingya ini hukum HAM internasional seperti tidak berfungsi dan tidak berdaya.

Dari sisi hukum manapun tak dapat dipungkiri bahwa Rohingya adalah bagian integral dari masyarakat Arakan, maka perlu ada desakan internasional untuk memaksa rezim Presiden Thein Sein untuk menghentikan segala bentuk penyiksaan Rohingya dan membatalkan UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis yang diakui di Myanmar.

---

[57]Lihat http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan-488287.html. diunduh pada tanggal 11-12-2012

Pemerintah Myanmar harus melahirkan hukum yang berdasarkan norma-norma hukum internasional dan hak asasi manusia.Rasialisme sistematis, intoleransi dan Islamophobia harus dihentikan. Tidak ada satupun kelompok etnik yang dapat diberi label "*ancaman terhadap keamanan nasional*" oleh pemerintah dan rakyat Myanmar. Diskriminasi berdasarkan perbedaan etnis dan intoleransi agama sama sekali tak dapat diterima.

f. Tuntutan Rohingya

Ada beberap tuntutan yang diinginkan Muslim Rohingya untuk menyelesaikan masalah ini, meski hal itu entah harus disampaikan kepada siapa karena PBB sampai saat ini belum bertindak ataupun masih dihalang-halangi oleh mereka. Tuntutan tersebut antara lain:

1) Mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian dan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Arakan.
2) Pemerintah Myanmar harus mengakui hak etnis Rohingya atas kewarganegaraan Myanmar.
3) Proses politik dan demokrasi Myanmar harus bersifat terbuka dan setara bagi semua etnis termasuk bagi etnis Rohingya.
4) Etnis Rohingya harus diperlakukan secara sama dan setara di Arakan dan Myanmar. Hak-hak dan kebebasan mereka harus dihargai dan dijamin oleh negara dan oleh etnis-etnis lain yang hidup di Myanmar.
5) Mendesak PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia untuk menekan

pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengembalikan kedamaian dan keamanan di bumi Arakan.

6) Meminta kepada komunitas internasional dan NGO untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban kekerasan di Arakan dan di lokasi-lokasi pengungsian.
7) Meminta kepada PBB dan masyarakat internasional untuk menyelenggarakan misi investigasi independen yang imparsial dan obyektif terhadap pembantaian massal terhadap etnis Rohigya di Arakan.
8) Mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasannya untuk menerima pelarian etnis Rohingya yang terancam keselamatan dan keamanannya di Arakan.
9) Meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif yang positif dan proaktif sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, sekaligus sebagai tuan rumah dari Sekretariat ASEAN, untuk penyelesaian krisis Rohingya secara permanen.
10) Mendesak PBB untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan perkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan.[58]

g. Respons Dunia Terhadap Muslim Rohingya

Ketidakadilan yang telah terjadi di Myanmar memberikan reaksi yang luar biasa dari masyarakat dunia,

[58]Lihat http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan-488287.html. diunduh pada tanggal 11-12-2012

baik Muslim maupun non-Muslim.Salah satunya adalah komunitas Muslim di Kanada. Masyarakat Islam Amerika Utara atau *The IslamicSociety of North America* (ISNA) Pada Ahad (15/7/2012) menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi terhadap anggota Masyarakat Muslim Rohingya. Sejak lama mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan di negara mereka, Myanmar. Untuk menikah saja mereka harus mendapatkan surat izin dari pemerintah, hanya diperbolehkan memiliki dua orang anak dan menjadi sasaran perbudakan modern melalui kerja paksa.

Mayoritas penduduk Rohingya dirampas tanah milik mereka, karena pemerintah menolak hak kewarganegaraan dan mereka juga dilarang melakukan perjalanan.ISNA menolak kebijakan kejam ini dan amat sedih dengan pembunuhan ke atas Muslim Rohingya baru-baru ini.Kami menentang sepenuhnya pemanfaatan perbedaan etnis dan agama untuk melakukan pembunuhan masyarakat minoritas, terlepas dari negara, agama, atau keadaan.

Pasca keganasan sektarian bulan lalu di Arakan, Myanmar, Human Rights Watch melaporkan tindakan militer dan undang-undang yang "bias" dan "kasar" terhadap penduduk Rohingya. Ketika pemerintah Myanmar menyatakan bahwa situasi sedang membaik, *The World Food Programme* melaporkan keganasan terbaru di Myanmar telah

membuat 90.000 orang kehilangan tempat.[59]

Amnesti Internasional menyebutkan orang-orang ini "kekurangan bahan pangan, air, tempat tinggal, dan perawatan medis" dan terhalang dari mendapatkan bantuan/akses kelompok lokal dan internasional. Hari Senin, ISNA turut serta dalam konferensi press bersama Amnesti Internasional dan organisasi lain untuk menarik perhatian terhadap krisis kemanusiaan ini. Kami bersama-sama meminta State Department untuk tidak melupakan nasib Muslim Rohingya dalam negosiasi diplomatik dengan Myanmar.Dalam kondisi kritisini, Amerika dan negara-negara lain haruslah menyeru perdamaian di Myanmar dan satu jalan baru untuk Rohingya.

Hari Senin, ISNA turut serta dalam konferensi press bersama Amnesti Internasional dan organisasi lain untuk menarik perhatian terhadap krisis kemanusiaan ini. Kami bersama-sama meminta State Department untuk tidak melupakan nasib Muslim Rohingya dalam negosiasi diplomatik dengan Myanmar.Dalam kondisi kritisini, Amerika dan negara-negara lain haruslah menyeru perdamaian di Myanmar dan satu jalan baru untuk Rohingya.[60]

---

[59]Lihat di situs http.http://mataharinews.com/ masyarakat muslim-kanada-kutuk-perlakuan-militer-myanmar .html, diunduh 11-12-2012

[60]Lihat di situs http.http://mataharinews.com/ masyarakat-muslim-kanada-kutuk-perlakuan-militer-myanmar .html, diunduh 11-12-2012

Sementara itu reaksi PBB berkali-kali menyerukan agar Pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan kepada Muslim Rohingya.Ahli Independen PBB untuk Hak Asasi Manusia meminta pemerintah Burma untuk melindungi Muslim Rohinya serta memperingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap minoritas. "Rohingya merupakan minoritas yang harus dilindungi sesuai standar Internasional", kata Ahli Independen untuk HAM, Rita Izsak, Rabu (31/11/2012)[61]

Namun amat disayangkan, seruan-seruan tersebut tidak disertai dengan penekanan sangsi yang tegas sehingga kekejaman tetap berlangsung tanpa adanya perbaikan dari Pemerintah Myanmar.

PENUTUP

Dari pembahasan panjang lebar di atas, bisa disimpulkan sebagai berikut:

a. Muslim Rohingya menetap di Arakan, yang sebelumnya bernama Rohang, sudah ada sejak abad ke-7 dan mereka tidak terbentuk dari satu suku saja. Mereka terbentuk dari percampuran berbagai suku yang berbeda, antara lain: Arab, Moor, Turki, Moghul, Asia Tengah, dan Bengal yang datang sebagai pedagang, prajurit, dan ulama. Mereka

[61]Lihat di situs http://www.aktual.co/internasional/183657pbb-rohingya-harus-dilindungi, diunduh 17-12-2012

datang melalui jalur darat dan laut. Pendatang tersebut banyak yang tinggal di Arakan dan bercampur dengan penduduk setempat. Pencampuran suku tersebut membentuk suku baru, yaitu suku Rohingya. Kekuasaan Islam di Arakan berjalan lebih kurang selama 350 tahun dengan 48 orang sultan yang memerintah silih berganti, sehingga dijajah oleh Burma pada tahun 1784 dan penjajahan ini berlanjut dengan diambil alih oleh British pada tahun 1822.

b. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi tindakan kekerasan terhadap suku Rohingya:

   1) Adanya gerakan anti Islam yang dilakukan oleh kaum mayoritas Buddha. Mereka menginginkan orang Islam masuk ke dalam agama Buddha. Sementara Pemerintah Burma yang mayoritas Buddha mendukung gerakan ini. Tahun 1942 adalah sejarah kelabu bagi umat Islam karena sebanyak kurang lebih 100.000 orang Islam dibantai oleh penganut Buddha Theravada di Arakan.

   2) Kecemburuan sosial yang diakibatkan kaum muslimin pada awal kemerdekaan banyak menduduki posisi strategis di pemerintahan dan menjadi pedagang yang sukses di negara Burma yang mayoritas Buddha.

   3) Ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer sejak menguasai Burma pada tahun 1962 yang berlanjut hingga kini.

4) Komunitas Muslim Rohingya menuntut agar Rakhine memiliki otonomi khusus supaya kehidupan mereka lebih baik, tetapi Pemerintah Junta Militer menolak dengan alasan yang tidak logis.

5) Pemerintah junta Burma meloloskan satu undang-undang yang dinamakan *"Burma Citizenship Law of 1982"*. Undang-undang ini bersifat sentimen keagamaan dan penuh diskriminasi. Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warganegara, malah diberi julukan 'pendatang' di tanah air mereka sendiri. Pemerintahan Junta Militer menganggap mereka tidak termasuk suku asli Burma sehingga dalam berbagai hal mereka senantiasa dipersulit kehidupannya.

c. Ada beberapa tindakan yang pernah dilakukan oleh Muslim Rohingya untuk mengatasi diskriminasi yang dilakukan Pemerintah maupun sentiment keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang Buddha, antara lain:

1) Bulan Agustus 1947, Muslim Rohingya memulai pemberontakan di bawah gerakan Mujahidin. Gerakan tersebut dibentuk pada deklarasi Dobboro Chaung yang dipimpin oleh Jafar Hussain atau lebih dikenal dengan nama Jafar Kawal (pada oktober 1950 Jafar kawal dibunuh. Kepemimpinan Mujahidin digantikan oleh penerusnya, Cassim).

2) Bulan april 1948, pecah lagi kerusuhan yang dilakukan oleh Muslim Rohingya di Arakan. Hal ini disebabkan pemerintah Burma melancarkan program

pengambilalihan tanah-tanah muslim untuk kaum Budha.

3) Pada tahun 1954, Cassim, pemimpin muda militan dan berpendidikan, menjadi pemimpin dari setiap gerakan yang dilakukan oleh Muslim Rohingya. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil memperoleh dukungan dalam jumlah yang besar. Namun, pada tanggal 13 September 1966 Cassim dibunuh oleh orang yang tak dikenal di daerah Cox's Bazar. Kematiannya menyebabkan gerakan muslim Rohingya mengalami kemunduran.

4) Antara 1960 sampai 1962, masyarakat Rohingya berjuang untuk memperbaiki status Arakan. Pada waktu pemilihan umum April 1960, U Nu berjanji jika partainya memenangkan pemilu, dia akan menjadikan Arakan sebagai wilayah Negara bagian yang otonom dan sejajar dengan Negara-negara bagian laiannya di bawah persatuan Burma. Setelah mencapai kemenangan, U Nu membentuk komisi yang bertugas mengumpukan segala permasalahan dan aspirasi muslim Arakan.

5) Pada tahun 1962, U Nu memenuhi janjinya setelah *regional autonomy communission 1948*, dan mengumumkan pembentukan Negara Mon dan Arakan. Akan tetapi, kelompok Mujahidin yang tidak puas meneruskan pemberontakan untuk memaksa dan meminta hak beragama Islam dan pemisahan yang legal dari daerah terdepan Mayu dari Burma.

6) Awal 1962, pemerintah mengajukan draft pembentukan Negara bagian Arakan tanpa memasukkan wilayah Mayu ke dalamnya. Namun, sesudah terjadi kudeta di bawah pimpinan Ne Win pada Maret 1962, rezim baru Burma tersebut membatalkan rencana pembentukan Negara bagian Arakan dan membubarkan gerakan Mujahidin.

7) Pada tanggal 26 Maret 1963, seorang mantan mahasiswa muslim dari Universitas Rangoon, Muhammad Jafar Habib, mereformasi gerakan Mujahidin dengan nama baru, *Rohingya Independence Force* (RIF) di Maungdaw, Arakan Utara. Mengikuti jejak pendahulunya, Mujahidin, RIF merupakan gerakan sebagai bentuk protes terhadap kudeta militer Ne Win.

8) Tahun 1969, RIF berubah nama menjadi *Rohingya Independence Army* (AIR) dipimpin oleh M. Jafar Habib. Gerakan ini dilakukan untuk tetap melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan pemerintah Junta Militer.

9) Pada tanggal 12 September 1973 berdiri *Rohingya Patriotic Front* (RPF) dengan pemimpinnya Jafar Habib di Sack Dala. Organisasi ini merupakan perubahan dari *Rohingya Independence Army* (AIR).

10) Pada Juni 1974, setelah kemerdekaan Bangladesh, banyak terjadi perubahan di RPF dan akhirnya RPF direkonstruksi, dipimpin oleh Jafar Habib sebagai

Presiden, Nurul Islam sebagai Wakil Presiden, dan Sekretaris Umum, Shabbir Hussain. Tujuan organisasi ini sama dengan organisasi sebelumnya, yaitu membentuk negara otonomi Islam.

11) Pada tahun 1978, pemerintah Burma melancarkan operasi militer untuk mengusir muslim Rohingya dari Arakan. Mereka dianggap sebagai komunitas ilegal di tanah kelahiran mereka sendiri. Operasi yang disebut dengan Operasi Naga Min (*Dragon King Operation*/ Operasi Raja Naga) ini memaksa 200.000 muslim Rohingya mengungsi ke Negara Bangladesh untuk melarikan diri dari penganiayaan.

12) Pada tahun 1979, setelah melalui perundingan dan bantuan Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi, Burma menerima kembali 186.965 muslim Rohingya untuk menetap di Arakan, di bawah perjanjian Decca. Akan tetapi, rezim yang berkuasa saat itu menyalahkan semua kekacauan kepada orang-orang Bengal.

13) Pada tahun 1982, tidak lama setelah operasi Naga Min berlangsung, penguasa militer Burma mengeluarkan sebuah dekrit tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Burma. Di dalam undang-undang tersebut, muslim Rohingya dicoret hak kewarganeraannya dan mereka menjadi tidak mempunyai Negara (*Stateless*). Ne Win memaklumatkan bahwa muslim Rohingya adalah rakyat tanpa Negara (*People wihout state*). Sejak itu,

Rohingya menjadi suku terasing di tempat kelahirannya sendiri.

Rezim militer Thein Sein yang kini berkuasa juga menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar pada Rohingya. Lebih buruk lagi, ia memasukkan Rohingya pada daftar hitam (*blacklisted*). Peringatan dari berbagai pihak, terutama dari PBB, tidak dihiraukan. Setiap ada pengamat ataupun badan PBB yang ingin mengetahui secara persis apa yang terjadi disana dijawab bahwa apa yang terjadi adalah sebaliknya. Peristiwa yang baru terjadi merupakan kerusuhan rasial antar suku dan tidak berkaitan dengan pemerintah, demikian yang seringkali diungkapkan Pemerintah Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Myrna, *Perjuangan Anti Fascist People's Freedom League dalam Mencapai Kemerdekaan Burma 1944-1948,* (Depok, Skripsi Program Ilmu Sejarah UI, 2008)

Astor, Gerald, *The Jungle War: Mavericks, Marauders, and Madmen in The China-Burma-India Theater of World War II,* (New Jersey: John Wiley & Son, 2004)

Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988,* (Depok: Skripsi Fak. Ilmu Pengetahuan dan Budaya UI, 2006)

Bodi, Bhikkhu, *Tipitaka Tematik: Sabda Buddha dalam Kitab Suci Pali,* (Jakarta, Ehipassiko Foundation, 2010), cet. II

Buruma, Ian *God's Dust a Modern Asian Journey,* (London: Jonathan Cape Ltd., 1991)

Cady, Jhon F, *A Histry of Modern Burma,* (New York, Cornell University Press, 1960)

Cady, John F. *Thailand, Burma, Laos, & Cambodia,* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1966)

Christie, Clive J. A, *A Modern of History Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism.* (London: Tauros Academic Studies an imprint of I.B Tauris Publisher, 1996)

Faniati,Tamia Dian Ayu, *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Etnis yang tidak memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar* (Depok: Skripsi Fak. Hukum Program Hukum UI, 2012)

Smith, Martin, *Burma: Insurgency and The Politics of Etnicity*, (New York: st. Martin's Press, 1991)

Harun, Lukman, *Potret Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985)

Keyes, Charles F. *Ethnic Adaptation and Identity: The Karen on The Thai Frontier with Burma,* (Philadelphia: Institute for The Study of Human Issues, 1979)

Nordlinger, Eric A., *Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan*, terj. Drs. Sahat Simamora (Jakarta, 1990)

Panontongan, Inggrid, *Dominasi Politik Militer di Burma-Myanmar 1948-2002,* (Depok, Skripsi FISIP, 2002)

Pederson, Morten B. et.al, Burma-Myanmar: Strong Regime, Weak State?, (London: C. Hurst & Co. Ltd, 2000)

Pluvier, J.M. *South East Asia from Colonialism to Independence*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974)

Sihbudi, Riza,ed., *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara : Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya,*(Jakarta : Puslitbang Politik dan Kewilayahan, LIPI, 2000)

Santoso, Thomas, *Teori-teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Soekanto,Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1198)

Than, Mya dan Joseph L.H. Tan, *Transisi Ekonomi 1990-an: Tantangan dan Dilema Myanmar,* (Jakarta: LP3ES, 1993)

Theodorson, George A. *Minority Peoples in The Union of Burma*, Journal of Southeast Asian History,Vol.5, No.1(Mar.,1964)

Website

Nurul Islam, *"Facts About The Rohingya Muslims Of Arakan"*, terdapat di situs http:// www.Rohingya.com/rahi/summary.htm

Mohammad Ashraf Alam, *"A Short Historical Background"*, terdapat di situs http: //www.Rohingyatimes.i-p.com/history/history maa.html, diakses 16-12-2012

http://mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html, diakses pada tanggal 11-12-2012

http://micankom.blogspot.com/2011/01/sejarah-islam-masuk-ke-myanmar.html diakses pada 11-12-2012

http://micankom.blogspot.com/2011/01/sejarah-islam-masuk-ke-myanmar.html diakses pada 11-12-2012

http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan-488287.html. diunduh pada tanggal 11-12-2012

http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan-488287.html. diunduh pada tanggal 11-12-2012

http://mataharinews.com/masyarakat-muslim-kanada-kutuk-perlakuan-militer-myanmar .html, diunduh 11-12-2012

http://pembela-aswaja.blogspot.com/2012/08/mengenal-sejarah-etnis-rohingya.html diakses 11-12-2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Myanmar, diunduh 11-12-2012

http://micankom.blogspot.com/2011/01/sejarah-islam-masuk-ke-myanmar.html, diunduh 11-12-2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Myanmar, diunduh pada tanggal 11-12-2012

http://www.library.upnvj.ac.id diakses pada tanggal 11 Desember 2012

http://www.library.upnvj.ac.id diakses pada tanggal 11 Desember 2012

http://www.library.upnvj.ac.id diakses pada tanggal 11 Desember 2012

SEJARAH ISLAM DI PATTANI THAILAND

Oleh: Syaukani

Pendahuluan

Thailand merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara historis, negara ini pernah popular dikenal dengan nama Siam. Selain itu, Thailand juga dikenal dengan nama Muangthai. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Dilihat dari sudut agama, penduduk Thailand mayoritas menganut agama Budha. Kehidupan Budha bahkan telah mewarnai hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat Thailand, baik dalam aspek pemerintahan (kerajaan), sosial, hukum, sistem dan kurikulum pendidikan, dan lain-lain.

Dilihat dari sisi agama, penganut agama Budha sebagai kelompok terbesar masyarakat Thailand berjumlah lebih kurang 95,3 persen. Sementara itu, kelompok terbesar kedua adalah penganut Islam yang jumlahnya diperkirakan 3,8 persen, dan kelompok ketiga adalah penganut agama Kristen yang jumlahnya sekitar 0, 5 persen. Menurut

Dulyakasem, proporsi populasi Thailand ini cenderung konstan dari waktu ke waktu.[1]

Meskipun hampir di setiap wilayah Thailand terdapat penganut agama Islam, namun mayoritas mereka terkonsentrasi di wilayah bagian Selatan Thailand, seperti Patani, Yala, dan Narathiwat. Meskipun minoritas, namun di provinsi bagian selatan Thailand, Muslim adalah populasi mayoritas (kurang lebih 80%) atau sekitar 5-7 juta jiwa.[2]

Di wilayah Thailand bagian selatan *(Southern Thailand)* terdapat empat belas provinsi, yaitu Chumporn, Surathani, Ranong, Phangga, Krabi, Phathalung, Phuket, Nakorn Sri Thammarat, Trang, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwas, dan Satun. Di wilayah tersebut, umumnya umat Islam terkonsentrasi di provinsi Patani, Yala, Narathiwat, Songkhla, dan Satun. Padamasa lalu, sebelum integrasi dengan Thailand, di wilayah bagian selatan Thailand ini pernah eksis sebuah kerajaan Islam yang masyhur yang dikenal dengan nama Kerajaan Islam Patani Darussalam. Disinilah awal kedatangan Islam yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah lain di Thailand. Sampai saat ini, meskipun Kerajaan Islam Patani Darussalam telah tiada, namun keberadaannya di masa lalu tetap menjadi rekaman sejarah kebesaran umat islam di Thailand.

---

[1] Uthai Dulyakasem, 'Muslim-malay separatism in Southern Thailand: Factors Underlying the Political Report' dalam Lim Joo Jock dan Vani S, *Armed Separatism in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 1984), h. 217.

[2] Lihat Imtiyaz Yusuf, 'Aspects of Islam in Thailand Today' dalam *Regional Issues ISIM Newsletter* No. 3/99, h. 19.

PERKEMBANGAN SEJARAH ISLAM DI THAILAND

1. *Awal Masuknya Islam di Thailand*

Menurut teori Arab Islam telah datang ke kawasan Asia Tenggara sejak abad pertama hijriah atau ketujuh Masehi langsung dari Arab.[3] Namun tidak ada penjelasan lebih rinci daerah mana yang lebih dahulu didatangi oleh Islam yang

[3] Menurut Azra, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crawfurd (1820), Keyzer (1859), Niemann (1861) de Hollander (1861), dan Veth (1878). Belakangan, teori ini juga dikemukakan oleh Hamka dalam Sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1962. Lihat Azyumardi Azra, 'Pendahuluan Islam di Asia Tenggara: Pengantar pemikiran' dalam Azyumardi Azra (Peny.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia1989), h. xi.

berasal langsung dari Arab tersebut. Namun, tersedia catatan-catatan historis yang mengemukakan bahwa Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malakka, Aceh, dan Semenanjung Malaya, termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam (Thailand).

Dikalangan para ahli belum ditemukan kesepakatan tentang kapan awal mula masuknya Islam di Thailand. Namun, sebagaimana dinyatakan Chapakia, para ahli sepakat bahwa wilayah Thailand yang pertama sekali dimasuki Islam adalah Patani.[4] Dalam sejarah Islam di Thailand, negeri Patani pernah eksis sebagai sebuah kerajaan Islam yang masyhur yang diberi nama *Patani Darussalam.* Pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19, Patani benar-benar menjadi pusat dan gedung agama Islam terbesar yang berperanan di Asia Tenggara, bahkan telah melahirkan ulama-ulama besar yang perannya masih dirasakan sampai sekarang.[5]

Beberapa sumber yang dikutip Chapakia menyebutkan bahwa sejak abad ke-10 hubungan perdagangan antara Patani dengan negara-negara Arab, Parsi, dan Cina telah terjalin erat. Sutivong Phongphaibul sebagaimana dikutip Chapakia menyatakan bahwa pada abad ke-10, di kawasan pantai Patani telah ditemukan gelas Arab dan barang-barang serpihan lain yang dibawa dari Arab, Parsi, dan Cina. Bahkan Piriya Krairek menyatakan bahwa pada abad ke-10 di kawasan Thailand

---

[4] Lihat Ahmad Omar Chapakia, *Politik Thai dan Masyarakat islam di Selatan Thailand* (Kuala Lumpur: Pustaka Darussalam Sdn. Bhd. Dan RMi Multimedia Publishing, 2000), h. 6.

[5] *Ibid.,* h. 34

bagian Selatan telah eksis pelabuhan maju dan menjadi jalur perdagangan yang dilalui para pedagang Arab dan Parsi.[6] Meski demikian, belum ditemukan sumber-sumber tertulis yang bisa dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa Islam telah memasuki wilayah Patani pada abad ke-10. Namun, berdasarkan tulisan Sutivong Phongphaibul dan Piriya Krairek, Chapakia hanya berani menyimpulkan bahwa pada abad ke-10 telah terjadi penyebaran agama Islam di kalangan individu-individu tertentu dari kalangan masyarakat Patani.

Shukri sebagaimana dikutip al-Fatani menulis bahwa dalam buku *Hikayat Patani* disebutkan penggagas berdirinya negeri Patani adalah Phya Tu Nakpa putera Phya Tu Krub Mahajana, yang memerintah negeri *Mahligai*.[7] Karena kota ini letaknya jauh dari pantai, maka para pedagang mengalami kesulitan dan enggan untuk singgah berdagang ke sana. Akibatnya perniagaan di kota *Mahligai* mengalami kesulitan dan kemerosotan. Keadaan ini pada gilirannya menyebabkan rakyat keluar kota *Mahligai* untuk mencari penghidupan, sehingga populasi kota *Mahligai* semakin hari semakin berkurang.Sementara itu, di kawasan pinggiran pantai, orang-orang Melayu yang berasal dari Sumatera membangun kampung-kampung yang semakin ramai dan berkembang pesat.[8]

---

[6] *Ibid.*, h. 6-7.

[7] Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani* (Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 10.

[8] *Ibid.*

Menurut al-Fatani, pada suatu hari Phyai Tu Nakpa pergi berburu ke hutan dan akhirnya sampai ke sebuah pantai. Disana ia bertemu dengan dua orangtua yang mendiami sebuah pondok. Salah satu dari orangtua tersebut bernama Pak Tani. Setelah memperhatikan lingkungan sekitar, Phyai Tu Nakpa kemudian berpikir bahwa wilayah pantai tersebut sangat sesuai untuk dijadikan negeri menggantikan kota *Mahligai* yang letaknya jauh di darat. Kemudian Phyai Tu Nakpa memerintahkan agar negerinya – kota *Mahligai* – dipindahkan ke wilayah tersebut. Sesuai dengan nama pemilik pondok yang ia temui, maka negeri itu kemudian diberi nama Pak Tani, yang kemudian mengalami perubahan penyebutan sehingga menjadi Patani.[9] Demikianlah awal mula pembangunan dan penyebutan Patani sehingga akhirnya menjadi pusat pemerintahan yang kelak diberi nama negeri Patani Darussalam.

Sebagai kota yang terletak di pinggiran pantai, maka Patani menjadi tempat yang sering dikunjungi para pedagang. Sebagaimana dinyatakan di atas, terdapat sumber-sumber yang menyatakan bahwa pada abad ke-10, telah banyak para saudagar Arab, Parsi, dan Cina yang singgah untuk berdagang di Patani. Bila itu benar, maka sejak saat itu sebenarnya telah terjadi kontak atau interaksi sosial dan ekonomi antara para pedagang Arab dan Parsi dengan penduduk Patani. Dari kontak atau interaksi inilah kemudian para penduduk Patani mengenal Islam. Meskipun belum

---

[9] *Ibid.*

secara komunal, namun dipercayai bahwa Islam kemudan diterima secara orang perorang oleh penduduk Patani sebagai agama atau keyakinan yang mereka anut. Pemikiran ini setidaknya didasarkan pada pendapat de Graft yang menyatakan bahwa di Asia Tenggara, salah satu metode penyiaran Islam sehingga diterima penduduk lokal adalah melalui dakwah yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam jalur perdagangan yang damai.[10] Bersandar pada pendapat ini, maka dapat dikemukakan bahwa disamping ulama, para pedagang Muslim telah memainkan peran langsung dalam menyebarkan Islam kepada penduduk Patani.

Menurut Teeuw dan Wyat, sebagaimana dikutip Chapakia, Pya Tu Nakpa akhirnya memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi *Sultan Ismail Shah Zillullah fil a`lam* dan negerinya disebut sebagai Patani Darussalam. Dengan Islamnya Pya Tu Nakpa, maka para menteri hulubalang dan rakyatnya pun turut memeluk Islam.[11] Menurut Bangnara, negeri Patani menerima Islam di sekitar tahun 1457.[12] Sejak saat itulah eksisnya Kerajaan Melayu Islam yang diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sri Wangsa dan dinasti Kelantan, sampai berakhir pada tahun 1902.[13]

---

[10] Lihat H.J. de Graft 'Islam di Asia Tenggara sampai Abad Ke-18 dalam Azyumardi Azra (peny.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), h. 2.

[11] Ahmad Omar Chapakia, *Politik…*, h. 18.

[12] A. Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang* (Patani: Penyelidikan Angkatan al-Patani, 1977), h. 7.

[13] Ahmad Omar Chapakia, *Politik…*, h. 18-19.

Menurut catatan sejarah, Kerajaan Patani meliputi kawasan geografi yang terdiri dari wilayah-wilayah yang termasuk Pattani, Yala, dan Narathiwat yang berada di bagian Selatan Thailand.[14] Namun, seiring dengan perkembangan dan kemajuannya, wilayah Patani kemudian meluas sampai meliputi Senggora. Pathalang. Legeh, Trengganu, dan Kelantan.

Setelah memeluk Islam, raja Patani melantik Syeikh Said menjadi guru agama Islam di dalam istananya dan diberi gelar 'Datuk Sri Raja Faqeh'. Setelah raja dan para pembesar kerajaan memeluk Islam, maka secara perlahan pengaruh Hindu-Budha mulai berkurang, lemah, dan akhirnya hilang dari Patani.[15] Sejarah memperlihatkan bahwa di Patani Islam terlebih dahulu dianut raja-raja sebelum rakyat memeluknya. Karenanya agama Islam segera mendapat status atau legitimasi politik.[16]

Pada masa-masa awal di Patani, dapat dikemukakan bahwa Syeikh Said memainkan peran sebagai tokoh ulama sentral dalam mendidikkan ajaran Islam kepada raja Patani, para menteri dan hulubalang kerajaan. Posisinya sebagai

---

[14] Abduloh Uma dan Suhaila Binti Abdullah 'Dakwah Islamiyah di Selatan Thailand: Kajian Kes Terhadap Metode Pergerakan Dakwah Syeikh Dr. Islamil Luthfi Al-Patani' dalam *Prosiding Seminar Kebangsaan Dakwah Saudara Kita: Isu dan Cabaran Semasa* (ttp: Bahagian Pengajian Islam, Pusat pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia, 2010), h. 127.

[15] Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar…*, h. 14.

[16] Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 37.

Datuk Sri Raja Faqeh menempatkan Syeik Said sebagai ulama besar di kerajaan Patani dalam mendakwahkan Islam.

Puncak kekuasaan dan kejayaan Patani terjadi pada abad ke-17. Pada masa itu, puncak kekuasaan Patani tidak hanya dalam aspek kenegaraan, sebab pada masa ini telah diletakkan dasar-dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan hubungan yang lebih intensif antara negara-negara Arab dengan Asia Tenggara, yang ketika itu pusat perdagangannya adalah Patani.[17]

Shukri dalam *Sejarah Kerajaan Melayu Patani* menyebutkan bahwa sejak masa awal hingga jatuhnya ke tangan Siam, kerajaan Islam Patani diperintah oleh sepuluh orang Raja, yaitu Raja Sri Wangsa, Raja Intira atau Sultan Muhammad Syah, Sultah Muzafar Syah, Sultan Masur Syah, Raja bambang, Sultan bahdur Syah, Nang Cayang 1 atau Raja Hijau, Nan Cayang 2 atau Raja Biru, Nan Cayang 3 atau Raja Ungu, dan Nan Cayang 4 atau Raja Kuning.[18]

Sejak raja pertama sampai kesepuluh, agama Islam terus berkembang luas dan menjadi perekat atau identitas masyarakat Thailand bagian selatan. Dalam konteks ini, Chapakia bahkan menegaskan bahwa Patani menjadi sebahagian dari Dunia Melayu yang berasaskan Islam.[19] Selama periode tersebut institusi-institusi pendidikan Islam

---

[17] Surin Pitsuwan, *Islam…*, h. 37-38.

[18] Ibrahim Shukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani* (Kota Bharu: Matbaah Majlis Ugama Islam Kelantan, tt).

[19] Chapakia, *Politik Thai...*, h. 8.

telah memainkan peran penting bagi proses islamisasi di Thailand. Bila pada masa-masa awal masuknya Islam pasar dan istana berfungsi sebagai institusi bagi proses islamisasi, maka pada masa-masa berikutnya, *pondok* dan masjid telah memainkan peran penting bagi proses islamisasi dan penyebaran agama Islam di Thailand bagian selatan.

2. *Islam di Patani pada Masa Penaklukan dan Integrasi dengan Thailand (1902-1932)*

Periode 1902-1932 merupakan satu babak yang harus mendapat perhatian khusus dalam perjalanan sejarah Muslim Patani. Tahun 1902 merupakan masalatan dimana kekuasaan raja-raja Patani dicopot oleh kerajaan Siam. Pada masa itu, seluruh wilayah bahagian selatan diintegrasikan ke dalam system administrasi dan politik kerajaan Siam.

Sebagaimana dicatat dalam sejarah, Kerajaan Islam Patani pernah menjadi salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Malek sebagaimana dikutip Daulay mengatakan bahwa kerajaan Melayu Islam Patani mengalami kemajuan pada masa raja-raja perempuan berkuasa pada tahun 1584-1624. Pada saat itu, Patani muncul sebagai pusat perniagaan terpenting di Asia Tenggara dan juga pusat pertumbuhan kebudayaan Melayu.[20] Disebutkan pada masa itu, kemantapan dan kemajuan ekonomi serta kekuatan Politik Patani yang mencapai Kelantan dan Johor menjadikan Patani disegani oleh negara-negara tetangga.

---

[20] Lihat dalam Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta2009), h. 132.

Kejayaan Patani mulai mengalami kemunduran sejak masa perintahan Raja Kuning (1635-1686). Menurut al-Fatani, peristiwa itu dimulai sejak paruh kedua abad ke-17. Pada abad ke-18 dan seterusnya, Patani telah menjadi "orang sakit di Semenanjung Melayu". Kekacauan politik mulai muncul, satu persatu wilayah Patani mulai melepaskan diri dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1679 Senggora dan Pathalang memisahkan diri, kemudian pada abad ke-18, Trengganu dan Kelantan juga memisahkan diri. Hal yang sama kemudian dilakukan pula oleh Legeh di tahun 1745.[21] Dalam masa-masa itu Patani pun tidak lagi dikungjungi para saudagar untuk berdagang disana.

Dalam kondisi yang demikian, pada tahun 1785 raja Siam (nama historis Thailand) yang bernama Rama I mengutus adiknya Raja Muda Putra Sarasi untuk menyerang Patani. Dalam keadaan yang serba kekurangan, kendatipun bertahan dengan sekuat tenaga, akhirnya pada bulan Nopember 1786, Patani berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Siam. Sejak saat itu, peperangan antara kerajaan Islam Patani dengan kerajaan Siam terus berlanjut. Dalam peperangan terbesar tahun 1786, meskipun dibantu Kedah, Kelantan, dan Trengganu, kerajaan Siam akhirnya berhasil menaklukkan Patani dan semakin mengokohkan kekuasaannya disana. Meskipun pada awalnya kerajaan Siam tetap memberikan kesempatan kepada raja-raja Melayu Patani untuk memerintah negeri, namun pada tahun 1890-an, Siam pun

[21] Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar…*, h. 43.

akhirnya menghapuskan kekuasaan raja-raja Patani. Pada tahun 1826, penaklukan Siam terhadap Patani mendapat pengakuan dari Inggris Raya. Dalam usahanya untuk mengokohkan kedudukannya di Patani, pada tahun 1902 Kerajaan Siam melaksanakan Undang-Undang Thesaphiban. Dengan Undang-Undang itu, maka sistem pemerintahan kesultanan Melayu resmi dihapuskan. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bangkok pada tahun 1909, Patani telah diakui oleh Inggris sebagai bagian dari jajahan Siam walaupun tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli Melayu Patani.[22] Sejak saat itu masyarakat Patani resmi hidup di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Meskipun melawan dan melakukan sejumlah pemberontakan, bahkan dengan meminta bantuan raja-raja Melayu, Singapura dan Inggris, namun Muslim Patani tetap saja tidak berhasil membebaskan diri dan wilayah mereka dari kekuasaan kerajaan Siam.

Raja Patani terakhir bernama Tengku Abdul Kadir. Beliau aktif menentang penghapusan kekuasaan raja-raja Patani oleh kerajaan Siam. Karenanya, Abdul Kadir bangkit dan memimpin pemberontakan melawan kerajaan Siam. Beliau bahkan pernah meminta bantuan kepada Gubernur negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu serta kerajaan Inggris. Namun usahanya tetap mengalami kegagalan dan pada tahun 1902 beliau ditangkap, diturunkan dari tahtanya, dan kemudian dibuang ke Pitsanulok.

---

[22] Lihat 'Provinsi Pattani' online dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani

Meskipun pada tahun 1905 beliau dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke Patani, namun karena tidak betah lagi bermukim di Patani, beliau akhirnya pindah ke Kelantan dan wafat di kota Bharu pada tanggal 20 Mei 1933.[23] Hal yang sama dialami oleh raja- raja Islam lainnya yang berada di bagian selatan Thailand. Semua kekuasaan dan kedudukan mereka sebagai raja dicopot atau dihapuskan oleh kerajaan Siam.

Sejak tahun 1902-1932 setidaknya telah terjadi lima kali pemberontakan Muslim Patani terhadap kekuasaan kerjaan Siam. Pada tahun 1903, Abdul kadir memimpin pemberontakan besar terhadap kerajaan Siam. Kemudian pada tahun 1910, seorang ulama bernama To' Tae memimpin pemberontakan dan membakar kantor-kantor pemerintahan yang dibangun oleh kerajaan Siam. Seterusnya pada tahun 1911, Haji Bula memimpin pemberontakan lainnya yang dengan sangat susah payah dipadamkan oleh pemerintah kerajaan Siam. Pemberontakan yang sama yang dipimpin oleh To' Janggut juga terjadi di tahun 1915. Sekali lagi, pada tahun 1922, dengan dukunan dan simpati dari unsur-unsur pro Melayu di Kesultanan-kesultanan Malaya Utara, Abdul Kadir berhasil untuk sementara menghentikan kampanye Thailand untuk "men-Thai-kan" provinsi-propinsi Melayu di bagian selatan negeri itu.[24]

---

[23] Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar…*, h.72-73.
[24] Surin Pitsuwan, *Islam…*, h. 53.

Pada tahun 1923 pemerintah Thailand terpaksa meninjau kembali kebijakan yang mereka terapkan terhadap Patani, terutama dalam bidang pendidikan wajib, penetrasi birokrasi, dan campur tangan dalam urusan ekonomi dan social di Patani. Raja Thailand berupaya memberikan sejumlah konsesi kepada golongan elit keagamaan dan politik Patani dan memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk memgikuti garis-garis kebijakan baru, di antaranya:

1. Praktek-praktek atau peraturan-peraturan yang bagaimanapun – yang tampaknya bertentangan dengan Islam – harus dihentikan dengan segera. Setiap garis pedoman yang baru tidak boleh melanggar agama Islam. Peraturan-peraturan baru itu seyogyanya mendukung Islam.
2. Tingkat pajak yang dipungut dari orang-orang Melayu Muslim di Patani tidak boleh lebih tinggi dari pajak yang dipungut di negeri-negeri Malaya (yang berada di bawah kekuasaan Inggeris).
3. Pejabat-pejabat pemerintah yang akan ditugaskan di Patani harus jujur, sopan, dan tegas. Jangan ditugaskan kesana pejabat yang sedang mendapat hukuman karena telah melakukan kesalahan di daerah-daerah lain.[25]

Mengomentari poin-poin di atas, Pitsuwan menyatakan bahwa untuk pertama kalinya pemerintah Bangkok terpaksa memberikan kelonggaran-kelonggaran

[25] Surin Pitsuwan, *Islam…*, h. 53.

kepada Patani dan daerah-daerah sekitarnya, dalam upaya mengintegrasikannya ke dalam sistem administratif Thai. Dengan demikian Patani memperoleh otonomi pada tingkat tertentu dan karakteristik-karakteristiknya yang khas diakui secara resmi oleh pemerintah Thailand.[26] Sayangnya, dasar negara Thai dan struktur birokrasinya yang didominasi orang-orang Thai-Budhis yang dijiwai oleh semangat "sovinisme etnik Thai" tidak bisa diharapkan mengimplementasikan kebijakan di atas.[27] Baru ketika Thailand mengalami transformasi konstitusi di tahun 1932, dimana monarki absolut digantikan dengan pemerintahan representatif, mulai terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat Muslim Patani. Selama diintegrasikan ke dalam kerajaan Thailand, Muslim Patani baru mulai merasa diikutsertakan dalam partisipasi politik Thailand, seperti memilih anggotanya sendiri untuk duduk di parlemen. Partisipasi semacam itu telah lama dirasakan hilang sama sekali sejak kerajaan Thailand menghapuskan kekuasaan raja-raja Patani Ddarussalam. Disamping itu, sejak reformasi konstitusi tersebut, di kalangan elit pemerintah Thailand pun tampkanya mulai muncul kesadaran bahwa penindasan identitas etnik dan kebudayaan Muslim Patani hanya akan memancing reaksi-reaksi kekerasan dari masyarakat Muslim.

Sepanjang periode 1902-1932, energi masyarakat Muslim Patani umumnya 'dihabiskan' untuk berjuang melawan pemerintah kerajaan Thailand guna

---

[26] Surin Pitsuwan, *Islam…*, h. 54.

[27] Elaborasi lebih lanjut lihat Surin Pitsuwan, *Islam…*, h. 54-55.

mempertahankan identitas keagamaan, etnik, dan kultur mereka. Perubahan sistem pemerintahan Thailand dari monarki absolut ke pemerintahan dengan system perwakilan representatif telah memberikan harapan baru bagi sebahagian Muslim untuk hidup sesuai dengan identitas dan karakteristik mereka. Namun bagi sebahagian yang lain, perjuangan bagi Patani merdeka yang terlepas dari pemerintahan Thailand tetap menjadi cita dan harapan yang akan terus diperjuangkan. Inilah antara lain yang kelak memicu terjadinya serangkaian kegiatan pemberontakan dan kekacauan di Thailand bagian selatan di kemudian hari.

3. *Islam di Patani pada Masa dan Integrasi dengan Thailand (1932-sekarang)*

Sebagaimana dipaparkan di atas, kerajaan Islam Patani dianeksasi oleh Thailand pada tahun 1902.[28] Sejak saat itu, Muslim Patani hidup di bawah taklukan dan kekuasaan Thailand. Upaya Thailand menaklukan Patani sebenarnya sudah berlangsung lama dan sudah dimulai sejak tahun 1603. Lewat beberapa kali peperangan dengan kerajaan Thailand, akhirnya kerajaan Islam Patani Darussalam 'runtuh'. Pada tahun 1909, melalui 'Perjanjian Sempadan" yang disetujui oleh Inggeris Raya ditetapkan bahwa seluruh wilayah Patani menjadi bagian dari negeri Siam (Thailand).[29] Ketika melukiskan kejatuhan Patani tersebut, al-Fatani menulis:

---

[28] Neil J. Melvin, (2007), h. iii.
[29] *Ibid*., h. 132-133.

Malangnya nasib Patani. Ternyata awal abad ke-20 yang sering disebut oleh sejarawan sebagai era kebangkitan bangsa-bangsa menentang penjajahan, menjadi sebaliknya bagi Patani, justru pada saat inilah Patani mulai hilang identitinya dan 'terserap' masuk menjadi sebahagian daripada wilayah kerajaan Siam sehingga sekarang.

Senja telah turun di Patani. Apakah masih ada fajar hari esok untuknya?[30]

Ketika Thailand diserang dan takluk kepada Burma, umat Islam di Patani merasakan kebebasan dan kemerdekaannya. Namun ketika Thailand berhasil melepaskan diri dari Burma, justru sebahagian besar umat Islam merasakan hal yang sebaliknya. Menyadari hal itu, maka pemerintah Thailand segera menggulirkan berbagai kebijakan bagi integrasi sepenuhnya Muslim Patani ke dalam Thailand. Berbagai program pembangunan dari mulai sektor pendidikan hingga pembangunan ekonomi, dan penciptaan stabilitas keamanan secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah Thailand.[31]

Proses mengintegrasikan Muslim Patani ke dalam masyarakat Thailand tidaklah mudah. Disamping Muslim Patani tetap merasa diri mereka sebagai berbeda dengan masyarakat Thailand lainnya, persoalan bahasa juga menjadi

---

[30] AhmadFathy al-Fatani, *Pengantar…*, h. 73.

[31] Elaborasi lebih lanjut mengenai hal ini lihat Pawee Thim Khom 'Muslim Society, Higher Education And Development: The Case of Thailand' dalam Sharom Ahmat dan Sharon Shiddique, *Muslim Society, Higher Education And Development in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 1987).

masalah besar bagi pemerintah Thailand dalam mengkomunikasikan dan mengimplementasikan program-program pembangunan pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Dalam studinya di tahun 1960-an, Mongkol menemukan bahwa 60 % anak-anak Muslim Patani tidak mampu berbahasa Thai. Selain itu, orangtua Muslim juga tenyata lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke *pondok* atau belajar ke Malaysia dan negeri-negeri Arab. Secara umum, orang-orang Muslim merasa bahwa diri mereka memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat Thai.[32]

Bila pada masa lalu institusi *pondok* menjadi sentra institusi bagi proses islamisasi di Thailand, maka pasca integrasi, selain *pondok* hadir pula institusi madrasah atau sekolah, bahkan perguruan tinggi atau universitas. Menurut Numan Hayimasae, semenjak dekade 1930-an sistem madrasah di Patani mulai dikembangkan atas inisiatif seorang ulama pelopor Patani, Haji Sulong Abdul Kadir. Madrasah tersebut diberi nama *Ma'had al-Ma'arif al-Wataniyah* dan ia menjadi titik tolak penting bagi perubahan arus pendidikan di Patani pada masa seterusnya. Sebelumnya, institutsi *pondok* telah lama menjadi tapak bagi pengajian ilmu-ilmu Islam, kini satu sistem baru, sistem sekolah atau *madrasah* menjadi pilihan kedua terpenting di Patani.[33] Pasca integrasi dengan Thailand,

---

[32] Lihat Pawee Thim Khom dalam Sharom Ahmat dan Sharon Shiddique, *Muslim Society…*,h. 178.

[33] Numan Hayimasae 'Madrasah di *Haramayn* dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Madrasah di Patani Abad ke-20' dalam Muhammad Azizan Sabjan dan Noor Shakirah Mat Akhir, *Wacana Ilmiah Muslim Se-ASEAN* (USM: Pusat Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, t.t), h. 265.

sejumlah madrasah telah dibangun di berbagai wilayah Thailand Selatan untuk memfasilitasi anak-anak Muslim dalam memperoleh pendidikan. Tidak hanya madrasah, pasca integrasi, bebeapa *pondok* juga dikembangkan dan memperoleh bantuan dari pemerintah untuk menjamin keberlangsungannya.

Bagi keberlanjutan pendidikan anak-anak Muslim Thai, maka pendidikan tinggi mulai dibangun pada tahun 1976 di Patani. Menurut Talek dan Hayimasae, inisitif pendirian perguruan tinggi tersebut dimulai oleh sekumpulan pelajar lulusan Indonesia dan Timur Tengah. Tokoh kunci inisitor tersebut adalah Ustaz Ahmad Shihabuddin, seorang alumni pendidikan tinggi dari Indonesia. Pada tahap awal diselenggarakan pendidikan tingkat Diploma bidang pendidikan (tarbiyah). Nama perguruan tinggi tersebut adalah Kulliyah dakwah Islamiyah.[34] Pada tahun 1978, upaya Muslim Patani untuk mendirikan institusi perguruan tinggi terus dilakukan. Hasilnya, pada tahun 1998 didirikan sebuah Kolej Islam dengan izin resmi dari pemerintah Thailand. Upaya-upaya untuk memajukan perguruan tinggi Islam di Patani terus dilakukan para akdemisi Muslim Patani lulusan Timur Tengah, di antaranya Dr. Islmail Alee, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Chapakia, Ahmat Worawit Baru, Ustaz Abdul Rahman Che'arong, Yahaya Khodir, Syed Abdullah Alyufri,

---

[34] Yusof Talek dan Numan Hayimasae 'Pengajian Tinggi Islam di Selatan Thailand: Pengalaman Silam dan Masa Depan' dalam Muhammad Azizan Sabjan dan Noor Shakirah Mat Akhir, *Wacana Ilmiah Muslim Se-ASEAN* (USM: Pusat Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, t.t), h. 122.

Che'useng Maliloh, Muhamamd Haji Said, Syafi'ie Baru, dan Ustaz Ismail Koto.[35]

Melalui upaya tersebut, akhirnya pemerintah Thailand menyetujui pendirian sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Kolej Islam Yala, Kolej Pengajian Islam di bawah Prince Songkla Universsity, kampus Patani. Selain itu, di beberapa perguruan tinggi pemerintah, seperti Bangkok Thonburi University, dibuka bidang-bidang pengkajian Islam. Keberadaan perguruan tinggi tersebut telah membuka peluang bagi proses pengkajian Islam dan memfalitasi anak-anak Muslim untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Seiring dengan kehadiran institusi-institusi pendidikan di atas, maka sikap-sikap masyarakat Muslim Patani terhadap pendidikan pun mulai mengalami perubahan. Bila pada masa lalu para orangtua Muslim hanya menyekolahkan anak-anak mereka ke *pondok* atau bagi yang memiliki kemapanan ekonomi mengantarkan anak-anak mereka studi ke negeri-negeri di Timur Tengah, kini orientasi tersebut mulai berubah. Pada tahun 1970, *Educational Development Center* wilayah dua (Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun) telah melakkan penelitian di wilayah Thailand bagian Selatan. Hasil studi ini menemukan bahwa Muslim Thai mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan karir sebagai guru menjadi profesi yang mereka sukai. Harapan orangtua Muslim terhadap pendidikan anak-anak mereka adalah: 1) untuk memperoleh pengetahuan agar mampu

---

[35] Yusof Talek dan Numan Hayimasae 'Pengajian …, h. 123-124.

berbahasa Thai, 2) untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tentang wajib sekolah, 3) agar anak-anak mereka kelak dapat memeproleh pekerjaan yang baik, dan 4) sebab para tetangga mereka menyekolahkan anak-anaknya.[36] Begitupun, bagi Muslim Patani, *pondok* tetap merupakan sarana bagi memelihara identitas masyarakat Muslim.

Bagi sebahagian umat Islam Patani, integrasi dengan Thailand sebenarnya merupakan sebuah tantangan serius bagi upaya mempertahankan identitas keagamaan, etnik, dan budaya mereka. Karenanya, meskipun telah terintegrasi dengan Thailand, sejak tahun 1960-an hingga tahun 2000-an, sejumlah tindakan perlawanan terhadap pemerintahan Thailand terus terjadi di Patani. Neil J. Melvin dengan menguitp Sugunnasil menulis:

> From the 1960s, a significant separatist movement, including more than 60 armed groups, was active among the Malay Muslims of the region. However, by the late 1980s the violence had largely subsided and many of the insurgent leaders had given up the armed struggle under an amnesty programme. As a result, for most of the 1990s the region was relatively stable, although it was not entirely free of conflict—233 deaths were attributed to political violence in the three provinces of Pattani, Yala and Narathiwat from 1979 until the end of 2003.[37]

---

[36] Pawee Thim Khom dalam Sharom Ahmat dan Sharon Shiddique, *Muslim Society…,*h. 178.

[37] Neil J. Melvin, h.1.

4. Pola Islamisasi di Thailand

Sebagaimana terjadi pada negara-negara Asia Tenggara lainnya, proses islamisasi di Thailand juga berawal dari dakwah yang dilakukan oleh para pedagang dan ulama.baik berasal dari Arab maupun Parsi, yang dilakukan secara orang per orang. Dalam konteks ini, Chapakia menyatakan bahwa penyebaran Islam di Patani-Thailand terjadi di kalangan individu-individu tertentu saja.[38] Namun belum ditemukan informasi yang rinci atau data yang akurat tentang bagaimana para pedagang Arab atau Parsi tersebut mengenalkan Islam kepada penduduk lokal Patani dan bagaimana akhirnya penduduk lokal Patani tertarik memeluk Islam. Sesuatu yang dapat disimpulkan berdasarkan data ini adalah bahwa penyebaran Islam di Patani-Thailand dilakukan hanya terhadap individu-individu tertentu saja. Inilah pola islamisasi awal di Thailand. Pada masa ini, para pedagang berperan sebagai *da`i*, interaksi dan transaksi ekonomi sebagai media, dan pasar berperan sebagai institusi yang memainkan peran penting bagi masuk dan penyebaran dakwah Islam pada masa-masa awal di Thailand.

Pola dakwah Islam yang dilakukan para pedagang Arab atau Parsi terhadap orang per orang tersebut umum terjadi di wilayah-wilayah lainnya di Asia Tenggara. Pada tahapan ini, pengucapan dua kalimah syahadat dan penggunaan nama-nama Islam merupakan kriteria minimal pemeluk Islam. Melalui interaksi sosial dan ekonomi,

---

[38] Chapakia, *Politik Thai...*, h. 7.

sejumlah orang tertarik memeluk Islam dan mereka diislamkan oleh para *da`i* pedagang dengan mengucapkan dua kalimah syahadah. Hal ini jugalah yang awalnya terjadi pada raja Patani yang pertama, Phya Tu Nakpa yang berganti nama menjadi *Sultan Islamil Shah Zillullah fil a`lam*.

Tidak tesedia data-data rinci tentang berapa lama pola awal di atas terjadi dan berlangsung. Namun, Chapakia mencatat bahwa pada abad ke-13 terjadi perubahan pola islamisasi di Thailand. Ketika itu, Islam diterima secara beramai-ramai oleh penduduk Patani. Pola ini disebut Chapakia sebagai *Political Conversions*[39] dimana raja Patani (Phya Tu Nakpa) memeluk Islam kemudian diikuti oleh para menteri, hulubalang, dan rakyatnya. Dalam catatan Chapakia, latar historis masuk Islamnya raja Patani tersebut diawali dari peristiwa sakitnya raja dan tidak seorang tabib pun yang dapat menyembuhkannya. Ketika itu, di kampung Pasai Patani ada seorang syaikh yang bernama Syaikh Said yang menyatakan kesanggupannya untuk mengobati dengan syarat apabila raja sembuh, maka beliau hendaklah memeluk agama Islam. Setelah beberapa kali pengobatan dan raja sembuh, baru akhirnya raja masuk Islam. Ketika itu, Syaikh Said mengislamkan pula para menteri, hulubalang, dan sebagian rakyat yang hadir di istana ketika itu dengan mengucapkan dua kalimah syahadat. Ketika berita ini tersebar ke seluruh Patani, maka beramai-ramai rakyat Patani memeluk Islam. Menurut Bangnara, proses beramai-ramainya rakyat Patani

---

[39] Chapakia, *Politik Thai...*, h. 7-8.

memeluk Islam itu terjadi pada tahun 1457.[40] Sejak saat itu, Islam resmi menjadi agama negeri atau kerajaan Patani Darusaalam.

Sebagai agama resmi Negara, Islam segera mendapat legitimasi dan kekuatan politiknya di Patani. Untuk menyebarluaskan Islam, sejumlah tokoh ulama membangun *pondok* dan masjid. Kedua institusi ini telah memainkan peran penting bagi islamisasi di Thailand pada masa-masa selanjutnya.

PENUTUP

Ada yang berpendapat bahwa Islam telah datang ke kawasan Asia Tenggara sejak abad pertama hijriah atau ketujuh Masehi langsung dari Arab, tapi penjelasan akurat daerah mana yang lebih dahulu didatangi oleh Islam belum ditemukan. Namun, ada beberapa catatan historis yang mengemukakan bahwa Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malakka, Aceh, dan Semenanjung Malaya, termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam (Thailand). Menurut Chapakia, para ahli sepakat bahwa wilayah Thailand yang pertama sekali dimasuki Islam adalah Patani. Dan di wilayah Patani ini pernah eksis sebuah kerajaan Islam yang masyhur yang diberi nama *Patani Darussalam.*

---

[40] A. Bangnara, *Patani...,* h. 7.

Proses islamisasi di Patani berawal dari dakwah yang dilakukan oleh para pedagang dan ulama, baik berasal dari Arab maupun Parsi, yang dilakukan secara orang per orang seperti yang dilakukan Rasulullah Saw pada awal penyebaran Islam. Lama-kelamaan proses islamisasi dilakukan secara berjamaah dan ini terjadi pada tahun 1457. Sejak saat itu, Islam resmi menjadi agama negeri atau kerajaan Patani Darussalam. Sebagai agama resmi Negara, Islam segera mendapat legitimasi dan kekuatan politiknya di Patani. Untuk menyebarluaskan Islam, sejumlah tokoh ulama membangun *pondok* dan masjid. Kedua institusi ini telah memainkan peran penting bagi islamisasi di Thailand pada masa-masa selanjutnya

Perkembangan selanjutnya muncul kerajaan Melayu Islam Patani dan kerajaan ini mengalami kemajuan pada masa raja-raja perempuan berkuasa pada tahun 1584-1624. Pada saat itu, Patani muncul sebagai pusat perniagaan terpenting di Asia Tenggara dan juga pusat pertumbuhan kebudayaan Melayu. Bahkan kemantapan dan kemajuan ekonomi serta kekuatan Politik Patani yang mencapai Kelantan dan Johor menjadikan Patani disegani oleh negara-negara tetangga.

Namun kemudian kejayaan Patani mulai mengalami kemunduran sejak paruh kedua abad ke-17 pada masa perintahan Raja Kuning (1635-1686). Pada abad ke-18 dan seterusnya, Patani telah menjadi "orang sakit di Semenanjung Melayu". Kekacauan politik mulai muncul, satu persatu

wilayah Patani mulai melepaskan diri dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Dalam masa-masa itu Patani pun tidak lagi dikungjungi para saudagar untuk berdagang disana

*Sedangkan pada Masa Integrasi dengan Thailand (1932-sekarang, p*roses mengintegrasikan Muslim Patani ke dalam masyarakat Thailand mengalami kesulitan. Salah satu kesulitan yang besar yang dialami adalah dalam hal bahasa. Persoalan ini menjadi masalah besar bagi pemerintah Thailand karena sulitnya mengkomunikasikan dan mengimplementasikan program-program pembangunan pendidikan, ekonomi, dan lain-lain pada masyarakat muslim Patani. Bahkan dalam suatu studi di tahun 1960-an ditemukan bahwa 60 % anak-anak Muslim Patani tidak mampu berbahasa Thai. Selain itu, orangtua Muslim juga tenyata lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke *pondok* atau belajar ke Malaysia dan negeri-negeri Arab. Secara umum, orang-orang Muslim merasa bahwa diri mereka memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat Thai.

Semenjak dekade 1930-an sistem madrasah di Patani mulai dikembangkan dan ini menjadi titik tolak penting bagi perubahan arus pendidikan di Patani pada masa itu dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

al-Fatani, Ahmad Fathy, *Pengantar Sejarah Patani,* Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994.

Azra, Azyumardi, 'Pendahuluan Islam di Asia Tenggara: Pengantar pemikiran' dalam Azyumardi Azra (Peny.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia1989.

Bangnara, A., *Patani Dahulu dan Sekarang,* Patani: Penyelidikan Angkatan al-Patani, 1977.

Chapakia, Ahmad Omar, *Politik Thai dan Masyarakat islam di Selatan Thailand* Kuala Lumpur: Pustaka Darussalam Sdn. Bhd. Dan RMi Multimedia Publishing, 2000.

Daulay, Haidar Putra, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara,* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

de Graft, H.J. 'Islam di Asia Tenggara sampai Abad Ke-18 dalam Azyumardi Azra (peny.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.

Dulyakasem, Uthai 'Muslim-malay separatism in Southern Thailand: Factors Underlying the Political Report' dalam Lim Joo Jock dan Vani S, *Armed Separatism in Southeast Asia* Singapore: ISEAS, 1984.

Hayimasae, Numan 'Madrasah di *Haramayn* dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Madrasah di Patani Abad ke-20' dalam Muhammad Azizan Sabjan dan Noor Shakirah Mat Akhir, *Wacana Ilmiah Muslim Se-ASEAN,* USM: Pusat Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, t.t.

Khom, Pawee Thim 'Muslim Society, Higher Education And Development: The Case of Thailand' dalam Sharom Ahmat dan Sharon Shiddique, *Muslim Society, Higher Education And Development in Southeast Asia,* Singapore: ISEAS, 1987.

Pitsuwan, Surin, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani,* Jakarta: LP3ES, 1989.

Provinsi Pattani' online dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani

Shukri, Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani,* Kota Bharu: Matbaah Majlis Ugama Islam Kelantan, tt.

Talek, Yusof dan Numan Hayimasae 'Pengajian Tinggi Islam di Selatan Thailand: Pengalaman Silam dan Masa Depan' dalam Muhammad Azizan Sabjan dan Noor Shakirah Mat Akhir, *Wacana Ilmiah Muslim Se-ASEAN,* USM: Pusat Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, t.t.

Uma, Abduloh dan Suhaila Binti Abdullah 'Dakwah Islamiyah di Selatan Thailand: Kajian Kes Terhadap Metode Pergerakan Dakwah Syeikh Dr. Islamil Luthfi Al-Patani' dalam *Prosiding Seminar Kebangsaan Dakwah Saudara Kita: Isu dan Cabaran Semasa,* ttp: Bahagian Pengajian Islam, Pusat pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia, 2010.

Yusuf, Imtiyaz, 'Aspects of Islam in Thailand Today' dalam *Regional Issues ISIM Newsletter* No. 3/99.

DINAMIKA ISLAM PATTANI ABAD XX

Oleh: Masmedia Pinem

PENDAHULUAN

Islam di Asia Tenggara, merupakan kekuatan sosial yang patut diperhitungkan. Karena hampir seluruh negara yang ada di Asia Tenggara dari jumlah penduduknya, baik mayoritas ataupun minoritas memeluk agama Islam. Sebagai contoh, Islam menjadi agama resmi Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Burma (sebagian kecil penduduknya beragama Islam), Republik Filipina, Thailand, dan Singapura. Hampir terdapat 300 juta orang di seluruh Asia Tenggara yang mengaku sebagai Muslim. Melihat kenyataan ini, Asia Tenggara merupakan satu-satunya wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat Daya hingga Asia Selatan, yang mempunyai penduduk Muslim terbesar.

Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Replubik Rakyat Cina di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di Selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan Anak Benua India di barat. Asia Tenggara biasa dipilah dalam dua kelompok, yaitu: Asia Tenggara Daratan (ATD) yang meliputi: Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Dan Asia Tenggara

Maritim (ATM) yang meliputi: Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste.[1]

Namun, melihat fakta tersebut yang menarik untuk terus diteliti adalah, kapan sejarah awal masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara? Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan, terutama mengenai kapan masuknya, siapa pembawanya, wilayah mana yang pertama kali diislamkan, dan bagaimana proses pengislamannya. Adapun mengenai perkembangannya, banyak tema yang masih menyisakan berbagai pertanyaan. Misalanya, dari aspek politik, kapan komunitas Islam di wilayah ini mencapai kekuasaan politik dan menjadi sebuah "negara", wilayah mana saja yang mencapai kekuasaan politik tersebut dan dalam bentuk apa kekuasaan tersebut; bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan bagaimana pula hubungannya di antara berbagai wilayah yang memiliki kekuasaan politik tersebut.

Sebagai contoh, kesultanan-kesultanan Islam yang pernah ada, mulai dari Samudera Pasai di Aceh, Malaka di Semenanjung Malaya, Tumasik di Singapura, Demak, Cirebon, Banten, Aceh Darussalam, Palembang, Riau, Goa-Tallo, Ternate-Tidore, Banjar, Sumbawa, Bima, dan lain-lain di Indonesia. Demikian juga di kawasan Asia Tenggara yang dulunya menggunakan bahaya Melayu sebagai *linguafranca*, seperti Pattani di Thailand, Mindanao dan Sulu di Filipina, serta seluruh wilayah yang sekarang menjadi Malaysia dan

---

[1]http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara

Brunei Darussalam; Wilayah lain adalah Burma, Kamboja, termasuk Campa, Vietnam, Muangthai, dan Timor Leste.[2]

Oleh karena itu, tulisan ini ingin melihat bagaimana Islam di Thailand yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Pada masa silam, Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama.[3] Islam masuk ke Thailand diperkirakan pada abad ke-10 Masehi melalui para pedagang dari Jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan.

Kawasan Thailand yang banyak dihuni umat Muslim adalah wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kantong-kantong muslim di daerah Thailand Selatan ini di antaranya adalah provinsi Pattani, Yala, Satun, Narathiwat dan Songkhla. Di provinsi-provinsi tersebut, rata-rata dihuni oleh sekitar 70-80% muslim. Selain itu, umat muslim juga tersebar di beberapa wilayah lain, seperti di provinsi Pattalung, Krabi, dan Nakorn Srithammarat. Jatuhnya pemerintahan militer pada tahun 1973, dan ditegakkannya demokrasi, yang berlangsung hingga 1976 saat Jenderal Kriangsak Chomanan mengambil alih pemerintahan sipil merupakan era baru dalam dunia politik Thailand.

---

[2]Bagian ini diambil dari Desain Operasional (DO)/Proposal "Penelusuran Sejarah Islam di Nusantara" Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2012.

[3]Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 211.

Kalau masa-masa sebelumnya tuntutan masyarakat Melayu-Muslim kepada pemerintah Thai hanya terbatas pada otonomi dalam urusan keagamaan, budaya dan hukum, mulai sekitar pertengahan 1970-an, tuntutan itu berubah, yaitu suatu pemerintahan yang otonom. Dalam memperjuangkan cita-cita ini, ternyata di kalangan masyarakat Melayu-Muslim terdapat perbedaan dalam orientasi ideologi, taktik dan ruang lingkup operasi perjuangan. Perbedaan inilah yang menyebabkan gerakan Melayu-Muslim terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yang masing-masing memiliki struktur kepemimpinan dan keanggotaan dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda,[4] organisasi Muslim ini menuntut kemerdekaan penuh bagi Pattani.[5]

Tiga kelompok gerakan tersebut adalah *Nasional Liberation Front of Pattani (NLFP)* atau Barisan Nasional Pembebasan Pattani. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1960, di dirikan oleh Tengku Mahyeddeen, putra Abdul Kadir, raja Pattani terakhir. Aspirasi utama organisasi yang didirikan sesudah berakhirnya Perang Dunia II ini adalah "otonomi Pattani dalam Federasi Malaysia". Dalam kaitannya dengan keinginan untuk bergabung dengan ke dalam federasi Malaysia itu, organisasi ini mendorong orang-orang Melayu Muslim untuk mendapatkan status sebagai Warga Negara (WN) Malaysia. Dengan menjadi WN Malaysia mereka bisa melintasi perbatasan secara lebih leluasa.[6]

---

[4]Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru*, h. 267.
[5]Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 212.
[6]Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai*, h. 175.

Organisasi yang lain adalah *Liberation Front of Republic Pattani (LFRP)* atau Barisan Revolusi Nasional (BRN). Aspirasi utama organisasi ini adalah ingin mendirikan suatu republik Pattani dengan dasar ideologi sosialisme Islam.[7] Organisasi ini berbasis di kota-kota, yang sebagian besar pemimpinnya berpendidikan luar negeri, terutama Malaysia dan Indonesia. Pemimpin utamanya adalah Ustaz Karim Haji Hassan, BRN didirikan pada Maret 1963 sebagai sebuah kelompok sempalan dari Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP). LRFP memiliki hubungan baik dengan Pattani Komunis Malaysia (CPM), yang giat menyebarkan ideologi komunis di kalangan penduduk Melayu.[8] Organisasi ini berhaluan sosialis yang ingin mendirikan hubungan dekat dengan partai komunis di Malaysia dan Thailand.[9]

Di samping itu, terdapat organisasi yang bernama *Pattani United Liberation Organization* (PULO) atau Pertubohan Persatuan Pembibasan Pattani (PPPP), dibentuk pada tahun 1968. Organisasi ini memiliki sistem pengorganisasian yang lebih efektif. Basis pendukungnya lebih luas, tersebar di kota-kota maupun di desa-desa. Landasan ideologinya dikenal dengan istilah "Ubang Tapekema," yang merupakan singkatan dari *Ugana* (baca: Agama), *Bangsa, Tanah Air,* dan *Perikemanusiaan*. Dengan landasan ideologi yang demikian ini

---

[7]Moeflich Hasbullah, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru*, h. 267.

[8]*Ibid*, h. 267.

[9]Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam,* Surabaya: IAIN Ampel Press, 2004, 313.

PULO mampu merangkul semua golongan dan lapisan dalam masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan.

Selain itu, PULO juga mampu membangun jaringan internasional yang luas.[10] Organisasi ini berada dibawah kepemimpinan kaum intelektual muda yang lebih terorganisir dan militan dan mendapat dukungan finansial dari Syria dan Libya.[11] Dalam kasus gerakan Melayu-Muslim di Thailand Selatan, faktor-faktor ras, bahasa, agama, adat istiadat, dan kesadaran akan suatu identitas kolektif yang khas, telah dimobilisasikan untuk memperkuat solidaritas kolektif dalam melawan setiap upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan pemerintah Thailand.Gerakan Melayu-Muslim di Thailand Selatan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan kesejarahan, dimana sejumlah aktor memperjuangkan hak kesejarahan mereka sebagai bangsa.

Dengan demikian ada secercah harapan bagi masyarakat Melayu-Muslim untuk meraih apa yang mereka perjuangkan selama ini. Dengan perkembangan Islam yang begitu menonjol, maka Islam di Thailand Selatan ini dijadikan sebagai pokok studi yang dapat memberikan pengetahuan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada negara Thailand, dari segi perkembangan sosial, keagamaan, budaya dan juga politik. Kecenderungan negara ini menarik dikaji karena negara ini mempunyai sejarah yang sangat unik dan menarik untuk dibahas di mana Thailand Selatan adalah sebuah negara

---

[10]*Ibid*, h. 268.
[11]*Ibid*, h. 313.

Melayu yang tertindas, yang di mana ada tuntutan dari masyarakat Melayu-Muslim kepada pemerintah Thai hanya terbatas pada otonomi dalam urusan keagamaan, budaya dan hukum, mulai sekitar pertengahan 1970an, tuntutan itu berubah, yaitu suatu pemerintahan yang otonom. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melihat secara lebih luas dinamika Muslim-Pattani di Tahailand Selatan pada abad ke-20.

Dalam sebuah penelitian, perlu adanya rumusan masalah untuk mencapai sasaran yang menjadi objek kajian sehingga pembahasan yang akan diteliti lebih terarah pada pokok masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana Keislaman dan Kemelayuan di Pattani? *Kedua,*seperti apa Dinamika Muslim Pattani pada Abad XX, baik hubungannya dengan Siam? *Ketiga*, seperti apa Perjuangan Politik Ulama dan Intelektual Islam di Pattani?

KEISLAMAN DAN KEMELAYUAN PATTANI

1. Kondisi Geografis Thailand Selatan

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tengggara merupakan kawasan antara benua Australia dan Daratan China, Daratan India sampai Laut China. Dengan begitu, Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari kehidupan maupun

penyebaran agama.[12] Thailand nama lainnya adalah: (Prades Thai, Muang Thai; dahulu Siam). Di sebalah Barat laut berbatasan dengan Burma, di Timur Laut dengan Laos, di timur dengan Cambodia, di Tenggara dengan Teluk Siam, di Selatan (jazirah) dengan Malaysia, di Barat Daya dengan Teluk Benggala. Luas: 514.000 km. penduduk: 4.9981.000.

Kepadatan penduduk: 98/km. dengan ibu kota: Bangkok (nama aslinya *krung Thep),* bahasa resmi: Thai (Siam). Agama: Buddhisme Hinaya, Islam, Kristen. Satuan mata uang: Baht. Thailand dapat dibagi dalam empat bentuk dari bumi: a) Tanah pegunungan Thai yang berbatasan dengan Burma yang berangsur-angsur menurun ketinggiannya; b) Daratan rendah yang terletak di tengah; c) Dataran pipih gunung (Perancis: *montagne de la table)* berbentuk cekung yang menempati Timur laut negeri; dan d) Semenanjung Thai di Jazirah Malaka.[13]

Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hamper seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.

---

[12]Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 211.

[13]Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, edisi khusus, jilid 6, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), (SHI-VAJ), h. 3531.

Kerajaan Thai berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya berada pada 5º-21º LU dan 97º-106º BT. Pattani terletak di Semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Thailand di sebelah utara. Di bagian selatan terdapat gunung-gunung dan atraksi turisme seperti taman negara Budo-Sungai Padi yang yang berada di perbatasan provinsi Yala (Jala) dan Narathiwat (Menara). Di sini juga terdapat beberapa tumbuhan yang agak unik seperti palma Bangsoon dan rotan Takathong. Di kawasan perbatasan dengan Songkhla dan Yala pula terdapat sebuah taman rimba yang terkenal dengan gunung terjunnya, Namtok Sai Khao.[14]

Tabel 1. Wilayah Pattani

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Thailand, 1979.[15]

Provinsi	Luas (km2)	Penduduk (jiwa)	Muslim (%)	Buddhis (%)
Pattani	2.109 km2	423.562	77,75%	22,22%
Yala	4.716 km2	256.064	60,00%	40,00%
Narathiwat	4.227 km2	419.141	80,00%	20,00%
Satun	2.669 km2	153.657	70,00%	30,00%
Total	13.721 km2	1.252.424	71,94%	28,06%

[14]Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani#Sejarah

[15]Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai*, h. 13.

Di Thailand, etnis Melayu Muslim memang merupakan kelompok minoritas. Menurut sensus 1979, jumlah mereka adalah 977.282 jiwa atau 2,84% dari seluruh penduduk Thailand yang sekitar 45 juta jiwa. Dan ada sekitar 6 juta Muslim di Thailand pada tahun 1982. Namun angka resmi jauh lebih kecil. Angka resmi hanya memberikan presentasi seluruh Muslim dengan penduduk sekitar 4%, padahal angka yang mungkin lebih 12%. Sebenarnya hal ini merupakan bagian dari usaha pemerintah Thai untuk mengurangi pentingnya penduduk Muslim. Muslim hidup di seluruh Thailand, tetapi ada tiga daerah pemusatan Muslim: selatan, dari perbatasan Malaysia sampai Genting Tanah Kra (*Isthmus of Kra*); utara, di daerah Chiang Rai; dan wilayah ibukota.

Wilayah selatan, dahulu bukan bagian dari Thailand. Sebenarnya Semenanjung Malaya berpenduduk Melayu yang dikelola dalam negaranegara kecil. Orang-orang Melayu ini memeluk Islam sepanjang abad lima belas, sebagaimana halnya dilakukan oleh hampir semua orang Melayu lainnya. Sejak abad empat belas, Thailand memulai serangan dan penaklukan Semenanjung Malaya dan memuncak pada 1767 M. Dengan penaklukan semua negara Muslim sampai ke Ligor (Nachom Sri Thammarat), dan memasukkan negeri-negeri Muslim Jays (Chaiya), Grahi (Surat-Tsani) dan Ligor dalam imperium Thai. Dari Ligor arang Thai memperluas penaklukannya ke selatan menaklukkan lebih banyak orang Muslim, seperti Bedelug (Pathalung), Senggora (Songkhala), dan Sentul (Satun).

Dari jumlah enam jutah Muslim di Thailand pada 1982 sekitar empat juta adalah Muslim Melayu yang hidup di provinsi-provinsi selatan. Muslim di Bangkok sekitar 800.000 orang, keturunan para tawanan yang dibawah dari negara-negara Melayu. Bahwa 5.250.000 Muslim di Thailand pada 1976. Muslim merupakan separuh penduduk wilayah selatan, satu dari empat wilayah kerajaan. Di wilayah ini (luas daerahnya 72.961 kilometer persegi), sebenarnya Muslim merupakan minoritas di provinsi-provinsi Narathiwat, Yala, Pattani, Satun, Songkhla, dan Krabi. Harusnya ada sekitar 2.500 masjid di Thailand, tetapi pada 1976, hanya 2.078 masjid terdaftar menurut Dekrit Raja 1947 mengenai masjid. Ada 414 masjid seperti itu di provinsi Pattani, 339 di provinsi Narathiwat, 213 di provinsi Songkhla, 196 di provinsi Yala dan 139 masjid di Ibukota Bangkok. Berdasar wilayah, ada 1.695 masjid di selatan, 364 masjid di provinsi tengah, 18 masjid di timur-laut dan hanya ada satu masjid terdaftar di provinsi timur.[16]

Tabel 2. Muslim di Thailand, 1976

Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Muslim	Prosentase	Jumlah Masjid
Wilayah Selatan	5.534	2.820	51,0%	1695
Wilayah Tengah	13.459	1.210	9.0%	364
Wilayah Timur Laut	15.584	930	6.0%	18
Wilayah Utara	9.696	290	3.0%	1
Jumlah	44.273	5.250	11,9%	2078

[16]Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai,* h. 202.

2. Sejarah Keislaman dan Kemelayuan Pattani

Secara historis, Pattani merupakan kesultanan yang cukup penting dalam pertumbuhan daerah perdagangan dan penyebaran Islam di dunia Melayu. Pattani menjadi begitu penting dalam sejarah islamisasi dan pertumbuhan perdagangan karena merupakan satu-satunya kota pelabuhan dan pusat perdagangan Islam yang paling berpengaruh yang pernah ada di perairan laut Cina Selatan.

Kalau merujuk kepada catatan pelawat-pelawat Cina, wilayah Pattani telah dikenal sejak abad ke-2 M, melalui hubungan dagang antara pedagang Cina dengan Negara-negara Asia Tenggara. Mereka mengenal sebuah negeri bernama *Lang-ya-hsiu* atau *Langkasuka* yang terletak di Pantai Timur semenanjung tanah melayu antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan dengan ibukota terletak di sekitar daerah Yarang.[17] Dalam catatannya disebutkan bahwa wilayah ini merupakan daerah perdagangan dengan adanya pelabuhan bagi para pelaut. Angkatan Laut Cina saat akan menyeberangi wilayah teluk Siam dalam perjalanannya ke Vietnam, ke Semenanjung Melayu, telah menemukan daratan ini.

Awal perkembangan Pattani telah dimulai pada kurun waktu abad ke-14 dan 15 sejalan dengan pesatnya bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kedudukannya secara geografi cukup strategis di mana Pattani berada di

---

[17]P. Rudolf Yuniarto, "Integrasi Muslim Pattani: Reidentitas Sosial atas Dominasi 'Nasional' Thailand", dalam *Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner,*Vol. 3 No. 2. Juli-Desember 2004, h. 152. Lihat juga Auni bin Haji Abdullah, *Islam dalam Perdagangan Dalam Sejarah Alam Melayu,* Malaysia, Darulfikir SDN BHO, h. 298.

pertengahan jalur lalu lintas perdagangan antara negeri Melayu dan negeri Asia Timur dan di anatara perairan Selat Malaka serta laut Sulu dengan perairan laut Cina Selatan. Jalur tersebut merupakan jalur perdagangan yang sangat terkenal, merupakan jalur perkapalan antarbangsa yang menghubungkan tanah Arab dan India bahkan dengan Cina. Pattani merupakan kerajaan dengan cakupan daerah cukup luas dan padat di Semenanjung laut Cina Selatan.[18]

Daerah dan wilayah Pattani selanjutnya menjadi pusat perniagaan, di antaranya dengan menjual hasil bumi berupa rempah-rempah yang ditukas dengan tekstil dan tembikar dari Cina. Selain itu juga, menjadi tumpuan bagi perdagangan saudagar Arab dan Cina yang banyak membawa bahan-bahan tekstil mereka. Hasil dari perdagangan ini kemudian oleh para pedagang Pattani dijual kembali bersama dengan hasil bumi dari Pattani sendiri seperti lada hitam, emas, dan bahan makanan lainnya. Aksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Pattani ini diyakini telah sampai ke daerah semenanjung tanah Melayu selatan, Pulau Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi (Makassar).[19]

Sumber lain menyebutkan, seperti ditulis A. Bangnara, pakar sejarah bangsa Pattani, mengatakan bahwa Islam pada awalnya tersebar di kalangan rakyat biasa. Meskipun demikian, pendapat lain menyebutkan bahwa Islam pada

---

[18]Auni bin Haji Abdullah, *Islam dalam Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu*,h. 300.

[19]P. Rudolf Yuniarto, “Integrasi Muslim Pattani: Reidentitas Sosial atas Dominasi ‘Nasional’ Thailand”, h. 154.

awalnya diterima oleh kalangan penguasa (elite), baru kemudian ke kalangan rakyat. Orang-orang Siam (Thai) mengenal orang-orang Islam dengan sebutan *Khei* atau *khaek* yang secara harfiah berarti pendatang atau orang yang datang menumpang. Dalam bahasa Thai, istilah ini juga selama berabad-abad dikenal dengan menyebut kaum pendatang berkulit gelap dari daerah Melayu dan Asia Selatan. Orang-orang Thai menolak sebutan ini dan menyatakan bahwa kedatangan mereka, khususnya di kawasan yang sekarang disebut Thailand Selatan, jauh lebih awal daripada kedatangan orang-orang Buddha Thailand.[20]

Sedari awal sebenarnya telah ada kontak dan hubungan antara Kerajaan Thailand dan Kerajaan Pattani. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada kerangka sistem sungai di mana-pemerintah lemah dan negara mengakui supremasi raja Thailand. Dalam praktiknya, mereka mengirim upeti secara berkala dalam bentuk simbolis dari perak dan bunga emas bunga ke pengadilan Thailand. Hubungan kekuasaan tersebut berteori sebagai sistem mandala di mana kekuatan paling kuat di sekitar pusat dan surut yang lebih jauh itu adalah dari pusat. Ini berarti bahwa secara historis suatu negara bawahan seperti Pattani memiliki beberapa otonomi dalam pemerintahan sendiri sambil mempertahankan status anak sungai dengan Siam.[21]

---

[20]Iik Arifin Mansurnoor dan Dadi Darmadi, "Minoritas Islam" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* Jilid 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 466-467.

[21]Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand,* Bangkok: Thammasat

Sebagai suatu kerajaan, kekuasaan Pattani terkenal dengan sebutan *Negeri Pattani Besar*. Kecuali Johor tidak ada negeri lain di belahan timur Semenanjung Melayu yang memiliki kemakmuran dan kekuatan sehebat Pattani saat itu. Sumber kekuatan yang cukup besar ini ditunjang oleh ikatan tali perkawinan yang dilakukan oleh Ratu Ungu dengan Sultan Pahang yang menguasai wilayah kerajaan Pahang. Hal ini semakin mengukuhkan kekuatan Pattani. Pada masa itulah Pattani tumbuh menjadi kekuatan politik dan daerah komersial. Kedudukan Pattani di Semenanjung Siam yang strategis dari segi geografi telah menyebabkan kota ini menjadi harapan pedagang-pedagang asing baik dari barat atau timur untuk singgah, beristirahat ataupun berdagang. Dalam waktu yang singkat saja Pattani muncul sebagai sebuah kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi serta stabil dari segi politik dan pemerintahan. Selain itu, dasar hubungan antarbangsanya yang baik telah menyelamatkan Pattani dari kejatuhan kepada pihak penjajah, seperti kerajaan Siam, Inggris, dan Prancis.[22]

Kekuatan dan kejayaan di bidang ekonomi dan kestabilan politik telah menjadikan Pattani pada masa lalu sebagai negeri yang terkuat dan disegani oleh negara-negara tetangga, termasuk Siam. Pengaruh politiknya sampai ke Selatan menguasai beberapa negara di pantai timur, termasuk Kelantan, Terengganu, Pahang, bahkan Johor-Riau. Kekuatan

---

University, 2003, h. 12.

[22]P. Rudolf Yuniarto, "Integrasi Muslim Pattani: Reidentitas Sosial atas Dominasi 'Nasional' Thailand", h. 156.

ini terbukti ketika Ratu Ungu 1624-1635 memperlakukan kebijakan politik anti-Siam, bahkan memutuskan hubungan diplomatik antara Pattani-Ayutthia.[23] Gelar kebesaran Siam *Phrao-Chao* yang diberikan kepadanya juga ditolaknya. Raja perempuan Pattani ini sangat berani mengutuk raja Siam sebagai penjahat, pembunuh dan pengkhianat.

Namun, Pattani mengalami kemunduran, secara khusus sejak berakhirnya kekuasaan Ratu Kuning yang meninggal pada 1651. Secara perlahan-lahan, kekuatan ekonomi, militer, dan politik Pattani semakin melemah. Dari dalam pertikaian di antara elite kerajaan yang semakin memperuncing dan memperlemah kerajaan. Hal ini sebenarnya telah terjadi pada masa antara 1573 dan 1584. Masa ini ditandai dengan gejolak perebutan kekuasaan. Kemunduran Pattani semakin nyata pada akhir abad ke-17, yang pada saat itu berbagai daerah yang dulu termasuk wilayah kekauasaan Pattani, mulai memisahkan diri .

Muslim di Thailand Selatan memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk (dan juga pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam, dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari Bangsa Pattani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam Kerajaan Islam Pattani.

Sejak 1909, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara:

---

[23]Mohd. Zamberi A. Malek, *Pattani dalam Tamadun Melayu*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1994, h. 3.

Pattani, Narathiwat, Songkhla, Satun dan Yala, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara negara di Melayu utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia.[24]

Muslim di Thailand Selatan memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk (dan juga pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam, dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari bangsa Pattani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam Kerajaan Islam Pattani. Kuatnya identitas lokal keislaman dan kemelayuan ini mendorong banyak intelektual Thailand untuk menggagas status otonomi Thailand Selatan, khususnya di tiga provinsi: Pattani, Yala dan Narathiwat, atau dalam banyak istilah sejarah ketiga provinsi ini disebut Muslim Pattani.

Penggunaan bahasa Melayu menurut statistik nasional Thailand juga sangat kuat di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat, di atas 70 %, dibandingkan dengan provinsi lain di Selatan: Satun dan Songkhla. Tetapi bahasa Melayu 'dilarang' digunakan sebagai bahasa resmi di perkantoran, lembaga pendidikan pemerintah, dan tempat atau acara resmi lainnya. Larangan ini tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan ba hasa Melayu, karena bahasa ini memberi spirit identitas mereka, yang berbeda dengan mayoritas warga Thailand, yang berbahasa Thai dan Buddha.

---

[24]*Ibid*, h. 236.

Dapat disimpulkan, tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan ekonomi menjadi kunci atas terus berlangsungya gerakan 'separatisme' atau dalam istilah David Brown[25] sebagai 'separatisme etnis' atas dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis dan keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti-pemerintah. Bahkan beberapa di antara mereka aktif terlibat dalam aksi kekerasan.

Lahirnya gerakan kemerdekaan Pattani di Thailand Selatan berawal sejak masyarakat Melayu-Muslim terintegrasi dalam negara Thai. Mereka sangat menentang kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah Thai. Bentuk perlawanan bersifat pasif sedangkan ledakan kekerasan hanya terjadi apabila kondisi sangat memburuk bagi eksistensi identitas mereka. Pada awalnya pimpinan pemberontakan terdiri dari kaum ulama dan keturunan bangsawan. Namun sejak decade 1970-an, terjadi perubahan pola dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Aktor yang memimpin gerakan adalah generasi muda yang memiliki bekal akademis. Tokoh-tokoh muda Melayu-Muslim tersebut lebih agresif dan canggih dalam mengorganisasikan dan menyusun strategi pergerakan.

---

[25]Brown, David, "From Pheripheral Communities to Ethnic Nations", dalam *Pacific Affairs 61*, 1988.

Demikian pula dalam mengekpresikan bahasa perjuangan, mereka berbicara “dalam bahasa yang sama”dengan bahasa politik Pemerintah Thai. Bagaimana tuntutan dan proses didasarkan atas asas-asas yang diserukan pemerintah Thai, yaitu kebebasan persamaan, dan jamianan hak-hak politik bagi semua warga negara tampa memandang asal-asal rasa dan etnik. Selain berjuang di dalam negeri, masalah etnik Melayu-Muslaim di Thailand Selatan sangat gencar diperjuangkan dalam diplomasi internasional.

Para intelektual muda tersebut mempunyai walil-wakil dalam pertemuan-pertemuan internasional seperti Konfrensi Liga Dunia Islam, Konfrensi Para Menteri Luar Negeri Islam, Konfrensi Islam Asia, dan Konfrensi Liga Arab. Begitu pula dengan esensi tuntutan yang diperjuangkan, bila sebelumnya terbatasnya pada otonomi dalam urusan keagamaan, kebudayaan dan hukum, namun mulai pertengahan 1970-an tuntutannya berkembang, yaitu keingginan untuk membentuk suatu memerintahan yang otonom. Dalam memperjuangkan cita-cita ini, etnik Pattani melakukan pergerakn-pergerakan terutama salah satunya dengan pemberontakan untuk memisahkan diri dari kerajaan Thailand.

DINAMIKA MUSLIM PATTANI

1. Hubungan Melayu Pattani dengan Siam

Kedudukan Pattani yang hampir sama dengan Siam, menjadikan kedua daerah ini menjadi istimewa. Peneliti

sejarah belum dapat memastikan dengan jelas kapan awal hubungan antara pattani dengan Siam. Sumber-sumber tradisional Siam menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu di bawah Siam semenjak zaman Sukhothai pada abad ke-13. Pengakuan ini didasarkan pada inskripsi Raja Ramkhamhaeng tahun 1292 yang ditemukan di Nakhorn Sri Thammarat. Konon raja tersebut mengantar ekspedisi ke Selatan Semenanjung dan menaklukkan kerajaan-kerajaan Melayu di situ.[26]

Siam dapat menguasai wilayah Pattani dengan mengalami pertempuran besar. Pada tahun 1776 Phya Taksin Raja Thonburi berhasil mengambil alih kerajaan Pattani melalui jalan peperangan. Walaupun kerajaan Melayu Pattani berusaha untuk mempertahankan diri tetapi Siam berhasil menguasai Pattani pada tahun 1778. Akibat kekalahan itu sebanyak 4000 orang Melayu Pattani menjadi tawanan dan dibawa ke Bangkok sebagai hamba tebusan. Setelah kejatuhan Pattani itu, Siam melantik raja baru yang sesuai dengan selera mereka. Hal inilah yang memicu adanya gerakan anti-Siam mulai tumbuh dan berkembang. Berbagai pemberontakan muncul justru dari pemimpin yang ditunjuk oleh kuasa kerajaan Siam. Salah satunya adalah pemberontakan Tengku Lamidin Raja Pattani yang berusaha untuk memberontak dengan bantuan Raja Annam yang beragama Islam, Okphaya Cho So, dan menyerang kedudukan tentara Siam yang

[26]Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Pattani 1785-1954*, Penerbit UKM Malaysia, 2006, h. 16.

dibantu oleh Syaikh Abdul Kamal, seorang ulama besar dari Mekah, walaupun akhirnya gagal.[27]

Kebijakan pemisahan kerajaan Melayu Pattani, kerajaan Siam berusaha melemahkan orang Melayu Pattani agar tidak bangkit menentang pihak kerajaan. Peraturan keras yang dikeluarkan kepada raja-raja negeri Melayu yang membangkang adalah hukuman mati ataupun penjara yang akan diberlakukan, termasuk bagi keluarga mereka apabila mereka kemudian memberontak. Sebagai bentuk pengukuhan penguasaannya atas negeri-negeri Melayu, pihak kerajaan menyiasati untuk melantik raja yang berketurunan Siam untuk wakil kerajaan pusat dalam mengawasi negeri wilayah selatan. Selain itu, kerajaan Siam juga memindahkan orang-orang Siam utara ke negeri-negeri tersebut dengan tujuan mengimbangi penduduk yang berketurunan Melayu.

Pada tahun 1821, Siam kemudian menyerang Kedah dan memaksa Sultan Abdullah, Raja Pattani, melarikan diri ke Pulau Pinang. Maksud dari penyerangan ini adalah untuk mengurangi kekuasaan dan pengaruh Melayu di wilayah Pattani. Fajta ini mengakibatkan kekosongan jabatan raja di Pattani. Jeda antara 1817-1842, Pattani diperintah setidaknya dua orang Raja Melayu. Raja Melayu yang pertama adalah Haji Tuan Sulong, anak Raja Bendahara Kelantan, Long Jenal. Haji Tuan Sulong menjabat raji sampai tahun 1832. Haji

---

[27]*Ibid*, h. 20-21. Lihat juga P. Rudolf Yuniarto, "Integrasi Mslim Pattani: Reidentitas Sosial atas Dominasi 'Nasional' Thailand", h. 157.

Sulong kemudian disingkirkan karena terlibat dalam kebangkitan anti-Siam pada tahun 1831. Gerakan anti-Siam mendorong pihak kerajaan melakukan upaya-upaya penyingkiran raja dan tokoh Pattani yang bertujuan tetap membuat kerajaan Pattani dalam suasana kacau yang pada akhirnya melemahkan kekuatan-kekuatan sentrifugal anti-Siam agar tidak dapat bergerak secara leluasa.[28]

Pada tahun 1832, konflik antara Kerajaan Siam dan Kesultanan Melayu Pattani berakhir dengan asimilasi politik Pattani ke dalam Siam. Akibatnya, Pattani terlibat dalam pemberontakan secara terus-menerus melawan Siam. Untuk membendung serangan Pattani, Raja Rama I memutuskan untuk memecahkan kesultanan Pattani dengan negara-negara Melayu Utara, yaitu Kedah, Kelantan, Terengganu di bawah kerajaan Siam. Sejak saat itu, Siam mempraktikkan kebijakan membuat peraturan di Thailand Selatan, dan membuat ulang batas-batas provinsi Melayu, karena adanya ancaman Melayu kepada Inggris. Pada tahun 1909, Siam dan Inggris menandatangani perjanjian di mana Siam harus melepaskan Kedah, Kelantan, Perlis, dan Terengganu tapi mempertahankan provinsi Narathiwat, Yala, Pattani, Songkhla, dan Satun.[29]

Situasi Pattani semakin terpojok dan terpinggirkan dengan diadakannya perjanjian antara pihak kerajaan Inggris

---

[28]P. Rudolf Yuniarto, "Integrasi Muslim Pattani…," h. 158.

[29]S.P. Harish dan Joseph Chinyong Liow, "*The Coup and the Conflict in Southern Thailand*" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 19, No. 1(2007), Northern Illinois University Center for Southeast Asian Studies h. 161.

dengan Kerajaan Siam dalam hal pembagian wilayah. Situasi politik regional akibat adanya kolonisasi Eropa di wilayah Asia mendorong Siam kemudian mendekonstruksi wilayah kekuasaan mereka untuk membendung arus imperialisme yang ingin menguasai wilayah semenanjung. Pihak Inggris yang telah menguasai semenanjung bagian selatan tertarik dengan empat daerah taklukan penting di sebelah selatan patanai: Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Perlis. Daerah-daerah tersebut dianggap penting karena berpotensi ekonomis sebagai daerah baru yang akan dijadikan pelabuhan penting dan menjadi pangkalan perang Inggris di Asia.[30]

2. Perjuangan Politik Melayu Pattani dan Integrasi Budaya

Pendudukan wilayah Pattani di awal abad 20 (tepatnya 1902) menjadi tonggak sejarah yang menandai runtuhnya kedaulatan Pattani. Kerajaan Pattani, sebagai suatu kekuasaan yang merdeka dan berdaulat penuh, harus tunduk pada kekuasaan pemerintah Thai. Pattani sebagai sebuah kelompok etnik yang berbahasa Melayu dan beragama Islam dipaksa untuk menjadi bagian integral dari masyarakat Thai yang berbeda secara etnik, bahasa, maupun agama. Penyatuan Pattani ke dalam Thai-Buddhis banyak mendundang dampak politik, ekonomis, maupun kultural. Konsekuensi politik dari penyatuan tersebut di antaranya terlihat dari beberapa

---

[30]P. Rudol Yuniarto, *Integrasi Melayu Pattani: Sejarah Perubahan Geopolitik dan Demografi*, PSDR-LIPI, 2004.

langkah kebijakan seperti: memecah wilayah Pattani menjadi beberapa provinsi, uniformisasi bahasa, dan pendidikan. Kebijakan ini menjadi bagian dari politik integrasi dan asimilasi.

Setelah ditandatanganinya perjanjian Anglo-Siamis pada tahun 1909, pemerintah Thai bisa mengonsolidasikan kekuasaannya atas seluruh wilayah Pattani. Perjanjian ini memberikan jaminan penuh bagi pemerintah Thai untuk menguasai sepenuhnya Pattani dan memberikan akses baginya untuk mengambil beberapa langkah kebijakan untuk memperlemah keududkan Muslim Pattani, sekaligus meng-konsolkidasikan kekuasaan pemerintah Thai atas Pattani. Semua kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan *monoethnic character of state,*[31] etnik tunggal yang menjadi ciri khas dari negara Thailand. Penduduk yang mayoritas Muslim di Thailand Selatan, kemudian dari segi bahasa dan identitas lainnya seperti cara berpakaian dan adat istiadatnya dipaksakan dan dimasukkan sebagai daerah jajahan.

Sebagai protes atas politik penyeragaman bahasa, banyak terjadi pembakaran sekolah pemerintah, pengeboman dan perusakan jembatan. Guru-guru Thai-Buddhis juga menjadi sasaran penculikan bahkan pembunuhan. Tujuan dari aksi kekerasan ini adalah agar pemerintah mengurungkan niatnya memaksakan pemakaian bahasa Thai dan

---

[31]David Brown, "From Pheripheral Communities to Ethnic Nations", dalam *Pacipic Affairs 61*, 1988, h. 51-71.

memprogramkan pendidikan sekular di wilayah Muslim Pattani. Terdapat sekitar 100 lebih pondok pesantren yang ditutup. Hal ini didasarkan kekhawatiran bahwa politik pendidikan dan penyeragaman bahasa akan mencerabut akar-akar tradisi keagamaan di Melayu Pattani dan menggeser kekuasaan ulama sebagai pengajar dan pemilik pondok.

Para ulama merasa geram ketika terjadi pelarangan pemakaian sorban yang diganti dengan topi. Bahasa Melayu diharamkan diajarkan di sekolah, dan dilarang menggunakannya di tingkat keraajaan secara resmi. Jadi tidak bisa orang Melayu begitu saja digantikan dengan etnik Siam. Begitu juga aksara Melayu yang dahulu dipakai diganti begitu saja dengan aksara Siam. Kegiatan keislaman dilarang di tingkat negara. Sejak itu banyak orang Melayu menyembah berhala Buddha. Semua jabatan di tingkat pemerintahan sama sekali tidak diberikan kepada Melayu-Muslim.[32]

Perjuangan politik untuk mengembalikan kedaulatan Melayu-Muslim-Pattani sebenarnya bermula sejak tahun 1786 ketika kekalahan Pattani atas Siam. Namun perjuangan politik berdsandarkan Islam dan nasionalisme berawal ketika raja-raja Melayu Pattani gagal mempertahankan kekuasaaan pemerintahan mereka. Raji Pattani yang terkahir Tengku Abdul Kadir Kamaruddin bin al-Marhum Sultan Sulaiman Syarifuddin Syah dengan gigih mengusahakan agar Melayu Pattani tidak diserahkan manjadi bagian dari Negara Siam.[33]

---

[32]Mohd. Zamberi A. Malek, *Pattani dalam Tamadun Melayu*, h. 241-242.
[33]*Ibid.*, h. 251-252.

Beberapa kebijakan politik Thai yang diskriminatif atas identitas keislaman dan kemelayuan Pattani yang harus diperjuangkan adalah: 1] Orang Islam dilarang berkumpul walaupun untuk salat Jumat; 2] Orang Melayu-Islam dipaksa meninggalkan adat istiadat Melayu-Islam dan harus melaksanakan apa yang diperkenalkan dari Bangkok; 3] Orang Islam dilarang mengadakan perayaan agama kecuali hari raya saja; 4] Sekolah agama dan pondok agar ditutup kecuali yang di bawah pemerintahan Thainad; 5] Buku teks agama Islam yang berbahasa Arab dan Melayu dilarang penggunaannya dan diganti dengan buku teks yang diterjemahkan ke bahasa Thai; 6] Bahasa pengantar di sekolah agama dan pondok yang berbahasa Arab dan Melayu ditukarkan dengan bahasa Thai; 7] Buku terjemahan bahasa Thai dicetak dengan patung Buddha dan pembelajaran harus ikut dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Thai; 8] Patung Buddha dipasang pada sekolah dasar dan menegah walaupun 70% atau 80% muridnya beragama Islam al ini juga diterapkan di sekolah agama dan pondok; 9] Pembagunan dakwah Islam di wilayah Pattani semata-mata inisiatif umat Islam Pattani. Pihak pemerintah tidak akan memberikan bantuan; dan 10] Bantuan keuangan bagi pendidikan Islam yang datang dari negara Arab, diselewengkan oleh negara Thailand dan hanya 30% yang sampai ke Melayu-Muslim.[34]

Politik integrasi yang dipaksakan, kesenjangan ekonomi makin membuat jarak sosial antara Melayu-Pattani

[34]*Ibid.*, h. 262-264.

berada dalam strata sosial yang lebih rendah dibanding dengan Thai-Buddhis dan Cina. Ini dikarenakan empat provinsi di Selatan Thailand merupakan produsen karet. Namun yang banyak terlibat dalam proses industrialisasi produk karet dan menikmati keuntungan pemasarannya adalah Thai-Buddhis dan Cina dibanding penduduk asli Pattani.

Secara umum dapat digambarkan bahwa dengan upaya-upaya pemerintahan Thai dalam melaksanakan kebijakan asimilasinya, baik itu berupa diskriminasi akomodasi elite politik terhadap etnis Pattani, melalui berbagai strategi pemerintah lain, memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesejahteraan ekonomi bagi etnis Pattani. Hal ini menyebabkan serangkaian pemberontakan atau pergerakan-pergerakan etnis Pattani untuk mendapatkan hak-hak yang dirasakan oleh mereka yang telah dirampas oleh pemerintah Thai.

Sasaran pemerintah Bangkok dalam menjalankan kebijakan asimilasi, yaitu: *Pertama,* di bidang hukum strategi yang ditempuh pemerintah menerpakan hukum kerajaan sebagai landasan hukum masyarakat Pattani, perombakan stuktur pengadilan, serta penerjemahan dan pengkodifikasian hukum Islam agar tercipta keseragaman dan kosistensi dalam penerapanya. *Kedua,* di sektor pendidikan yaitu dengan melarang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk diganti dengan bahasa Thai, mengharuskan pondok menerapkan pendidikan sekular/sebagai sekolah swasta untuk pendidikan Islam. *Ketiga,* di bidang budaya

adalah diciptakannya konsep kebudayaan Thai Ranhanium atau mandat kebudayaan Wiraihan yang merupakan perundang-undangan nasional mengenai keberanian rakyat Thai.

Jatuhnya rezim militer pada tahun 1973, dan ditegakkannya demokrasi, yang berlangsung hingga 1976 saat Jenderal Kriangsak Chomanan mengambil alih pemerintahan sipil merupakan era baru dalam dunia politik Thai. Setiap lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam urusan negara semua keburukan sosial, politik dan ekonomi yang telah ditutupi di bawah rezim diktator diangkat kepermukaan.

Semakin hebat konflik antara pemerintah dan kaum Muslim, semakin mendesak kebutuhan yang disarankan komunitas atas pimpinan yang lebih baik dan lebih efektif. Seperti halnya dengan semua sektor lainnya dalam kehidupan kenegaraan Thai, kaum muda dan terpelajar mengibarkan panji pembaharuan politik. Para pemimpin tradisional yang memperoleh pendidikan di pondok mendapatkan dirinya tidak berdaya dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang telah terjadi selama dua dasawarsa sebelumnya. Sedikit banyaknya dapat dikatakan bahwa, upaya-upaya pemerintah untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan Melayu-Muslim yang tradisional, telah berhasil. Namun, bagaimanapun, suatu saat akan datang dengan sungguh-sungguh kejadian di mana segala urusan, bukan lagi kepada pemerintah, tetapi rakyat berpaling kepada para mahasiswa dan para ulama tradisional.[35]

---

[35]Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai,* h. 168.

Muslim di dunia dewasa ini akan merasakan dampaknya di Thai Selatan. Majlis tertinggi sedunia sudah memutuskan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan dakwahnya di negara-negara di mana terdapat minoritas Islam, seperti Piliphina dan Thailand Selatan. Salah satu perubahan paling penting yang telah terjadi pada golongan Melayu-Muslim di Thailand Selatan adalah terbentuknya berbagai kelompok militan yang secara terang-terangan yang bertujuan "membebaskan" daerah Melayu dari kekuasaan Thai. Namun, masih sulit untuk memperkirakan besarnya dukungan pada organisasi ini, ia telah mendapat banyak sekali publikasi dan kredibilitas melalui kegiatan-kegiatan kekerasan dan propaganda yang terus-menerus dilancarkannya di dalam dan di luar daerah Melayu di Thai Selatan. Melalui organisasi inilah, bantuan dari luar negeri disalurkan kepada berbagai kelompok yang menyatakan sedang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri sekarang.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan telah berganti pimpinan dan sedang bereksperiman dengan taktik-taktik baru dan bahkan dengan ideologi baru untuk mencapai tujuannya, yakni hak menentukan nasib sendiri. Pada era belakangan ini, Partai Komunis Thai (CPT) dan Partai Komunis Malaya (CPM) giat membantu gerakan separatis Melayu itu. Walaupun berbagai organisasi yang bersangkutan telah membantah hal itu, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa setidak-tidaknya tujuan bersama untuk mengacaukan daerah perbatasan dan menghasut penduduk agar menentang peme-

rintah, telah lebih mendekatkan mereka satu sama lain. Baik CPT maupun CPM memanfaatkan kepekaan dan kebencian orang-orang Melayu-Muslim terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang sedang merongrong identitas kebudayaan mereka. CPT, umpamanya, dalam pernyataannya untuk memperingati ulang tahun ke-34 partai itu (1942-1976) menegaskan:[36]

> *Rakyat berbagai nasionalitas di Muangthai harus memperoleh akhlak yang sama; harus saling menghormati, saling mendukung dan saling membantu; harus mempunyai hak untuk menggunakan bahasa dan aksara sendiri dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dan kebudayaan mereka yang halus. Kami menentang setiap diskriminasi dan penindasan terhadap golongan-golongan etnis akan dibentuk administrasi-administrasi otonom dalam lingkungan keluarga besar Negeri Thai. Pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan sepenuhnya.*[37]

Ungkapan ini ditulis untuk menghimbau orang Melayu-Muslim. Ungkapan itu disusun untuk menggugah mimpi ke depan para cendekiawan Muslim yang sedang memperjuangkan kebijakan yang serupa dari pemerintah Thai dimulai sejak masa Haji Sulong. Dengan demikian, di antara orang Melayu di Thai Selatan ada yang mendapatkan sekutu-sekutu yang bersimpati dengan Partai Komunis Thai dan Partai Komunis Malaya. Sudah jelas bahwa konflik-konflik

---

[36]Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai,* h. 172.

[37]*Journal of Contemporary Asia , Vol . 7 , No. 67.*

ideologis pasti akan terjadi kelak; tetapi untuk sementara waktu, tujuan bersama: "pembebasan nasional" merupakan sumber inspirasi yang cukup ampuh untuk mempersatukan ketiga kawan seperjungan yang sebetulnya saling bertentangan. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, ketika orang-orang Kurdi di Iran berjuang berdampingan dengan pasukan-pasukan pendukung Khomeini sebelum jatuhnya rezim Syah; begitu musuh bersama dapat disingkirkan, orang Kurdi memerangi bekas sekutunya.[38]

Kesadaran politik massa rakyat merupakan fungsi dari partisipasi mereka dalam penderitaan yang diakibatkan oleh struktur sosial-ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Apabila nyawa dan harta benda mereka dalam bahaya, mereka pasti akan menjadi dasar politik. Dengan demikian mereka dapat memilih: menentukan sikap dan ikut dalam gerakan untuk perubahan di bawah semacam peng-arahan dan pengawasan, atau keseret ke dalam konflik dalam keadaan tidak berdaya. Orang-orang Melayu di Thai Selatan tampaknya sedang hidup di tengah-tengah perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan yang akan mempunyai implikasi-implikasi yang sangat besar bagi masa depan mereka sebagai suatu golongan etnik.[39]

Periode Ayutthaya ke periode Bangkok awal, para penguasa Thailand mengadopsi kebijakan memecah belah dan memerintah dalam berurusan dengan negara-negara Muslim

---

[38]Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai,* h. 173.
[39]*Ibid,* h. 174.

di Selatan. Setelah banyak pemberontakan dari negara-negara Muslim, Bangkok dibagi menjadi kota-kota kecil dan melimpahkan kewenangan atas negara-negara pengikut di Selatan ke kota Thai-Buddha utama di daerah, yang bertindak atas nama Bangkok. Songkhla dan Nakhonsrithammarat adalah kota yang dipilih. Pengaturan ini mencerminkan keterbatasan birokrasi Bangkok dan keinginan untuk menguasai negara-negara jajahan jauh dengan cara politik untuk menciptakan berbagai kelompok yang kuat di kalangan elite lokal sehingga tak seorang elite cukup kuat untuk membuat pemberontakan berhasil melawan Bangkok.

Kebijakan tersebut membagi dan aturan terbukti efektif meskipun ketidakefisienan birokrasi Siam.[40] Sejarah kerajaan Ayutthaya mencatat bahwa tahun 1564 ketika Ayutthaya kerajaan terpaksa menyerah ke Burma, sebuah unit pasukan Melayu dari Pattani, yang diminta untuk datang untuk membantu Ayutthaya terhadap Birma, melihat kesempatan dan memutuskan untuk berbalik melawan raja Ayutthaya itu dengan mengelola merebut istana untuk sementara waktu. Raja dievakuasi dari istananya sebelum mencoba kemudian untuk mengusir pemberontak Melayu keluar dari Ayutthaya. Pemberontakan lain terjadi antara 1630 dan 1633 di bawah Raja Prasat Thong, dan tawaran terakhir pada tahun 1767, setelah karung Ayutthaya oleh Burma.[41]

---

[40]Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand,* h.12.
[41]*Ibid,* h.13.

Walaupun ada pemberontakan dan perlawanan dari penguasa Pattani di periode Ayutthaya dan Bangkok, mereka konflik antara kelompok istimewa dan kuat dari kedua belah pihak atas kontrol tenaga kerja dan kekayaan di daerah tersebut. Tidak sampai sejarah modern negara-bangsa tidak konflik mulai datang dari rasa rakyat identifikasi mereka agama dan budaya. Dengan munculnya nasionalisme Thailand dan ekspansionisme selama Perang Dunia II, Melayu-Muslim di Selatan yang mendalam menjadi sasaran kebijakan *thailandicization* Bangkok. Sejak saat itu konflik daerah berubah menjadi gerakan separatis yang melibatkan semua Muslim di daerah itu, tidak hanya kelas elite.[42]

Penggabungan daerah Pattani Greater (lebih besar) ke dalam sistem administrasi Thailand pada tahun 1902 tidak hanya tindakan politik sentralisasi kekuasaan oleh Bangkok, tapi apa yang lebih bermasalah dan menghancurkan adalah intervensi ke dasar masyarakat Islam dengan praktek Thai-Buddhis. Yang paling penting adalah penghapusan Syariah (hukum Islam) dan adat Melayu (hukum adat Melayu), yang merupakan dasar praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum penggabungan wilayah Pattani Raya, daerah itu diperintah oleh raja Melayu (raja).

Meskipun berada di bawah kekuasaan Raja Pattani Thailand, raja masih memerintah berdasarkan syariah dan adat Melayu. Lembaga-lembaga penting Islam adalah masjid, atau masjid di Kadi Thailand, dan pondok (sekolah agama).

---

[42]Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslim in Thailand,* h.14.

Masjid ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi serta sebagai tempat praktek keagamaan dan balai desa. pondok ini merupakan pusat belajar bagi masyarakat. Kedua lembaga sangat penting bagi keberadaan dan kesejahteraan bagi semua umat Islam. Pelaksanaan sentralisasi administrasi di wilayah ini pasti campur tangan dan diganti aturan lokal dan adat dengan peraturan pusat dan peraturan. Segera setelah itu, ruang provinsi menggantikan masjid lama, sebagai arti dari kedatangan pemisahan agama dari politik.[43]

Dari penggabungan awal Greater Pattani Daerah pada tahun 1902, wilayah penting yang menjadi perhatian besar bagi negara Thailand itu di bidang pendidikan, yang dianggap salah satu sarana yang diperlukan untuk mencapai modernisasi. Di bagian lain Thailand, reformasi pendidikan dilakukan oleh para biksu Buddha lokal dan kuil-kuil bersama dengan pejabat pemerintah pendidikan. Masyarakat Muslim memiliki sistem mereka sendiri dan bahasa pengantar.[44]

Ketika reformasi pendidikan datang ke masyarakat Muslim, mereka diminta untuk membaca dan menulis di Thailand dan isinya berorientasi pada mata pelajaran sekular dan bahkan Buddhisme. Reaksi langsung di kalangan umat Islam adalah keengganan dalam hal mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum. Orang Melayu memandang UU Pendidikan sebagai “batas ketahanan”. Mereka menuduh pemerintah Thailand dari “mencoba untuk

---

[43]*Ibid,* h, 15.
[44]*Ibid,*h. 17.

membasmi bahasa Melayu membenci dan mengubah status alami dari generasi muda Melayu ke Siam".

Integrasi paksa-Melayu Muslim terus pada masa pemerintahan Raja Rama VI Vajiruvudh atau (1910-1925) yang berkampanye secara intens untuk menyatukan kerajaan Thailand bawah nasionalisme resmi. Melayu-Muslim di Pattani menentang ide Raja Thailand karena esensi yang diterapkan untuk menekankan tritunggal bangsa, agama (Buddha) dan raja. Pemerintah mengeluarkan program pendidikan wajib Thailand untuk menanamkan rasa nasionalisme baru. Kebijakan tersebut dan praktik memengaruhi-Muslim Melayu di Selatan karena pendidikan mereka dilakukan di masjid-masjid dan pondok. Syarat yang harus mengubah bahasa dan kurikulum untuk Thailand tidak bisa diterima.

Pada tahun 1910 dan 1911, pemberontakan pecah di bawah kepemimpinan tertentu [pemimpin agama] para haji. Pemberontakan 1922 adalah lebih mencolok karena melibatkan beberapa pemimpin agama dan kaum bangsawan Melayu termasuk mantan raja Pattani, Raja Abdul Kadir. Tujuan dari pemberontakan itu adalah kemerdekaan. Pada tahun 1923, pemerintah Bangkok terpaksa meninjau kembali kebijakan pendidikan wajib, penetrasi birokrasi dan keterlibatan sosial, dan ekonomi-Melayu Muslim. Kebijakan revisi memerintahkan pejabat tidak melanggar agama Islam dan bukan pajak-Muslim Melayu di Pattani lebih besar dari negara-negara Melayu di bawah Inggris, dan pejabat

pemerintah yang akan ditugaskan di sana harus jujur, sopan dan tegas.

Kondisi saat ini, elite Melayu-Muslim di wilayah tersebut menemukan bahwa pernyataan politik otonomi dan hak agama terdengar oleh para pemimpin pemerintah Thailand. Meskipun kebijakan umum asimilasi budaya dan konsolidasi kekuasaan negara Thailand belum diberhentikan, struktur politik yang berubah dan kondisi ekonomi di tahun 1930-an, baik di pemerintah pusat-Thailand dan juga di provinsi Pattani, membawa suasana baru demokrasi dan nasionalisme dari yang untuk sesaat tampaknya memberikan elite Muslim dan penduduk beberapa harapan untuk masa depan yang lebih baik.[45] Runtuhnya kerajaan Pattani sebagai suatu kelompok etnik dan berbahasa Melayu serta beragama Islam dipaksa menjadi suatu bagian yang integral dari masyarakat Thai yang berbeda secara etnik, bahasa dan agama.

Penyatuan ini banyak membawa dampak politik, ekonomi maupun kultural.[46] Rapuhnya Melayu Pattani di Thailand Selatan, lunturnya kekuatan politik dan hilangnya peran elite tradisional mereka menimbulkan efek melemahkan umat. Bahasa Melayu yang menjadi perekat identitas mereka dan media dalam sistem pengajaran dihapuskan karena mendapat pengawasan dari penguasa Thai.[47] Muslim Thailand

---

[45]*Ibid*, h, 17.

[46]Tim Penyusun Studi Islam, *Pengantar Studi Islam* , h. 311.

[47]Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 270.

merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas (misalnya, mereka dipaksa mengambil nama-nama Thai). Sangat tidak menyenangkan di Selatan dengan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap perasaan kebangsaan (Melayu) dan keagamaan penduduk.

Pemerintah mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim dan menggantinya dengan sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim, tidak peduli terhadap perayaan-perayaan Islam, menganiaya, menahan dan kadang-kadang malah membunuh para pemimpin agama dan politik Muslim (antara 1973 dan 1975), sekitar lima ratus Muslim dibunuh oleh pemerintah di selatan, dan terakhir tetapi tidak sepele, pemerintah memerintah Muslim untuk mengambil nama Thai yang non Muslim: demi menipisnya identitas Islam mereka.[48]

Setidaknya, ada dua jenis kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand atas wilayah Pattani. Salah satunya adalah aturan langsung dan aturan tidak langsung. Aturan yang terlibat langsung mengirim pejabat Thailand untuk memerintah kerajaan Muslim; orang Siam dikenakan pada kelompok penguasa lokal dan penduduk. Hasil dari awal perlawanan dan ketidakpuasan para penguasa Pattani dan orang-orang yang cenderung untuk memungkinkan peran yang lebih dan kepentingan dengan elite Muslim lokal dan

---

[48]M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 2003.

dengan demikian memberikan persyaratan lagi hubungan damai antara kedua belah pihak.

Ke depan, yang menjadi tantangan terbesar masyarakat Buddha yang mayoritas maupun Muslim minoritas di Thailand adalah apakah bangsa itu mampu menjadi sebuah masyarakat yang benar-benar pluralistik, yang mengakui persamaan dari semua keyakinan keagamaan dan minoritas etnik. Karena saat ini kaum Muslim semakin banyak mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan politik, pendidikan, dan budaya Thailand untuk membantu dalam membangun landasan bagi masyarakat yang lebih terbuka, toleran, dan majemuk.[49]

Berikut adalah periodesasi integrasi Melayu-Pattani menjadi kerajaan Siam sejak tahun 1785-1902.

Tabel 3. Periodesisasi Integrasi Muslim Pattani

Tahun	Akar Masalah	Sejarah	Aktor
1785	Patani diserang oleh kerajaan Chakri	Pasca Phya Taksin Berjaya mengalahkan Burma di Ayuthia pada 1776, Siam kemudian membidik selatan Thailand di semenanjung Ligor, Songkhla, dan Pattalung. Kerajaan Melayu Pattani berhasil dikuasai oleh kerajaan	Phraya Chakri memerintah adiknya, Putra Surasi dibantu oleh Phraya Senaphutan, Gabenor Pattalung, Palatcana dan Songkhla agar menyerang Pattani pada tahun 1785, dan raja Pattani bertahan namun gagal

[49]Raymond Scupin, "Thailand" dalam John L. Esposito (Ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,* Jilid 6, Mizan, Bandung, h. 41.

		Chakri (Siam) tahun 1786	mempertahankan serang Siam
1808	Kerajaan Melayu Pattani terpecah menjadi 7 wilayah	Permberontakan dari tokoh Melayu Pattani dapat dipatahkan oleh Siam dengan bantuan kerajaan pusat di Bangkok. Kemudian Kerajaan Melayu Pattani dipecah menjadi 7 negeri atau *Hua Muang*, untuk melemahkan Pattani. 7 negeri tersebut adalah: 1) Pattani Tuan Sulung; 2) Teluban Nik Dir; 3) Nongchik Tuan Nik; 4) Jalor Tuan Yalor; 5) Jambu Nai Pai; 6) Rangai Nik Dah; dan 7) Reman Tuan Mansur	- Sultan Muhammad kalah dalam pertempuran dengan pihak Siam. Akibat kekalahan ini, 4000 Melayu Pattani dijadikan tawadan dan dibawa ke Bangkok - Tengku Lumidin telah bersatu dengan Raja Annam yang beragama Islam, Okphaya Cho So dan memberontak dan menyerang tentara Siam di Tiba, Chanak. Songkhala dan Saiburi. Pada peristiwa ini Tengku Lamidin dibantu oleh Syaikh Abdul Kamal , seorang ulama dari Mekah, tapi gagal - Pada tahun ini juga Datuk Pangkalan ikut menentang Siam walaupun akhirnya gagal juga.
1838	Kebangkitan anti-Siam	Peristiwa dipicu oleh keadaan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat Pattani. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan	Kekecewaan tokoh Pattani terhadap Raja Rama III yang melantik gubernur kepala tujuh wilayah Pattani untuk mendukung pemerintahan Siam

		kekuasaan raja dan kedaulatan Pattani yang dimabil alih Siam	
1896	Perubahan kebijakan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan materi dengan meminta upeti lebih yang diberlakukan Raja Chulalongkor n	Rencana pembagian wilayah berdasarkan thesapiban. Lewat peraturan ini kerajaan Melayu-Patani tidak lagi mempunyai kekuasaan otonom. Sistem ini menjadikan tiap daerah dipimpin oleh dewan perwakilan yang bertanggung jawab kepada Mendagri. Dengan ini semua kaki tangan kerajaan dari atas sampai bawah dibayar dengan gaji kerajaan	Raja Chulalongkorn memberlakukan system tersebut sebagai akibat pergolakan yang terjadi di Asia Tenggara tahun 1890 dengan berkuasanya Inggris dan Prancis yang mengancam wilayah integritas Siam
1901	Kerajaan Melayu Pattani melakukan permebrontak an atas Siam	Raja serta petinggi Melayu Pattani menolak kehadiran pegawai kerajaan Siam dan pegawainya karena dianggap ikut campur dalam pembagian wilayah di negeri-negeri Pattani. Diberlakukannya wilayah 120 ntuk memperkokoh kerajaan Siam atas Pattani yang berakibat penangkapan raja-raja Melayu di antaranya Raja Abdul Kadir	Tengku Abdul Kadir memberontak di akhir Oktober 1901 setelah perbekalan senjata datang dari Singapura, dan hal ini didukung oleh Siam

1902	Perjanjian Anglo-Siam	Pemisahan wilayah Melayu Pattani jadi provinsi dengan perjanjian antara Inggris dengan Siam	Dihadiri utusan Inggris untuk wilayah Asia, Frank Swettenham dengan Raja Siam Chulalongkorn, di mana wilayah Kedah, Terengganu, Kelantan, dan Perlis masuk menjadi wilayah Kerajaan Inggris sedangkan Pattani menjadi kerajaan Siam.
1910 dan 1911	Proses Siamisasi	Ini membawa dampak negative terhadap pimpinan politik Islam. Raja kehilangan wibawa karena pembatasan pelksanaan syariat Islam	Ulama memberontak terhadap pemerintah Bangkok yang dipimpin oleh ulama atas adanyakebijak tersebut
1921	Kebijakan Pendidikan Dasar	Anak-Anak Muslim diwajibkan masuk sekolah negeri Thai, diwajibkan menggunakan bahasa Thai	Bahasa Melayu mulai terhapus dari bahasa sehari-hari sehingga tahun 1922 dan 1923 Inggris camput tangan dengan kompromi berbagai kebijakan social.
1932	Perubahan "pemerintahan raja absolut" ke "kerajaan konstitusional"	Hal ini disambut baik oleh Musli-Pattani, karena sejumlah pemimpin muslim yang tadinya mengungsi ke Kelantan bisa kembali ke Pattani	Hasilnya pada pemilu 1937 dan 1938 tiga dari empat provinsi Muslim-Pattani berhasil mengirimkan wakil-wakil Muslim ke Parlemen di Bangkonk

1980-…	Kebijakan Tai Rum Jen dan Kuam Wang Mai atau kebijakan aspirasi baru	Kebijakan ini diprakarsai oleh Jenderal Chavalit Yungchayudh	Banyak warga Pattani merasa lega karena kebijakan ini bertujuan membangun empat wilayah muslim, yakni Narathiwat, Pattani, Yala, dan Satul. Hal ini juga membawa angin segar terhadap taraf hidup warga Muslim Pattani.

Sumber diolah dari: Yuniarto, P. Rudolf, (2004), Nik Anur Nik Mahmud (2006), Mohd. Zamberi A. Malik (1994), dan Iik Mansurnoor dan Dadi Darmadi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5.*

3. Intelektual Islam Pattani

Abad ke-16 meruapakan puncak kemasan dari kerajaan Islam Pattani. Kegemilangan tersebut bisa terlihat bukan hanya dari perdagangan saja tetapi juga ilmu pengetahuan. Kejayaan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan berlangsung hingga awal abad ke-19. Pada era tersebut Pattani menghasilkan bayak ulama yang menulis kitab keislaman, baik asli maupun terjemahan dari buku-buku berbahasa Arab. Tidak mengherankan jika menjelang pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19, pattani layak disebut sebagai ‘tempat kelahiran Islam Asia Tenggara’.[50]

---

[50]Iik Arifin Mansurnoor dan Dadi Darmadi, ”Minoritas Islam” dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* Jilid 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 474-475.

Pada abad ke-16 muncul nama-nama pemikir dan penyebar Islam seperti Syaikh Syafiauddin al-Abbasi, Syaikh Muhammad Said Barsisa, dan Syaikh Gombak Abdul Mubin. Kemudian muncul juga para pendakwah Pattani seperti Syaikh Fakih Ali al-Nalbari, Syaikh Ali Faqih al-Fatani, Syaikh Abdul Jalil al-Fattani.[51]

Kemudian pada abad ke-17 juga merupakan masa kemajuan dalam tradisi penulisan Melayu di kawasana Asian Tenggara. Berbagai wilyah di kawasan tersebut banyak menghasilkan berbagai karya, terutama yang bercorak sejarah,m seperti *Silsilah Kutai, Hikayat Banjar, Hikayat Tanah Hitu, Hikayat Aceh,* dan *Hikayat Pattani*. Pada saat yang bersamaan sistem perdagangan yang dibawa oleh bangsa Eropa juga menemukan polanya di tempat tersebut. Keberadaan Pattani sebagai bagian khazanah dari keusasteraan Melayu di era tersebut. Dalam *Sejarah Melayu* yang disalin pada abad ke-19, Pattani digambarkan sebagai kota mahligai. Negeri tersebut merupakan kerajaan yang berdaulat yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, yaitu Siam dan Malaka. Hubungan baik dengan Siam terjadi karena raja Pattani, Cau Sri Bangsa merupakan keturunan dari Siam.[52] Kegemilangan Pattani

---

[51]Mohd. Zamberi A. Malek, *Pattani dalam Tamadun Melayu,* Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1994, h. 94.

[52]Mamlahatun Buduroh, "Legitimasi Kesultanan Patani dalam Teks-Teks Melayu", dalam Titik Pujiastuti & Tommy Christomy (peny.), *Teks, Naskah, dan Kelisanan Nusantara Festschrift untuk Prof. Achadiati Ikram,* Yayasan Pernaskahan Nusantara, 2011, h. 76-77.

terus berlanjut sampai menjelang akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terus berperan sebagai pusat budaya Islam.

Pada abad ke-20 adalah masa-masa khusus tentang penyebaran kitab-kitab Islam yang mempengaruhi Semenanjung Melayu. Pattani seperti dikatakan oleh Awang Had Salleh, menjadi titik tolak utama bagi pelajar Muslim-Melayu sebelum berangkat menuntut ilmu ke Timur Tengah. Begitu juga Virginia G. Matheson menyatakan bahwa Pattani dipilih oleh pelajar Islam sebagai tempat menimba ilmu. Faktor-faktor penyebaran Islam dari Pattani ke seluruh nusantara bertepatan dengan perkembangan Pattani sebagai pusat kebudayaan Melayu.[53]

Salah satu ulama yang berasal dari tanah Pattani adalah Syaikh Dawud bin Abdullah bin Idris al-Fatani,[54] dikenal salah satu ulama yang produktif di kawasan Asia Tenggara. Selama di tanah suci ia bergaul dan belajar bersama beberapa orang yang kemudian menjadi ulama berpengaruh di Indonesia, seperti Abdus Samad al-Palimbani. Ia menimba berbagai ilmu keislaman, seperti ilmu-ilmu hadis, syariat, kalam, dan tasawuf dari berbagai ulama terkenal pada zamannya, seperti asy-Syarqawy dan asy-Syanwani. Keduanya adalah Syaikh al-Azhar, Kairo dan merupakan tokoh pembaru yang sangat berpengaruh. Salah satu karya

---

[53]Mohd. Zamberi A. Malek, *Pattani dalam Tamadun Melayu,*h. 100-101.

[54]Tentang tokoh ini secara lengkap bisa dibaca disertasi Lukman Hakim Darusman yang berjudul Lukman Hakim Darusman, *Jihad In Two Faces of Shari'ah, Sufism and Islamic Jurisprudence and The Revival of Islamic Movements In The Malay World Case Studies of Yusuf al-Maqassary and Dawud al-Fatani,* VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010,h. 249-311.

Dawud al-Fatani yang cukup terkenal adalah *Furµ' al-Mas±'il wa U¡µl al-Mas±'il,* sebuah kitab yang membahas akidah Islam.

Di masa-masa selanjutnya, sekolah-sekolah agama dan pondok tetap menjadi lembaga pendidikan terpenting di dalam penyemaian ajaran-ajaran Islam. Ulama di pondok menjadi pemimpin yang disegani dan ditaati, terutama ketika situasi sosial dan politik tidak menentu. Dalam sejarahnya pondok merupakan lembaga pendidikan keislaman yang sangat berpengaruh dan terhormat di Pattani. Hingga awal abad ke-20, di seluruh Pattani terdapat lebih 500 pondok.[55]

Bahkan pondok yang paling tua dan terkenal di Pattani dan masih aktif adalah Pondok Dalam, Bermin, Semela, Dual, Kota, Gerisik, Telok Manok. Murid atau santri yang datang ke pondok-pondok ini adalah berasal dari dalam dan luar negeri. Karena itu, pondok menjadi sangat penting dalam meyebarkan dan memajukan martabat Melayu. Di Burma dan Kamboja pada waktu itu, khutbah jumat disampaikan dengan bahasa Melayu. Begitu juga karangan dan kitab-kitab ulama Patani diajarkan di sana. Di Pattani santri pondok disebut *tuk pake.* Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang sangast ingin kepada ilmu pengetahuan dan bimbingan keagamaan. Orang yang mengajar disebut *tuk guru*, biasanya seorang yang mendalam ilmu pengetahuan Islam, warak, dan tawaduk. *Tuk Guru* biasanya orang yang telah beribadah haji

---

[55]Iik Arifin Mansurnoor dan Dadi Darmadi, "Minoritas Islam" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* Jilid 5, h. 475.

atau pernah tinggal dan belajar di Mekah atau Timur Tengah.[56]

Peran intelektual atau ulama Pattani terhadap pembebasan wilayah ini dari penjajah Siam juga tidak pernah berhenti sampai saat ini. Bahkan salah satu ulama kharismatik Pattani, Tengku Abdul Jalil bin Tengku Abdul Mutallib, pada tanggal 23 September 1963, memohon kepada Presiden Soekarno untuk membantu Pattani membebaskan diri dari Siam. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pattani bukanlah bagian dari negeri Siam. Karena itu Tengku Abdul Jalil, meminta kepada Presiden Soekarno beberapa hal, yaitu: *pertama,* agar Negara Republik Indonesia khsusunya presiden untuk membantu Pattani; *kedua,*Pattani menuntut HAM sesuai dengan *Atlantic Charter*; dan *ketiga,* kami mengharap kepada presiden dan Negara Republik Indonesia agar membawa kasus ini ke organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).[57]

Intelektual atau ulama Indonesia yang keturunan Pattani adalah Syaikh Abdus Samad al-Palembani dan Syaikh Ahmad Marzuki al-Batawi. Abdus Samad Al-Palimbani keturunan Pattani yang lahir di Palembang. Ayahnya adalah Syaikh Abdul Jalil. Pada masa itu hubungan Palembang dengan Pattani terjalin erat sekali. Pendidikan pertama al-Palimbani dalam menuntut ilmu di Pattani adalah adalah Pondok Bendang Gucil-Gerisik, Pondok Kuala Bekah, dan Pondok Semela. Guru-gurunya di Pattani memang tidak

---

[56]Mohd. Zamberi A. Malek, *Pattani dalam Tamadun Melayu,*h. 96-97.

[57]Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954,* h. 74-75.

diketahui secara tepat. Namun ketika ia di Mekah dan Medinah, beberapa gurunya yang terkenal adalah Syaikh Ataullah, Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi, Syaikh Muhammad bin Abdul Karim Saman, dan sebagainya. Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi merupakan guru Muhammad bin Abdul Wahab (1115-1206 H/1703-1794 M). Sahabat dan teman al-Palimbani pada saat itu adalah Syaikh Daud al-Fatani, Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, dan Syaikh Abdul Wahab Arsyad Daeng Bunga Bugis.[58]

Adapun Syaikh Ahmad Marzuki al-Batawi dengan nama Ahmad Marzuki bin Syekh Ahmad al-Mirshad bin Khatib Sa'ad bin Abdul Rahman al-Batawi. Atau lebih dikenal dengan nama Guru Marzuki dari Klender yang dilahirkan tahun 1876 dan meninggal pada tahun 1934. Ayah Guru Marzuki adalah Syekh Ahmad al-Mirshad, keturunan keempat Kesultanan Melayu Patani di Thailand Selatan yang hijrah ke Batavia. Ia adalah ulama Betawi generasi kelima setelah Syekh Ahmad Junaidi al-Batawi (pernah menjadi imam di Masjidil Haram), Guru Mujtaba, Guru Manshur dan Habib Utsman bin Yahya.[59]

Bersamaan dengan Guru Marzuki di masa yang sama, terkenal juga lima ulama lainnya yaitu KH Moh Mansur

---

[58]Mohd. Zamberi A. Malek, *Pattani dalam Tamadun Melayu,*h. 121-122.

[59]Lihat "Hujjatul Islam: Ahmad Marzuki Al-Batawi, Pelopor Pesantren di Batavia" dalam *http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54118&Itemid=367* diakses 2 Nopember 2012.

(Guru Mansur) dari Jembatan Lima, KH Abdul Majid (Guru Majid) dari Pekojan, KH Ahmad Khalid (Guru Khalid) dari Gondangdia, KH Mahmud Romli (Guru Mahmud) dari Menteng Dalam dan KH Abdul Mughni (Guru Mugni) dari Kuningan. Seperti ulama terkemuka masa itu, Guru Marzuki pun sempat hijrah ke Makkah di usia 16 tahun. Selain melaksanakan ibadah haji, ia juga menimba ilmu agama selama tujuh tahun di sana. Selama masa belajarnya di Makkah ia menerima pembelajaran tentang Islam melalui pengajian halaqah di masjid-masjid.

Ahmad Marzuki al-Batawi dan juga kelima ulama terkemuka yang sama-sama berkarya akhir abad 19 dan awal abad 20 berhasil menyebarluaskan ajaran Islam dan juga meningkatkan intelektualitas di seluruh penjuru tanah Batavia. Begitu juga mendidik ulama-ulama terkemuka yang meneruskan ajaran-ajaran gurunya. Para juru baca di kelompok santri pesantren kemudian menjadi ulama terpandang di masyarakat Betawi. Sebagian dari mereka meneruskan metode ajar Guru Marzuki dengan mendirikan pondok pesantren dan juga lembaga pendidikan Islam yang masih bisa ditemui saat ini.

PENUTUP

Dari parparan dan bahsan dari bab-bab sebelumnya maka ada beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: *Pertama*, sejak perjanjian Inggris-Siam 1909, pemisahan Melayu Pattani sebelah utara menjadi:

Pattani, Narathiwat, Songkhla, Satun dan Yala, dimasukkan ke provinsi di Thailand. Sementara negara di Melayu utara yang lain seperti Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia.

Kebijakan nasionalisme budaya Thailand termasuk wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatan. Muslim di Thailand Selatan memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk (dan juga pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam, dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari bangsa Pattani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam Kerajaan Islam Pattani. Kuatnya identitas lokal keislaman dan kemelayuan ini mendorong banyak intelektual Thailand untuk menggagas status otonomi Thailand Selatan, khususnya di tiga provinsi: Pattani, Yala dan Narathiwat, atau dalam banyak istilah sejarah ketiga provinsi ini disebut Muslim Pattani.

Kebijakan diskriminatif yang seringkali dilakukan oleh pemerintah Thailand membuat identitas keislaman dan kemelayuan di Thailand Selatan menjadi tidak nyaman bagi etnis tersebut. Sebagai contoh kebijakan nasionalisasi pendidikan di bawah satu kebijakan yang tidak memperhatikan aspirasi keislaman dan kemelayuan terus akan meyebabkan konflik yang berkepanjangan. Menghilangkan identitas kemelayuan sama dengan melenyapkan keislaman dan begitu pula sebaliknya. Keislam-an dan kemelayuan satu identitas yang tidak disa dipisahkan.

Menjadi Melayu berarti Islam dan menjadi Islam berarti Melayu.

Kedua, hubungan antara Melayu-Pattani dengan Siam tampaknya tidak pernah akur dalam sepanajang sejarah. Hal ini disebabkan oleh Kerajaan Siam yang selalu ingin menguasai Melayu Pattani. Siam dalam usaha-usahanya untuk menaklukkan Melayu Pattani sering pula dibantu oleh pihak Asing seperti Inggris. Campur tangan Inggris ini membuat suasana semakin memperkeruh hubungan antara Melayu-Pattani dengan Siam. Sehingga akhirnya, Melayu Pattani menganggap Siam adalah bagian dari koloniaslime baru bagi mereka. Sebab itu, Melayu Pattani tidak akan pernah surut untuk menentang Siam yang ingin menguasai daerah mereka di selatan.

Ketiga, akibat kebijakan Siamisasi secara terus menerus mengakibatkan munculnya gerakan politik separatisme. Hal ini karena adanya politik penyeragaman dari tingkat pemerintahan Thailand di segala bidang. Implikasinya adalah lewat ulama, intelektual Melayu-Pattani, merapatkan barisan untuk menentang seluruh kebijakan penyeragaman yang diterapkan di Pattani. Beberapa kharismatik yang cukup terkenal dalam menentang kebijakan Thailand tersebut adalah Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, Kooday, Haji Sulung, Tengku Mahmood Mahyiddeen, Tnegku Abdul Kador Petra, Tengku Abdul Jalil, dan lain-lain.

Perlawanan budaya akibat diskriminasi tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu: *pertama,* Melayu-

Pattani berhak atas kehidupan yang layak dengan identitas budaya dan agamya; *kedua,* semua orang harus menghormati dan menghargai perbedaan budaya; dan *ketiga,* masyarakat daerah dapat berperan penting dalam penyelesaian di bidang pembangunan.

Akhirnya, Thailand ditantang apakah negara ini dapat mempraktikkan sikap pluralitas agama, budaya, etnis di masa-masa akan datang. Kalau tidak, maka keadaan akan terus memburuk bahkan sampai titik terendah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Auni bin Haji, *Islam dalam Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu,* Malaysia, Darulfikir SDN BHO.

Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah,* Yogyakarta, Ar-ruzz Media.

Aphornsuvan, Thanet 2004. "Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand" dalam *Asia Research Institute Working Paper Series No. 32*.

______, 2003. *History and Politics of the Muslim in Thailand,* Bangkok, Thammasat University.

Brown, David. 1988. "From Pheripheral Communities to Ethnic Nations", dalam *Pacipic Affairs 61*.

Buduroh, Mamlahatun. 2011. "Legitimasi Kesultanan Pattani dalam Teks-Teks Melayu" dalam Titik Pujiastuti &

Tommy Christomy, *Teks Naskah dan Kelisanan Nusantara,* Yayasan Pernaskahan Nusantara, Depok.

Darusman, Lukman Hakim. 2010. *Jihad In Two Faces of Shari'ah, Sufism and Islamic Jurisprudence and The Revival of Islamic Movements In The Malay World Case Studies of Yusuf al-Maqassary and Dawud al-Fatani,* VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG.

Desain Operasional (DO)/Proposal. 2012. "Penelusuran Sejarah Islam di Nusantara" Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI.

Harish, S.P., dan Joseph Chinyong Liow. 2007. *"The Coup and the Conflict in Southern Thailand"* dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 19, No. 1. Northern Illinois University Center for Southeast Asian Studies.

Hasbullah, Moeflich. 2003. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru: Kebangkitan Islam,* Bandung: Fokusmedia.

"Hujjatul Islam: Ahmad Marzuki Al-Batawi, Pelopor Pesantren di Batavia" alam *http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54118&Itemid=367* diakses 2 Nopember 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani#Sejarah

Kettani, M. Ali. 2005. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini,* PT Raja Grafindo Persada.

Journal of the Muslim World League, September 1978.

Journal of Contemporary Asia , Vol . 7 , No, 67.

Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta, Bentang Budaya.

Liow, Josep Chinyang. 2006. *Muslim Resistance in Southern Thailand and Philippines: Religion, Ideology, and Politics,* East-West Center Washington 1819 L Street, NW, Suite 200.

Mahmud, Nik Anuar Nik. 2006. *Sejarah Perjuangan Melayu Pattani 1785-1954,* UKM Malaysia-Bangi.

Malek, Mohd. Zamberi A.1994. *Pattani dalam Tamadun Melayu,* Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur.

Mansurnoor, Iik Arifin, dan Dadi Darmadi, "Minoritas Islam" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* Jilid 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Muhadjir, Noeng.1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta, Rakasarasin.

Narbuko, Cholid, dan Abu Narbuki. 1997. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksaram.

Pitsuwan,Surin. 1989. *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani,* Jakarta: LP3ES.

Scupin, Raymond, “Thailand” dalam John L. Esposito (Ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,* Jilid 6, Mizan, Bandung.

Shadily, Hassan. 1984. *Ensiklopedi Indonesia*, edisi khusus, jilid 6, Jakarta, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah,*Yogyakarta, Penerbit Ombak.

Suhrke, Astri. 1977. “Loyalists and Separatists: The Muslims in Southern Thailand” dalam *Asian Survey, Vol. 17, No. 3.* University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2643498 .

Supriadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam,* Bandung: Pustaka Setia.

Thohir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Studi Islam. 2004. *Pengantar Studi Islam,* Surabaya: IAIN Ampel Press.

Walker, Dennis P. Dennis P. Dennis P. 2005. “Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Pattani) 1948-2005”, dalam *Islamiyyat 27 (1).*

Yuniarto, P. Rudolf. 2004. “Integrasi Muslim Pattani: Reidentitas Sosial atas Dominasi ‘Nasional’ Thailand”, dalam *Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner,*Vol. 3 No. 2. Juli-Desember.

______, 2005. ”Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya,* Vol. 7, No. 1 Tahun.

______, 2004. *Integrasi Melayu Pattani: Sejarah Perubahan Geopolitik dan Demografi,* PSDR-LIPI.

SEONGGOK CATATAN AKHIR KAJIAN

Oleh : Choirul Fuad Yusuf

Penelusuran sejarah Islam di Nusantara yang meliput kawasan Asia Tenggara seperti dinarasikan dalam *Dinamika Islam Asia Tenggara: Filipina, Burma, dan Thailand* ini, sesungguhnya, bukan topik baru. Sudah banyak sejarahwan dan ilmuwan sosial mengkaji mengenai Islam di Asia Tenggara dari berbagai perspektif--historik, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Buku-buku monumental ikhwal sejarah muslim Filipina, seperti : *Muslim in the Philippine*, oleh Cesar Adib Majul dan *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippine*, ditulis oleh Thomas M. McKenna, 1998, menggaris-bawahi bahwa Islam Filipina, dalam kesejarahannya memang mengalami perkembangan dinamik yang luar biasa. Sejak kehadirannya, secara politik, Islam dan pemeluknya dianggap sebagai sebagai agama penyebab terjadinya siatuasi yang mengacaukan.

Pada awal masuknya Islam sekitar abad 14-an, misalnya, Islam dianggap sebagai pesaing sang penguasa Spanyol (Counter-Spaniard). Pengikutnya digelari "*moro*" yang berarti "orang bodoh (*non-intelligent, stupid person*), dan petempur musim (*muslim fighter*). Terakhir, dalam ranah politik, istilah "moro" dipergunakan untuk menyebut muslim Mindanao sebagai "Bangsamoro", yang secara kultural

sebenarnya untuk menstigmatisasi muslim sebagai bangsa yang kurang beradab.[1] Walau tidak dipermasalahkan oleh muslim Mindanao itu sendiri dalam realitasnya.

Pada perkembangan berikutnya, Islam yang berkembang di Filipina bagian selatan (atau pulau Mindanau dan sekitarnya) membangun kesultanan sebagai pusat kekuasaan muslim, diantaranya Kesultanan Sulu dan Maguindanaon. Keberadaan dan kekuasaan kesultanan-kesultanan ini, dalam sejarah Filipinan, senantiasa dihadapkan pada situasi konfliktul berbasis politik-agama melawan Spanyol, Amerika, dan Pemerintah Filipina sendiri pada paska kemerdekaan. "*Conflicts and rebellions have continued in the Philippine from the colonial period up to the present time*" yang berujung pada pengusulan Daerah otonom bagi Muslim Filipina (Autonomous Region in the Muslim Mindanao/ARMM) yang dalam prosesnya tetap memuat konflik tanpa henti.

Nasib muslim di Burma (Myanmar), demikian pula, tak kalah memprihatinkannya--bila dibanding dengan komunitas muslim Filipina dan Thailand. Muslim Burma berjumlah sekitar 4 % dari total penduduk Burma yang terdiri dari adalah kelompok minoritas pemeluk Budha yang berjumlah 89 %. Secara historik, muslim Burma—yang hadir

---

[1] Istilah Moro berasal dari bahasa Spanyol (*moor*), yang dipergunakan secara derogatorik dan pejoratrif untuk menjelekkan status orang muslim sebagai orang bodoh (*non-intelligent, stupid person*) dan orang yang gemar berperang (muslim fighter). Oleh kolonial Spanyol, penyebutan moro bagi orang Islam memang disengaja sebagai upaya stigmatisasi dan diskriminasi atau muslim—sebagai bangsa yang pernah menaklukkan Spanyol pada abad

ke negeri Arakan (salah satu negara bagian Burma) pada sekitar abad 7 Masehi—pernah mengalami kehidupan yang harmonis dan sejahtera, terutama sejak berdiri Negara Islam Arakan pada abad 14 dan mengalami kejayaan pada pemerintahan Raja Zabuk Shah (Min Bin, 1531-1553). Pada era prakolonial ini, muslim Arakan mampu mengakarkan peradaban Islam di Burma dan masyarakat sekitarnya, seperti di Thailand, Vietnam, dan Kamboja, serta menjalin hubungan politik, ekonomi, dan budaya dengan sejumlah negara muslim. Namun, sejak kehadiran Portugis pada tahun 1517, di kerajaan Arakan mulai terjadi konflik—baik antar Kerajaan Arakan dengan Portugis, maupun Arakan dengan Kerajaan Budhis, seperti Mrauk-U dan Syriam hingga Burma peroleh kemerdekaannya dari Inggeris pada tahun 1948.

Delapan bulan paska-kemerdekaan (1948), masyarakat muslim Burma, khususnya etnik Rohingya mulai terusik oleh Pemerintahan U Nu. Pengusiran dan penguasaan tanah oleh Pemerintah yang non-muslim terjadi atas masyarakat muslim Rohingya. Klimaksnya, terlihat saat Jenderal Ne Win (1962) melancarkan strategi pengusiran penduduk muslim keluar Burma karena dianggap sebagai kelompok anti-Pemerintah. Dan peristiwa pengusiran paksa, pembunuhan, pemerkosaan, dan penggusuran mesjid terjadi lagi lebih dahsyat pada tahun 1978 terhadap komunitas Rohingya melalui Operasi Naga Min, yang berlanjut dengan keluarnya dekrit *Burma Citizenship Law* (1982), yang berisikan pencoretan muslim Rohingya sebagai warga negara Burma. Implikasi kebijakan ini, maka bukan hanya "mematikan" hak-hak kewarganegaraan untuk

peroleh kemudahan, namun lebih jauh mengakibatkan muslim Rohingya mengalami tekanan, penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan semena-mena oleh penguasa tiran militer Burma.[2]

Tidak jauh berbeda dengan nasib "seikhwan" muslim Filipina dan Burma, muslim Thailand-pun demikian pula. Pada awalnya, khususnya Pattani adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang berada di Thailand Selatan. Dikarenakan, berbagai faktor penyebab, seperti : diskriminasi, kedendaman sejarah yang dilakukan oleh warga Budhis terhadap muslim Pattani yang berpenduduk mayoritas muslim (88%), dan muslim Thailand Selatan umumnya, maka muncullah berbagai gerakan protes (yang disebut Pemerintah sebagai gerakan pemberontakan). Kelahiran gerakan-gerakan protes ini, sesungguhnya, cenderung disebabkan oleh sejumlah faktor berkelindan menyangkut agama, politik, ekonomi, dan budaya. Diskriminasi dan marginalisasi politik, ketidak-adilan dan ketidak-merataan ekonomi, intoleransi agama, dan peminggiran budaya Melayu yang dilakukan Pemerintah Budhis dan Sino-Thai merupakan setumpuk faktor ketidak-puasan komunitas muslim Thailand Selatan.

Pada awal kemunculan gerakan-gerakan pemberontakan sipil ("*insurgent movements*") yang dilancarkan dalam berbagai *modus operandi*-nya, oleh Pemerintah Thaksin

---

[2] Tercatat lebih dari 200.000 pada tahun 1978 diusir dari negerinya, dan dari tahun 1962-1984 sekitar 20.000 muslim Rohingya dibunuh rezim militer Burma. Hingga saat ini, sekitar 1,5 juta muslim Rohingya terusir dari Burma.

hanya dipandang sebagai "bandit biasa".[3] Namun, akhirnya, pada 2004, Thaksin Shinawatra menyadari bahwa gerakan-gerakan protes yang berkembang ternyata adalah "pemberontak lokal" yang berhubungan dengan organisasi global--seperti Al Qaida dan Jamaah Islamiyah. Thailand Selatan, kemudian dikategorikan sebagai "*Unrest in Southern Thailand*". Pada tahun ini, Thaksin menyatakan "Perang terhadap Terorisme", dan memberlakukan hukum darurat militer (*Martial Law*) di wilayah basis muslim Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Dampaknya, Thailand Selatan menjadi kancah konflik dan peperangan antara muslim Patani dengan Pemerintah, dan dengan komunitas Budhis-Sino Thai. Tak kurang dari 5.473 korban tewas dan 9.693 orang terluka korban dari sekitar 843 peristiwa yang terjadi selama kurun waktu sejak 4 Januari 2004 hingga 30 November 2012 di wilayah provinsi Thailand Selatan.[4]

Dinamika Islam di ketiga negara minoritas muslim di Filipina, Burma dan Thailand, secara substantif, merupakan kajian berdaya tarik luar biasa yang nyaris menjadi "*the endless issue of history*". Ketiga wilayah ASEAN tersebut terpendam mendalam sejarah konflik berkepanjangan yang seharusnya menjadi agenda penting internasional untuk dicarikan alternatif penyelesaiannya. Kadir Che Man dalam tulisannya

---

[3] Seperti PULO (Patani United Liberation Organisation), BRN (Barisan Revolusi Nasional) Melayu Pattani, dan GMIP (Group Mujahidin Islam Patani), PLA (Patni Liberation Army).

[4] Statistik yang dikompilasi oleh Deep South Watch.

Muslim Separatism : The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, menyimpulkan bahwa studi-studi komparatif ikhwal fenomena politik minoritas dan implikasi tumbuhnya gerakan separatis sebagai protes atas perlakukan diskriminasi Pemerintah di Filipina, Burma, dan Thailand menjadi issu paling menarik dan penting untuk dicarikan solusinya segera. Untuk itulah, penelusuran kembali bukti-bukti dan jejak-jejak Islam masa lalu dengan segenap dinamika historiknya di kawasan ini menjadi bemakna dan fungsional bagi pengayaan sejarah peradaban manusia.

Fungsional, karena paling tidak, secara keilmuan, diharapkan bermanfaat bagi pengayaan dan penguatan argumentasi ilmiah, akademis, dan historis atas kajian-kajian sebelumnya. Melalui penelusuran ini, diharapkan berkontribusi memperkaya, melengkapi data, atau menambah dan memperjelas informasi baru tentang fakta sejarah, yang pada gilirananya mampu mengubah pandangan dunia, bahwa Islam di Asia Tenggara ternyata bukanlah fakta feriferi atau pinggiran, tetapi merupakan sentra dan bagian dari arus utama perkembangan Islam. Fakta menunjukkan bahwa Islam--yang terhubung dari Andalusia (Spanyol) di Barat sampai *ma wara' al-hind* atau *Jawah* (*al-Jawi*) atau Asia Tenggara sekarang, atau dari kawasan Timur Tengah--pernah menjadi pusat peradaban dunia pra-Islam yang menyebar hampir ke seluruh pelosok bumi ini. Bahkan, andaikata pasukan Perancis terlambat menghadapi pasukan Islam sehari atau dua hari saja saat tentara Thariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol pada

abad ke-7 M, maka bukan mustahil seluruh Eropa telah masuk Islam.

Dan, tak kalah pentingnya, secara politik, dalam konteks pengembangan peradaban global universal berbasis humanitas, maka kajian Islam Asia Tenggara menjadi strategis pula. Melalui kajian ini, diharapkan kontribusi konstruktif bagi penyelesaian masalah "*the endless conflicts*" yang terjadi di kawasan ini dapat tersolusikan, sehingga cita-cita kosmopolit untuk membangun kawasan ASEAN sebagai zona damai dan harmonis dapat terwujudkan dalam realitas sesungguhnya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Penulisan sejarah Islam di Nusantara memiliki kecenderungan Eropa centris di satu sisi, dan di sisi lain sangat nasionalis. Persepektif pertama belum dapat memosisikan Islam sebagai bagian penting dari sejarah kawasan ini. Peran Islam cenderung dipinggirkan dan sumber lokal yang berupa historiografi tradisonal seperti babad, hikayat, tambo, sajarah, dan kaba kurang dipercaya sebagai sumber dalam penulisan sejarah Islam. Sementara perspektif nasionalis—meskipun sampai batas tententu menguntungkan bagi kepentingan dalam negeri untuk melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme—belum sepenuhnya menggunakan sumber lokal sebagai acuan dalam penulisan sejarah Islam dalam konteks sejarah perkembangan negara bersangkutan. Dua kecenderungan ini sama-sama belum memaksimalkan sumber lokal tersebut, yang dikenal sebagai historiografi tradisional, dalam meng- gambarkan sejarah awal dan perkembangan Islam kawasan ini.

Selain historiografi tradisional, sumber lainnya yang berupa peninggalan arkeologis juga masih dilihat secara terpisah-pisah mengikuti batas-batas geografi negara-negara yang sekarang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara. Sesungguhnya negara-negara tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain di masa lalu, apalagi jika dilihat dari bahasa yang digunakannya, yaitu bahasa Melayu. Maka sebagian wilayah Thailand dan Filipina serta seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam disebut sebagai Jawah atau al-Jawi, yakni sebuah kawasan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pergaulan.

ISBN 978-602-8766-73-9